

**MENDIDIK MANUSIA INDONESIA
DAN
MEMPERSIAPKAN GENERASI PEMIMPIN
NASIONAL**

**Editor:
Emanuel Prasetyono
dan
Aloysius Widyawan**

**FAKULTAS FILSAFAT
Unika Widya Mandala
Surabaya
2014**

Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional

Editor: Emanuel Prasetyono dan Aloysius Widyawan

Penulis Artikel:

Agustinus Pratisto Trinarso
Agustinus Ryadi
Aloysius Widyawan
Anita Lie
Emanuel Prasetyono
Ramon Nadres
Toetik Koesbardiaty
Xaverius Chandra H. Marbun

@ 2014



Diterbitkan oleh:
FAKULTAS FILSAFAT
Unika Widya Mandala Surabaya

Cetakan Pertama, Maret 2014
Ukuran Buku: 360 hal
Desain Cover: Ferdinandus Eltyson Prayudi

ISBN: 978-602-17055-1-3

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta:

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 27, AYAT (1), (2), DAN (6).

KATA PENGANTAR

Judul buku ini adalah “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional”. Tema ini pertama-tama berbicara tentang pendidikan. Ini adalah tema besar. Tema besar ini digarap dalam kaitan dengan urgensi untuk mengembalikan perhatian dan fokus pandangan hidup berkebangsaan di Indonesia kepada pendidikan bagi anak-anak bangsa ini. Sudah sejak awal diamati bahwa carut-marut kehidupan berbangsa di negeri ini berakar dari ditelantarkannya visi pendidikan yang seharusnya memanusiasikan manusia (pendidikan sebagai proses humanisasi, sebagai lawan dari dehumanisasi) dengan penekanan istimewa pada sistem pendidikan nasional yang seharusnya semakin menjadikan setiap warga negara Indonesia sebagai “manusia Indonesia”, terutama setiap orang yang terlibat di dalam proses pendidikan nasional (baik itu peserta didik/murid, para pengajar/pendidik, maupun para pejabat penyelenggara pendidikan nasional).

Cita-cita menjadikan seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional untuk menjadi “manusia Indonesia” sudah sangat sejalan dengan visi bapak pendidikan dalam sejarah bangsa Indonesia, Ki Hajar Dewantara (1889-1959). Sejak awal sejarah perjuangan

bangsa ini, beliau sudah melihat pentingnya pendidikan sebagai jalan yang harus ditempuh untuk menanamkan dan mengembangkan rasa kebangsaan bagi anak-anak bangsa Indonesia. “Mendidik Manusia Indonesia” menyiratkan suatu permenungan tentang hakekat pendidikan, kemanusiaan, dan keindonesiaan. Pada hakekatnya, pendidikan pertama-tama adalah untuk memuliakan hidup manusia agar semakin bermartabat sebagai manusia. Maka, dasar pemahaman antropologis merupakan keniscayaan yang seharusnya menjadi asumsi dasar bagi setiap praksis pendidikan. Pada prinsipnya, kemanusiaan itu memiliki nilai universal (satu dan sama di mana-mana). Tetapi pada praksisnya, pendidikan berkaitan langsung dengan manusia konkrit di dalam diri individu-individu. Pada gilirannya, sistem pendidikan nasional mesti berpijak pada kepentingan manusia konkrit itu yang ditemukan di dalam diri manusia Indonesia. Maka pendidikan nasional mesti berorientasikan kepada pendidikan yang menjadikan manusia Indonesia semakin menjadi “manusia Indonesia”.

Tema-tema tentang “Mendidik Manusia” tersebut secara sistematis digarap dan dijabarkan dalam sub tema tentang hakekat pendidikan dan hakekat kemanusiaan, terutama dalam bagian pertama buku ini. Tema-tema di bagian ini terasa sangat kental dimensi teoretis, konseptual,

dan reflektif. Pemahaman teoretis, konseptual, dan reflektif dalam kajian tentang pendidikan tidak terelakkan lagi apabila kita menginginkan praksis pendidikan yang holistik dan integral. Yang teoretis, konseptual, dan reflektif selalu menjadi dasar orientasi dan visi bagi praksis. Tanpa pemahaman dan pendasaran teoretis, konseptual, dan reflektif, praksis pendidikan akan kehilangan orientasi kemanusiaannya. Alih-alih pendidikan yang memuliakan martabat manusia, pendidikan yang minus orientasi dan visi kemanusiaan justru akan menjadi sarana untuk melanggengkan *status quo* dari penguasa dan kaum kapitalis dan secara ironis justru melakukan praktek dehumanisasi dalam pendidikan.

Selanjutnya, tema-tema dalam bagian ke-2 dari buku ini menggagas tantangan-tantangan praktis dunia pendidikan dalam konteks persoalan-persoalan yang tengah terjadi di Indonesia. Tantangan itu mulai dari sistem pendidikan nasional. “Bongkar pasang” kurikulum yang tidak melibatkan seluruh elemen pendidikan menjadikan sistem pendidikan nasional tidak mengakomodir persoalan-persoalan dasar pendidikan itu sendiri dalam relevansi dengan kebhinekaan dan keanekaragaman latar belakang situasi-situasi pendidikan nasional dari Sabang sampai Merauke. Keanekaragaman alam budaya Indonesia

semestinya menjadi titik tolak orientasi pendidikan nasional demi kepentingan kemajuan bangsa. Mana saja persoalan-persoalan mendasar dalam dunia pendidikan Indonesia yang seharusnya juga diakomodir oleh sistem pendidikan nasional? Beberapa tema berikutnya menggagas beberapa persoalan yang sekiranya relevan dan aktual bagi situasi perkembangan pendidikan di tanah air yang berkaitan langsung dengan persoalan pendidikan nasional.

Bagian terakhir dalam buku ini menjadi semacam titik klimaks dari serangkaian pembahasan tema-tema sebelumnya. Seluruh refleksi dan permenungan kita tentang pendidikan, kemanusiaan, dan keindonesiaan, terarah kepada kepentingan yang sangat mendesak yang dibutuhkan oleh negeri ini, yaitu pendidikan bagi generasi pemimpin. Mendidik manusia bukan lagi sekedar untuk menghasilkan generasi intelektual yang mampu membangun konsep-konsep brilian, tetapi sekaligus juga generasi yang mampu mengambil keputusan-keputusan dalam ranah praktis untuk membuat perubahan nyata yang lebih baik lewat jiwa kepemimpinan. Oleh karena itu, menggagas persoalan tentang “Mendidik Manusia Indonesia” mesti terarah kepada orientasi “Mendidik Generasi Pemimpin”. “Mendidik Manusia Indonesia” mesti sekaligus mengakomodir di dalamnya bentuk-bentuk pendidikan yang

“merawat” jiwa kepemimpinan di dalam diri para subjek-didik.

Buku ini lahir dari materi-materi yang disampaikan dalam Program *Extension Course* yang diadakan oleh Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya, tanggal 28 Agustus – 27 November 2013. Beberapa materi sudah mengalami proses *editing* dan bahkan pernah dimuat dalam beberapa jurnal ilmiah (info tentang artikel yang pernah dimuat dalam jurnal ilmiah kami sampaikan dalam catatan kaki pada bagian judul artikel yang bersangkutan). Sejatinya, artikel-artikel dalam buku ini adalah bagian dari cara kami untuk terlibat dalam berkontribusi untuk turut mengembangkan kualitas pendidikan nasional.

Terima kasih kami ucapkan kepada para penulis dan pemateri. Semoga kontribusi kecil ini menjadi indikasi semangat dan komitmen tak kunjung putus dalam membangun dan mendidik manusia Indonesia sebagai bagian dari proses mempersiapkan generasi pemimpin nasional.

Emanuel Prasetyono

Penulis dan Editor

(Gambar negara kepulauan Indonesia dalam warna abu-abu, tidak terlalu terang)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

PROLOG

**MENDIDIK MANUSIA INDONESIA DAN
MEMPERSIAPKAN GENERASI PEMIMPIN
NASIONAL**

Oleh: Emanuel Prasetyono

BAGIAN 1

**ANEKA KEGELISAHAN EKSISTENSIAL
TENTANG “MENDIDIK MANUSIA
INDONESIA”**

BAB 1

**MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN, DAN
KESADARAN DIRI**

Oleh: Emanuel Prasetyono

BAB 2

**EDUCATING HUMAN BEINGS:
AN OVERVIEW OF PHILOSOPHY OF
EDUCATION**

Oleh: Ramon Nadres

BAB 3

**KARAKTERISTIK MANUSIA INDONESIA
ANTARA HARAPAN DAN REALITAS**

Oleh: Aloysius Widyawan

BAB 4

**MENCARI MAKNA KEINDONESIAAN
DALAM PENDIDIKAN**

Oleh: Aloysius Widyawan

BAB 5

**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM
TANTANGAN**

Oleh: Anita Lie

BAGIAN 2

**MENEROPONG PRAKSIS PENDIDIKAN
DI TANAH AIR**

BAB 1

**MEMAKNAI HAKIKAT PENDIDIKAN DALAM
ALAM BUDAYA INDONESIA: PENDEKATAN
ANTROPOLOGIS ATAS PENDIDIKAN DI
INDONESIA**

Oleh: Toetik Koesbardiati

BAB 2

**MENGGAGAS PENDIDIKAN BERBASIS
PLURALISME**

Oleh: Agustinus Pratisto Trinarso

BAB 3

PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI SIBER

Oleh: Agustinus Ryadi

BAB 4

**MENGGAGAS PENDIDIKAN ANTIKORUPSI
DENGAN ETIKA ARISTOTELES**

Oleh: Xaverius Chandra H. Marbun

BAB 5

PENDIDIKAN DAN ETIKA BERPOLITIK

Oleh: Agustinus Pratisto Trinarso

BAGIAN 3

MENGGAGAS PENDIDIKAN BAGI CALON PEMIMPIN NASIONAL

BAB 1

MENGGAGAS PENDIDIKAN CALON PEMIMPIN INDONESIA

Oleh: Agustinus Pratisto Trinarso

EPILOG

MENCARI *COMMON CORE VALUES* BAGI PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Emanuel Prasetyono

PARA PENULIS

PROLOG

MENDIDIK MANUSIA INDONESIA DAN MEMPERSIAPKAN GENERASI PEMIMPIN NASIONAL

Oleh: Emanuel Prasetyono

LATAR BELAKANG MASALAH

Arus Balik Reformasi

Bagi generasi penulis, masa reformasi tahun 1998 menyusul krisis ekonomi dan jatuhnya Presiden Soeharto dari kekuasaannya seakan masih hari kemarin. Padahal peristiwa hiruk-pikuk dan euforia masa itu telah lewat 15 tahun. Banyak pihak yang mempertanyakan arah gerakan reformasi yang tidak mampu mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dan kegaduhan politik.¹ Jurang kemiskinan semakin dalam. Segelintir orang saja yang terlihat memiliki harta kekayaan yang menumpuk. Sementara itu jutaan orang hidup di bawah garis kemiskinan dan bergulat setiap hari dalam keterbatasan hidup untuk mencukupi kebutuhan dasarnya. Kegaduhan politik nampak dalam sikap arogan dan saling melempar *statement* menyerang di antara para

¹ Bdk. *Tajuk Rencana, KOMPAS*, Rabu, 22 Mei 2013.

praktisi politik dan tokoh masyarakat. Terkesan ada sikap saling melempar kesalahan dan tanggung jawab, atau retorika-retorika kosong yang mengkamufase realitas ketidakadilan dan kebobrokan.

Dalam rangka mengenang gerakan reformasi Indonesia tahun 1998, Tajuk Rencana harian KOMPAS menulis: “Kehancuran ekologi, yang berlangsung paralel dengan ketimpangan ekonomi, merupakan tantangan pelik yang dihadapi bangsa Indonesia.”² Dalam rangka menyambut hari kemerdekaan R.I. yang ke-68, Tajuk Rencana harian KOMPAS juga mensinyalir bahwa ada kemerosotan semangat berkorban dan kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ “Prinsip seperjuangan dan sependeritaan sebagai kebajikan dalam hidup bernegara dan berbangsa, sebagaimana sering ditekankan Bung Karno, melemah”, demikian tulis Tajuk Rencana tersebut.

Negara Kaya Penuh Dilema

Kita memang memiliki banyak pekerjaan rumah berkaitan dengan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara di negeri kita. Negeri yang luas dan kaya raya akan hasil

² *Idem.*

³ *Tajuk Rencana, KOMPAS, Jumat, 16 Agustus 2013.*

bumi dan alam ini masih menyimpan beribu masalah sosial. Puluhan juta orang hidup dalam kemiskinan. Tindakan kekerasan makin masif dalam ekspresi sikap main hakim sendiri. Sementara itu di kalangan elite muncul mafia, antara lain mafia dalam bidang hukum, pengadilan, hutan, tambang, dan narkoba. Generasi masa depan negeri ini akan menghadapi masalah pelik berkaitan dengan keterbatasan sumber daya alam seiring dengan kecenderungan ribuan tambang liar yang menghancurkan lingkungan, yang pelan namun pasti membawa dampak mengerikan bagi ekologi.⁴ Air bersih semakin sulit didapat. Udara sudah terpolusi dan terkontaminasi dengan gas beracun. Hutan dan tanaman digunduli sehingga tanah longsor, kegersangan, dan banjir melanda setiap tahun.

Yang seringkali menjadi korban dari *kekisruhan* kehidupan dan penyelenggaraan berbangsa dan bernegara adalah para pelajar dan kaum muda. Anak-anak muda ini seringkali kehilangan teladan dan sosok yang bisa diacu sebagai teladan moral. Idealisme dan energi mereka tidak terakomodir dalam kehidupan bermasyarakat secara sehat. Saban hari mereka *disugubi* berita dan topik tentang kekerasan, korupsi, dan pelbagai perilaku tak bertanggung jawab yang dilakukan oleh para tokoh publik. Kaum muda

⁴ *Ibid.*

kita setiap hari juga *digempur* oleh tuntutan hidup yang keras. Akibatnya mereka menjadi sangat sensitif, mudah terpicu oleh arus massa, semakin gampang menempuh solusi kekerasan, *cuek* dan apatis. Tawuran pelajar masih seringkali menjadi momok yang menghantui para orang tua setiap kali melihat anaknya berangkat ke sekolah. Godaan penggunaan dan kecanduan narkoba menjadi ancaman setiap saat. Berita tentang mafia obat terlarang (bahkan dikendalikan dari balik penjara) membuat miris setiap orang tua yang memiliki anak-anak muda.

Kasus-kasus korupsi juga dalam level sangat memprihatinkan dan bersifat sistematis. Bahkan, beberapa orang yang tersangkut kasus korupsi berlatar belakang akademis cukup tinggi. Sebagai contoh, pada tahun 2013 telah terungkap tindak korupsi yang dilakukan oleh seorang yang berlatar belakang guru besar dari sebuah sekolah tinggi ternama di tanah air, lulusan luar negeri dengan karier akademis yang cukup cemerlang. Peristiwa ini tentu sangat menyentak dunia pendidikan. Peristiwa ini sendiri mengafirmasi bahwa gelar akademik dan kesalehan yang nampak formal itu tidak menjadi faktor mutlak yang menentukan kualitas moral dan integritas seseorang.⁵ Entah kebetulan atau tidak kasus suap yang dibongkar oleh KPK

⁵ Bdk. *KOMPAS*, Jumat, 16 Agustus 2013, Kolom Politik dan Hukum.

ini terjadi selang 2 hari sebelum perayaan hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2013.

Kasus para pejabat negara yang berlatar belakang akademisi, yang dalam perjalanan kariernya menjadi tersangka kasus suap dan korupsi, membuat kita mengernyitkan kening dan berpikir ulang terhadap asumsi yang mengandaikan bahwa seseorang yang berlatar belakang pendidikan tinggi otomatis memiliki kualitas moral dan integritas tinggi pula. Kita boleh bertanya, tidakkah latar belakang pendidikan seseorang berpengaruh terhadap karakternya? Integritasnya? Tanggung jawab dan komitmennya? Kita lantas bertanya, apakah memang sistem pendidikan tidak membuat seseorang belajar arti integritas, komitmen, dan tanggung jawab? Apa hakekat sebuah pendidikan? Kasus tertangkapnya para koruptor berlatar pendidikan tinggi sekaligus akademisi bisa menjadi pembelajaran dan permenungan bagi perkembangan dunia pendidikan Indonesia. Bahwa seseorang sekaliber guru besar dan doktor lulusan luar negeri sekali pun bisa dihadapkan pada kasus korupsi dan gratifikasi bila kualitas moral dan integritasnya rendah.

APATISME RAKYAT DAN KRISIS KEPEMIMPINAN NASIONAL

Krisis kehidupan berbangsa dan bernegara cepat atau lambat akan membawa masyarakat bangsa ini pada persoalan krisis kepemimpinan nasional. Tidak jarang terjadi, dalam pelbagai kesempatan pemilihan kepala daerah atau anggota-anggota legislatif, masyarakat merasakan kesulitan dalam memilih para calon pemimpinnya yang sungguh-sungguh berkomitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Masyarakat kebingungan ketika mereka harus memilih pemimpinnya. Krisis kepemimpinan ini semakin diperparah oleh tertangkapnya para pejabat penyelenggara negara dan anggota wakil rakyat yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sesungguhnya, krisis kepemimpinan nasional sudah seharusnya dirasakan ketika perilaku koruptif sudah menjadi bagian keseharian dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, mulai dari level birokrasi tingkat atas sampai bawah, dari pusat kekuasaan di Jakarta sampai ke tingkat kelurahan dan RT-RW. Secara langsung maupun tidak, perilaku korupsi dan suap-menyuap bagaikan “membeli” hajat hidup publik. Kepentingan-kepentingan publik menjadi “barang dagangan” yang bisa ditawarkan dan dinegosiasi. Berhadapan dengan praktik korupsi yang

menggurita dalam birokrasi dan penyelenggaraan negara, pelan tapi pasti, masyarakat akan kehilangan kepercayaan dan keyakinan terhadap martabat hidup publik.

Logikanya, negeri ini mempercayakan amanat penyelenggaraan negara dan pemerintahan di tangan mereka yang dipilih oleh partai-partai pemenang pemilu. Karena amanat itu datang dari rakyat, semestinya amanat itu dijalankan demi kepentingan rakyat, demi hajat hidup publik agar tercapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil dan makmur. Tetapi ketika para terpilih itu menyalahgunakan amanat rakyat itu lewat perilaku koruptif demi kepentingan segelintir orang atau kepentingannya sendiri, di situlah tepatnya hubungan sebab-akibat antara perilaku koruptif dan “jual-beli” hajat hidup publik. Di situlah terjadi pengkhianatan terhadap rakyat (kepentingan dan amanat rakyat). Rakyat lelah dengan suguhan kasus-kasus korupsi dengan bilangan angka jutaan, milyaran, dan triliunan hasil korupsi yang mereka dengar dan lihat di media-media massa, sementara sebagian besar rakyat hidup dalam keterbatasan dan kesulitan ekonomi. Rakyat merasa dibohongi oleh janji-janji selama masa kampanye. Sikap rakyat lantas menjadi apatis terhadap kepentingan dan hajat hidup publik. Rakyat juga menjadi apatis terhadap dunia politik. Dan di situlah akar dari krisis kepemimpinan

nasional. Masyarakat menjadi apatis dan *cuek*, tidak peduli dengan tujuan dan kepentingan hidup bersama.

Apatisme rakyat sesungguhnya merupakan fenomena sosial yang cukup memprihatinkan dalam proses penyelenggaraan negara. Bagaimana sebuah kehidupan bersama dalam masyarakat bisa berlangsung dengan baik, sejahtera, dan adil bila warga masyarakat pasif dan apatis? Para pemegang kekuasaan penyelenggaraan negara pun menjadi tidak *legitimate* ketika dilanda oleh apatisme rakyat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. De facto, apatisme menjadi bukti dari sebuah kekuasaan yang sudah kehilangan legitimasi dari rakyat.

MENDIDIK MANUSIA INDONESIA

Kami memulai perbincangan tentang situasi kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan tesis awal, yaitu bahwa serangkaian masalah sosial-politik dan carut-marut penyelenggaraan negeri ini pertama-tama disebabkan oleh gagalnya pemahaman diri dan identifikasi diri sebagai **manusia Indonesia**. Kegagalan memahami dan mengidentifikasi diri sebagai manusia Indonesia bisa dilihat dari hal-hal berikut ini.

Kasus-kasus sosial-politik dan (terutama) korupsi yang merajalela di pelbagai tingkat kehidupan berbangsa membuat penulis berpikir bahwa rasa kesatuan sebagai satu bangsa yang memiliki keterikatan budaya, moral, dan sosial demi mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai amanat Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, telah melemah. Sendi-sendi kehidupan bersama menjadi keropos dan gampang sekali digoncang oleh konflik sosial maupun sektarianisme-primordialisme. Kebanyakan orang saat ini cenderung lebih mementingkan dirinya sendiri. Di level atas, para politisi dan penyelenggara negara yang *ketabuan* menggunakan uang negara untuk *bancakan* cenderung tidak menunjukkan rasa sesal, bahkan “beramai-ramai” saling menutupi dan melindungi (atau malah sebaliknya, saling membuka aib masing-masing dan menjatuhkan). Hal ini jelas-jelas menunjukkan lemahnya kesadaran diri dan tanggung jawab sebagai bangsa Indonesia. Di atas sudah disinggung, latar belakang pendidikan tinggi seseorang ternyata tidak otomatis sejalan dengan integritas, komitmen, dan tanggung jawabnya untuk mengemban amanat rakyat untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera. Dalam situasi kekacauan seperti ini, berbicara tentang keberpihakan terhadap rakyat kecil dan terpinggirkan menjadi bagaikan seorang nabi yang berteriak-teriak di

padang gurun, tidak ada yang mendengarkan selain hampanan pasir, angin gurun yang panas, dan terik matahari.

Pelbagai krisis politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan yang kami paparkan dalam aneka contoh di atas membuktikan bahwa kehidupan kita bersama sebagai bangsa dan negara Indonesia belum sungguh-sungguh menghantar kita pada suatu kehidupan yang bermartabat dan manusiawi. Maka, kita lantas bertanya pada diri kita sendiri: apa yang bisa kita perbuat untuk membuat kehidupan di tanah air Indonesia ini masih dimungkinkan sebagai kehidupan yang manusiawi dan bermartabat? Pertanyaan ini berakar dari kehendak baik karena memang sama sekali tidak dimaksudkan untuk memancing sikap pesimistik berhadapan dengan carut-marut penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Penulis sadar, tidak ada jawaban yang sungguh-sungguh memberikan jaminan perubahan dalam waktu singkat. Tetapi tanggapan yang kurang lebih representatif bagi pembahasan kita saat ini adalah bahwa untuk bisa keluar dari krisis di pelbagai bidang kehidupan, **pendidikan untuk menjadi manusia Indonesia** adalah fokus yang harus menjadi perhatian berkelanjutan dalam proses pembangunan bangsa. Dengan kata lain, mendidik “manusia Indonesia” adalah jawaban yang kurang lebih representatif untuk menanggapi pelbagai krisis kehidupan

berbangsa dan bernegara. Mengapa? Sebab, mendidik “manusia Indonesia” adalah soal proses identifikasi diri sebagai manusia yang berbangsa dan bernegara Indonesia. Ketika pelbagai carut-marut penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia berakar dari ketidakmampuan untuk memahami dan mengidentifikasi diri sebagai bangsa, maka mendidik “manusia Indonesia” menjadi jawaban yang representatif. Kita perlu menggali lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan mendidik “manusia Indonesia”.

Mendidik “manusia Indonesia” pertama-tama berkaitan dengan pendidikan, lalu kemanusiaan, dan selanjutnya keindonesiaan. Krisis kebangsaan dan kerentanan hidup sosial bangsa Indonesia berakar dari ditinggalkannya hakekat pendidikan sebagai pendidikan yang memanusiakan manusia (pendidikan sebagai proses *humanisasi*, melawan *dehumanisasi*). Hakekat pendidikan di dalam dirinya terkandung kemanusiaan. Praksis pendidikan yang meninggalkan kemanusiaan sering terindikasi dalam aneka kebijakan pendidikan nasional yang pragmatis dan berjangka pendek, kurang bervisi kemanusiaan universal, dan cenderung mengambil jalan pintas ketika berhadapan dengan kemajemukan dan kompleksitas situasi anak didik. Dalam konteks berbangsa dan bernegara Indonesia, manusia

yang dimanusiakan oleh tujuan pendidikan nasional adalah manusia Indonesia. Maka kita juga perlu mengkaji lebih jauh tentang hakekat pendidikan bagi manusia Indonesia sebagai jalan untuk memanusiakan manusia Indonesia.

Berbicara tentang hakekat pendidikan bagi bangsa Indonesia, kita ingat akan bapak pendidikan dalam sejarah Indonesia, Ki Hadjar Dewantara (1889 – 1959). Ki Hadjar Dewantara meyakini pendidikan sebagai jalan yang bisa ditempuh oleh bangsa Indonesia untuk menanamkan dan mengembangkan rasa kebangsaan bagi anak-anak muda.

“Ki Hadjar Dewantara begitu yakin bahwa ranah pendidikan adalah medan perjuangan yang mendasar dan mampu mengakomodasi perwujudan cita-cita ke arah kemerdekaan demi pembangunan kesadaran bangsa Indonesia akan identitas kemanusiaannya yang bemartabat luhur”.⁶

Maka, berangkat dari tesis awal yang kami angkat sebagai titik tolak perbincangan ini, yang akan menjadi sasaran perbincangan dan refleksi kita adalah persoalan yang berkisar pada **pendidikan, kemanusiaan, dan keindonesiaan.**

⁶ Lih. Bartolomeus Samho, *Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Tantangan dan Relevansi*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, hal. 22

MENGGALI MAKNA “MENDIDIK MANUSIA INDONESIA DAN MEMPERSIAPKAN GENERASI PEMIMPIN NASIONAL”

Tema “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional” sejatinya mengasumsikan adanya keterkaitan hakiki antara pentingnya “Pendidikan Manusia Indonesia” dan tugas mulia “Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional”. Di balik tema ini, terkandung keterkaitan esensial-substansial antara **kemanusiaan, pendidikan, keindonesiaan, dan kepemimpinan**. Ke empat unsur ini akan menjiwai seluruh artikel di dalam buku ini. Untuk itu, kami akan memaparkan kerangka penjabaran tema ini satu per satu. Kami akan memulai pembahasannya dengan pertanyaan tentang “Siapakah manusia itu?” Ini adalah pertanyaan yang mau mengkaji hakekat manusia dan kemanusiaannya dalam tinjauan filsafat manusia. Filsafat yang dari sendirinya mau mengupas hal-hal mendasar (fundamental) dari fenomena yang nampak, sekarang menjadi tinjauan manusia untuk memahami dan menyadari dirinya. Pertanyaan tentang “Siapakah manusia itu?” sejatinya berakar dari gugatan terhadap diri sendiri: “Siapakah aku?”

1. Siapakah Manusia itu? – Suatu Tinjauan Filsafat Manusia

Kemanusiaan menduduki tempat pertama bahan kajian kita. Asumsinya adalah bahwa apa pun sistem yang mau dijalankan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, apa pun jalan yang mau ditempuh untuk mencapai program-program pembangunan suatu bangsa, keyakinan akan nilai kemanusiaan yang luhur mesti menjadi titik tolak acuannya. Pertanyaan **“Siapakah Manusia?”** adalah pertanyaan yang menggugat eksistensi manusia. Pemahaman tentang kemanusiaan harus selalu mulai dengan memahami diri sendiri: “Siapakah aku?” Selagi nilai kemanusiaan tidak dihormati, program pembangunan seindah apa pun tidak berarti bagi pemuliaan kehidupan dan kesejahteraan bersama yang adil. Jaman boleh terus bergerak dan berkembang, tetapi nilai kemanusiaan itu tetap di sepanjang jaman. Kenyataan sejarah memang telah menyaksikan perang dan konflik-konflik yang berakibat mengerikan bagi nilai kemanusiaan dan kehidupan. Diskriminasi, rasisme, primordialisme, sektarianisme, pelecehan, problem gender, dan lain sebagainya, menunjukkan bahwa kesadaran manusia akan kemuliaan nilai kemanusiaan universal harus terus dibangun sebagai titik tolak bersama, paradigma bersama.

2. Mendidik Manusia – Kajian Filsafat Pendidikan

Pemahaman tentang kemanusiaan menghantar kita pada persoalan hakiki tentang pendidikan. Pendidikan pertama-tama adalah pendidikan bagi manusia. **Mendidik Manusia** adalah kajian diskusi dan pembahasan kita dalam pembahasan buku ini. Pelbagai sistem dan kebijakan pendidikan mesti mengabdikan kepada kemanusiaan dan nilai-nilainya. Di tengah situasi di mana kebijakan pendidikan nasional yang berubah-ubah, kita sesungguhnya dihadapkan pada situasi di mana pendidikan sudah kehilangan nilai-nilai luhur yang seharusnya dituju oleh setiap kebijakan pendidikan. Pendidikan tanpa nilai luhur itu bagaikan menanamkan ilmu pengetahuan kepada peserta didik tanpa memedulikan penanaman nilai dan karakternya. Akhirnya ilmu pengetahuan dimiliki tanpa karakter dan nilai, bagaikan pisau dan senjata yang dimiliki oleh orang yang tidak stabil kepribadiannya (berpotensi menjadi bumerang). Dan ini tentu berbahaya. Sistem dan kebijakan pendidikan macam apa pun mesti dilandasi oleh nilai dan kepercayaan akan keluhuran kemanusiaan universal. Tanpa landasan nilai dan kepercayaan akan keluhuran kemanusiaan universal, sebuah sistem dan kebijakan pendidikan akan dipraktikkan bagaikan meyakini sebuah dogma yang dipatenkan, tidak bisa dikritisi atau dikaji ulang secara kritis. Oleh karena itu,

pendidikan semestinya memiliki filosofinya. Filsafat pendidikan semestinya mampu mengambil sikap kritis terhadap pelbagai sistem dan kebijakan yang diterapkan pada pendidikan nasional. Mengapa sikap kritis? Sebab sikap kritis sudah merupakan tradisi panjang dalam filsafat itu sendiri. Filsafat pendidikan “tidak akan membiarkan” relasi pendidik dan peserta didik tak ubahnya bagaikan “korban” dari sistem-sistem yang sesungguhnya tidak adil, feodal, dan menindas. Maka, sikap kritis menjadi sebuah pilihan sadar dan bijak untuk mengembalikan dan mempertahankan kemanusiaan universal dalam pelbagai kebijakan dan sistem pendidikan nasional.

3. Karakteristik Manusia Indonesia

Pertanyaan kita sekarang adalah: sejauh mana sebuah sistem dan kebijakan pendidikan nasional benar-benar cocok dan sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia? Karena kita sudah memegang asumsi dasar bahwa setiap pendidikan mesti berlandaskan dan dijiwai oleh nilai luhur kemanusiaan universal, maka persoalan tentang sistem dan kebijakan pendidikan nasional mesti dimulai dari pemahaman tentang **Karakteristik Manusia Indonesia**. Ini memang bukan persoalan yang bisa dijawab dalam satu dua kalimat, atau

pun bisa dibahas dalam jangka waktu pendek. “Jatuh-bangun” sejarah perjuangan bangsa Indonesia sendiri sudah menandakan bahwa pemahaman tentang karakteristik manusia Indonesia berlangsung dalam proses-proses sejarah, sejak jaman perjuangan melawan penjajah, kesadaran dan kebangkitan nasionalisme-kebangsaan sebagai bangsa Indonesia (yang seringkali ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda), Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, hingga mulai disusunnya pondasi kebangsaan baik secara ideologis, konstitusional, maupun sistem-sistem pemerintahan. Semua terjadi dalam proses sejarah yang tidak sederhana. Ada kesepakatan, perjanjian, kesadaran baru, konflik, pertentangan, bahkan juga primordialisme dan sektarianisme. Peristiwa demi peristiwa sejarah menyaksikan proses jatuh-bangunnya bangsa Indonesia dalam membentuk karakter manusia Indonesia. Jadi, karakteristik manusia Indonesia secara filosofis dibentuk oleh refleksi sejarah bangsa ini dalam membangun hidup berbangsa dan bernegara. Refleksi sejarah melampaui peristiwa sejarah. Dalam refleksi sejarah, ada kesadaran historis tentang *spirit* yang menaungi jaman ini yang terhubung dengan *spirit* yang kurang lebih sama yang menaungi jaman-jaman yang telah lewat. Keterhubungan *spirit* dari suatu jaman ke jaman sebelumnya bisa berbentuk kesadaran sejarah. Menemukan *spirit* sebuah jaman adalah pekerjaan seorang sejarawan dan

orang-orang yang bergiat dalam refleksi sejarah. Oleh karena itulah telah disinggung bahwa untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana karakteristik manusia Indonesia dibutuhkan jawaban yang tidak sederhana dalam satu dua kalimat atau hanya dalam ungkapan-ungkapan spontan belaka.

4. Mencari Makna Keindonesiaan dalam Pendidikan

Setelah menemukan karakteristik manusia Indonesia dalam kerangka refleksi historis kebangsaan Indonesia, kesadaran sebagai manusia Indonesia yang berkarakter “Indonesia” menjadi ikatan filosofis-ideologis bagi pembentukan sebuah sistem dan kebijakan pendidikan. Sistem dan kebijakan bagi pendidikan di Indonesia mesti berlandaskan pada pemahaman dasar yang hakiki tentang bagaimana menjadi manusia Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berkarakter “Indonesia”. Ke-indonesia-an mesti ditemukan dan menjiwai pendidikan bagi manusia Indonesia. Ditemukan? Ya, harus ditemukan. Itulah inti dari sesi **Mencari Makna Keindonesiaan dalam Pendidikan**. “Penemuan” ini tidak lepas dari “kerja keras” dalam sesi sebelumnya, yang mau menemukan makna keindonesiaan dan karakteristik manusianya dalam rentang sejarah dan

refleksi atasnya. Tanpa “penemuan” ke-indonesia-an tersebut, sistem dan kebijakan pendidikan nasional macam apa pun bisa sangat riskan “jatuh” ke dalam sistem-sistem yang sempit, yang terkooptasi oleh bahasa dan dominasi kekuasaan, kekuatan modal, primordialisme, rasisme, sektarianisme, fanatisme sempit, dan pelbagai paham sempit lainnya. “Mencari Makna Keindonesiaan dalam Pendidikan” membuat kita tidak mudah terjebak dalam sistem-sistem atau kebijakan pendidikan nasional yang “tidak bersahabat” dengan manusia Indonesia. Kita tidak mudah silau oleh paradigma impor dari luar negeri dalam mengambil kebijakan pendidikan bagi generasi penerus negeri ini.

5. Sistem Pendidikan Nasional dalam Tantangan

Tetapi bagaimana sesungguhnya praktek pengambilan kebijakan bagi pendidikan di negeri ini? Nyatanya dunia pendidikan dan praktek pengambilan kebijakan atasnya masih mengalami sangat banyak tantangan. Kita masih mendapati perbedaan situasi sekolah-sekolah dan praktek pendidikan yang berbeda dari satu pulau ke pulau lainnya, dari satu daerah ke daerah lainnya. Artinya, kesenjangan dalam mendapatkan akses pendidikan merupakan masalah dalam dunia pendidikan di Indonesia.

Termasuk juga akses guru. Banyak sekolah-sekolah di daerah yang mengalami kekurangan jumlah guru. Infrastruktur pendidikan juga masih menjadi masalah di sana-sini. Pada tahun 2013 ini, kita juga masih bisa mendapati praktek sistem Ujian Akhir Nasional (UAN) yang kedodoran. Pencetakan naskah ujian nasional yang bermasalah dan mengakibatkan penundaan pelaksanaan UAN di sejumlah provinsi menjadi preseden yang memalukan dunia pendidikan nasional. Pertanyaan kita adalah: Apa yang salah dengan sistem pendidikan nasional kita? Nampaknya memang diperlukan keberanian untuk berpikir kritis dan bersikap arif dalam menentukan setiap kebijakan sistem pendidikan nasional, justru karena pendidikan nasional adalah hak setiap warga negara Indonesia yang harus dipenuhi oleh negara lewat sistem pendidikan nasional yang baik. Perlu diakui dengan jujur, bahwa **Sistem Pendidikan Nasional dalam Tantangan**. Tantangan itu perlu dilihat, diakui dengan jujur, dikritisi, dan dicoba untuk disikapi lewat kebijakan yang lebih baik.

6. Pendidikan dalam Alam Budaya Indonesia

Beberapa tantangan mau diangkat dalam beberapa sesi pembahasan. Tantangan pertama adalah tantangan

budaya. Kita perlu mengkaji **Pendidikan dalam Alam Budaya Indonesia**. Indonesia memiliki keragaman budaya yang luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke bangsa Indonesia terdiri dari keragaman budaya dari pelbagai daerah dan suku bangsa. Kebudayaan yang berbeda-beda di satu sisi merupakan kekayaan kehidupan berbangsa sebagai satu bangsa Indonesia, tetapi juga merupakan tantangan yang harus dijawab oleh pendidikan bagi bangsa Indonesia. Kesatuan sistem dan kebijakan pendidikan nasional di satu sisi merupakan upaya standardisasi pendidikan dalam satu sistem yang bersifat nasional. Tetapi standardisasi itu juga bisa bertransformasi menjadi hegemoni sistem pendidikan global yang melupakan kekayaan budaya masing-masing. Globalisasi dalam pendidikan di satu sisi mengajak kita untuk menjadi bagian dari “warga masyarakat dunia”, tetapi di sisi lain juga riskan melupakan (bahkan meminggirkan) potensi-potensi budaya yang khas bagi pengembangan kekuatan lokal. Akibatnya ilmu pengetahuan yang diajarkan di sekolah-sekolah seringkali nampak demikian jauh dari nilai-nilai yang dihidupi oleh manusia Indonesia. Ilmu pengetahuan bagaikan hidup di menara gading, bersifat elitis, tidak mendarat dan berakar dalam ranah hidup konkret manusia Indonesia. Kita boleh dengan jujur bertanya: berapa persen dari ilmu-ilmu yang pernah kita pelajari di sekolah dasar dan sekolah menengah dulu yang

sungguh berguna dalam pekerjaan yang sedang kita geluti saat ini? Berapa persen dari usia produktif tenaga kerja yang bekerja sesuai dengan bidang yang digeluti semasa sekolah? Berapa persen dari mata pelajaran yang ada dalam suatu kurikulum yang berlaku yang sungguh-sungguh “akrab” dengan budaya Indonesia?

Dalam kerangka konsekuensi logis, kalau kebudayaan belum sungguh-sungguh digali dan dikaji dengan serius untuk bisa menjwai seluruh sistem dan kebijakan pendidikan nasional, maka sistem dan kebijakan pendidikan nasional belum terarah (berorientasi) kepada hakekat dan tujuan pendidikan nasional, yaitu membangun manusia Indonesia seutuhnya. Padahal kekayaan budaya masing-masing suku di negara Indonesia ini sebetulnya amat potensial sebagai kekayaan budaya bangsa bila dikelola sebagai unsur fundamental yang turut membentuk pendidikan manusia Indonesia. Alam budaya Indonesia seyogyanya menjadi bagian fundamental yang tak boleh dilupakan oleh pemangku kebijakan pendidikan nasional. **Pendidikan dalam Alam Budaya Indonesia** semestinya menjadi bagian yang tak terelakkan dalam setiap pembahasan tentang kebijakan pendidikan nasional. Topik ini menjawab persoalan tentang ke mana arah pendidikan nasional kita.

7. Pendidikan dan Pluralitas Bangsa

Keragaman masyarakat Indonesia bukan hanya dalam soal kebudayaan. Masyarakat kita secara sosiologis-antropologis bisa dibedakan dalam keragaman suku, agama atau keyakinan, *jender*, strata sosial, politik, ideologi, dan ekonomi. Keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam terminologi baku disebut pluralitas bangsa. Oleh karena itu, kita perlu mengkaji **Pendidikan dan Pluralitas Bangsa** secara serius. Kita hidup dalam masyarakat yang plural. Ada kemajemukan yang luar biasa dalam komposisi masyarakat Indonesia. Semestinya, sistem dan kebijakan pendidikan nasional mengandung unsur yang mendidik anak-anak bangsa ini untuk mampu hidup berdamai dengan pluralitas. Toleransi, kesaling-pemahaman, kedewasaan berpikir, keluasan wawasan, perspektif, dan paradigma, seharusnya menjadi atmosfer dan topik pendidikan di sekolah-sekolah. Sekolah seharusnya tidak hanya mampu menghasilkan anak-anak yang pintar tetapi juga cerdas. Misalnya, ketika kita mendapati kenyataan adanya fenomena budaya kekerasan di lingkungan sekolah-sekolah, lantas tawuran antar pelajar menjadi *momok* yang menghantui setiap orang tua (wali murid), pertanyaan kita adalah: Apakah peserta didik kita memang sudah terpolo dalam paradigma perbedaan sebagai pertentangan dan permusuhan sedemikian hingga

memandang perbedaan sebagai yang harus dilawan dan dibasmi? Jika ya, kita bertanya: ini kesalahan siapa? Atau apa yang salah dengan sistem pendidikan kita? Apakah selama ini sistem pendidikan dan sekolah hanya berorientasi pada hasil yang nampak pada kelulusan yang seratus persen setiap tahun? Tanpa mempertimbangkan kualitas kelulusan tersebut? Apakah tersirat sebuah paradigma yang memandang sekolah dan institusi pendidikan bagaikan suatu pabrik yang mencetak orang-orang pintar? Tetapi sesungguhnya tidak mampu hidup berdampingan dengan penuh toleransi dengan orang lain yang berbeda dari dirinya? Beda kulitnya, pemahamannya, sukunya, bahasanya, agamanya, keyakinannya, dan lain sebagainya. Atmosfer kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah seharusnya menjadi keprihatinan besar. Sebab hal itu menandakan sebuah generasi yang tidak sanggup memahami makna pluralitas sebagai realitas kehidupan. Salah satu tanda kecerdasan adalah bahwa orang mampu menerima perbedaan *in se* sebagai sebuah perbedaan tanpa merasa kehilangan apa pun dari dirinya ketika dia mesti hidup dalam pelbagai perbedaan itu. Ketika sesuatu dari adanya memang berbeda tanpa harus dibedakan, kemampuan dan pemahaman dalam menerima perbedaan semacam itu menjadi semacam kebijaksanaan dan kecerdasan. Kita tentu mengharapkan bahwa sistem dan kebijakan pendidikan

nasional mengakomodir pembelajaran bagi para peserta didik untuk memiliki kecerdasan dalam menyikapi perbedaan dan pluralitas.

8. Pendidikan dan Arus Cybernetika

Tantangan yang juga harus dipertimbangkan masak-masak oleh para pengambil kebijakan dan praktisi pendidikan adalah kenyataan bahwa saat ini kita hidup dalam era digital atau yang biasa disebut dengan dunia cyber (cybernetics). Maka kita perlu mendiskusikan lebih jauh keterkaitan antara **Pendidikan dan Arus Cybernetika**.

Era digital sesungguhnya mengasumsikan suatu dunia yang saling terhubung dalam sebuah sistem di mana perangkat-perangkatnya memberi kemungkinan bagi setiap elemen (manusia) di dunia ini untuk membangun jaringan global. Perangkat-perangkat itu bisa berupa perangkat keras yang bersifat fisik maupun perangkat lunak. “Cita-cita” membangun dunia cyber sebetulnya bagus, yaitu mau membangun sebuah masyarakat global yang saling menguntungkan dan pada akhirnya membangun semacam peradaban dunia yang saling terhubung bagaikan sebuah desa kecil. Manusia di muka bumi dicita-citakan bisa saling terhubung lewat jembatan komunikasi yang cepat, murah,

dan efektif. Peradaban dunia mau dibangun dan dikontrol oleh sebuah sistem yang saling terhubung, bagaikan jaring laba-laba yang saling terkoneksi tanpa ada satu pun elemen yang berada di luar jejaring tersebut. Contoh konkret yang paling fenomenal dari dunia cyber ini adalah internet. Jaringan internet menjadikan dunia bagaikan berada dalam satu perangkat computer yang sedang berada di hadapan kita, atau dalam genggamannya *gadget* yang ada di tangan kita.

Dunia *cyber* bagaimana pun telah mengubah masyarakat menjadi lebih *melek* informasi. Terjadi semacam transformasi dari masyarakat industri ke masyarakat informasi. Masyarakat seakan menjadi haus informasi. Dampaknya, nyaris segala lini perikehidupan manusia seakan bisa diatasi oleh teknologi informasi. Akses-akses ke kehidupan yang lebih baik tidak jarang dibantu oleh jejaring informasi yang benar. Informasi yang benar dan tepat bisa membantu mengklarifikasi kesalahpahaman serta membuka peluang memperbaiki nasib atau peruntungan seseorang. Situasi ini tentu menjadi pangsa pasar yang terbuka bagi industri media, informasi, dan komunikasi. Kehausan akan informasi yang berkombinasi dengan mentalitas senang memiliki “barang baru” (alias mentalitas konsumtif) dimanfaatkan oleh pelbagai industri media, informasi, dan

komunikasi untuk berkompetisi menjangkit pangsa pasar dari pelbagai usia dan kategori sosial.

Sejatinya, ketika cita-cita dunia *cybernetics* yang mau membangun peradaban dunia baru dalam sistem-sistem global tidak diimbangi oleh kesiapan mental manusia, jadilah suatu bangsa manusia yang semakin “terpuruk” dalam mentalitas konsumtif, tidak kritis, gampang tersesat dalam rimba belantara informasi, dan lantas menjadi “pemakan lahap” produk-produk baru. Jadilah dunia *cyber* sebagai ajang kompetisi pasar bebas yang terbuka bagi industri media, informasi, dan komunikasi. Kompetisi pasar bebas dan terbuka pun tidak jarang ditunggangi oleh kepentingan politik, ekonomi, dan budaya sehingga informasi-informasi yang beredar di kalangan masyarakat juga bias kepentingan. Masyarakat dijejali oleh informasi dan komunikasi bagaikan berada dalam rimba belantara informasi. Dan ironisnya, masyarakat sudah terlanjur “suka dan jatuh cinta” terhadap situasi ini. Ada semacam kecanduan dan ketergantungan terhadap pelbagai macam informasi, bahkan termasuk informasi sekelas *gossip*. Pendidikan manusia nampaknya memang tidak pernah tergantikan oleh arus dunia *cybernetics* sebagaimana yang diimpikan oleh para pencetusnya. Sebab, pendidikan manusia menggagas kemanusiaan dari hakekatnya, yang bersifat tetap dan prinsipil, yang tidak

lejang oleh perubahan-perubahan jaman. Sebab, kemanusiaan sebagai nilai hakiki mesti berada di atas sistem apa pun.

9. Pendidikan dan Kesenjangan Sosial

Ada satu permasalahan yang tidak boleh luput dari pengamatan kita berkaitan dengan masalah pendidikan di tanah air, yaitu masalah kemiskinan. Banyak persoalan pendidikan yang diperbincangkan di tanah air tidak menyentuh persoalan kemiskinan. Banyak rakyat miskin yang terpinggirkan dari wacana sistem dan kebijakan pendidikan. Bukan hanya kemiskinan di perkotaan yang tidak tersentuh oleh wacana sistem dan kebijakan pendidikan. Daerah terpencil dan tertinggal pun seringkali tidak masuk ke dalam pertimbangan dan perhitungan pengambilan kebijakan sistem pendidikan nasional. Hal ini tentu semakin menguatkan asumsi bahwa kebijakan pendidikan seringkali ditunggangi oleh pelbagai kepentingan politik, kekuasaan, dan modal. Bahwa pendidikan tidak lebih hanya sarana sistematis untuk melanggengkan ketidakadilan dan kesenjangan sosial, memapankan *status quo*, dan penjinakan sikap berpikir kritis. Hak mendapatkan akses pendidikan yang sungguh mencerdaskan generasi masa

depan sering terganjal oleh kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat miskin. Kita melihat contoh beberapa kasus sekolah di daerah-daerah terpencil. Anak-anak di suatu Sekolah Dasar di daerah terpencil harus berjalan kaki jauh untuk menuju ke sekolah. Di beberapa daerah terpencil, anak-anak sekolah kadang-kadang harus menyeberangi sungai atau menyeberang jembatan yang berbahaya. Semua mereka tempuh demi sekolah. Sesampai di sekolah kadang-kadang guru tidak ada di tempat karena ada urusan ke kota, sementara jumlah guru di sekolah tersebut hanya tiga orang. Bayangkan bagaimana repotnya tiga orang guru mesti mengajar 6 kelas. Isu tentang pendidikan bagi anak-anak miskin, terlantar, terpinggirkan, dan daerah pedalaman nampaknya bukan isu yang mendatangkan keuntungan bagi jabatan kekuasaan politis. Oleh karena itu, keinginan anak-anak miskin dan terlantar di hadapan dunia pendidikan bagaikan *voice of the voiceless*, suara dari kaum yang tak bersuara. *Sharing* dari praktisi pendidikan bagi anak-anak miskin dan terlantar perlu kita dengarkan, jatuh-bangun dan kesulitan serta tantangan yang mereka alami dalam kesediaan untuk turut mencerdaskan anak-anak miskin, terlantar, dan terpinggirkan. Wacana tentang **Pendidikan dan Kesenjangan Sosial** adalah sungguh permasalahan nyata di negeri kita.

10. Pendidikan Anti-Korupsi

Mengapa segala usaha pengambilan kebijakan publik di negeri ini (termasuk kebijakan pendidikan nasional) seakan-akan bak menepuk angin, tak berbuah memuaskan dalam menyejahterakan kehidupan rakyat banyak? Persoalan yang sudah mengakar lama dan acapkali dilontarkan adalah masalah mentalitas korup dan fenomena korupsi yang menggurita. Sejatinya, korupsi adalah wajah buram kehidupan berbangsa di negeri ini yang sangat dikuasai oleh kepentingan mengeruk keuntungan demi kepentingan diri sendiri atau pun kelompok. Keburaman wajah hidup manusia oleh korupsi berkait-mengkait antara politik kekuasaan, buruknya sistem dan pranata normatif dalam bentuk produk-produk hukum yang tidak adil dan bias kepentingan politik, serta perilaku korupsi yang sudah meng-kultur. Akibatnya adalah kehancuran kehidupan sosial dan hilangnya kepercayaan terhadap kehidupan bersama dalam masyarakat sebagai lembaga yang sanggup mengayomi, melindungi, dan menyejahterakan. Singkatnya, terjadi kesenjangan ekonomi dan hancurnya ke-saling-percaya-an antar warga masyarakat. Oleh karena itu, perilaku korupsi menjadi sangat fenomenal dan sekaligus memprihatinkan semua orang yang masih bekehendak baik

dan mendambakan peradaban kehidupan yang bermartabat sebagai manusia.

Nampaknya **Pendidikan Anti-Korupsi** perlu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional agar kejujuran menjadi *output* atau produk dari sebuah sistem pendidikan. Adalah sesuatu yang menyakitkan ketika kita melihat dan mendengar bagaimana seorang pejabat publik yang berlatar belakang pendidikan tinggi justru terlibat dalam tindak pidana korupsi, mengeruk uang negara untuk kepentingan diri sendiri. Adalah memprihatinkan melihat bahwa latar belakang pendidikan tinggi ternyata tidak otomatis sejalan dengan integritas dan sikap kebangsawanan seseorang. Pendidikan Anti-Korupsi semestinya menjadi perlawanan terhadap budaya korupsi dan sikap tidak jujur sejak dari akarnya, yaitu sejak dari masa pendidikan dasar sampai atas.

11. Pendidikan dan Kesadaran Politik-Etis

Pada dasarnya, pendidikan tidak boleh memisahkan peserta didik dari realitas hidup bermasyarakat di sekitarnya. Lewat pendidikan, peserta didik semestinya dihantar pada pemahaman akan realitas hidup sosial di sekitarnya. Pendidikan yang tidak menyentuh kehidupan real-sosial di

sekitarnya menjadikan ilmu dan produk-produknya bak menara gading. Ilmu menjadi “elitis”. Yang dihasilkan adalah manusia-manusia yang pintar tetapi tidak tanggap, tidak peka, dan tidak memiliki kepedulian terhadap situasi-situasi di sekitarnya. Ilmu dipisahkan dari penghayatan atas nilai-nilai. Dalam kasus ini, para ilmuwan menjadi sosok yang dingin, yang tidak tanggap dan tidak peka terhadap orang-orang dan lingkungan di sekitarnya.

Seyogyanya, pendidikan juga menghantar peserta didik kesadaran akan kehidupan bersama secara etis. Bahwa kehidupan bersama umat manusia mesti ditata dalam perangkat yang normatif-legal demi suatu tujuan bersama, yaitu membangun masyarakat yang berkesejahteraan. Agar kesejahteraan umum dicapai, maka perangkat normatif-legal harus adil. Pembahasan semacam ini merupakan bagian dari kajian tentang politik-etis. Politik-etis tidak membahas soal kekuasaan dan akses mendapatkannya. Politik-etis mengkaji tentang kehidupan bersama umat manusia yang memiliki tujuan meraih kesejahteraan bersama melalui pranata dan sistem-sistem normatif yang adil dan berpihak kepada kepentingan bersama.

Para peserta didik perlu menjadi bagian dari pembelajaran politik-etis semacam ini. Mereka tidak boleh dibutakan dari politik dalam arti etis. Kesejahteraan umum,

pranata normatif dan sistem perundang-undangan yang adil, mesti menjadi bagian dari pembelajaran di negeri ini. Kepekaan dan kepedulian terhadap kehidupan bersama umat manusia secara bermartabat mesti menjiwai kurikulum dan sistem pendidikan. Bila tidak demikian, maka negara kita hanya akan menyaksikan generasi yang *cuek, semau gue*, apatis, permisif, melegalkan segala cara demi kepentingannya sendiri (termasuk juga melakukan tindak pidana kejahatan). Mereka akan menjadi generasi yang tidak peduli terhadap situasi di sekitarnya. Kesadaran politik-etis mesti pertamanya berangkat dari kesiap-sediaan untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur.

12. Mendidik Para Calon Pemimpin Indonesia

Semua dimensi pendidikan di tanah air ini semestinya mengarah kepada satu visi, yaitu mendidik para calon pemimpin Indonesia. Semua kebijakan dan sistem pendidikan negeri ini semestinya terarah untuk merealisasikan visi mendidik calon pemimpin Indonesia. Jiwa kepemimpinan amat dibutuhkan untuk dimiliki oleh generasi negeri ini. Jiwa kepemimpinan dipupuk oleh semangat disiplin diri yang tinggi sekaligus kerendahan hati untuk mau belajar. Ki Hadjar Dewantara adalah teladan tipe

pemimpin yang religius, tegas, visioner, dan pemberani. Beliau selalu menyuarakan nasionalisme tinggi kepada generasi muda pada jamannya, yaitu bagaimana menjadi manusia Indonesia lewat pendidikan. Hidupnya yang tenang dan bersahaja, sederhana, jujur, dan tidak bermental pragmatis, seharusnya menjadi teladan bagi setiap (calon) pemimpin di negeri ini.⁷

Bagi kebanyakan orang, mungkin visi pendidikan bagi para calon pemimpin ini terasa demikian “jauh” dan muluk-muluk. Orang melihat bahwa setelah sekian tahun anaknya belajar, hidupnya pada akhirnya ditentukan oleh hasil ujian nasional beberapa hari. Itu pun isi ujian nasional adalah soal-soal pilihan berganda yang hanya mengandalkan kemampuan mengingat dan hapalan sehingga hasil ujian nasional itu tidak seluruhnya merepresentasikan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh siswa secara holistik. Akibatnya sistem pendidikan yang mengandalkan hapalan dan ingatan semacam itu menghasilkan mentalitas pragmatis baik di antara pendidik maupun peserta didik. Yang penting pelajaran di hapal dan diingat, soal-soal dikerjakan, lulus, dan selesai.⁸ Orang melihat, sebetulnya anak-anak sekolah

⁷ Bdk. *Ibid.* hal 30-31.

⁸ Dan menjadi lebih parah lagi situasinya pada tahun ini (2013) karena Ujian Nasional terjadi dua kali karena kasus terlambatnya pencetakan dan distribusi naskah soal ujian. Bahkan, UN “gelombang

dididik untuk mengingat dan menghafal, untuk meniru dan mengikuti saja apa isi pelajaran gurunya. Bersekolah dengan demikian menjadi “beban berat” bagi para peserta didik. Sinyalemen itu juga nampak dalam “ritual” konvoi sepeda motor yang dilakukan anak-anak selepas berita kelulusan sekolah. Padahal setelah lulus sekolah, persoalan pendidikan lanjut (dengan biaya tinggi) atau persoalan lapangan kerja yang sempit sudah menghadang di depan mata. Sistem dan kebijakan pendidikan yang berorientasi pada hasil atau produk memang akan cenderung bersifat pragmatis: mementingkan gelar akademis dan bukti-bukti dalam bentuk ijazah atau sertifikat. Padahal, visi pendidikan mendidik calon generasi pemimpin nasional semestinya dijiwai oleh semangat mendidik manusia agar menjadi manusia yang berintegritas, memiliki komitmen dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan berbangsa secara damai dan jujur, serta total dalam meraih profesionalitas di setiap bidang kerja yang ditugaskan atau dikerjakannya. Dan ini jelas bukan pendekatan pragmatis melainkan visioner.

ke dua” pun gagal dilaksanakan di sejumlah daerah dengan alasan yang sama, distribusi soal yang bermasalah. Di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), misalnya, 31 SMA/MA dan 19 SMK batal menyelenggarakan ujian karena kekurangan soal. Menjelang penyelenggaraan UN, hanya tersedia 801 amplop soal atau kurang 705 amplop dari seharusnya 1.506 amplop soal. Sebanyak 6.943 peserta UN yang sudah tiba di sekolah terpaksa pulang. Berita *KOMPAS*, Jumat, 19 April 2013, hal. 1.

Visi pendidikan sebagai sarana untuk mendidik para calon pemimpin Indonesia memang mesti menjadi visi yang memenuhi setiap elemen dari sistem dan kebijakan pendidikan, baik para pejabat yang berwenang, institusi pendidikan dan institusi terkait, para praktisi pendidikan dan para guru, para peserta didik, dan para orang tua murid.

MENCARI MAKNA HAKIKI “MENDIDIK MANUSIA INDONESIA DAN MEMPERSIAPKAN GENERASI PEMIMPIN NASIONAL”

Kita sudah melihat kerangka pemaparan tema “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional” satu per satu. Membaca kerangka penjabaran tersebut, mungkin secara spontan orang mengernyitkan kening tanda penuh dengan tanya di dalam benaknya. Tidakkah hal-hal ini terlalu idealis dan muluk-muluk? Masih mungkinkah untuk dicapai dalam situasi masyarakat yang sudah demikian apatis, pesimistik, dan dilanda “penyakit” tidak peduli alias *cuek*?

Tulisan-tulisan di dalam buku ini memang bukan berangkat dari pesimisme dari ketidakpedulian, tetapi sebaliknya berangkat dari sikap optimistik, visioner, sambil tetap mengusahakan diri untuk mencari langkah-langkah

konkrit yang mungkin untuk dilakukan. Bukankah sudah jelas dari pelbagai paparan di atas bahwa kerusakan dan kebobrokan kehidupan berbangsa dan bernegara di negeri ini dimulai dari *semrawutnya* visi dan orientasi pendidikan? Kalau pun visi dan orientasi pendidikan sudah jelas, mungkin pula komitmen dan gerak langkah realisasinya masih sangat lemah.

Sebagai sebuah tema yang bersifat visioner, “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional” memang bukan sebuah tips mudah, murah, dan cepat untuk menggarap sebuah karya pendidikan nasional. Diperlukan saat untuk belajar bersama dengan sepenuh komitmen, kehendak baik, dan kerendahan hati. Diperlukan kajian kritis terhadap situasi-situasi sosial, politik, kebudayaan, dan ekonomi pada saat ini, sebab bidang-bidang tersebut tentu sangat berkaitan dengan situasi pendidikan nasional. Perlu untuk mencari dan menemukan saripati dari **pendidikan, kemanusiaan, dan keindonesiaan**, agar apa pun kebijakan dan sistem pendidikan yang diambil tetap terarah dan berorientasi pada visi yang jelas tentang tiga hal tersebut.

PENUTUP

Mengangkat tema “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional” hanyalah satu upaya kami (para penulis dalam buku ini) untuk terlibat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, yaitu dalam bidang pendidikan, pencerahan, dan pengembangan kualitas diri sebagai manusia Indonesia. Kajian-kajian dan permenungan filosofis yang mengiringi dan mewarnai perspektif dalam setiap artikel dalam buku ini seringkali akan nampak indah karena dilakukan dengan sepenuh kemampuan budi, kepekaan hati, dan komitmen untuk terlibat. Tetapi “keindahan” itu tentu tidak boleh berhenti dalam level wacana saja. Akan menjadi lebih “indah” jika kita menjadi bagian dari komunitas orang-orang yang berkehendak baik untuk membangun manusia Indonesia lewat realisasi atas visi “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional”. Setiap usaha dan niat baik untuk membangun negeri memang tidak semudah membalik telapak tangan. Semua mesti dimulai dari diri kita sendiri, untuk semakin menjadi “manusia Indonesia”.

DAFTAR ACUAN

Bartolomeus Samho, *Visi Pendidikan Ki Hadjar Dewantara. Tantangan dan Relevansi*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.

KOMPAS, Rabu, 22 Mei 2013.

KOMPAS, Jumat, 16 Agustus 2013.

KOMPAS, Jumat, 19 April 2013.

BAGIAN 1

ANEKA KEGELISAHAN EKSISTENSIAL TENTANG “MENDIDIK MANUSIA INDONESIA”

BAB 1

MANUSIA, ILMU PENGETAHUAN, DAN KESADARAN DIRI⁹

Oleh: Emanuel Prasetyono

KEBANGKITAN KESADARAN MANUSIA AKAN DIRINYA

Dalam hidupnya, manusia senantiasa mau mengusahakan hidup yang baik. Kehidupan manusia pada dasarnya terarah kepada apa yang baik. Kehidupan yang baik menjadi cita-cita dan harapan manusia. Untuk mencapai hidup yang baik itu, manusia mengembangkan kehidupannya, memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, mengembangkan cara-cara pemenuhan kehidupan secara lebih efektif, modern, dan efisiensi. Untuk itu diciptakanlah teknologi pertanian, kedokteran, bangunan, dan lain

⁹ Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 4 September 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya. Dengan beberapa revisi redaksional, artikel ini juga pernah dimuat dalam *ORIENTASI BARU*, Jurnal Filsafat dan Teologi, Vol. 22, No.2, Oktober 2013, Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, hal. 187-205.

sebagainya. Kodrat hidup manusia yang terarahkan kepada yang baik itu amat nampak dalam sejarah bagaimana manusia memperindah dan *mempernyaman* (membuat lebih nyaman) bangunan rumah tempat tinggalnya. Rumah bagi manusia bukan sekedar sarang atau liang untuk hidup. Rumah bagi manusia dibangun dengan pemikiran dan pemahaman tertentu. Untuk itu, “terciptalah” arsitektur bangunan dengan berbagai macam gaya, seni, dan fungsi. Manusia juga mengembangkan alat-alat kerjanya agar hidupnya semakin dipermudah. Penemuan mesin-mesin mengubah dunia manusia dalam pekerjaan-pekerjaannya. Ini adalah pandangan yang optimistik tentang hidup manusia.

Pandangan optimistik tentang manusia juga didasarkan atas kenyataan bahwa manusia juga mengembangkan cara dan metodenya. Ketika teknologi belum berkembang sedemikian jauh seperti saat ini, hidup manusia ditandai dengan kerumitan. Kerumitan dalam hal transportasi, pekerjaan-pekerjaan kantor, proses pembangunan gedung-gedung bertingkat, informasi jarak jauh, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi sesungguhnya terarah kepada kehidupan yang lebih mudah, dengan cara yang semakin sederhana dan mudah. Hal ini dibuktikan dengan berkembangnya alat-alat komunikasi, telepon seluler, computer, internet, dan lain sebagainya. Jadi,

kenyataan bahwa manusia dalam hidupnya mengembangkan perangkat-perangkat teknis untuk mendukung kemudahan dan kemanyanan hidupnya, membuktikan bahwa hidup manusia terarah kepada tujuan. Bahwa tujuan itu memberi kepada manusia suatu arah, orientasi, dan proses perkembangan. Tujuan juga memberikan arah dan orientasi bagi keputusan-keputusan hidup manusia.¹⁰

Ada suatu abad dalam sejarah pemikiran manusia yang demikian mengagungkan dan mengagumi kemampuan manusia untuk mencapai kemajuan hidupnya. Abad itu demikian optimistik dalam memandang kehidupan manusia. Abad tersebut ditandai oleh kemajuan yang sangat signifikan dalam berbagai penemuan yang membuat hidup manusia lebih sehat, lebih maju, lebih sejahtera, lebih baik. Jaman ini

¹⁰ Pandangan ini dikenal dengan istilah **teleologi**, berasal dari bahasa Yunani *telos* yang berarti tujuan. Adalah Aristoteles (384-322 SM), filsuf Yunani Kuno yang memandang kehidupan bertujuan pada sesuatu yang baik. Menurut Aristoteles, dalam bukunya *Etica Nicomachea*, dikatakan bahwa tujuan segala perikehidupan adalah **yang baik**. Aristoteles merumuskan apa yang pada hakikatnya merupakan tujuan sebagai segala hal yang untuk mana atau demi mana kita mau melakukannya atau meraihnya dengan segala usaha dan suka rela (*that for the sake of which a thing is done*). Apa yang baik adalah apa yang menjadi tujuan segala sesuatu (*that at which all things aim*). Bdk. Aristotle, *Nicomachean Ethics*, book I, ch. 1, 1094a 1 dan 1094a 3. Bdk. juga Aristotle, *Physics*, book II, ch. 3, 194b 33. Bdk juga Emanuel Prasetyono, *Dunia Manusia Manusia Mendunia*, Zifatama Publishing dan Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2013, hal. 113-114.

disebut dengan jaman Pencerahan, Renaisans (*Renaissance*).¹¹ *Renaissance* dari akar katanya *ri-nascere* berarti “kelahiran kembali”. Kelahiran kembali dari apa maksudnya? Yaitu, semacam “kelahiran kembali” manusia. Selama berabad-abad sebelumnya, hidup manusia dikuasai oleh berbagai bentuk mitologis, nuansa religius yang dikuasai oleh doktrin-doktrin dan lembaga agama. Bahkan, dalam soal berpikir pun manusia mengalami belenggu kekuasaan agama dan kaum bangsawan. Jaman Pencerahan dipahami sebagai jaman di mana manusia mengalami optimismenya sebagai manusia yang berkemampuan intelektual, berakal budi, bertanggung jawab atas hidupnya sendiri, dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan hidupnya sebagai manusia. Pada masanya, jaman Pencerahan ditandai oleh optimisme manusia secara luar biasa. Ada semacam perasaan umum bahwa kemajuan hidup berada di tangan manusia. Jaman ini juga sekaligus menandai manusia sebagai pusat pemikiran dan pusat diskursus tentang berbagai segi kehidupan. Kesadaran akan kemanusiaan terus berkembang dalam berbagai segi: seni, arsitektur, kedokteran, dan berbagai bentuk kebudayaan moderen. Jadi ada semacam gerakan kesadaran akan kekayaan dimensi dan makna

¹¹ Bdk. Samuel Enoch Stumpf & James Fieser, *Socrates to Sartre and Beyond*, Seventh Edition, Mc Graw Hill, New York, 2003, hal. 191 – 192.

kehidupan manusia. Oleh karena itu, Abad Pencerahan ini ditandai juga oleh sebuah gerakan yang disebut dengan humanisme.¹²

FRANCIS BACON: SAINS SEBAGAI JAWABAN BAGI PERMASALAHAN HIDUP MANUSIA

Seorang filsuf yang cukup representatif yang bisa diangkat dari jaman Pencerahan ini adalah Francis Bacon (1561-1626). Filsuf dari Inggris ini menganggap bahwa *science* atau sains adalah jawaban bagi permasalahan hidup manusia. Francis Bacon terkenal dengan ungkapannya: *Knowledge is*

¹² Humanisme sebagai sebuah jaman pertama-tama muncul dalam paruh ke dua abad ke XIV di Italia, lalu berkembang ke negara-negara Eropa lainnya. Dalam berbagai bentuk gerakan kesadaran yang berkembang dalam berbagai segi hidup manusia (baik dalam bentuk seni, arsitektur, dan berbagai bentuk kebudayaan moderen), humanisme mendasarkan pemahamannya pada kodrat manusia yang mampu meraih kemajuan berdasarkan kodrat kemanusiaannya. Humanisme mendasarkan diri pada sikap optimistik terhadap kodrat kemanusiaan. Keterbatasan-keterbatasan manusiawi diakui dan diberi tempat dalam kerangka keseluruhan dimensi kemanusiaannya. Ada kelebihan maupun kekurangan dalam kodrat kemanusiaan kita. Namun demikian, semua minat berkembang ke arah pemahaman yang lebih dalam tentang manusia dan kemanusiaannya. Humanisme jelas memberikan kontribusi yang tidak kecil pada paham kita tentang manusia dan kemanusiaan di jaman ini. Bdk. Nicola Abbagnano, *Dizionario di Filosofia di Nicola Abbagnano*, terza edizione aggiornata ed ampliata da Giovanni Fornero, UTET, Libreria, Torino, 1998, hal. 1124-1125.

power. Dengan ungkapan tersebut, Bacon mau menyatakan superioritas ilmu pengetahuan atau sains (*science*) dalam berbagai perikehidupan. Bacon mau menunjukkan bahwa berbagai macam permasalahan hidup manusia harus diatasi dengan mengembangkan ilmu pengetahuan atau sains. Dengan nada sedikit mengkritik, Bacon menyatakan bahwa manusia dalam jaman Yunani berkutat dengan persoalan-persoalan etis. Orang-orang Romawi sibuk dengan persoalan hukum. Manusia dari Abad Pertengahan sibuk dengan persoalan teologis. Sebaliknya, manusia dari abad modern ini sibuk dengan bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan hidupnya.¹³ Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, kita bisa mengembangkan kehidupan, terutama dengan menguasai alam untuk dimanfaatkan bagi kehidupan manusia yang lebih sejahtera. Menurut Bacon, manusia hanya bisa hidup makmur dan sejahtera kalau dia berhasil menguasai dan menaklukkan alam. Caranya yaitu dengan mengembangkan ilmu pengetahuan yang pada gilirannya amat bermanfaat bagi penaklukkan atas alam. Di sinilah kunci pandangan Bacon, yaitu bahwa ilmu pengetahuan dianggap dapat mengembangkan hidup manusia. Caranya yaitu dengan

¹³ Bdk. Hardiman, F. Budi, *Filsafat Modern. Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 27.

mengembangkan perspektif ilmiah sebagaimana yang selalu dipakai oleh ilmu pengetahuan atau sains.¹⁴

Menurut Bacon, perspektif ilmiah bisa diperoleh dengan cara mengubah sikap dan pandangan manusia terhadap realitas. Menurut Bacon, kemajuan hidup manusia seringkali terhambat oleh cara pandang manusia sendiri terhadap realitas hidupnya. Bacon menyebut “halangan” ini sebagai idola-idola. Idola-idola itu dianalogikan seperti debu yang menempel di mata kita dan mengganggu proses penglihatan kita terhadap realitas di depan mata. “Debu” ini berbentuk idola-idola dan seakan terpatri dalam benak pikiran kita. Idola-idola itu ada dalam pikiran kita,

¹⁴ Perspektif ilmiah yang ditekankan oleh Bacon ini membuatnya digolongkan sebagai filsuf Pencerahan yang sangat *outstanding* di Inggris. Namanya selalu diasosiasikan dengan perkembangan dan kemajuan dalam ilmu pada jaman Pencerahan. Konservatisme yang cukup menguasai universitas-universitas di Inggris pada masa sebelum Pencerahan telah membuat pemikiran Francis Bacon sangat mengemuka. Dia telah meninggalkan “kesibukan-kesibukan” pemikiran sebelumnya yang berkisar pada pemikiran-pemikiran beraliran Aristotelianisme-Skolastik maupun Platonisme. Juga pemikiran Bacon tak berkaitan dengan *teosophy*. *Teosophy* adalah semacam kombinasi atau pertautan antara mistisisme dan pemikiran rasional-refleksi filosofis, yang banyak menguasai diskursus-diskursus di universitas-universitas pada akhir Abad Pertengahan. Francis Bacon banyak mengembangkan pemikiran ilmiah dengan pendekatan teknis-induktif demi perkembangan kemajuan umat manusia. Bdk. Copleston, Frederick, S.J., *A History of Philosophy, Volume III: Modern Philosophy*, Image Books, Doubleday, New York, 1994, hal. 292-293.

membentuk persepsi-persepsi kita, dan kita tanpa sadar menganggapnya sebagai perspektif yang benar. Padahal sebetulnya kita terganggu olehnya karena dengan demikian kita tidak mampu memahami realitas dengan objektif. Idola-idola itu mendistorsi pikiran kita. Realitas menjadi kabur, suram, dan remang-remang. Idola-idola itu dalam wujudnya berupa prasangka-prasangka yang tidak diuji atau dikaji kembali, yang akibatnya sangat mempengaruhi persepsi kita dalam memandang dan menilai realitas. Bisa juga berupa pelbagai bentuk kepercayaan takhayul, mitos-mitos, dan legenda-legenda. Akibat dari prasangka-prasangka yang tak teruji adalah bahwa pandangan dan penilaian kita atas realitas lantas menjadi kabur, keliru, salah duga, salah persepsi, atau salah konsep.

Menurut Bacon, ada 4 macam idola yang bisa mengganggu perspektif dan wawasan kita dalam memandang dan menyikapi realitas hidup kita. Pertama, idola *tribus* (*tribe*: suku bangsa). Ini semacam prasangka-prasangka yang dibentuk karena keterbatasan akal budi manusia dalam memahami realitas. Manusia memahami realitas dengan akal budi, tetapi seringkali akal budi itu terbatas. Keterbatasannya disebabkan oleh bermacam-macam faktor: *mood* atau situasi jiwa tertentu (gembira, sedih, galau), faktor geografis (terasing, terbelakang), dan

yang cukup signifikan adalah faktor pemahaman kolektif. Pemahaman kolektif suatu masyarakat atau bangsa turut membentuk prasangka-prasangka yang melatarbelakangi proses pembentukan persepsi-persepsi umum.¹⁵

Ke dua adalah idola *cave*, yang dalam bahasa Inggris berarti gua. Kata “gua” ini mengacu pada ceritera Plato tentang gua di mana para budak dibelenggu sebagai tawanan, dan mereka hanya mampu melihat bayang-bayang manusia yang lalu-lalang akibat dari pancaran api unggun di belakang mereka. Bayang-bayang itu adalah analogi dari opini-opini pribadi, prasangka-prasangka sendiri, atau perspektif pribadi yang tidak diuji, didialogkan, atau didialektika-kan dengan perspektif orang lain. Juga bisa berupa kebiasaan-kebiasaan yang sudah menjadi *habitus* pribadi

¹⁵ Ada pengalaman-pengalaman dalam sejarah suatu bangsa yang membuat pemahaman kolektif mempengaruhi persepsi umum suatu bangsa. Misalnya, sejarah konflik sosial (seperti peristiwa G 30 S tahun 1965), sejarah penjajahan (misalnya, penjajahan Belanda atas Indonesia), masa Reformasi tahun 1998, dan lain sebagainya. Pemahaman kolektif yang membentuk persepsi umum harus dikaji dan dievaluasi kembali mengingat bahwa tidak jarang proses pembentukan persepsi itu sangat kental dengan pelbagai kepentingan di balik proses “distribusi” informasi atas apa yang terjadi. Pemahaman kolektif tidak jarang sangat dipengaruhi info-info dari media massa, sementara media tidak jarang ditunggangi oleh pelbagai kepentingan (kekuasaan, politik, pemodal). Untuk itulah, pemahaman kolektif yang membentuk persepsi umum suatu bangsa juga perlu dihadapi dengan sikap kritis agar tidak menyesatkan pemikiran objektif.

seseorang. Atau latar belakang pendidikan seseorang yang mengurung seseorang dalam suatu prasangka tertentu. Orang yang terjebak atau terkurung dalam prasangkanya sendiri bagaikan para tawanan dalam ceritera Plato yang terpesona hanya oleh bayang-bayang dalam gua. Ketika seseorang telah mampu meruntuhkan prasangkanya sendiri dan menemukan kebenaran secara objektif, Plato menggambarkannya sebagai tawanan yang telah membebaskan diri dari gua dan melihat sinar yang sejati dari pancaran cahaya matahari.¹⁶

Ke tiga adalah idola *fora* atau pasar. Yaitu prasangka-prasangka yang dibentuk oleh opini publik yang berkembang. Prasangka-prasangka yang dibentuk oleh opini publik ini bisa sangat menyesatkan karena kekuatan “iklan”, media, kata-kata orang yang berpengaruh (pejabat, penguasa, pemodal) bisa berpotensi membelokkan kebenaran objektif.

Ke empat adalah idola teater (*theater*, panggung). Yang dimaksudkan adalah prasangka-prasangka yang dibangun oleh sistem-sistem pemikiran yang sedang berlaku, yang sedang menjadi *mainstream*. Bacon menyebut ini sebagai sistem-sistem filsafat dan teologi yang telah mengklaim diri

¹⁶ Bdk. Samuel Enoch Stumpf & James Fieser, *Socrates to Sartre and Beyond*, Seventh Edition, Mc Graw Hill, New York, 2003, hal.49-50 dan 210.

sebagai ilmu yang sanggup membawa manusia pada pemahaman terhadap realitas.¹⁷ Dalam konteks jaman ini, idola ini bisa berupa sistem-sistem pemikiran dan ideologi-ideologi semu yang menjebak dan mengurung manusia dalam perspektif yang sempit dalam memahami realitas. Padahal, jaman berubah secara dinamis dan sistem pemikiran atau ideologi itu juga bisa tidak laku lagi. Maka, Bacon menggambarkan sistem-sistem pemikiran itu sebagai panggung, yang tampil sekali, sesudah itu mati karena harus “turun panggung” ketika jaman kejayaan pemikiran itu telah berakhir dan berganti dengan sistem pemikiran berikutnya.

Dari pandangan tentang keempat idola yang menghalangi atau menghambat proses pengetahuan manusia di atas, nampaklah bahwa Francis Bacon merepresentasikan optimisme jamannya yang melihat masa depan yang cerah berkat ilmu pengetahuan. Cita-citanya adalah pencapaian kebenaran yang didapat dari pengetahuan yang bersifat objektif dan murni. Dan untuk mencapai objektivitas dan kemurnian ilmu, maka metode ilmiah sekuat mungkin diterapkan dalam proses pencapaian kesimpulan. Oleh karena itu, Bacon juga merupakan seorang “bapak” metode

¹⁷ Bdk. Simon Petrus L. Tjahjadi, *Petualangan Intelektual. Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 194.

induksi, yang mau menarik kesimpulan umum dari observasi dan pengkajian terhadap hal-hal khusus. Metode ini dijalankan dengan menyingkirkan segala bentuk prasangka yang menghambat proses pembentukan pengetahuan.¹⁸ Bacon telah memberikan kontribusi bagi perkembangan kemajuan zaman. Sains menjadi ilmu pengetahuan yang dipandang “elitis” dan “dipercaya” bisa menghantar manusia kepada pemahaman akan peradaban dunia modern, lantas manusia diasumsikan “siap” menuju kepada sebuah peradaban agung yang disebut dengan peradaban modern. Peradaban yang “dipimpin” oleh sains atau ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemajuan.¹⁹ Modernisme

¹⁸ Bdk. F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern. Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 28.

¹⁹ Menggagas tentang peradaban dunia yang “dipimpin” oleh sains, teknologi, dan kemajuan sesungguhnya merupakan cita-cita yang sangat idealis yang pernah dilahirkan oleh seorang Bacon. Sejatinya, dengan mengatakan “*Knowledge is power*”, Francis Bacon memaksudkan bahwa pengetahuan bagi manusia harus dikembangkan untuk menguasai alam. Pengetahuan ilmiah sejatinya dikembangkan agar alam dapat kita kuasai. Tetapi menguasai alam berarti pertama-tama adalah bahwa kita harus “tunduk” kepadanya, artinya kita harus memahami dan mengenali alam, tetapi tetap dengan tujuan untuk menaklukkan alam; yaitu, bekerja keras lewat pelbagai penyelidikan dan penemuan-penemuan ilmiah. Penaklukkan atas alam inilah yang pada akhirnya menjadi “bumerang” dari aplikasi atas teori Bacon di abad ke 21 ini ketika kita menyaksikan eksploitasi atas alam secara *gila-gilaan*. Bdk. Simon Petrus L. Tjahjadi, *Op.Cit.*, hal. 196. Bdk juga Frederick Copleston, S.J., *A History of Philosophy, Volume III: Modern Philosophy*, Image Books, Doubleday, New York, 1994, hal. 300.

sendiri menjadi sebuah nama yang diasosiasikan dengan kecanggihan teknologi dan kemajuan jaman. Dari sinilah kritik terhadap perspektif Francis Bacon muncul di jaman ini.

Jaman sekarang ini sudah menyaksikan sendiri dampak dari pelbagai bentuk penaklukan alam dan kecenderungan mengeksploitasi alam. Jaman ini ditandai oleh pengapnya udara akibat polusi berlebihan, pembuangan gas emisi berlebihan seiring dengan semakin meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan aktivitas industrialisasi, kebakaran hutan, penebangan hutan secara *gila-gilaan* tanpa diimbangi proses reboisasi yang terencana, semakin menipisnya air tanah dan kandungan air bersih akibat penebangan dan penggundulan hutan berlebihan. Pemanasan global kian menjadi-jadi dari tahun ke tahun. Ritme alam pun berubah yang ditandai oleh perubahan cuaca yang tidak menentu. Kehidupan pada umumnya dan kehidupan manusia pada khususnya jelas mengalami dampak ini. Kekeringan, banjir, dan berbagai macam penyakit dengan mudah menjangkiti dan mengganggu hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, kenyataan yang terjadi adalah bahwa bukannya kebudayaan dan peradaban manusia yang dipimpin oleh ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan kemajuan jaman, tetapi

manusia justru menjadi “korban” dari eksploitasi alam secara *gila-gilaan*. Perkembangan jaman telah berubah menjadi nafsu penguasaan dan penaklukkan alam secara tak terbatas.

Dalam bidang pendidikan, “mimpi” Bacon pun tidak kurang menimbulkan problematika. Ketika ilmu sains menghegemoni sebuah sistem pendidikan, maka metode yang diterapkan mesti bersifat empiris (inderawi), observasi dan penelitian ilmiah (lewat kalkulasi kuantitatif), singkatnya segala perangkat atau variabel yang memberikan standard keilmiah. Sistem semacam ini mereduksi standard keilmuan yang berkaitan dengan manusia (*humaniora*) hanya pada dimensi ilmiah yang sifatnya terbatas (*empiris-observasional*). Yang sesungguhnya terjadi adalah reduksi saintistik pada ilmu-ilmu kemanusiaan. Kekayaan dimensi manusia (*manusia multi-dimensi*) hanya dipandang, diukur, dan dinilai sejauh bisa dijelaskan secara empiris-ilmiah. Dengan demikian, manusia dipandang dan diperlakukan tidak lebih jauh daripada obyek-obyek ilmu pengetahuan lainnya.²⁰ Kita perlu bersikap kritis terhadap hal ini. Sebab ketika suatu sistem pendidikan hanya berkuat dominasi

²⁰ Bdk. Emanuel Prasetyono, *Dunia Manusia Manusia Mendunia*, Zifatama Publishing dan Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2013, hal. 171.

sains yang nampak “elitistis”, maka ilmu-ilmu sosial dan humaniora tidak diberi tempat. Ilmu-ilmu sosial dan humaniora dipandang tidak perlu dipelajari dengan rumit, dianggap gampang. Dipandang hanya anak-anak yang “standard” saja yang harus mempelajari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Pandangan ini dalam jangka panjang jelas akan berdampak pada sikap dasar manusia terhadap kemanusiaannya sendiri. Dalam level terparah, dampak yang dihasilkan dari sistem pendidikan semacam ini adalah dihasilkannya generasi yang pintar tetapi minus sosialisasi, kepekaan, kepedulian, *human sense*, lantas yang nampak adalah generasi yang *emotional, unstable*, dingin, dan tidak berkarakter. Sejarah sudah menyaksikan bagaimana sains dan ilmu pengetahuan justru akan menjadi bumerang yang menghancurkan hidup manusia ketika berada di “tangan” orang-orang yang tidak berkarakter, kejam, dingin, dan kehilangan *human sense*.²¹

²¹ Sejarah menyaksikan bahwa tak seorang pun menyangka bahwa Adolf Hitler kecil yang rajin, tak banyak bicara, dan tak pernah bikin ulah itu ketika dewasa menjadi sosok tiran yang menakutkan selama perang dunia ke 2. Perangnya yang wajar-wajar saja selama masa pendidikannya di masa kecil membuat deteksi terhadap potensi jiwa kekejamannya tidak terlacak oleh orang tua dan para gurunya di sekolah. Melihat kekejamannya dalam menghapus ras tertentu dari muka bumi serta kamp-kamp konsentrasi yang dibangunnya untuk membunuh jutaan nyawa manusia, orang lantas melihat kembali sejarah masa kecilnya. Lantas orang bertanya, tidak adakah sistem pendidikan yang bisa sekaligus *merangkul* jiwa kepemimpinan dan

Oleh karena itu, yang menjadi pertanyaan kita adalah: apakah “proyek” dan mimpi Bacon dengan kebudayaan dan peradaban manusia yang dipimpin oleh ilmu pengetahuan, kebenaran obyektif murni, teknologi, dan kemajuan sudah sukses tercapai? Mungkinkah suatu kebenaran obyektif murni yang bebas dari nilai-nilai itu bisa dicapai oleh ilmu pengetahuan? Tidakkah setiap ilmu juga selalu diiringi oleh nilai-nilai dan kepentingan?

TUMPANG TINDIH ILMU DAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN UNIVERSAL

Gerakan kebangkitan kesadaran manusia akan kodratnya sebagai makhluk berakal budi dan berpotensi dalam meraih kemajuan dan perkembangan hidupnya membuktikan bahwa dalam suatu masa umat manusia mengalami sikap optimistik yang luar biasa akan perkembangan kebudayaan dan peradabannya. Kemajuan ilmu-ilmu alam dan perkembangan teknologi serta mesin-

kemanusiaan yang arif dalam pelbagai kurikulum dan pengajarannya? Ataupun memang pendidikan dianggap boleh melupakan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan serta kebenaran dari sistem-sistemnya? Lantas untuk siapakah dan untuk apakah pendidikan itu? Bdk. Paulo Freire dkk, *Menggugat Pendidikan. Fundamentalis, konservatif, liberal, anarkis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998, hal. vii-viii.

mesin industri telah turut mengubah cara berpikir dan optimisme manusia di jaman Pencerahan. Sampai dengan hari ini, “mimpi” Francis Bacon tentang peradaban yang ditandai oleh kemajuan ilmu pengetahuan, kecanggihan teknologi, dan produk-produk modernitas masih menjadi bagian dari euforia jaman ini. Sampai dengan awal abad ke 20, euforia sains sebagai dominan ilmu-ilmu pengetahuan amat terasa.²² Dominasi itu dirasakan terutama dalam pengaruhnya terhadap metode atau pendekatan ilmu-ilmu terhadap realitas, termasuk ilmu-ilmu humaniora. Ilmu-ilmu tentang manusia “dikuasai” oleh metode ilmu-ilmu pasti dan ilmu alam. Maksudnya, pendekatan terhadap realitas dunia manusia dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kemanusiaan, dipengaruhi oleh metode dan asumsi-asumsi ilmiah yang tentu saja bersifat empiris, ilmiah, kalkulatif-kuantitatif, dan observasional. Cara pandang dan penilaian terhadap manusia pun menjadi sangat kuantitatif, empiris, dan observasional. Manusia seakan-akan bisa diperlakukan sebagai obyek ilmu pengetahuan.²³ Ada krisis terhadap ilmu-ilmu kemanusiaan (humaniora) ketika terjadi hegemoni metode ilmiah dalam ilmu-ilmu pasti dan ilmu alam di

²² Bdk. Stumpf, Samuel Enoch and James Fieser, *Socrates to Sartre and Beyond. A History of Philosophy*, Seventh Edition, Mc Graw Hill, Boston, 2003, hal. 447-448.

²³ Bdk. *Ibidem*.

dalamnya. Hal ini kita lihat misalnya dalam Positivisme Logis (atau seringkali cukup disebut dengan Positivisme).

Positivisme sendiri sebetulnya mau meneruskan “tradisi” empirisme dengan penekanan pada metode verifikasi. Kata “positif” itu sendiri merujuk kepada arti “faktual”, atau apa saja yang berkaitan dengan fakta-fakta empiris. Dalam positivisme, pengenalan dan pengetahuan harus didasarkan pada pengenalan empiris (inderawi) dan observasional (mengandung proses penelitian dan pengamatan). Fakta selalu dikaitkan dengan fenomena yang bisa diobservasi. Maka yang faktual berarti sekaligus observasional. Setiap pengetahuan baru diakui sebagai ilmu pengetahuan apabila tidak melampaui fakta-fakta empiris (positif). Dengan demikian, dalam proses pencapaian suatu kesimpulan, proses observasi terhadap fakta-fakta empiris harus dijalankan dengan tujuan untuk mem-verifikasi kebenaran yang terkandung di dalam suatu *statement*. Setiap keputusan (*judgment*) dinilai bermakna (*meaningful*) secara objektif apabila bisa diverifikasi ke dalam realitas empiris (inderawi), artinya diuji secara inderawi, dan juga bisa diobservasi secara ilmiah (diamati dan dicermati bagaikan suatu pengembangan metode ilmiah). Sebagai catatan, apabila suatu *statement* tidak bisa diverifikasi dan tidak empiris-observasional, positivisme menyebutnya sebagai

metafisis, dan dengan demikian tidak diterima oleh Positivisme sebagai ilmu pengetahuan.²⁴

Kita sekarang dihadapkan pada pertanyaan kritis: apakah mungkin ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia itu bersifat objektif – murni? Mungkinkah dicapai suatu ilmu pengetahuan yang bebas, tanpa kepentingan dan tanpa nilai-nilai? Bila memang ilmu itu obyektif – murni tanpa nilai dan kepentingan, lantas untuk tujuan apakah ilmu pengetahuan itu? Pertanyaan ini semacam tuntutan pertanggungjawaban ilmu-ilmu di hadapan realitas kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan alam dan ilmu-ilmu sosial memang pada dasarnya harus rasional. Tetapi tuntutan rasionalitas ilmu dan cita-cita obyektivitas – murni ilmu itu berbeda.

Rasionalitas ilmu berarti bahwa ilmu-ilmu harus mampu mempertanggungjawabkan pendirian dan argumentasinya berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, dengan tantangan dan serangan argumentatif,

²⁴ Dengan demikian juga menjadi jelas bahwa metafisika sebagai cabang filsafat yang setua filsafat itu sendiri ditolak, karena metafisika tidak mendasarkan refleksi ilmiahnya pada fakta-fakta empiris, melainkan pada pendasaran teoretis-spekulatif-rasional. Bahwa positivisme menolak metafisika itu sudah bersifat definitif. Bdk. *The Cambridge Dictionary of Philosophy. Second Edition*, Robert Audi (General Auditor), Cambridge University Press, Cambridge, 199, hal. 514. Juga F. Budi Hardiman, *Filsafat Modern. Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal. 204-205.

sangkalan dan bantahan.²⁵ Rasionalitas berarti mengandung dimensi ke-masuk-akal-an. Tuntutan rasionalitas ilmu berarti bahwa ilmu-ilmu harus bisa dipertanggungjawabkan berhadapan dengan realitas hidup manusia. Sebab, dimensi ke-masuk-akal-an ilmu berarti bahwa ilmu bisa dipertanggungjawabkan berhadapan dengan realitas hidup manusia. Harapannya adalah bahwa ilmu dan seperangkat metode yang dimilikinya itu mampu membawa kita sedekat mungkin dengan kebenaran dalam realitas hidup konkret manusia. Tuntutan rasionalitas juga berarti tuntutan agar ilmu-ilmu juga disikapi dengan kritis. Mengapa keabsahan ilmu juga perlu disikapi dengan kritis? Sebab bukannya tidak mungkin bahwa ilmu-ilmu pengetahuan yang diajarkan “ditanggunggi” oleh kepentingan-kepentingan politik kekuasaan sempit dan sektarian. Ilmu-ilmu bukannya tidak mungkin menjadi “senjata” kekuasaan untuk menjinakkan, meninabobokan, atau menggiring kepada kesadaran palsu. Jadi tuntutan rasionalitas ilmu berarti tuntutan untuk bersikap kritis terhadap ilmu.

Mengapa ilmu harus rasional? Dengan kata lain, mengapa kita harus menyikapi ilmu dengan kritis? Sebab

²⁵ Bdk. Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat. Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 21

tidak ada ilmu yang bebas nilai dan kepentingan. Setiap penetapan dan penerapan metode suatu ilmu dengan sendirinya sudah mengimplikasikan nilai atau kepentingan yang mendasarinya, yang berada di baliknya. Seorang peneliti, misalnya, sebelum memulai penelitian, dia harus sudah menetapkan metode apa yang akan dipakainya yang mengarahkan kepada tujuan penelitiannya. Tujuan menjadi kepentingan di balik penetapan suatu metode penelitian.²⁶ Nah, sikap kritis berarti mempertanyakan kepentingan dan nilai-nilai yang berada di balik pengajaran dan penguasaan ilmu-ilmu.

Mengatakan bahwa setiap ilmu harus rasional (tuntutan rasionalitas ilmu) berbeda dengan mengatakan bahwa setiap ilmu harus rasionalistik. Kalau tuntutan rasionalitas ilmu berarti bahwa ilmu-ilmu harus bisa dipertanggungjawabkan kepentingan, tujuan, dan nilai-nilainya berhadapan dengan realitas hidup manusia, sementara itu, tuntutan bahwa ilmu harus rasionalistik sama saja dengan menuntut bahwa setiap ilmu harus bersifat obyektif-murni. Rasionalistik berarti bahwa apa-apa harus didasarkan pada fakta obyektif benar. Bila sesuatu secara faktual-obyektif benar, baru kita percayai sebagai benar.

²⁶ Bdk. *Ibidem*, hal. 155.

Rasional dan rasionalistik itu berbeda.²⁷ Dalam arti tertentu, tuntutan dalam pandangan ke dua ini (yang rasionalistik) bersifat *non sense*. Karena, dalam kenyataannya, kita tidak pernah menunggu sampai pengetahuan kita lengkap dan sempurna lebih dulu sebelum kita menjalani hidup. Cukup sering kita berangkat dengan asumsi dengan tingkat probabilitas tertentu yang membuat kita merasa sudah cukup untuk mengambil suatu keputusan. Kita tidak menunggu sampai ada kepastian pengetahuan kita yang seratus persen obyektif murni terhadap sesuatu untuk mengambil keputusan. Misalnya, kita tidak perlu menunggu pengetahuan kita tentang ilmu mekanik dan otomotif sudah lengkap dan sempurna untuk mulai menyetir mobil. Mungkin bagi kita sudah cukup kalau kita tahu bagaimana mengecek BBM, aki mobil, air radiator, dan oli mesin, serta bagaimana mulai menyalakan mesin. Kalau setiap kali kita menuntut kepastian obyektif seratus persen murni terhadap pengetahuan kita, maka kita akan menjadi orang yang paranoid. Kita akan melihat segala sesuatu mengandung risiko membahayakan atau melukai diri kita kalau kita tidak

²⁷ Masalah pembedaan antara yang rasional dan yang rasionalistik dalam ilmu pengetahuan diinspirasi dan diangkat dari pembedaan pendekatan terhadap teologi dalam: Franz Magnis-Suseno, *Pijar-pijar Filsafat. Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 2005, hal. 19-21.

memiliki pengetahuan yang lengkap tentangnya. Kemampuan hati nurani dan akal budi untuk membuat pertimbangan dan pilihan juga hancur kalau setiap kali kita harus mengetahui segala sesuatu dari nol demi mendapatkan pengetahuan yang seratus persen obyektif-murni.

Dalam praktek dan kenyataannya, kadang-kadang kita merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang bersifat masih samar-samar dan belum sempurna, namun sudah berada dalam tingkat probabilitas tertentu.²⁸ Lalu, apa artinya? Artinya, suatu ilmu kita kuasai karena kita pilih (preferensial) dan kita kehendaki dengan maksud tertentu (intensional). Bahwa manusia memilih untuk menguasai suatu ilmu karena kebutuhannya, melihat dimensi manfaat di dalamnya. Jadi selain bersifat preferensial, intensional, dan fungsional, ilmu juga bersifat eksistensial bagi manusia. Jadi pilihan untuk penguasaan sebuah ilmu tidak pernah lepas dari sosok eksistensi manusianya. Ilmu ada demi manusia. Ilmu pengetahuan yang dicita-citakan oleh Francis Bacon sebagai ilmu pengetahuan obyektif-murni bebas nilai dan kepentingan itu *non sense* ketika menihilkan kepentingan eksistensial manusia. Ilmu demi ilmu itu impersonal. Ketika suatu ilmu demi ilmu, selalu ada risiko ilmu menjadi alat kekuasaan, alat penguasaan dan eksploitasi dari si kuat

²⁸ Bdk. Emanuel Prasetyono, *Op.Cit.*, hal. 36.

terhadap si lemah, menyesatkan dan membangun kesadaran palsu. Ilmu yang berada di tangan penguasa yang jahat, lalim, dan kejam, diibaratkan seperti pistol yang berada di tangan seekor kera (yang tidak paham sama sekali akan bahayanya pistol yang meletus dan membunuh).

Jadi, ilmu mesti demi manusia dan oleh manusia. Maka dengan ini ditegaskan superioritas manusia dan nilai kemanusiaannya atas suatu ilmu.

KEBUTUHAN AKAN PEMAHAMAN DIRI MANUSIA YANG OTENTIK

Manusia adalah sosok yang kompleks dan dinamis. Dinamika manusia inilah yang melahirkan ilmu. Kalau dikatakan bahwa ilmu harus personal, pertama-tama hal itu mau mengatakan bahwa ilmu dan penguasaan atasnya harus menyentuh sisi-sisi keunikan kepribadian manusia. Personalitas mengacu pada kepribadian dan keunikan sebagai pribadi. Di sisi lain, ilmu harus mengabdikan dirinya bagi nilai kemanusiaan yang bersifat universal. Secara praktis, ilmu harus mengabdikan pada kesejahteraan hidup manusia.

Pertanyaan kita: apakah personalitas manusia itu? Seberapa pentingkah pemahaman tentang personalitas manusia sampai ilmu harus personal dan mengabdikan pada nilai kemanusiaan universal? Seberapa pentingkah sampai diskursus tentang ilmu juga harus menyertakan di dalam dirinya diskursus tentang kemanusiaan dan personalitas?

1. Manusia sebagai *Person* (Pribadi)

Dimensi manusia itu amat beragam. Dari dimensi jasmaniahnya, manusia bergerak dan beraktivitas dalam ruang dan waktu. Manusia bisa diraba, *visible*, dan diperlakukan seperti obyek-obyek yang materiil yang memenuhi ruang dan waktu di muka bumi ini. Adalah tubuh yang membuat manusia memiliki dimensi jasmaniah ini. Tubuh manusia memungkinkannya berkontak dan berelasi dengan dunia sekitarnya. Dengan tubuhnya, manusia terhitung di antara manusia-manusia lainnya. Dengan tubuhnya, manusia berada di antara manusia-manusia lainnya. Tetapi tubuh manusia tidak sama dengan benda-benda atau obyek-obyek materiil lainnya. Berhadapan dengan obyek-obyek materiil lainnya, tubuh manusia adalah tubuh organis dan biologis (mengandung organ-organ yang hidup). Dalam hal ini, tubuh manusia memiliki kesamaan

dengan tubuh binatang dan tumbuhan, yaitu kesamaan dalam hal unsur-unsur organis, biologis, dan kimiawi. Tetapi tubuh manusia bukan hanya tubuh yang bersifat organis, biologis, dan kimiawi. Tubuh manusia juga bersifat individual. Sebagai individu, tubuh manusia adalah tubuh manusia. Artinya, nilai kemanusiaan itu membuat tubuh manusia berharga sebagai tubuh manusia. Sebagai individu, tubuh manusia membuat manusia bisa terhitung di antara individu-individu lainnya.

Individualitas manusia memungkinkannya memiliki identitas dan terhitung di antara individu-individu lainnya. Individualitas memungkinkan manusia bisa diidentifikasi di antara individu-individu lainnya. Ada beragam bentuk identifikasi yang menyatakan diri (individu) seseorang: penomoran atau kodefikasi, pencirian warna dan bentuk, penamaan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, kita memiliki kartu tanda penduduk atau kartu identitas yang memberi kita identitas individu yang terhitung di antara identitas individu lainnya. Individualitas membuat kita bisa dikenali dan diperhitungkan sebagai salah satu di antara lainnya, diakui dan diterima. Tanpa pengakuan dan penerimaan atas individualitas, seseorang tidak termasuk dalam hitungan, terasing, anonim, kehilangan identitas.

Tetapi manusia bukan hanya sosok individual. Manusia juga adalah personal, memiliki kepribadian dan sekaligus mempribadi. Kalau manusia hanya sosok individual, maka manusia hanya cukup dicirikan dan diidentifikasi berdasarkan kodefikasi atau penomoran. Sebagai contoh, dalam kekejaman selama masa Perang Dunia ke 2, para tahanan tidak diperkenankan menyebut namanya. Mereka hanya boleh menyebut nomor kode identitas dirinya. Setiap kali mereka menyebut namanya sendiri, mereka disiksa atau dipukuli. Dengan demikian, nama yang menyatakan kesejarahan, martabat, dan personalitas dihapus dan identitas manusia hanya sejauh nomornya. Demikian juga dalam kasus penemuan mayat yang tidak dikenali identitasnya, biasanya lantas diberi kode atau pencirian tertentu agar bisa dikenali. Identifikasi yang menyatakan individualitas membuat manusia bisa dikenali. Tetapi manusia bukan hanya individualitasnya. Manusia adalah juga personalitasnya.²⁹ Bagaimana memahami hal ini?

Personalitas adalah kekhasan dari manusia yang hidup. Personalitas mengatakan otonomi, keunikan, dan

²⁹ Pembedaan yang lebih detail dan lengkap tentang individualitas dan personalitas manusia sebagai dualitas dalam kesatuan, bisa dibaca dalam: Adelbert Snijders, OFM Cap., *Antropologi Filsafat Manusia. Paradoks dan Seruan*, Kanisius, Yogyakarta, 2004, hal. 91-92.

kepribadian. Personalitas berasal dari kata *person*, *persona*. Kata *person* menunjuk kepada diri manusia sebagai *self*, diri yang hadir dan terlibat lewat otonomi, keunikan, kekhasan, dan kepribadian. Sebagai *self* atau diri, manusia itu utuh tak terbagi, tidak bisa sekedar dihitung sebagai salah satu di antara yang lainnya sebagaimana dalam individualitas. Personalitas manusia bukanlah predikat yang ditambahkan atau diberikan oleh sesuatu atau seseorang di luar dirinya. Personalitas sudah terkandung di dalam kemanusiaan itu sendiri. Personalitas membuat kemanusiaan itu unik dan berkepribadian. Oleh karena itu, personalitas mendatangkan martabat dan menuntut kewajiban penghargaan atas setiap orang sebagai pribadi yang unik dan personal. Pandangan ini melawan segala bentuk penindasan, hegemoni, dan kekuasaan dari satu pribadi atas pribadi lainnya. Juga melawan segala bentuk *human trafficking* atau perdagangan manusia. Juga melawan segala bentuk *brain washing* atas pribadi manusia lewat segala bentuk kodifikasi (seperti dalam kasus para budak dan tahanan perang). Personalitas bukanlah identifikasi yang diberikan atau dibuat oleh sesuatu di luar dirinya sebagaimana dalam individualitas. Dengan personalitasnya, manusia hadir sebagai dirinya, pribadinya, dan otonominya. Inilah sebabnya mengapa individualitas saja tidak cukup untuk mengatakan keutuhan sosok manusia.

Dari mana kita memahami bahwa manusia adalah *person*? Dari mana pemahaman tentang personalitas manusia ini didapat? Apa dasar-alasan personalitas manusia? Dasar alasannya adalah dimensi kesadaran diri dan kenyataan manusia yang bukan sekedar “ada”, tetapi sekaligus juga “mengada”.

Self atau diri bagi manusia sejatinya adalah kesadaran dirinya (*self-awareness*). Kesadaran diri memungkinkan manusia untuk hadir di dalam dan bagi dirinya, sebagai dirinya. Kesadaran diri menghantar kepada kehadiran diri. Itulah yang disebut dengan *self-existence*. Dengan kehadiran diri, maka manusia sanggup “menjaga jarak” dengan obyek-obyek dunianya. Manusia mampu membuat refleksi diri dan menyadari diri. Manusia mampu berabstraksi, membuat konsep-konsep, berimajinasi, menyadari kesejarahan dirinya dan kenyataan dirinya dalam rangkaian sejarah tersebut. Kesadaran diri dengan demikian bagi manusia bisa digambarkan sebagai sebuah “gerak ke dalam diri”, menyadari kenyataan diri. Kesadaran diri yang menghantar kepada kehadiran diri melibatkan keseluruhan daya manusiawi, rasionalitasnya, intelektualitasnya, jiwanya, kehendaknya, harapan-harapannya, komitmennya, dan lain sebagainya. Kesadaran diri dan kehadiran diri pada gilirannya mengatakan otonomi manusia. Berkat

personalitasnya, manusia adalah sosok yang otonom. Sebaliknya, otonomi menjadikan manusia sebagai dirinya, yang sadar dan hadir bagi dirinya. Sekarang kita telah mendapatkan beberapa karakter yang mencirikan personalitas manusia: yaitu, kesadaran diri, kehadiran diri, dan otonomi diri.

Pertanyaan kita sekarang: bagaimana kesadaran diri, kehadiran diri, dan otonomi diri bisa dihayati dalam kehidupan manusia? Bukankah manusia dalam hidupnya selalu terikat oleh kehadiran orang lain? Bukankah manusia tidak pernah sungguh-sungguh bisa menjadi dirinya sendiri dan hadir bagi dirinya sendiri kalau dalam kenyataannya dia hidup bersama dengan orang lain? Bagaimana memahami personalitas dalam konteks sosialitas ini?

Pertama-tama yang harus ditegaskan adalah bahwa agar kesadaran diri, kehadiran diri, dan otonomi diri bisa dicapai harus ada ruang kebebasan yang cukup. “Menjadi diri” yang sejati dan otentik membutuhkan ruang kebebasan yang cukup. Kebebasan itu disebut dengan kebebasan eksistensial. Kebebasan itu memberi ruang bagi eksistensi manusia untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk tumbuh dan berkembang. Kalau misalnya seseorang setiap kali dihina dan dilecehkan apabila mengekspresikan dan mengaktualisasikan dirinya, yang terjadi adalah bahwa orang

tersebut bisa kehilangan ruang kebebasan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan rasional dan pilihan-pilihan bagi hidupnya. Seorang anak yang dididik dalam kekerasan fisik dan pelecehan demi pelecehan atas otonominya, akan bertumbuh dalam kesulitan pribadi dan ketakutan akan kesadaran diri. Setiap kesadaran diri yang muncul selalu ditekan karena hal itu menimbulkan trauma “pukulan atau siksaan”. Dia mengalami hambatan besar dalam bertumbuh menjadi dirinya yang otentik, yang sejati. Dia mengalami trauma untuk hadir bagi dirinya sendiri, karena setiap usaha kehadiran bagi dirinya sendiri di masa lalu menimbulkan trauma yang sangat besar. Inilah yang disebut dengan pencabutan kebebasan eksistensial yang menghambat pertumbuhan personalitas seseorang. Ruang kebebasan eksistensial bersifat tak terelakkan (*inevitable*) dalam diskursus tentang personalitas manusia.

Setiap diskursus tentang kebebasan juga harus selalu diiringi dengan diskursus tentang tanggung jawab. “Menjadi diri” yang otentik adalah wujud atau bentuk tanggung jawab terhadap ruang kebebasan eksistensial yang dimiliki. Setiap orang tidak cukup hanya sekedar “ada”. Manusia sebagai *person* juga “mengada”. Menjadi diri yang sejati dan otentik bagi manusia adalah panggilan dan tanggung jawab hidupnya. Dalam bentuk konkretnya, “mengada” bisa

dimaknai sebagai aktualisasi diri, *self-formation*, pengembangan dan pertumbuhan diri. Maka personalitas bagi manusia bukan sebuah status yang *mandbeg*, melainkan suatu bentuk pertumbuhan, perkembangan. Personalitas menunjuk kepada keterbukaan manusia untuk semakin menyempurnakan dirinya sebagai manusia. Di sinilah kata aktualisasi diri dan ekspresi diri itu bermakna. Mengaktualisasikan diri dalam membangun personalitas manusia dengan demikian bukan sebuah *statement* kosong atau slogan indah, melainkan sebuah tanggung jawab untuk dilaksanakan dengan komitmen, sebagaimana menjadi diri yang sejati dan otentik adalah sebuah panggilan hidup manusia.

Personalitas bagi manusia bukan hanya kodrat yang mendatangkan martabat bagi kemanusiaannya. Personalitas dalam kesadaran diri, kehadiran diri, dan otonomi diri membuat manusia memiliki karakter, “berwajah”, eksistensial, dan memiliki integritas. Personalitas membuat individualitas memiliki bentuknya, wajahnya, karakternya. Sebaliknya, individualitas membuat personalitas bisa dikenali, dipahami, dikomunikasikan.

2. Paradoks Personalitas dan Sosialitas (Komunitas)

Paradoks yang terjadi dalam hidup manusia adalah bahwa personalitas manusia memperkuat sosialitasnya. Sebaliknya, sosialitas manusia akan menemukan bentuknya yang otentik kalau personalitas seseorang sudah menemukan kematangan dan kedewasaannya. Paradoks ini sekaligus juga mengandaikan kodrat manusia sebagai makhluk personal dan sekaligus sosial, dan sebaliknya sebagai makhluk sosial sekaligus personal.³⁰

Paradoks ini di satu sisi mengasumsikan bahwa personalitas tidak membuat seseorang hidup dengan dirinya sendiri. Adalah sesuatu yang bersifat paradoksal bahwa aktualisasi diri seseorang sebagai pribadi justru ditemukan ketika dia “keluar dari dirinya sendiri” dan berjumpa dengan *persons* lainnya. Aktualisasi diri yang sejati ditemukan dalam sosialisasi dengan pribadi lain. Seseorang yang paranoid atau mengalami sakit mental tertentu, akan mengalami hambatan dalam sosialisasinya dengan pribadi lain. Rendahnya

³⁰ Sebagai sebuah paradoks, personalitas dan sosialitas adalah dua sisi (dimensi) dari satu realitas yang sama. Kehadiran salah satu sisi menyatakan kehadiran dari sisi yang lain, demikian pula sebaliknya. Refleksi tentang paradoks personalitas dan sosialitas bisa dibaca secara lebih detail dalam: Emanuel Prasetyono, *Dunia Manusia Manusia Mendunia*, Zifatama Publishing dan Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2013, hal. 120-124.

gambaran diri dan ketidakmampuan untuk hidup dalam jati diri yang otentik juga mempersulit perjumpaan dan relasi dengan orang lain. Hal itu kita temukan di dalam sebuah situasi yang saling mengeksploitasi, memanipulasi, dan “memakan” (mirip dengan gambaran *homo homini lupus* dalam Leviathan karya Thomas Hobbes). Ironisnya, pranata hidup bermasyarakat dalam bentuk norma-norma legal justru seringkali berada di tangan para pejabat publik yang tidak peduli dengan pertumbuhan dan perkembangan personalitas manusia. Akibatnya tentu pada kacaunya kehidupan bermasyarakat secara etis dan manusiawi. Sebaliknya, orang-orang yang matang dan dewasa akan lebih mudah membangun komunikasi dan berelasi secara sehat dengan orang lain. Orang-orang ini memiliki gambaran diri yang sehat dan jati diri yang otentik. Berhadapan, berjumpa, dan berelasi dengan orang semacam ini membuat kita merasa menjadi diri kita sendiri, bertumbuh dalam komunikasi, dan tidak takut mengekspresikan pemikiran-pemikiran yang positif.

Sisi lain dari paradoks ini mengasumsikan bahwa sosialitas yang otentik tidak pernah menghabiskan (*exhausting*) atau menghancurkan personalitas seseorang yang hidup di dalamnya. Kehidupan komunitas atau pola kekerabatan yang otentik justru membuat pribadi-pribadi

yang hidup di dalamnya menemukan pemenuhan atas ekspektasi-ekspektasinya. Relasi dalam komunitas semacam ini adalah *reciprocal relationship*. Ada unsur timbal balik yang sepadan, komunikasi yang timbal balik. Bisa disebut juga dengan *interpersonal relationship*, relasi interpersonal, relasi yang terjadi di antara *persons*. Relasi semacam ini seperti yang digambarkan oleh Gabriel Marcel (1889-1973) sebagai relasi dalam tahap kehadiran.

Dalam kacamata relasi kehadiran menurut Gabriel Marcel, kalau orang-orang yang saling berelasi dan berkomunikasi hadir satu sama lain, itu berarti ada dialog, komunikasi timbal balik, dan kesadaran akan eksistensi masing-masing. Ada kesaling-terarahan satu sama lain. Kehadiran adalah jalan menuju komunikasi diri satu sama lain. Kalau orang-orang yang saling berkomunikasi dan berelasi itu hadir satu sama lain, maka mereka tidak hanya menyampaikan gagasan atau ide saja, tetapi juga mengkomunikasikan diri; lebih jauh, mengkomunikasikan eksistensi dirinya satu sama lain. Jadi, kehadiran mengandaikan dua orang yang saling “mengarahkan diri satu kepada yang lain dengan cara yang sama sekali berlainan dengan cara mereka menghadapi obyek-obyek.”³¹ Dalam

³¹ Lih. K. Bertens, *Perancis. Filsafat Barat Kontemporer*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal. 84.

relasi interpersonal di mana orang-orang hadir satu sama lain, “aku justru menemukan diriku-yang lain di dalam dirimu. Sebagaimana aku menemukan diriku-yang lain di dalam dirimu, aku juga menemukan dirimu-yang lain di dalam diriku”.³² Menurut Gabriel Marcel, kehadiran tertinggi dicapai ketika orang-orang yang berelasi dan berkomunikasi itu saling mencintai. Cinta adalah wujud kehadiran tertinggi. “Di dalam pribadi-pribadi yang saling mencintai, semangat *altruistic* dan solidaritas tumbuh subur.”³³ Sebab ada keterbukaan yang personal satu sama lain.

TANTANGAN JAMAN INI

1. Sebuah Tantangan di Jaman Ini: Sikap Pragmatis dan Mentalitas *Instant*

Jaman ini ditandai oleh sikap pragmatis dan kecenderungan meraih segala sesuatu dengan cara-cara yang *instant*. Kebangkitan kesadaran manusia yang menjadi tanda fenomenal jaman Pencerahan serta kejayaan ilmu-ilmu pengetahuan yang dimulai pada jaman tersebut justru menghantar jaman ini pada mentalitas manusia yang mau

³² Lih. Emanuel Prasetyono, *Op.Cit.*, hal. 126.

³³ *Ibidem*.

serba mapan dan nyaman dalam waktu cepat. Orang menuntut proses pendidikan dan pembelajaran yang cepat, murah, dan praktis. Belajar sekali, sesudah itu sukses dan mapan, dengan cara apa pun. Sering pula muncul ungkapan sarkatis sebagai bentuk parodi atas gaya hidup saat ini: “muda foya-foya, tua kaya-raja, mati masuk surga”. Itu adalah salah satu fenomena dari sikap serba pragmatis dan mentalitas *instant*. Sikap serba pragmatis tidak mepedulikan visi jangka panjang karena yang diinginkan adalah hasil atau produk yang langsung menampilkan wujudnya atau buktinya. Tanpa sadar, orang digiring menjadi melulu konsumen dan penikmat dari hasil-hasil produksi. Orang menjadikan dirinya obyek dari sebuah jaman. Setiap orang dipandang melulu sebagai “produk” dari jamannya (dalam kacamata ekstrem: “korban” jamannya). Adalah sebuah ironi ketika orang menghidupi dan menikmati “buah-buah” dari jaman kebangkitan kesadaran manusia tetapi dalam ketidaksadaran.

Sikap ini tentu bermasalah ketika dihadapkan pada sosok manusia sebagai pribadi, misteri, dan paradoks. Sebab proses pertumbuhan personalitas dan aktualisasi diri manusia jelas tidak bisa dipahami dalam kerangka-kerangka yang bersifat pragmatis dan *instant*. Pendidikan dan pembelajaran bagi manusia bukan dalam kerangka

pragmatis, melainkan visioner. Mentalitas *instant* juga bermasalah karena selalu mau sebisa mungkin mempercepat dan mempersingkat proses pembelajaran dan pendidikan manusia. Pendidikan dan pembelajaran manusia diperlakukan seperti telepon seluler pintar (*smartphone*), atau computer yang sekali di-*install* langsung mampu menjalankan program-program yang sudah di-setting. Manusia diperlakukan layaknya produk-produk yang cepat memberikan kepuasan.

Yang langsung menjadi “korban” dari sikap pragmatis dan mentalitas *instant* dalam dunia pendidikan dan pembelajaran manusia tentulah nilai. Nilai-nilai yang berorientasi pada kemanusiaan universal, moral-etis, dan budaya dikaburkan dalam sebuah sistem pendidikan dan pembelajaran yang melulu berorientasi pada hasil yang cepat, murah, dan mudah. Produk dari sebuah sistem pendidikan yang bersifat pragmatis dan *instant* amat berisiko kehilangan kepekaan pada nilai-nilai dalam hidupnya. Padahal, yang membuat manusia bertumbuh sebagai pribadi personal dan dewasa adalah ketika seseorang mampu digerakkan dan dimotivasi oleh nilai-nilai.

Dalam konteks pendidikan, semakin disadari bahwa sikap pragmatis dan mentalitas serba *instant* memang telah merasuk ke dalam dunia pendidikan. Banyak orang *jengah*

dan tersadar ketika, misalnya, seseorang yang dianggap sebagai tokoh publik dan akademisi berlatar belakang pendidikan tinggi ternyata tidak luput dari godaan melakukan korupsi dan manipulasi; ketika pendidikan tinggi tidak selalu sejalan dengan integritas pribadi. Orang juga tentu prihatin dengan maraknya kultur kekerasan di antara pelajar dan kaum muda, yang menggambarkan bahwa generasi jaman ini sudah turut “mengidap penyakit” mentalitas *instant* dan pragmatis. Tawuran antar pelajar membuktikan bahwa kekerasan terus membentuk pola-pola dalam benak manusia dalam mencari solusi setiap permasalahan, termasuk di antara orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan, karena dianggap efektif memecahkan masalah. Segala bentuk mentalitas *instant* dan pragmatis memang mencari segala cara untuk mendapatkan hasil yang cepat, produktif, cari gampang dan murah, asalkan semuanya bisa memuaskan.

Masyarakat menjadi “sakit” ketika personalitas dan nilai-nilai kemanusiaan universal dielakkan dari praktek-praktek kehidupan sehari-hari; ketika visi kemanusiaan dianggap idealis dan tidak laku lagi; ketika dengan gampang orang mengatakan bahwa yang luhur, mulia, dan bermartabat dianggap tidak *gaul* lagi; ketika yang *trendy* dan yang *gaul* dianggap wajar dan sah-sah saja. Masyarakat

menjadi “sakit” ketika perkosaan dan pelecehan seksual terhadap kaum perempuan dan anak-anak dipakai sebagai bahan *guyonan*; ketika kekerasan sudah terpola dan dianggap sebagai solusi efektif pemecahan masalah; ketika seorang terdidik, terpelajar, dan berlatar belakang akademis tidak merasakan perlunya kesejajaran (kesesuaian) antara ilmu yang digelutinya dan integritas pribadinya.

Tantangan bagi generasi jaman ini cukup besar. Tetapi itu sekaligus menandakan bahwa panggilan dan tanggung jawab kita sebagai manusia yang bertumbuh dalam jati diri otentik dan personalitas semakin mendesak untuk dipahami, dihayati, dan dipraktekkan.

2. Sebuah Tawaran Sikap

Menjadi manusia dengan jati diri yang otentik adalah suatu panggilan, terlebih panggilan bagi para guru dan pembelajar. Menjadi guru dan pembelajar pertama-tama adalah mengenal dirinya sendiri, memahami diri, dan berkembang sebagai *person*. Berkembang menjadi *person* berarti menjadi pribadi yang *genuine*, otentik, tidak gampang terseret oleh arus berpikir masif yang *mainstream*, berani

berbeda bukan demi berbeda, namun perbedaan dalam arti meraih jati diri yang otentik.³⁴

Kalau hal ini menjadi sikap dari seorang guru dan pembelajar, maka personalitas dan nilai kemanusiaan sudah menjadi bagian dari visi pembelajaran dan *self-formation* sehari-hari. Ketika visi sudah menjadi penuntun dari setiap gerak langkah praktis dalam keseharian, dikatakan bahwa seseorang memiliki *habitus* sebagai guru dan pembelajar. Setiap gerak langkah, ucapan dan ungkapan, pandangan dan pengamatan, pertimbangan, pilihan, dan keputusan, sudah dengan sendirinya diarahkan oleh orientasi yang tetap: personalitas yang menunjuk kepada keunikan pribadi dan nilai kemanusiaan yang bersifat universal.

³⁴ Jati diri yang otentik dilawankan dengan pribadi yang manipulatif, koruptif, eksploitatif, dan penuh dengan kamufase. Jati diri yang otentik sepadan dengan pribadi yang *genuine*, bebas, dan bertanggung jawab. Jati diri yang otentik adalah wujud dari pribadi berkarakter, yang personal, dan dewasa.

DAFTAR ACUAN

1. Abbagnano, Nicola, *Dizionario di Filosofia di Nicola Abbagnano*, terza edizione aggiornata ed ampliata da Giovanni Fornero, UTET, Libreria, Torino, 1998.
2. Aristotle, *Nicomachean Ethics*, dalam: *The Basic Works of Aristotle* edited by Rhicard Mc Keon, The Modern Library, New York, 2011.
3. Audi, Robert (General Auditor), *The Cambridge Dictionary of Philosophy. Second Edition*, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
4. Bertens, K., *Perancis. Filsafat Barat Kontemporer*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006.
5. Budi Hardiman, F., *Filsafat Modern. Dari Machiavelli sampai Nietzsche*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
6. Copleston, Frederick, S.J., *A History of Philosophy, Volume III: Modern Philosophy*, Image Books, Doubleday, New York, 1994.
7. Enoch Stumpf, Samuel, & James Fieser, *Socrates to Sartre and Beyond*, Seventh Edition, Mc Graw Hill, New York, 2003.

8. Freire, Paulo, dkk, *Menggugat Pendidikan. Fundamental, konservatif, liberal, anarkis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
9. Magnis-Suseno, Franz, *Pijar-pijar Filsafat. Dari Gatholoco ke Filsafat Perempuan, dari Adam Müller ke Postmodernisme*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.
10. Petrus L. Tjahjadi, Simon, *Petualangan Intelektual. Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*, Kanisius, Yogyakarta, 2004.
11. Prasetyono, Emanuel, *Dunia Manusia Manusia Mendunia*, Zifatama Publishing dan Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, Surabaya, 2013.
12. Snijders, Adelbert, OFM Cap., *Antropologi Filsafat Manusia. Paradoks dan Seruan*, Kanisius, Yogyakarta, 2004.

BAB 2

EDUCATING HUMAN BEINGS AN OVERVIEW OF PHILOSOPHY OF EDUCATION³⁵

Oleh: Ramon Nadres

This paper was written to form part of the Extension Course series entitled *Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional* [Educating Indonesians and Preparing a Generation of National Leaders], organized by the Faculty of Philosophy of Widya Mandala Catholic University in Surabaya, Indonesia. The goal of the series is to enlighten the students on how Education is so central to coming up with competent and ethical candidates as leaders of the nation in the future.

The class before this one was on the Philosophy of Man. In that previous, class the students were expected to learn who man is, what his purpose in life is and what other

³⁵ Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 11 September 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya. Artikel ini juga pernah dimuat dalam *ARETÉ*, Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, Vol. 02, No. 02, September 2013.

aspects have to be kept in mind when assessing the life of a human being. In this class, we aim to understand that choosing the right education principles is important for the formation of tomorrow's leaders. Philosophy of Education scrutinizes educational philosophies and methods in order to test their authenticity and effectiveness. We shall learn a little about this below with the hope of applying this knowledge in the crafting of the education of a leader.

1. WHAT IS PHILOSOPHY OF EDUCATION?

Philosophy is a way of studying some area of human existence by going to its deeper or deepest principles. For example, Biology is the scientific study of life. Biology starts with the premise that life exists and that we know what we are referring to when we say "life". From this premise, we start scientifically explaining: (a) why living things move (biological kinetics); (b) how they reproduce (reproduction and genetics); (c) where they get their energy (biochemistry and cell biology); (d) how they depend on one another (ecology); etc. This is what the biological sciences are concerned about.

But if we were to study the "Philosophy of Life", we will not be looking into reproduction, genetics, biochemistry, cell biology, ecology, etc. In the "Philosophy

of Life”, we would first ask “what is life?” and then try to answer it.

This is the same with Philosophy of Education. In Philosophy of Education, we are not going to ask how the students have to be taught—that comes later—but we shall rather ask “what is education”? If we can know what education is, then we can distinguish it from all that is non-education or all that is anti-education. Knowing these principles, we can analyse current-day trends in educational theory and methods and see whether they are valid or not. With Philosophy of Education, we can “purify” the educational methods and theories and, in that way, make them more effective and coherent with the aim of education itself.

2. WHAT IS EDUCATION?

The notion of Education stems from premises about man. The first and deepest premise is that he is different from animals. Some biologists might say that the difference is only in the degree of complexity. But from the point of view of education, I would say that the difference is very big and very significant.

The short of it is that, while animals can be trained, people have to be educated. What’s the difference? Training is a matter of making an animal repeat a movement many

times as a response to a certain stimulus. This is to modify basic natural behaviour. For example, an animal is used to relieving itself—defecating or urinating—in whatever place seems instinctively convenient: it could be in any place where there is soil and they can dig a shallow hole that they can cover up with dirt after they have done their necessities. Thus, your pet dog or cat will probably see no problem in relieving itself in your favourite flower plot or on your garden path (where you normally walk!). Since your pet dog or cat live with you, you would like to train it. So you punish it each time it relieves itself on your flower plot or on your garden path and you reward it (with a pat on the back or with some food) if it relieves itself in some special box that you have assigned for it. Animals can be trained to do this. It is a matter of stimulus-response training. This training does not allow the animal to make further conclusions about toilet training on its own because the knowing capabilities of animals are limited.

On the other hand, when it comes to a human being, you certainly need to toilet train children. But toilet training of children is not the same as toilet training of animals. Verbal explanations help a lot in the toilet training of children. When they understand the principle behind this training, they usually are able to apply the same principle to other similar situations and they can link one piece of

information with another until they come up with a coherent adult knowledge and attitude towards hygiene. A human being is educated and not merely trained.

3. HUMAN BEINGS CANNOT SURVIVE WITHOUT EDUCATION

As we observe in nature, almost all animals can survive on their own immediately after they are born. Perhaps, they will need an adult animal around for protection, support and nutrition, but they can already do many basic functions even without training. It is all instinctive.

Take walking, for example. Most animals automatically stand up and take their first strides as soon as they are out of the womb of their mother. This is important because, if they cannot do that, they will probably get eaten by the next predator that comes around.

This does not happen in the case of man. A baby will need its parents around at the moment that it starts to learn how to walk.

Human life is also more complicated than the life of most animals. His brain needs a lot of inputs so that he can survive not only in a wild environment but also in an environment that has been created by the human beings that have gone before him. He is naturally called to live in

such an environment. He is called to form part of cultural milieu, a social context. It is not just a matter of walking around with several adult animals in order to share food and protection with them. There is an entire process of communicative interaction through which the younger human being learns about things that will be useful for him in his efforts to live as a human being.

When an animal learns how to look for its food, to protect itself and to reproduce, then it has already achieved its perfection. With feeding itself, protecting itself and reproducing, it can already be a good lion or a good rabbit or a good dog.

Not so with the human being. The human being is equipped with education in order to reach a “competent stage”, not a “perfect stage”. A human being does not reach his ultimate perfection once he receives all the lessons he can receive from adults. Once he has received lessons from the adults, he is supposed to go on his own and work on his own original and creative perfection. This is the reason why the story of two human beings is never the same. This is why each and every human being has a biography, unlike animals whose species will probably have the same life story for most of the individuals belonging to the same species.

Bringing human beings to the “competent stage” when he can do things on his own and create his own life is done through education.

4. WHAT IS THE COMPETENT STAGE IN EDUCATION?

Looking at what we have discussed so far, most of us will probably generally agree: (1) that human beings need to be educated more than animals; and (2) that the educative process involves the passing on of both concrete and intellectual information, productive skills (*poiesis*) and ethical skills (*praxis*) that can make someone humanly competent.

We can possibly differ in: (a) the content of that information and even debate about which is true and which is false; (b) what skills, whether productive or ethical, will be useful to a human being; and (c) what is the final goal of all of this.

What is true or false, what is useful or not useful, what belongs to the final goal of our human perfection or not is determined by: (1) what we think man essentially is (anthropology); (2) how he is able to learn (how he can be educated) (epistemology); and (3) what it is that makes him a good human being (ethics). In the study of philosophy of education, therefore, there are three things that we have to

determine for ourselves so that we can choose or construct what we think will be an effective method or process of education, that is: (1) our basic anthropological assumptions; (2) our basic epistemological assumptions; and (3) our basic ethical assumptions.

5. SOME EXAMPLES OF PHILOSOPHY OF EDUCATION

5.1. Plato

Plato was a philosopher who lived from around the year 427 to the year 347 before the Christian era. He was the pupil of the revered philosopher Socrates, who often figured as the main character and the life of writings. Most of Plato's works are dialogues: stories of conversations between people wanting to understand more deeply some of the realities of life. Within these dialogues, the reader is able to pick up a solution or two for the problems that life presents, and these become guidelines for future actuation and choice.

5.1.1. Plato's Anthropology and Epistemology

For Plato, man is mainly soul; he is a spirit who has been called to contemplate the eternal spiritual realities which are the type of knowledge that really matters. All

contingent and concrete knowledge that we can gather here on earth is of little use. In order to live a worthwhile life and in order to be happy, in order to return to the eternal, divine life that the soul once had before getting trapped and incarcerated in a body, the human mind has to free itself from the shackles of earthly knowledge in order to soar to the knowledge that is divine, universal and eternal.

Learning, according to Plato, was a matter of remembering what we previously saw as disembodied souls in the *topos uranos*, the heavenly place of the Eternal Ideas. This is what we see Socrates applying to his students in the dialogues written by Plato. Socrates presumed that the knowledge was hidden somewhere in the mind of the his pupils and his role was to draw out this knowledge through dialogue, i.e., through question and answer. Education, for Plato, is a *maieutikos*, like the work of the midwife who helps pregnant women to give birth to their children. The teacher helps his students give birth to ideas that are born from their “pregnant minds”.

The authentic human being (the competent individual) is a philosopher. The philosopher knows spiritual knowledge. He understands what Truth, Beauty and Justice are. He is able to contemplate these realities and have them incarnated in the world today.

5.1.2. Plato's Ethics

Plato tended to roll speculative knowledge and practical knowledge (ethics) together into one single body of knowledge: philosophy. The philosopher is not only an intelligent and wise person, he is also a good person. In modern day parlance, we could say that Plato thinks that the philosopher should be a sage and a saint at the same time. Wisdom is not only the ability to explain things, it is also the ability to do good. As one might surmise, Plato thinks that the philosopher gets the correct ethical norms by contemplating or remembering the Eternal (ethical) Ideas such as Justice and Goodness.

5.1.3. The Leader and his Education according to Plato

For Plato, the competent human being—and, therefore, the competent leader—is a philosopher. One of Plato's life projects was to test his hypothesis about the philosopher-king: he went on several trips to Syracuse in order to educate a philosopher-king. However, this did not work out as he would have wished.³⁶

³⁶ COPLESTON, Frederick, *A History of Philosophy, Volume I: Greece and Rome*, Doubleday, New York, 1993, pp. 131-132.

For Plato, therefore, the leader of the nation had to study Geometry and the arts. He needed to learn how to contemplate Beauty, Justice and Goodness. The leader had to be a good and just person. He must be able to judge concrete cases correctly. Given the structure of society Plato proposes, with the soldiers occupying a specific caste and function, the philosopher-king probably does not need to know much about military science since the soldier class can take care of this detail. The leader, therefore, is meant for higher knowledge.

5.2. Al-Ghazzali

Muhammed Ibn Muhammad Ibn Ahmed, Abu Hamid Al-Tusi Al-Ghazzali (or Al-Ghazzalli) Al-shafi was born in 1058 at Tus in Khursan near the modern Meshed in Iran. He was an expert of Islamic law and jurisprudence, an outstanding theologian, a philosopher, a mystic and a religious reformer. He died in Baghdad in the year 1111.

5.2.1. Al-Ghazzali's Epistemology

It is not easy to pin down the real intention of Al-Ghazzali in his philosophy. It seems true that he was a sincere searcher for the truth and that he confidently used his intellect in order to find it. The truth he found, however,

was this: religious truth is always correct. He did not see the need to harmonize religious truth with scientific truth. If scientific truth seems to contradict religious truth, this would be because they belong to two different realms that do not intersect. They simply do not meet, and there is no need to harmonize them. Thus, a believer can perfectly hold a religious truth even though it may seem to contradict scientific truth. Religious truth is far beyond the ability of the intellect to analyze, so it is impossible to test religious truth by using scientific truth.

5.2.2. Al-Ghazzali's Anthropology and Ethics

Man is God's creature and is completely subordinate to Him. We are subject to His Mercy and Power. In his anthropology, Al-Ghazzali follows Islamic tradition and, to his mind, the purpose of man is to submit himself completely to the will of the Creator. This absolute submission also applies, as we can see above, to his epistemology: God's knowledge is greater and man has no right to test God's word against human knowledge.

5.2.3. The Leader and his Education according to Al-Ghazzali

What effect does this have on the system or method of education? If we use Al-Ghazzali's principle, religious

education can be considered enough for a person to become a “competent human being”. Science will have to take second place. This may be the reason why one of the solutions given to improve the education given in Indonesia is to increase the amount of time for religious education while decreasing the time for science³⁷. Within Al-Ghazzali’s epistemological scheme, this is perfectly logical.

A leader of the nation schooled in this system will probably reason issues according to a pattern similar to the above. He will put the religious and moral education of the people before their scientific and technical training.

5.3. Karl Marx

Karl Marx was born in Trier, Germany, in 1818. He was very intelligent even as a child and ended up studying law in Bonn and Berlin. To obtain his doctorate in

³⁷ ARITONANG, Margareth S., “New curriculum to focus on religion, civics and history”, *The Jakarta Post*, Jakarta | Headlines | Mon, November 26 2012, 9:32 AM, url = <http://www.thejakartapost.com/news/2012/11/26/new-curriculum-focus-religion-civics-and-history.html>; PALATINO, Mong, “More Religion, Less Science for Indonesian Students”, *The Diplomat*, August 21, 2013, url = <http://thediplomat.com/asean-beat/2013/08/21/more-religion-less-science-for-indonesian-students/>.

Philosophy in 1841, he wrote a thesis comparing the views of Democritus and Epicurus. This gives us an idea of how early the materialist view of the world came to him. He wanted to teach, but he joined a group of thinkers that were so radical that they were not accepted in the university. Because of this, Marx turned to journalism and there vent his energies on tackling political and social issues. This eventually led him to embrace Communism.

5.3.1. Marx's Anthropology

Marx's philosophy follows Hegel, but with a materialist twist. If Hegel says that the Absolute Spirit is everything and that it evolves into everything through the dialectics of thesis-antithesis-synthesis, for Marx what evolves in this way is not the Absolute Spirit but Matter. The evolution of the Absolute Spirit in Hegel embodies the development of history. According to Marx, the same thing happens with Matter: it evolves with the dynamics of thesis-antithesis-synthesis and embodies the development of world history. According to Hegel, the summit and last stage of perfection of the development of the Absolute Spirit is the German Empire. According to Marx, the summit and last stage of perfection of the historical development of Matter is the Communist Society.

As a simplified summary, we can say that Marx interpreted the last stages of the dialectics of human history in this way: (1) we have the thesis of the fiefdom and the antithesis of the serfs; the clash between these two makes history move from the feudalist society to the industrialist society; (2) in the industrialist society, you have the capitalist (bourgeoisie) as thesis, who owns the means of production, and the workers (proletariat) as anti-thesis, who are oppressed by the capitalists; the clash produces the socialist society where there is a State that rules over the people and the State embodies the dictatorship of the Proletariat; (3) from the socialist state to the communist state, there is no further thesis-antithesis-synthesis step: the socialist state simply and naturally turns into a Communist state, where there is no longer need for the State to rule but each citizen moves with complete selflessness and sharing the products his work with others each according to his need or due.

5.3.2. Marxian Ethics

In a Communist scenario, the individual man is of less importance: it is the collective that needs to survive and be perfected. With this type of anthropology, the rights of the individual can be suppressed in favor of the development of the state into a communist society. The

coming of this communist society is the most important thing that has to happen in this world.

The Communist educational model stresses the importance of the State, to such an extent that the individual has to be ready to sacrifice or be sacrificed for the sake of the rightful development of history in the direction of the Communist Society. Besides, with the clash between thesis and antithesis embodied as “revolution”, the changes and transitions are expected to be violent, and the human victims—especially among the bourgeoisie but also among the proletariat—can be many.

The materialist view of Marx makes Communist education aim at the removal of what are called “superstructures” in order to free the fundamental “economic man”—the material man—from underneath the oppressive layers of alienation produced by superstructures. These superstructures are religion, philosophy, political rule and society.

5.3.3. Marxian Epistemology

For Marx, the mind of the human being must be conformed to the process of the historical evolution of matter. Thus, it is important in a communist state to instil in their citizens the need to: (1) do everything so that the

conflict between the thesis and antithesis (during that time, between the bourgeoisie and the proletariat) becomes more exacerbated so that it results in a revolution; (2) so the analysis of thesis-antithesis runs through all the areas of human life: between men and women, between parents and children, etc. The Marxist mind should flow in sync with the dialectical evolution of Matter.

5.3.4. The Leader and his Education according to Marx

We can imagine the type of leader that would come out when he is educated in this type of anthropology. We only need to look at the examples of Stalin and Mao Tse Tung.

Theoretically, the Communist Society should end up not having a leader. Marx does not clarify how this will happen in detail. He just says that from having a State like the ones ruled by Stalin and Mao, by some trick of nature, the leaders will leave their posts and the people will start ruling themselves. This looks illogical to us now, but during the time of the rise of Communism the injustices suffered in many societies made the people think that this was logical and good.

The leader upholds the Marxist tenets and should therefore work assiduously on the destruction of the superstructures that prevent the advent of the Communist Society. He should eradicate religion—which, according to Marx, is the opium of the people, something that prevents them from being aware of the injustice that is being committed against them. He should do away with tradition and culture, other sources of alienation. In the former Communist nations we saw this being actively done.

The fall of the communist societies, especially starting 1989, illustrates the failure and the rejection of such a system.

5.4. Jean Jacques Rosseau³⁸

Jean-Jacques Rousseau was born in 1712 in Calvinist Geneva to parents of the bourgeois class. Considering the time and place where he was born, it was almost inevitable that he would be influenced by the ideas of the Enlightenment. He lived most of his adult life in France, which he honored with his eventual world-wide acclaim. His

³⁸ Much of the information about Rosseau in this article was taken from the book of Joy A. Palmer, *Fifty Major Thinkers in Education: From Confucius to Dewey*, Routledge, New York, 2006, pp. 61-64.

education was largely informal. He fathered five children with his commonlaw wife Thérèse Levasseur, but later left them in an orphanage.

Rousseau wrote two great works in 1762: *Émile, or on Education*, which was on developmental psychology, and the *Social Contract*, which explained his political theory. *Émile* became very popular but it was the reason for Rousseau's his banishment and exile after it was condemned by the Paris Theology Faculty and then by the Paris *Parlement*, which ordered his arrest. Geneva and the Archbishop of Paris also condemned him because they thought that these two books would lead to the destruction of the Christian religion and all governments. The most important accusation was that Rosseau denied original sin.

5.4.1. Rosseau's Anthropology and Epistemology

In his detailed reply to the accusations in 1763 Rousseau said that: 'The fundamental principle of all morality...is that man is a naturally good creature, who loves justice and order; that there is no original perversity in the human heart, and that the first movements of nature are always right.'

This summarizes the central tenet of Rosseau's anthropology: for him, man is naturally good and all things that flow naturally from him are good. *Émile* was an

imaginary educational experiment. Rousseau thought all the problems in man can be traced back to the corrupted education given by the public institutions of schools and colleges of their time. He explained that the only solution to this problem was to withdraw both pupil and teacher from society and to follow a naturalistic approach to education. He said that knowledge comes from the senses, and that for children to learn they should be actively engaged and interacting in a well-ordered environment. He suggests following the principle of 'learning by doing', which means having the lessons in the open air and veering away from the method of primarily using textbooks and laboratories.

Within this influence-free environment, the children's natural drives are expected to develop well because it will be free of bad education from society: 'In the present state of things a man abandoned to himself in the midst of other men from birth would be the most disfigured of all.... All the social institutions in which we find ourselves submerged would stifle nature in him and put nothing in its place'³⁹.

The supposed result of this method of education is an authentic man, a liberal man: "The truly free man wants

³⁹ Jean-Jacques Rousseau, *Émile*, Book I, trans. A. Bloom New York: Basic Books, p. 37, 1979. All further page references are to this translation.

only what he can do and does what he pleases. That is my fundamental maxim. It need only be applied to childhood for all the rules of education to flow from it'.⁴⁰

5.4.2. Rosseau's Ethics

According to Rousseau, from infancy up to the age of 12, ethical training follows the principle of 'negative education'. We do not yet teach the child how to live virtue but rather protect his heart from vice and the mind from error⁴¹, because Rousseau thinks that children are incapable of moral behavior until the age of puberty. When he reaches the age of reason—usually at adolescence or “the age of energy”—the tutor has to reveal to him “all his moral relations”⁴². At this point, one starts to build himself up by interacting with others. According to Rousseau, the central piece of this new ethical stage is *amour-propre*, which is ‘the first and most natural of all the passions’⁴³. *Amour-propre* is a ‘useful but dangerous instrument’⁴⁴, because at this stage the tutor is no longer fully in control. The child is beginning

⁴⁰ *Émile*, p. 84

⁴¹ *Émile*, p. 93.

⁴² *Émile*, p. 318.

⁴³ *Émile*, p. 208,

⁴⁴ *Émile*, p. 224.

to go on his own. Around this time, the child learns justice and compassion towards others.

Rousseau makes distinctions between the education of men and the education of women. For men, he thinks that they should not be taught anything religious until they are 20 years old. For women, he thinks that they should be taught religion from the very beginning.

5.4.3. The Leader and his Education according to Rousseau

Rousseau built up his educational theory with the assumption that modern society corrupts the original goodness of man. He considered society as totalitarian, and his extolling the innate goodness of the human being incarnates the liberal aspirations of the Enlightenment. Man has to be left free to use his reason. He is mainly answerable to himself.

We could imagine that a leader educated according to Rousseau's system would want a democratically-ruled nation that gives maximum freedom to its citizens. This country would interfere little in business, education, etc. It will believe in the innate goodness of its citizens and will allow them to do what they think is right with little control on their part.

PHILOSOPHER	ANTHROPOLOGY	EPIS-TEMOLOGY	ETHICS	LEADER
Plato	Man is soul	Eternal Ideas	From Wisdom	Philosophering
Al-Ghazzali	Man is a lowly creature	Faith over reason	Based primarily on Faith	A firm Islamic believer
Marx	Man is part evolving Matter	Consciousness of Material Dialectics	Promote the Dialectical movement of History	A tyrant who is committed to producing a Communist Society
Rousseau	Man is naturally good	Truth naturally flows from pristine human nature	Follow the flow of human nature	A liberal leader

6. CONCLUSION: *QUEMADMODUM PHILOSOPHIA ITA ET DISCIPLINA.*

“Howsoever your philosophy is that is how your mode of teaching will be.” We have seen that the mode and the result of education depend on the educator’s

background philosophy: his anthropological ideas, his epistemological principles and the ethics that he holds.

As seen in the four examples given, each philosopher of education uses a different mode or method of education and produces different results. This relationship between background philosophy and system of education must be kept in mind if we are to look into the education of future leaders of the nation. If we already know what type of results we want to achieve, we must be able to identify the underlying anthropological, epistemological and ethical principles that have to be behind the structure, method and content of our educational system.

As Jesus Christ says: “For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit, for each tree is known by its own fruit. [...] The good man out of the good treasure of his heart produces good, and the evil man out of his evil treasure produces evil, for out of the abundance of the heart his mouth speaks.” (Luke 6: 43-45)

The above principle also applies to education. Let us remember this and choose our philosophy of education carefully.

BIBLIOGRAPHY

- ALTAREJOS, Francisco dan NAVAL, *Concepción, Filosofía de la Educación*, EUNSA, Pamplona 2004.
- COPLESTON, Frederick, *A History of Philosophy, Volume I: Greece and Rome*, Doubleday, New York, 1993, pp. 131-132.
- GRIFFEL, Frank, "Al-Ghazali", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2013 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/sum2013/entries/al-ghazali/>>.
- PALMER, Joy A., *Fifty Major Thinkers in Education: From Confucius to Dewey*, Routledge, New York, 2006, pp. 61-64.
- WOLF, Jonathan, "Karl Marx", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<http://plato.stanford.edu/archives/sum2011/entries/marx/>>.

BAB 3

KARAKTERISTIK MANUSIA INDONESIA ANTARA HARAPAN DAN REALITAS⁴⁵

Oleh: Aloysius Widyawan

PENDAHULUAN

Memahami karakteristik manusia Indonesia sangatlah penting untuk menentukan arah segala upaya pengembangan hidup berbangsa sekarang dan pada masa-masa yang akan datang. Akan tetapi, tidaklah mudah membahas tema karakteristik manusia Indonesia. Biasanya, pembahasan tentang karakteristik selalu mengacu pada upaya memberikan gambaran yang jelas tentang ciri-ciri hakiki dari suatu objek. Ciri-ciri hakiki itu harus bisa menjadi jawaban atas pertanyaan apa itu (yaitu objek yang sedang dibahas). Dengan kata lain, pembahasan tentang karakteristik selalu mengacu pada penjelasan tentang esensi dari suatu objek. Penjelasan itu haruslah dapat dipahami (*intelligible*), universal, dan mendasar. Sulitnya lagi, yang akan dibahas adalah karakteristik manusia (bangsa) Indonesia. Mungkinkah menjelaskannya?

⁴⁵ Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 18 September 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya.

Hal paling utama yang harus dilakukan jika kita hendak membahas tema manusia Indonesia adalah realitas sejarah. Kita tidak bisa menyingkirkan kenyataan bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang menyejarah. Artinya, pemahaman tentang siapa manusia Indonesia tidak pernah bisa dilepaskan dari konteks historis tertentu yang membedakannya dengan manusia Arab, manusia Jepang, Amerika Serikat, dll. Bagaimana pun, tidak pernah ada realitas objek yang disebut manusia Indonesia tanpa upaya meninjau kembali pemahaman tentang masa lampau Indonesia.⁴⁶

Dari pemahaman historis itu, pembahasan tentang siapa manusia Indonesia, apa saja karakteristiknya, bahkan bagaimana cita-cita dan proyeksi pembangunan manusia Indonesia bisa dimulai. Akan tetapi, bukan berarti bahwa kesulitan pembahasan sudah selesai. Lahirnya pernyataan historis sebagai manusia Indonesia diikuti serentetan peristiwa historis yang semakin menguatkan karakteristik manusia Indonesia. Proses ini belum tuntas karena Indonesia masih tegak berdiri sebagai negara-kebangsaan yang berdaulat. Ini adalah suatu proses “menjadi

⁴⁶ Bdk. Sartono Kartodirjo, “Kebangsaan, Sejarah Nasional, dan Proses Integrasi”, dalam P.J. Suwarno (ed.), *Negara dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1994, hlm. 4

Indonesia”⁴⁷. Sebagaimana karakter pribadi, karakter manusia (bangsa) Indonesia tidak pernah berhenti berubah kecuali jika Indonesia sendiri sudah mati atau bubar. Inilah kenyataan bahwa masih harus tetap ada harapan untuk “menjadi (semakin) Indonesia.”

Tulisan ini mencoba membatasi diri untuk merefleksikan siapa manusia Indonesia pada awal kebangkitan nasional sampai kemerdekaan. Dari proses awal “menjadi Indonesia” itu, kita akan bisa merangkum seperti apa sebenarnya *harapan dan realitas* manusia Indonesia. Tentu saja, refleksi atas masa lampau itu akan dibenturkan dengan berbagai bentuk tantangan masa kini yang memberi warna tersendiri pada karakteristik manusia Indonesia.

SIAPAKAH MANUSIA INDONESIA ITU?

Manusia Indonesia adalah manusia yang telah mengarungi perjalanan sejarah. Persoalannya, sejak kapan kita harus meruntutnya? Apa dasar-dasarnya?

Parakitri T. Simbolon mengungkapkan bahwa pokok itu bahasan tentang kebangsaan (*nationhood*) sebenarnya

⁴⁷ Bdk. P. Swantoro, “Pengantar”, dalam Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas 2006 (cetakan II), hlm. xxviii

adalah “rangkaiian upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan masyarakat (*society*) di satu pihak dan kekuasaan negara (*state*) di pihak lain”⁴⁸. Keseimbangan itu menjelma dalam lembaga dan pranata (*institution*). Dalam lembaga, ada aturan main (*rules of game*) dan individu-individu yang tunduk pada aturan main lembaga. Dengan demikian, lembaga menjadi pemandu dalam hubungan antar individu. Lembaga ini bisa diciptakan secara formal atau terjadi secara informal dalam bentuk adat, kebiasaan, tata krama, dsb. Dari sudut pandang di atas, kita baru bisa meruntut sejarah manusia Indonesia secara spesifik dari adanya keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pemerintahan.

Dari pemahaman di atas, Parakitri T. Simbolon berpendapat bahwa ada tiga faktor sejarah yang paling menentukan lahirnya kesadaran sebagai bangsa Indonesia, yakni kesatuan ekonomi, kesatuan administrasi politik/pemerintahan dan kesatuan budaya.⁴⁹ Tiga prasyarat

⁴⁸ Ibid., hlm. 3; catatan bab I nomer 1, hlm. 395

⁴⁹ Agar kekuasaannya langgeng, pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan antara lain mengembangkan ekonomi dengan tanam paksa, *land reform*, pertambangan, dan industri; mengembangkan sistem administrasi dan politik di seluruh nusantara sehingga pada tahun 1910, seluruh wilayahnya (Wilayah Indonesia saat ini) sudah ada keseragaman administrasi politik. Administrasi semacam itu membutuhkan tenaga admin yang terpelajar. Maka, mulailah dibuka sekolah bagi bumiputera, baik yang berbahasa Melayu maupun yang berbahasa Belanda. Lewat

itu merupakan hasil yang tidak terduga sama sekali dari upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda sejak pertengahan abad ke-19. Tiga prasyarat itu semakin meneguhkan perjalanan manusia Indonesia sebagai bangsa yang utuh.

Bangsa Indonesia sendiri terdiri dari beragam etnis, agama, bahasa ibu, dan corak budaya yang mendiami sebuah wilayah kepulauan Nusantara yang luas. Dari konteks historis itu, kita bisa mengenal bahwa yang mempersatukan keanekaragaman ini bukanlah faktor-faktor alamiah. Secara spesifik, yang mempersatukan adalah tekad dan solidaritas untuk hidup bersama, menciptakan sejarah bersama, merasakan kedekatan sebagai satu keluarga besar. Menyitir pemikiran Ernest Renan (1823-1892) dan Otto Bauer (1881-1938), Soekarno berkata, "Satu bangsa adalah satu *solidariteit* (rasa kesetiakawanan) yang besar."⁵⁰ Lanjutnya, "Bangsa adalah suatu persatuan perangai yang terjadi dari suatu

jalan pendidikan bumiputera ini, kesatuan budaya pun muncul. Pada awal mulanya, semua upaya itu adalah murni kepentingan pemerintah kolonial. Akan tetapi, akibat samping yang tidak diharapkan, upaya-upaya yang sama itu membangun fundamen yang kuat bagi lahirnya bangsa Indonesia. Lih. *Ibid.*, hlm. 6; 151 – 153; 400 (catatan akhir bab I nomor 7)

⁵⁰ Pidato Soekarno di depan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945

persatuan hal-ikhwal yang telah dijalani oleh rakyat... nasionalisme adalah suatu itikad; suatu keinsyafan rakyat bahwa rakyat itu adalah satu golongan, satu bangsa... bangsa adalah satu persamaan, satu persatuan karakter, watak...yang terjadi karena persatuan pengalaman”⁵¹.

Tekad untuk bersatu tumbuh dari pengalaman akan penderitaan dan penindasan bangsa kolonial. Terhadap pengalaman akan penderitaan ini, ada banyak tanggapan dan sikap. Di satu sisi, muncul ketidakpercayaan diri, merasa bodoh, harus menerima nasib, bermental budak. Di sisi lain, pengalaman akan penderitaan menjadi satu-satunya dasar pengetahuan dan perjuangan untuk merdeka.

Di sisi yang pertama, mental bangsa Indonesia diperlemah. Pada sisi ini, manusia Indonesia hanya sekedar pasrah merenungi nasib. Dalam kepasrahan itu, kesadaran akan hal-hal mistis menjadi-jadi. Tan Malaka mengkritik manusia Indonesia yang justru menghambakan diri pada logika mistika.⁵² Karena tidak memiliki dasar kekuatan

⁵¹ Ibidem

⁵² Tan Malaka dalam bukunya berjudul *Madilog (Materialisme, Dialektika dan Logika)* mengkritik praktik penghayatan hidup mistis bangsa Indonesia yang menghambat perjuangan menuju kemerdekaan. Baginya, kemerdekaan mutlak harus diperjuangkan, bukan hanya sekedar menunggu nasib baik atau menggantungkan diri pada irasionalitas-mistik.

mental, orang lari pada penjelasan-penjelasan irasional untuk sekedar memperoleh penghiburan semu. Soekarno menyitir pula sikap *inferior complex* yang akut karena tekanan baik dari kolonialisme maupun feodalisme. Soekarno mengkritik mentalitas kuli atau budak yang berurat akar pada manusia Indonesia yang justru menghambat perjuangan menuju Indonesia merdeka.

Di sisi lain, kesadaran dan ingatan akan penderitaan bangsa menggugat untuk dituntaskan. Soekarno dengan semangat meneriakkan, Indonesia merdeka sekarang, sekarang, dan sekarang. Ia melawan pandangan umum peserta sidang BPUPKI tentang arti kemerdekaan. Baginya, kemerdekaan tidak harus menunggu kemerdekaan batin manusia Indonesia, kemerdekaan diri sendiri. Kemerdekaan Indonesia mutlak perlu untuk membangun manusia-manusia merdeka. Kemerdekaan adalah jembatan emas menuju kemerdekaan sejati manusia-manusia Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan prasyarat mutlak untuk melakukan koreksi fundamental terhadap tata sosial, politik, ekonomi, budaya yang lebih baik.⁵³

⁵³ Pidato Soekarno di depan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945

Menarik pula mencermati tulisan Soewardi Soerjaningrat berjudul “Seandainya Saya Seorang Belanda” pada pesta peringatan kemerdekaan Belanda yang ke-100.⁵⁴ Dengan nada ironi, Soewardi menyatakan bahwa manusia yang menghayati kemerdekaan itu tidak mungkin bertindak dan berperilaku yang justru menguatkan membelenggu kemerdekaan manusia atau bangsa lain. Kemerdekaanku tidak bisa berdiri tegak di atas penindasan terhadap kemerdekaan bangsa lain.

Dari seluruh perjalanan sejarah awal munculnya kesadaran akan satu bangsa ini, kita bisa merefleksikan karakter khas manusia Indonesia yang ingin dibangun. Yang pertama, tekad untuk bersatu. Kesatuan itu muncul dari pengalaman yang sama akan penderitaan dan penindasan bangsa lain. Corak persatuannya bisa disimpulkan sebagaimana pandangan Soekarno, yakni gotong royong. Yang kedua, manusia Indonesia adalah manusia merdeka. Manusia merdeka tidak bisa diartikan luas merdeka untuk

⁵⁴ Menurut Savitri Scherer, tulisan itu merupakan artikel yang tajam pertama ditulis dalam bahasa Belanda oleh seorang Jawa yang menentang pembenaran penjajahan Belanda di Indonesia. Lih. Savitri Scherer, *Keselaras dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, terj. Jiman S. Rumbo, Jakarta: Komunitas Bambu 2012, (cet. 2), hlm. 37. Teks lengkap artikel “Seandainya Saya Seorang Belanda” bisa dibaca pada bagian lampiran, buku yang sama halaman 241 - 246

menciptakan penindasan dan penderitaan yang lain. Akan tetapi, kemerdekaan selalu membuka ruang untuk upaya-upaya memerdekakan semua orang dari penderitaan dan penindasan. Dua karakter ini berhadapan dengan dua karakter yang justru melemahkan, yakni ketidakpercayaan diri dan kemerdekaan semu. Ketidakpercayaan diri adalah akumulasi pengalaman ditindas yang membuat manusia minder dan segan pada kekuasaan yang tidak adil dan melanggengkan penindasan lewat aksi kekerasan. Kemiskinan ini memicu orang untuk mencari penghiburan semu, terutama penghiburan yang bersifat mistis irasional. Kemiskinan juga memicu karakter lemah kedua, yakni mengejar kemerdekaan semu. Karena tidak berani berhadapan dengan kekuatan lain yang lebih besar, pandangan tertuju pada kekuatan yang jauh lebih lemah. Pengalaman pahit ditindas malah memicu tindak menindas yang lebih lemah di antara saudara-saudara sebangsa.

PANCASILA DAN MANUSIA INDONESIA

Merefleksikan sejarah awal manusia Indonesia tidak bisa dilepaskan pula dari pemahaman mendasar akan Pancasila sebagai dasar filosofis negara-kebangsaan

Indonesia merdeka.⁵⁵ Dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 yang bertujuan mencari dasar negara Indonesia merdeka, Soekarno mengungkapkan idenya tentang lima prinsip dasar atau Pancasila, yakni kebangsaan, internasionalisme/perikemanusiaan, mufakat/demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan.

Prinsip pertama, prinsip kebangsaan bersumber dari kesadaran bahwa negara merdeka nanti adalah rumah tempat bersatunya keanekaragaman manusia Indonesia. Negara Indonesia haruslah *nationale staat* (negara-kebangsaan) yang dibangun dari tekad dan solidaritas untuk hidup bersama. Di dalamnya termuat pula pengertian geopolitis, yakni bahwa negara Indonesia adalah kesatuan seluruh keanekaragaman manusia Indonesia yang mendiami wilayah Nusantara. Lawan dari nasionalisme kebangsaan ini adalah *chauvinisme* atau nasionalisme sempit.

Prinsip kedua, prinsip internasionalisme atau perikemanusiaan bersumber pada kesadaran bahwa bangsa Indonesia adalah bagian dari seluruh umat manusia di dunia. Karena itu, bangsa Indonesia harus bersama-sama dengan

⁵⁵ Dalam pidatonya, Soekarno menyebut Pancasila sebagai "*Philosophische grondslag* (dasar filosofi-Ed.) dari Indonesia Merdeka. *Philosophische grondslag* itulah *fondamen*, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi".

seluruh bangsa di dunia berjuang memajukan perikemanusiaan atau kemanusiaan universal. Di dalam prinsip ini, terkandung pula kesejajaran Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Lawan dari prinsip ini adalah *kosmopolitanisme* yang meniadakan kebangsaan demi kepentingan-kepentingan yang sifatnya lebih universal.

Prinsip ketiga, prinsip mufakat/perwakilan/permusyawaratan bersumber dari kesadaran bahwa keanekaragaman yang satu haruslah dijaga agar tetap kuat. Akan tetapi, Soekarno menggarisbawahi bahwa demokrasi perwakilan ini bekerja terutama untuk memajukan keadilan dan kesejahteraan manusia Indonesia, bukan hanya untuk golongan-golongan tertentu. Kesejahteraan dan keadilan sosial ini menjadi prinsip keempat.

Untuk prinsip kelima, Soekarno berkata,

”Prinsip kelima dari Negara kita, ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti yang luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain. Hatiku akan berpesta raya, jikalau Saudara-saudara menyetujui bahwa Negara Indonesia Merdeka berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa! Di sinilah, dalam pangkuan asas yang kelima inilah, Saudara-saudara, segenap agama yang ada di

Indonesia sekarang ini, akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan bertuhan pula!

Bila diperas lagi, Soekarno memakai istilah negara-gotong royong. Katanya,

“Gotong-royong” adalah paham yang dinamis, lebih dinamis dari “kekeluargaan”, Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinamakan anggota yang terhormat *Soekardjo satu karyo, satu game*. Marilah kita menyelesaikan karyo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-binantu bersama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. *Holopis-kuntul-baris* buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong!

Menurut Driyarkara, Soekarno merumuskan ide Pancasila setelah merefleksikan sejarah, keadaan sosiologis, watak, dan kejiwaan manusia Indonesia. Driyarkara menambahkan bahwa isi Pancasila sebenarnya “inheren atau melekat pada eksistensi manusia-sebagai-manusia, lepas dari keadaan tertentu pada konkretnya”⁵⁶. Dengan kata lain,

⁵⁶ N. Driyarkara, “Buku VI: Menalar Dasar Negara Indonesia”, dalam A. Sudirja, dkk. (eds.), *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsa*, Jakarta:

upaya merefleksikan kodrat manusiawi akan mengantar pada pemahaman tentang Pancasila.⁵⁷

Driyarkara memulai refleksinya itu dari pemahaman fenomenologis tentang siapa manusia. Manusia adalah pribadi potensial mencakup kerohanian dan kejasmaniannya. Sebagai pribadi yang jasmaniah, manusia terus memanusiaikan dirinya dalam kesatuan jasmaniah. Dalam arti ini, manusia membudaya. Di samping itu, sebagai pribadi rohaniah, manusia terus mempribadi menjadi pribadi yang rohani.

Manusia yang adalah pribadi ini adalah ada-bersama-yang-lain. Ini tercermin dalam fenomena komunikasi dan bahasa. Nilai yang diperjuangkan dalam keberadaan bersama yang lain ini adalah cinta kasih untuk menjadi saudara satu sama lain. Karena itu, hidup saling menghormati dan menjunjung tinggi kemanusiaan menjadi sikap yang paling mendasar. Sesama adalah aku-yang-lain. Karena itu, sesama harus dihormati, dihargai, ditumbuhkembangkan sebagaimana yang aku lakukan atas diriku sendiri. Apa pun latar belakang sesamaku manusia, aku tidak boleh

Kompas Media Nusantara, Gramedia Pustaka Utama, Kanisius, Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia 2006, hlm. 834

⁵⁷ Bdk. *Ibid.*, hlm. 834, 839

mengabaikannya. Karena itu, penghormatan dan penghargaan pada aku-yang-lain tidak pernah boleh diabaikan. Inilah prinsip perikemanusiaan dalam hidup.

Salah satu aspek yang diwujudkan dalam ada-bersama-yang-lain adalah keadilan sosial. Keadilan sosial menjadi tujuan segala bentuk hidup bersama, termasuk hidup berbangsa dan bernegara. Aku tidak bisa hanya menyahterakan diriku sendiri. Aku memiliki tanggungjawab untuk mengusahakan pula kesejahteraan bagi sesamaku, bagi aku-aku yang lain. Jika aku tidak peduli pada kesejahteraan sesama, aku berarti melupakan kodrat keberadaanku, yakni aku-ada-bersama-yang-lain. Inilah prinsip keadilan sosial.

Keadilan sosial harus benar-benar diwujudkan untuk semua. Karena itu, perlulah suatu tata hidup bersama yang menjamin cita-cita bersama itu. Bentuk demokrasi adalah kemungkinan yang terbaik. Karena hanya dalam demokrasi itu, perbedaan tetap dihargai, tetapi kesatuan pun dipelihara. Inilah prinsip demokrasi. Adanya pemimpin dan partai-partai hendaknya berangkat dari pemahaman demokrasi seperti ini.

Aku yang ada-bersama-yang-lain ini memiliki akar yang kuat. Akar itu adalah ibu pertiwi atau tanah air.

Bersama-sama dengan sesama yang berakar pada ibu pertiwi yang sama, aku disatukan secara lebih khusus. Di tanah air inilah, aku dan sesama hidup bersama, menghayati adat dan nilai-nilai luhur bersama, ditempa oleh kondisi geografis yang sama, menghadapi tantangan bersama, mengukir sejarah bersama, dsb. Inilah prinsip kebangsaan.

Meskipun demikian, prinsip kebangsaan harus tunduk pada prinsip kemanusiaan yang universal. Bangsaaku harus sadar bahwa bangsa ini hanya satu bagian kecil dari seluruh umat manusia. Maka, penghormatan dan kesetaraan pribadi manusia, haruslah diperluas di tataran regional dan mundial. Kerjasama menjadi jalan terbaik untuk mewujudkan kemajuan seluruh umat manusia. Inilah prinsip internasional

Pemahaman yang menyeluruh tentang ada-ku sebagai pribadi yang membudaya, yang ada-bersama-yang-lain, yang mengusahakan keadilan untuk semua, akhirnya sampai pada pencarian jawaban yang paling mendalam tentang siapa aku. Aku yang terbatas ini ternyata berusaha memaknai hidup yang diberikan oleh Yang-tak-terbatas, yakni Tuhan. Tuhanlah alasan paling dasar dari ada-ku di tanah air ini. Karena itu, ke sana pulalah aku akan mempersembahkan segala yang kuperbuat.

Dari refleksi itu, Driyarkara mencoba memberi gambaran siapa manusia Indonesia. Baginya, memeluk Pancasila berarti menjadi manusia yang mengamalkan humanisme yang religius dan sosialis.⁵⁸ Karena itu, manusia Indonesia yang berkeadilan sosial adalah manusia yang bertanggungjawab mengabdikan diri pada kepentingan bersama, bukan yang suka main kuasa, apalagi korupsi. Manusia Indonesia yang menjunjung demokrasi adalah manusia Indonesia yang menempatkan pengabdian pada rakyat sebagai sesuatu yang rasional, bukan yang hanya suka formalisme, apalagi yang tunduk pada irasionalitas. Bukan pula manusia yang kebal kritik, hanya *sendika dhawub* tanpa berpikir, dan menikmati kenyamanan feodalistis.⁵⁹ Manusia Indonesia yang menghidupi kebangsaannya adalah manusia yang tahu menempatkan kepentingan seluruh bangsa di atas kepentingan golongan. Dalam arti ini, korupsi adalah suatu bentuk pengkhianatan dan egoisme buta. Manusia Indonesia yang berperikemanusiaan adalah manusia yang terbuka pada persaudaraan seluruh umat manusia atas dasar cinta pada sesama, bukan egoisme. Akhirnya, manusia Indonesia yang berketuhanan adalah manusia yang mampu memandang dan menempatkan Tuhan sebagai dasar upaya untuk tetap hidup

⁵⁸ Bdk. *Ibid.*, hlm. 886

⁵⁹ Bdk. *Ibid.*, hlm. 895

bersama dalam kesatuan. Baginya, Indonesia bukanlah teokrasi karena teokrasi hanya mengacu pada satu bentuk perwujudan iman. Indonesia bukan lembaga agama. Karena itu, toleransi mutlak diperlukan. Indonesia juga bukan negara profan (sekuler) karena negara profan selalu memusuhi Tuhan dan mengesampingkan peran agama.

JURANG ANTARA HARAPAN DAN REALITAS

Refleksi yang mendalam atas sejarah dan juga Pancasila memang mampu memberikan gambaran ideal atau visi hidup manusia Indonesia. Akan tetapi, tetap saja manusia Indonesia tidak (akan) pernah mampu menghayati jatidirinya itu secara sempurna. Ada jurang lebar dan dalam yang memisahkan antara harapan dan realitas siapakah manusia Indonesia itu. Ada banyak faktor yang bisa dikatakan sebagai penyebab.

Soekarno terus menerus mengingatkan Indonesia agar tidak bermental budak atau kuli.⁶⁰ Karena kemerdekaan, manusia Indonesia mestinya berbangga diri karena mampu melepaskan belenggu penindasan dengan kekuatannya

⁶⁰ Bdk. H. S. Dillon dan Idham Samudra Bey, "Soekarno dan Bangsa", dalam Daniel Dakhidae, Soekarno: Membongkar Sisi-sisi Didup Putra Sang Fajar, Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2013, hlm. 92 – 93

sendiri. Ia menyadari bahwa pengalaman pahit penindasan berabad-abad membentuk karakter manusia Indonesia yang lemah ketika berhadapan dengan kekuatan asing. Karena itu, harus disadari bahwa peran Soekarno sangat mencolok untuk memompakan semangat rakyat Indonesia untuk maju. Revolusi belum berakhir. Artinya, perjuangan mewujudkan kemerdekaan yang sejati belum selesai.

Pada tanggal 6 April 1977, di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Mochtar Lubis menyampaikan ceramah atau pidato budaya tentang ciri-ciri manusia Indonesia.⁶¹ Ia memaparkan

⁶¹ Ceramah budaya Mochtar Lubis tentang Manusia Indonesia telah diterbitkan menjadi sebuah buku dan dicetak serta diedit beberapa kali dengan memasukkan tanggapan-tanggapan beberapa tokoh. Penyampaian Mochtar Lubis yang lugas itu menuai banyak tanggapan. Sarlito Wiryawan mengkritik Mochtar Lubis yang terlalu subjektif, kurang ilmiah. Sarlito berpendapat bahwa “generalisasi yang berlebihan akan membahayakan karena bisa menimbulkan kesan yang keliru mengenai manusia Indonesia”⁶¹. Sarlito tidak ingin memandang masa depan Indonesia dalam perspektif yang pesimistis. Mochtar balik menyerang Sarlito yang justru jauh lebih subjektif daripada dirinya. Mochtar menekankan bahwa yang ia lakukan adalah memotret berbagai fenomena kehidupan manusia Indonesia yang kompleks dan paradoks. Tanggapan yang tak kalah keras datang dari Margono Djojohadikusumo Margono menyayangkan tulisan Mochtar Lubis yang cenderung menyudutkan orang Jawa. Karena kecenderungannya itu, Margono mengatakan bahwa Mochtar Lubis seorang anti-Jawa. Tak mau disalahmengerti, Mochtar Lubis menjawab bahwa dirinya tidak punya niat sedikit pun untuk menyudutkan orang Jawa. Ia hanya mau memberi gambaran real tentang manusia Indonesia, bukan khusus manusia Jawa. Lih. Lubis, Mochtar, *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*, Jakarta: Yayasan Idayu 1981

realitas sosio-budaya manusia Indonesia dari sudut pandangnya. Ia menguraikan beberapa karakter khas manusia Indonesia, antara lain:

a) Hipokritis atau Munafik.

Manusia Indonesia sejak dulu sudah dipaksa oleh kekuatan-kekuatan luar untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya dirasakan, dipikirkan, atau dikehendaknya karena takut akan mendapatkan ganjaran yang membawa bencana bagi dirinya. Ciri ini bersumber pada praktik feodalisme primordial dan religius. Dengan bersikap munafik, ia bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Contoh: Hipokrisi seksual, mengutuk korupsi, tapi diam-diam melakukannya.

b) Segan dan Enggan Bertanggungjawab Atas Perbuatan, Putusan, Kelakukan, Pikirannya

Seringkali, manusia Indonesia menghindar dari tanggungjawab dengan mengatakan, “Bukan saya” atau “Saya hanya melaksanakan perintah”. Akan tetapi, ketika ada penghargaan atau tanda jasa, orang berlomba-lomba mengejarnya.

c) Jiwa Feodal

Ciri ini nampak dalam diri para penguasa dan pembesar yang minta diperlakukan secara istimewa. Keluarga besar, bahkan tetangga mereka pun harus diperlakukan atau setidaknya menuntut untuk diperlakukan secara istimewa.

d) Percaya Takhayul

Meskipun Indonesia sudah terpengaruh oleh modernitas, manusia Indonesia masih percaya pada takhayul. Terbukti, orang masih “memelihara” kepercayaan terhadap keris, jimat, tuyul, kuntilanak hantu kuburan, dll. Bahkan, ada takhayul-takhayul modern yang baru muncul seperti: mantera-mantera pembangunan, Pancasila, GNP/GDP, angka pengangguran, dsb.

e) Jiwa Artistik

Manusia Indonesia dekat dengan alam. Dari kedekatannya itu, lahirlah jiwa artistik. Jiwa artistik menunjukkan bahwa hidup manusia Indonesia lebih mengedepankan naluri, perasaan, nafsu dan keindahan seni.

f) Karakter Lemah

Manusia Indonesia dikenal sebagai orang yang kurang kuat memperjuangkan keyakinan. Orang Indonesia

suka pada “pelacuran intelektual”. Karakter lemah ini dibungkus dalam istilah indah “tepa slira”.

g) Ciri Lainnya

Orang Indonesia dikenal boros karena senang berpakaian bagus, berpesta, bermobil mewah, menggunakan barang-barang bermerk luar negeri. Orang Indonesia tidak suka kerja keras, tapi ingin menjadi milyuner seketika. Orang Indonesia bermimpi menjadi priyayi atau pejabat, bahkan mengembangkan karir pejabatnya sekaligus “nyambi” menjadi pengusaha. Orang Indonesia bisa lembut dan sopan, tetapi suatu ketika bisa menampakkan amuk yang dahsyat. Demikian seterusnya.

Mochtar Lubis menilai bahwa karakteristik negatif manusia Indonesia ini tak pernah bisa lepas dari sejarah penindasan dan kekuasaan otoriter. Ia menyebut bahwa faktor pengalaman dijajah menjadi faktor pertama. Selanjutnya, kekuasaan rezim pemerintah yang otoriter dan represif, khususnya rezim Orde Baru, semakin memperparah kondisi manusia Indonesia.

Koentjaraningrat menambahkan bahwa manusia Indonesia memiliki mentalitas yang lemah.⁶² Cara pandang dan sikap mental terhadap kepentingan negara dan bangsa sangat rendah. Mentalitas yang lemah ini diakibatkan oleh nilai budaya negatif yang berasal dari bangsa sendiri dan juga oleh sejarah penindasan dan penjajahan selama berabad-abad. Secara rinci, ia menulis kelemahan mental itu terletak pada sifat meremehkan mutu, suka main terabas, tidak percaya diri, tidak disiplin, dan mengabaikan tanggung jawab.

**MEMPERJUANGKAN MAKNA “MENJADI
(SEMAKIN) INDONESIA”; MENJAWAB
TANTANGAN ZAMAN**

Kini, manusia Indonesia sudah 68 tahun memproklamasikan kemerdekaannya, sudah menjalani lima belas tahun reformasi. Jurang antara harapan dan realitas masih ada. Karakteristik negatif masih mengancam proses menjadi (semakin) Indonesia. Namun, penting pula melihat tantangan kebangsaan pada masa ini.

⁶² Bdk. Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2004, hlm. 37 – 38, 45

Tantangan pertama adalah kondisi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Pada kenyataannya, Indonesia telah 68 tahun merdeka, belum banyak manusia Indonesia yang merasakan kesejahteraan. Bisa jadi, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat mengecoh kita. Bisa jadi, kita juga terkecoh dengan buaian manis dan mitos-mitos baru tentang turunnya angka pengangguran dan jumlah orang miskin. Tak ada salahnya pula memberi respek pada beberapa program pro-rakyat, tetapi jika dievaluasi lebih dalam, apakah program-program itu tepat sasaran, menjawab kebutuhan, dan bermutu? Belum lagi, ada begitu banyak praktik korupsi yang menggerogoti kekayaan negeri ini. Realitas kemiskinan dan ketidakadilan sosial merupakan salah satu pemicu bagi keutuhan manusia Indonesia.

Tantangan kedua adalah ke-bhineka-tunggal-ika-an Indonesia. Keberagaman ini mulai dirongrong oleh beberapa kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya. Merebaknya kelompok-kelompok semacam ini tentu ada sebabnya. Salah satu penyebabnya menjadi tantangan pertama yang tadi telah kita bahas. Harus pula dilihat bahwa kelompok-kelompok ini seolah menemukan surga kebebasannya setelah rezim sebelumnya, rezim ORBA melakukan represi terhadap mereka.

Tantangan ketiga adalah globalisasi.⁶³ Globalisasi dipicu oleh pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta kuatnya tekanan kapitalisme modern dari grup-grup korporasi multinasional terhadap seluruh tatanan dunia. Ada banyak pengaruh baik dari globalisasi ini. Akan tetapi, tetap harus diwaspadai beberapa hal. Nurcholis Madjid misalnya menyebutkan setidaknya ada empat hal yang patut diwaspadai sebagai akibat buruk globalisasi, yakni: 1) Deprivasi relatif, yakni perasaan tersisih atau tertinggal karena sulit beradaptasi dengan perubahan; 2) Dislokasi, yaitu perasaan tidak memiliki tempat dalam tatanan sosial yang terus berubah; 3) Disorientasi, yakni

⁶³ Globalisasi adalah kondisi dunia yang merujuk pada keseluruhan proses yang kompleks (proses moneter, ekonomi, sosial, politik, budaya yang saling terkait dan bersifat mundial) di mana semua orang diinkorporasikan ke dalam masyarakat dunia yang tunggal, masyarakat global (Bdk. Nirwan Ahmad Arsuka, "Tentang Bangsa dan Indonesia", dalam *Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi: Merangsang Pemikiran Ulang Keindonesiaan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2001, hlm. 29-35); Ali Alatas mendefinisikan globalisasi sebagai empat bentuk perubahan mundial yang terjadi, yakni 1) perubahan konstelasi politik dari suatu kerangka bipolar (Timur-Barat atau Utara-Selatan) ke kerangka multipolar; 2) menguatnya gejala saling bergantung antarnegara, antarbangsa yang diikuti oleh saling keterkaitan antara masalah-masalah ekonomi, politik, sosial, lingkungan hidup, dll.; 3) meningkatnya peran lembaga-lembaga non pemerintah dan perusahaan multi nasional dalam tata hubungan antarnegara; 4) munculnya isu-isu baru dalam agenda internasional misalnya masalah HAM, ekologi, demokrasi, dsb. (bdk. Ali Alatas, "Tatanan Politik Dunia Abad XXI", dalam *Kompas* 28 Juni 2000, hlm. 30

perasaan tidak memiliki pegangan identitas kultural karena segalanya berubah; 4) negativisme, yakni perasaan yang serba negatif pada susunan mapan, sikap tidak percaya, curiga dan bermusuhan yang menjadi tempat subur bagi radikalisme, fundamentalisme, atau sektarianisme.⁶⁴ Secara ringkas, Arief Budiman melihat bahwa globalisasi memengaruhi manusia Indonesia berubah dari tata hidup komunal ke individualisme dan materialisme.

Tiga tantangan itu membuat proses “menjadi (semakin) Indonesia menjadi semakin berat. Akan tetapi, seperti halnya karakter manusia individual yang bisa diubah lewat olah diri, karakter manusia Indonesia pun tentu bisa berubah. Jalan perubahan harus dimulai dari melihat kembali apa hakikat “menjadi manusia Indonesia”. Bila diperas dari pengalaman sejarah dan dari Pancasila, kita menemukan bahwa manusia Indonesia sejatinya adalah manusia yang merdeka. Kemerdekaannya tidak hanya soal bebas dari tekanan asing, tetapi juga kemerdekaan untuk menentukan langkah-langkah transformasi diri agar menjadi Indonesia yang lebih baik. Transformasi diri yang baik itu tidak pernah boleh mengabaikan hakikat manusia sebagai manusia. Karena itu, segala bentuk kebijakan dan perilaku

⁶⁴ Bdk. Azis, Yaya M. Abdul (ed.), *Visi Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998, hlm. ix

pengkhianatan dan penggerogotan terhadap paham personalistik ini harus dilawan. Di samping itu, yang tidak boleh dilupakan adalah manusia Indonesia adalah manusia yang tegak berdaulat, sejajar dengan yang lain. Memang, manusia Indonesia telah mengalami *inferior complex* akibat pengalaman dijajah baik oleh kolonialisme maupun oleh feodalisme. Akan tetapi, ingatan akan penderitaan itu menggugat kita untuk bangkit. Bung Karno berkata, “Tiada satu rakyat yang dapat diperbudak jikalau Rohnya tidak mau diperbudak”⁶⁵

Dari mana kita memulai transformasi diri itu? Jalan apa yang paling tepat? Pendidikan. Sejarah kita sendiri telah menunjukkan bahwa pendidikan menjadi jalan utama pembentukan kesadaran kebangkitan nasional pada awal abad ke-20. Pendidikan yang semula hanya bertujuan mencetak tenaga administratur murah bagi pemerintah kolonial, ternyata menjadi jalan bagi penanaman keahlian dan watak nasionalis para perintis kebangkitan nasional. Tugas kita semua, manusia Indonesia menyelamatkan pendidikan nasional agar tetap menghasilkan langkah-langkah transformatif “menjadi (semakin) Indonesia”.

⁶⁵ H. S. Dillon dan Idham Samudra Bey, “Soekarno dan Bangsa”, ... hlm. 93

DAFTAR ACUAN

Alatas, Ali “Tatanan Politik Dunia Abad XXI”, dalam *Kompas* 28 Juni 2000

Azis, Yaya M. Abdul (ed.), *Visi Global*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1998.

Dakhidae, Daniel, *Soekarno: Membongkar Sisi-sisi Didup Putra Sang Fajar*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas 2013.

Demokrasi, Kekerasan, Disintegrasi: Merangsang Pemikiran Ulang Keindonesiaan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Kartodirjo, Sartono, “Kebangsaan, Sejarah Nasional, dan Proses Integrasi”, dalam P.J. Suwarno (ed.), *Negara dan Nasionalisme Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2004.

Lubis, Mochtar, *Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban)*, Jakarta: Yayasan Idayu 1981.

Malaka, Tan, *Madilog (Materialisme, Dialektika dan Logika)*.

Scherer, Savitri, *Keselarasn dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, terj. Jiman S. Rumbo, Jakarta: Komunitas Bambu 2012.

Sudirja, dkk. (eds.), A., *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*,

Jakarta: Kompas Media Nusantara, Gramedia Pustaka Utama, Kanisius, Ordo Serikat Jesus Provinsi Indonesia 2006.

Swantoro, P., "Pengantar", dalam Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas 2006.

BAB 4
MENCARI MAKNA KEINDONESIAAN
DALAM PENDIDIKAN⁶⁶

Oleh: Aloysius Widyawan

PENDAHULUAN

Menjadi manusia Indonesia berarti menjadi pribadi yang sadar akan jatid dirinya sebagai orang yang merdeka. Kemerdekaan manusia Indonesia terletak pada tidak adanya bangsa lain yang membelenggunya menentukan kemajuannya sendiri dan pada orientasi mengubah tata masyarakat yang jauh lebih adil, makmur, dan berlandaskan persatuan bangsa, perikemanusiaan, perikeadilan sosial, demokrasi, dan hidup religius.⁶⁷ Pada era kemerdekaan ini,

⁶⁶ Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 25 September 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya.

⁶⁷ Bdk. Pidato Soekarno di depan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, diunduh dari <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/> pada tanggal 2 September 2013, pk. 15.43; bdk. N. Driyarkara, "Buku VI: Menalar Dasar Negara Indonesia", dalam A. Sudirja, dkk. (eds.), *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, Gramedia Pustaka Utama, Kanisius, Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia 2006, hlm. 836

ada banyak jalan menuju ke sana, misalnya melalui tata politik yang bersih dan demokratis, tata ekonomi yang berkeadilan sosial, dsb. Akan tetapi, patut dicatat bahwa “menjadi semakin Indonesia” di era kemerdekaan ini pertama-tama adalah sebuah proses budaya. Kebudayaan sendiri merupakan segala upaya budi manusia yang bisa diubah melalui proses belajar. Jika proses belajar itu “sengaja dilakukan dengan cara-cara tertentu, sistematis, dan mencakup keseluruhan hasil akal budi manusia”⁶⁸, proses belajar yang demikian itu disebut pendidikan.

Dalam kajian sejarah, kesadaran akan jatidiri sebagai manusia Indonesia yang merdeka ini tidak lepas dari peran pendidikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Karena itu, “mencerdaskan kehidupan bangsa” yang hanya bisa dikaitkan dengan pendidikan, menjadi salah satu tujuan yang ingin diwujudkan oleh Indonesia merdeka. Karena itu pula, ada kaitan erat antara pencarian makna keindonesiaan dan pendidikan anak bangsa. Kaitan itu dapat dicermati dalam proses sejarah bangsa kita. Dari keberhasilan dan kegagalan, diharapkan bahwa selalu ada kesempatan-kesempatan emas untuk membangun pendidikan kita agar lebih memanusiakan manusia-manusia merdeka.

⁶⁸ Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, Jakarta: Kompas 2006 (cetakan II), hlm. 197

Kesadaran ini sepertinya tertanam pula pada pemerintahan di era reformasi ini. Paling tidak, terbukti dari itikad baik meng-amandemen pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan (dicatat sebagai bagian dari amandemen ke-4 tahun 2002). Dalam amandemen itu, dicantumkan beberapa hal baru, misalnya hak warga negara mendapatkan pendidikan (ay. 1), pendidikan dasar yang wajib diikuti setiap warganegara dan tanggungjawab pemerintah untuk membiayainya (ay. 2), kewajiban pemerintah menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional (ay. 3), anggaran pendidikan yang tidak boleh kurang dari 20% APBN atau APBD (ay. 4), dan kewajiban pemerintah memajukan iptek demi kesejahteraan (ay. 5).

Meskipun demikian, kita masih melihat kondisi real pendidikan kita yang masih memprihatinkan. Kini, pendidikan di Indonesia sedang mengalami krisis. Berbagai persoalan belum juga terselesaikan dengan memuaskan. Sebut saja misalnya: ketersediaan fasilitas dan sarana penunjang yang belum memadai, sistem pendidikan nasional yang berubah-ubah, penyelenggaraan ujian nasional yang ramai diperdebatkan, pendidikan yang hanya berorientasi pada pasar, pendidikan yang bermutu identik dengan pendidikan mahal, dsb. Kenyataan seperti ini tentu perlu direfleksikan bersama karena pada hakikatnya pendidikan

menjadi salah satu faktor pemicu perubahan budaya yang mendasari transformasi lain di segala bidang. Secara khusus, melalui pendidikan ini pula, sejarah Indonesia mencatat adanya awal kesadaran penuh sebagai manusia Indonesia yang merdeka.

Tulisan ini ingin menelusuri jejak pencarian makna keindonesiaan dalam pendidikan kita dan bagaimana pencarian makna keindonesiaan itu seharusnya tetap menjadi bagian dari pendidikan kita.

PROSES PENEMUAN KESADARAN KEINDONESIAAN DALAM PENDIDIKAN ALA PEMERINTAH KOLONIAL

Harus diakui bahwa pemerintah kolonial sejak zaman VOC sampai pemerintahan Hindia Belanda termasuk lamban menanggapi isu pentingnya pendidikan. Hal ini tak lepas dari cara pandang kolonialisme terhadap negeri jajahan. Negeri jajahan adalah negeri tempat mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk kemajuan negeri induk.⁶⁹ Di samping itu, sejak awal sejarah kolonialisasi

⁶⁹ Pernyataan itu tertuang dalam Statua Hindia Belanda tahun 1801, dan masih terus dipertahankan sampai tahun 1854. Lih. S. Nasution, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara 2001, hlm. 8

Hindia-Belanda, pendidikan menjadi tugas dan tanggungjawab lembaga agama.⁷⁰

Kesadaran akan pentingnya pendidikan tumbuh seiring dengan kebutuhan akan tenaga pegawai rendahan untuk mengawasi berbagai aktivitas ekonomi pemerintah, seperti perkebunan, pertambangan, administrasi, transportasi, dsb.⁷¹ Pentingnya pendidikan itu sudah muncul pada era Gubernur Jendral Dandies. Ia ingin agar anak-anak pribumi (Jawa) pun setidaknya dididik untuk mengenal baca, tulis, berhitung sederhana, kesusilaan, adat istiadat, pengertian agama-agama, dll. Sayangnya, pemerintah tidak mengalokasikan dana untuk anggaran pendidikan. Pada tanggal 30 September 1848, keluar surat keputusan Raja

⁷⁰ Hal ini didasari oleh kepentingan VOC yang hanya berpusat pada kegiatan berdagang dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya dari negeri jajahan. Pendidikan hanya diperuntukkan bagi anak-anak pegawai Belanda, khususnya terkait dengan menjaga moralitas mereka. Tugas mendidik semacam itu akhirnya lebih tepat diberikan pada lembaga agama. Karenanya, kurikulum utamanya adalah katekismus, baca, tulis, menyanyi dan berdoa. Hanya saja, VOC tidak ingin Lembaga Keagamaan, dalam hal ini Gereja, terlalu bebas mengatur penyelenggaraan pendidikan. Karena itu, meskipun mengajar agama dan berasal dari kalangan agamawan, para pengajar/pendidik adalah juga pegawai-pegawai VOC. Di kalangan pribumi, ada juga pendidikan tradisional yang dilakukan di pesantren dan padepokan. Fokusnya pun terkait dengan pendidikan keagamaan. Lih. *Ibid.*, hlm. 4-7; bdk. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, hlm. 198; bdk. Sumarsono Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka 1986, hal. 77-85

⁷¹ Bdk. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, hlm. 197-198

Belanda (*Koninklijke Besluit* 1848) tentang wewenang kepada Gubernur Jenderal untuk menyediakan biaya 25.000 gulden per tahun untuk pendirian sekolah-sekolah bumiputera di Pulau Jawa dengan tujuan utama mendidik calon-calon pegawai negeri.⁷² Lambat-laun, pemerintah kolonial menghimbau agar setiap bupati pribumi menyelenggarakan sekolah bagi bumiputera.⁷³ Akan tetapi, kendala paling besar adalah ketersediaan tenaga guru.⁷⁴

Pada era Politik Etis, ada desakan dari golongan etis terhadap pemerintah Hindia Belanda untuk mengupayakan peningkatan kesejahteraan bumiputera.⁷⁵ Pendidikan dilihat

⁷² Kebijakan ini lambat laun tak berjalan sebagaimana mestinya karena biaya pasti membengkak. Misalnya, pada awal penerapan, ternyata pemerintah harus mengeluarkan 40.000 gulden dari anggaran yang cuma 25.000 gulden. Akibatnya, pemerintahan Gubernur Jenderal meminta dengan paksa para penguasa lokal untuk mengadakan pendidikan sendiri. Pada tahun 1882-1892, pemerintah Hindia Belanda terpaksa menutup beberapa sekolah dan tidak lagi menganggarkan pendidikan karena terkena dampak krisis ekonomi global pada saat itu. Bdk. Sumarsono Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari...*, hlm. 92-93

⁷³ Bdk. S. Nasution, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, hlm. 8-14; Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, hlm. 203-210

⁷⁴ Bdk. Wasti Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional 1983, hlm. 43;

⁷⁵ Tugas menyejahterakan bumiputera diyakini, misalnya oleh **Van Deventer**, sebagai hutang kehormatan bangsa Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda sesuai dengan norma dan ajaran kekristenan. Van Deventer mengajukan tiga program utama untuk memajukan kesejahteraan pribumi, yakni pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Pendidikan untuk bumiputera harus diarahkan pada tujuan

sebagai salah satu jalan untuk memajukan kesejahteraan bumiputera. Bahasa Belanda diperkenalkan di segala tingkatan pendidikan formal. Anak-anak bumiputera juga diperkenankan mengenyam pendidikan yang setara dengan pendidikan yang diterima oleh anak-anak Eropa, baik di ELS, MULO, AMS, HBS, maupun di perguruan-perguruan tinggi di Belanda. Meskipun propaganda kaum etis terkesan baik, kebijakan yang dijalankan pemerintah Hindia Belanda tidak juga menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan bagi bumiputera.⁷⁶ Dalam suatu riset tentang pengaruh Politik Etis terhadap kemajuan bumiputera, disimpulkan bahwa setelah lima tahun seorang anak tamat dari Sekolah Desa atau Sekolah Kelas II, mereka tetap buta aksara.⁷⁷ Lulusan-lulusan Sekolah Kelas II juga sulit mendapatkan pekerjaan, bahkan yang paling rendah sekalipun, seperti pekerjaan menjadi carik sekretaris desa) atau *klerk* (juru tulis)

membebaskan rakyat secara bertahap agar mampu mandiri. **Snouck Hurgronje** mengajukan teori asosiasi. Baginya, pendidikan bagi bumiputera dari golongan ningrat sejatinya adalah *proses asosiasi*. Proses asosiasi yang dimaksud adalah proses membuat struktur sosial, politik, dan ekonomi rakyat bumiputera menjadi sama dengan sistem sosial, politik, dan ekonomi negeri-negeri Eropa yang sudah maju. Lih. S. Nasution, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, hlm. 15-16

⁷⁶ Bdk. *Ibid.*, hlm. 18-19; Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, hlm. 241-246

⁷⁷ Bdk. Wasti Soemanto dan F.X. Soeyarno, *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, hlm. 48

Secara umum, praktik kebijakan pendidikan pemerintah kolonial adalah:⁷⁸

a) Gradualisme

Penyelenggaraan pendidikan bagi pribumi berjalan bertahap secara sangat lamban. Alasan utamanya adalah: 1) Belanda melihat tanah kolonial sebagai tanah perasan demi keuntungan sebesar-besarnya negeri Belanda sehingga pendidikan bukanlah program utama pemerintah kolonial; 2) pendidikan anak-anak bumiputera menjadi tanggungjawab para pembesar setempat.

b) Dualisme

Ada perbedaan pendidikan formal bagi anak-anak Belanda dan bumiputera dari banyak segi, yakni: inspeksi, kurikulum, bahasa pengantar, pembiayaan. Bagi anak Belanda pun, ada perbedaan antara ELS kelas I dan II untuk anak-anak pejabat tinggi, ada pula ELS kelas tiga untuk anak indo dan orang-orang pribumi yang disetarakan dengan bangsa Eropa karena sama-sama Kristen, seperti orang Ambon, orang Manado, dll. Khusus untuk anak pribumi, ada Sekolah

⁷⁸ Bdk. S. Nasution, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, hlm. 20-30; bdk. Sumarsono Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari...*, hlm. 86

Kelas Satu (yang kemudian pada tahun 1914 menjadi HIS), yakni sekolah untuk anak-anak pemuka bumiputera yang terhormat. Ada pula Sekolah Kelas Dua bagi pribumi umum dengan pengantar bahasa Melayu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan masih dipengaruhi oleh rasialisme, agama, dan pembedaan status sosial. Akan tetapi, hal ini dibungkus dengan rasionalisasi bahwa setiap anak memerlukan pendidikan yang berbeda-beda sesuai dengan golongannya sehingga ada ELS (anak Belanda), HIS (untuk pribumi), HCS (anak Cina), HAS (anak Arab). Dualisme ini baru dihapuskan selama dan sesudah Perang Dunia I⁷⁹

c) Kontrol sentralistis

Kebijakan dan tata pelaksanaan pendidikan sangat sentralistis-hierarkis mulai dari raja/ratu, menteri

⁷⁹ Terjadi perubahan terhadap kebijakan diskriminatif pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1848, penduduk digolongkan dalam empat golongan, yakni Eropa, yang disamakan dengan Eropa, Bumiputera, dan yang dipersamakan dengan Bumiputera. Pada tahun 1920, terjadi perubahan, yakni golongan Eropa, Bumiputera, dan Timur Asing. Sementara itu, di tingkat penduduk Bumiputera, pemerintah membedakan rakyat dalam tiga golongan, yakni kaum aristokrat (bangsawan atau pemimpin adat), pemimpin agama (ulama) dan rakyat biasa. Penggolongan sekolah mengikuti penggolongan yang *resmi* diakui oleh pemerintah. Lih. Sumarsono Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari...*, hlm. 111

jajahan, gubernur jenderal, sampai ke direktur pendidikan. Segala kebijakan terkait dengan pendidikan bumiputera, haruslah mendapat izin resmi dari pemerintah pusat.

d) Prinsip konkordansi

Pemerintah berusaha untuk menyamakan standar antara sekolah-sekolah di Hindia Belanda dengan yang ada di negeri Belanda. Akibatnya, sekolah-sekolah formal berorientasi pada Belanda, mengabaikan kebudayaan lokal dan bahasa Melayu.

e) Keterbatasan tujuan

Pendidikan formal di sekolah melulu hanya untuk memenuhi kebutuhan akan pegawai murah (pengawas, klerk, pegawai admin, dll). Di samping itu, pendidikan formal diberikan pada calon-calon pembesar lokal agar pemerintah tidak mengalami kesulitan dalam pengelolaan negeri jajahan melalui tangan kekuasaan mereka. Dengan demikian, pemerintah hanya ingin melanggengkan supremasi politik dan ekonomi di negara jajahan

f) Tanpa perencanaan sistematis

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh pejabat lokal tidak

terkoordinasi, otonom, tanpa kesatuan. Pendidikan bagi bumiputera tidak boleh merugikan kepentingan kolonial.

Meskipun pendidikan formal pada era kolonial sama sekali tidak berpihak pada bumiputera, ternyata masih ada buah-buah kebaikan yang bisa dinikmati. Buah-buah ini mengarah pada pembentukan kesadaran sebagai manusia Indonesia yang merdeka.

Buah pertama yang mungkin bisa dicatat adalah semakin dirasakannya bahasa Melayu sebagai alat komunikasi yang disebarluaskan dan mempermudah diterimanya bahasa ini kelak menjadi bahasa persatuan.⁸⁰ Di samping itu, penguasaan bahasa asing membuka wacana bangsa menjadi lebih luas. Berita-berita tentang kebangkitan bangsa-bangsa Asia dalam bahasa asing diserap kemudian disajikan dalam bahasa Melayu melalui berbagai cara sehingga akhirnya banyak orang yang merasakan gairah kebangkitan bangsa-bangsa Asia.⁸¹ Selain itu, pemerintah membuka kemungkinan bagi bumiputera untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, baik di Hindia Belanda sendiri maupun di negeri Belanda. Hal ini berarti

⁸⁰ Bdk. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, hlm. 200-201

⁸¹ Bdk. *Ibid.*, hlm. 246-247

kesempatan menimba ilmu dan informasi tentang banyak hal semakin luas. Semakin luas ilmu, semakin luas pula bidang pengabdian yang tersedia.

Buah yang tak kalah penting adalah bahwa pendidikan ala Eropa waktu itu ternyata membangkitkan keberanian para pemuda bumiputera untuk reflektif dan kritis menilai situasi dirinya.⁸² Model pendidikan Eropa sejak abad ke-18 sangat dipengaruhi oleh Abad Pencerahan Eropa (*Aufklärung*). Pendidikan selalu memiliki ciri-ciri utama, yakni percaya pada nalar, pada sifat-sifat baik manusia, pada nilai-nilai etis perikemanusiaan, dan menjunjung tinggi akal sehat.⁸³ Karena itu, bumiputera yang akhirnya mengenyam pendidikan ala barat melalui sekolah-sekolah kolonial menjadi kritis atas budaya feodalnya sendiri. Mereka juga kritis terhadap aneka bentuk ketidakadilan sosial yang mereka alami sebagai bangsa jajahan.

⁸² Bdk. Savitri Scherer, *Keselarasn dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*, terj. Jiman S. Rumbo, Jakarta: Komunitas Bambu 2012, hlm. 13-28

⁸³ Bdk. Sumarsono Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari...*, hlm. 87, 102-103

PENGEMBANGAN KESADARAN AKAN KEINDONESIAAN

Dari bidang pendidikan, kesadaran akan jatidiri keindonesiaan dipertajam dalam kehidupan politik praktis. Kesadaran berpolitik menuju Indonesia memang dipelopori oleh kaum muda terpelajar. Tercatat bahwa Boedi Oetomo (BO) sebagai organisasi kebangsaan pertama lahir di antara para pelajar STOVIA (sekolah dokter pribumi). Meskipun masih fokus pada upaya-upaya konkret demi kesejahteraan dan kemajuan bangsa Jawa, lahirnya BO memicu berdirinya organisasi-organisasi kebangsaan sejenis seperti SDI, SI, Jong Java, Jong Minahasa, dsb.

Arah kesatuan jatidiri bangsa Indonesia makin jelas ketika para mahasiswa bumiputera di negeri Belanda mendirikan Perhimpunan Indonesia. Mereka tidak hanya menimba ilmu, tetapi juga mengorganisasi diri untuk kesatuan dan kemajuan bangsa.⁸⁴

Keterlibatan para kaum terpelajar dalam kehidupan bangsa semakin kuat ketika organisasi yang mereka dirikan sifatnya kepartaian dan memiliki tujuan jelas, yakni Indonesia merdeka. *Indische Partij* adalah partai politik pertama di kalangan bumiputera. Tujuan partai sangat tegas, yakni Indonesia merdeka. Setelah IP, bermunculan

⁸⁴ Lih. Parakriti T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, hlm. 342-356

organisasi-organisasi politik lain yang memiliki tujuan yang sama. Pada saat itulah, pemerintah kolonial sadar akan adanya gerakan baru kaum terpelajar nasionalis. Pemerintah memberikan reaksi keras terhadap organisasi-organisasi politik dengan memberikan hukuman pembuangan pada tokoh-tokohnya. Akan tetapi, hukuman pembuangan itu justru memantapkan kehendak untuk mewujudkan jatidiri sebagai manusia merdeka.⁸⁵

Sejalan dengan geliat organisasi kebangsaan, bermunculan media massa yang dikelola oleh bumiputera untuk kepentingan bumiputera sendiri. *Medan Prijaji* tercatat sebagai surat kabar berbahasa Melayu yang menyadarkan para bumiputera akan hak-haknya yang ditindas.⁸⁶ *Medan Prijaji* menjadi pembela bumiputera dalam beberapa kasus hukum. Sejak saat itu, keberadaan media massa tak pernah lepas dari gerak kebangkitan nasional. Hampir semua tokoh pendiri bangsa ini menempa dirinya lewat tulisan-tulisan di media massa seperti Soewardi Soerjaningrat, dr. Tjipto, dr. Soetomo, Tan Malaka, Hatta, dll.

⁸⁵ Lih. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, hlm. 342-343; lih. Savitri Scherer, *Keselaras dan Kejanggalaan*, hlm. 54-63, 109-111

⁸⁶ Lih. Parakitri T. Simbolon, *Menjadi Indonesia*, hlm. 258; Lih. Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, terj. Hilmar Farid, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1997, hlm. 44-46

Yang tak kalah menarik untuk dicermati adalah keberadaan lembaga pendidikan yang didirikan sendiri oleh bumiputera. Taman Siswa didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 oleh R.M. Soewardi Soerjaningrat atau yang kemudian dipanggil Ki Hajar Dewantara. Taman Siswa adalah badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-citanya. Taman Siswa didirikan untuk pendidikan bagi bumiputera agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, merdeka lahir batin, luhur akal budinya, cerdas dan berketerampilan, serta sehat jasmani dan rohaninya untuk menjadi anggota masyarakat yang mandiri dan bertanggung jawab atas kesejahteraan bangsa, tanah air, serta manusia pada umumnya.

Dari organisasi kebangsaan, media massa, dan lembaga pendidikan khas seperti Taman Siswa, kita bisa melihat bahwa embrio kebangsaan yang ditanamkan secara tidak sengaja melalui pendidikan kolonial dikembangkan menuju kesadaran konkret “menjadi manusia Indonesia”. Ciri khas pelajar yang peduli pada situasi real bangsanya menjadi pokok pembicaraan menarik. Bagaimana kepedulian itu bisa muncul dan menjadi energi besar menggerakkan roda organisasi, media massa dan lembaga pendidikan? Hal ini juga menunjukkan bahwa pendidikan tidak pernah

menjadi faktor tunggal penentu. Pendidikan harus sinergis dengan berbagai bentuk aktivitas masyarakat untuk mencari makna jatidiri kebangsaannya.

PENDIDIKAN PADA MASA PENJAJAHAN JEPANG

Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat pada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Era penjajahan Jepang mulai. Pada waktu itu, Jepang sendiri mempropagandakan Kemakmuran Bersama Asia Raya. Hasilnya adalah pemiskinan dan penderitaan semakin mendera bangsa Indonesia.

Jepang memang datang melulu untuk menjadikan Indonesia sumber bahan mentah bagi militer dan industrinya. Menang perang adalah tujuan utama mereka. Karena itu, tidak heran bahwa pendidikan bumiputera terabaikan. Jumlah sekolah, guru, dan murid pun menurun drastis. Pendidikan yang diselenggarakan memang akhirnya hanya untuk kebutuhan jangka pendek, yakni menghapus ingatan akan zaman Hindia Belanda dan diganti dengan jargon Kemakmuran Asia Raya, mendapatkan tenaga (militer) yang secara fisik dan mental tangguh untuk kepentingan pertahanan negara.

Ada beberapa hal menarik yang patut dicermati terkait dengan problem pendidikan.⁸⁷ Yang pertama, Jepang menghapus penggunaan bahasa Belanda. Hanya Bahasa Indonesia dan bahasa Jepang yang boleh dipakai sebagai bahasa resmi, baik di kantor-kantor maupun di sekolah-sekolah. Dari sinilah, bahasa Indonesia semakin luas dipakai dan diperbaharui. Buku-buku asing juga dilarang. Akibatnya, para penulis tertantang untuk menerjemahkan karya-karya penulis asing dalam bahasa Indonesia. Pendek kata, bahasa Indonesia tidak lagi hanya sekedar sebagai bahasa pergaulan, bahasa pemersatu, atau bahasa kelas dua. Bahasa Indonesia telah pula menjadi alat untuk mengekspresikan pikiran. Istilah-istilah pun semakin modern.

Yang kedua, diskriminasi penduduk ditiadakan. Tidak ada lagi pelapisan berdasarkan agama, ras, dan status sosial. Semuanya sama dan harus mengabdikan pada satu pemimpin yang sama, yakni kaisar. Akibatnya, semua bersekolah di sekolah-sekolah yang sama. Pemerintah Jepang sangat ketat mengontrol sistem pendidikan yang seragam ini.

Yang ketiga, pendidikan diwarnai dengan semangat juang kebangsaan dan militeristik. Ada pendidikan bela diri dan senam pagi untuk para siswa agar secara fisik dan

⁸⁷ Bdk. Sumarsono Mestoko, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari...*, hlm. 136-141

mental, mereka mampu mempertahankan dan memperjuangkan kepentingan bangsanya dari ancaman bangsa lain. Ada pula latihan kepemimpinan dengan gaya militer Jepang. Ada upacara bendera setiap pagi untuk memupuk cinta tanah air dan pemimpin meskipun pada waktu itu, semuanya masih ditujukan pada tanah air dan pemimpin bangsa Jepang, yakni kaisar. Ada pula dorongan untuk mencintai kebudayaan nasional.

TANTANGAN PENDIDIKAN DI ERA PERTENTANGAN IDEOLOGIS

Setelah merdeka, bangsa Indonesia menetapkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah salah satu tujuan nasional yang ingin diwujudkan oleh negara Indonesia merdeka. Meskipun demikian, mewujudkan pendidikan yang memerdekakan tidaklah mudah. Tantangan utama adalah pertentangan ideologis yang terjadi. Pada era revolusi kemerdekaan sampai era perang dingin, pertentangan ideologi berimbas pada penyelenggaraan pendidikan. Satu ideologi senantiasa menegasi keberadaan ideologi yang lain. Penyatuan ideologi sangat sulit. Soekarno, misalnya, berupaya sejak pra-kemerdekaan memperjuangkan kesatuan ideologis antara nasionalisme, islamisme, dan

komunisme. Yang terjadi, upaya itu sia-sia dan hanya sebatas jargon, namun tidak terjadi dalam realitas.

Era Soeharto tidak lebih baik. Pertentangan ideologis ditiadakan dan diganti dengan ideologi negara, yakni Pancasila. Secara prinsip, tidak ada yang keliru dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara sebab bagaimana pun, Pancasila adalah prinsip dasar dan utama yang di atasnya berdiri negara kesatuan republik Indonesia. Akan tetapi, dalam penerapannya, ideologi Pancasila ini dibentengi oleh berbagai macam aturan dan pedoman yang membelenggu. Kritik terhadap Pancasila saja sudah berarti pengkhianatan. Sejarah bangsa pun difokuskan pada sejarah perjuangan fisik, bukan sejarah dalam arti yang luas. Banyak sekali kebijakan pendidikan yang lebih bernuansa politis daripada filosofis atau pedagogis. Pendidikan menjadi alat propaganda ideologi dan kepentingan negara.⁸⁸ Karena itu, partisipasi masyarakat pun dalam pendidikan diabaikan demi keseragaman dan kesatuan.⁸⁹

⁸⁸ Bdk. A. Waidl, "Pendidikan yang Memahami Manusia", dalam A. Atmadi dan Y. Setyaningsih (eds.), *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*, Yogyakarta: Kanisius dan Universitas Sanata Dharma 2000, hlm. 18

⁸⁹ Lih. Darmaningtyas, "Makna Pendidikan", dalam Islah Gusmian dan Sunarwoto Dema (eds.), *Pendidikan yang Memiskinkan, Kumpulan Tulisan Darmaningtyas*, Yogyakarta: Galang Press 2004, hlm. 1-26

Di era reformasi ini pun, pertentangan ideologis masih terasa hebat. Adanya otonomi daerah kadang disalahmengertikan sebagai segala upaya mengangkat kekhasan daerah tanpa memperhitungkan nilai kesatuan dan kebangsaan yang sudah dibentuk lebih dulu dalam sejarah Indonesia. Penekanan nilai ketakwaan dan akhlak terasa amat kuat sehingga nilai-nilai lain terkait dengan kemanusiaan, keadilan sosial dan demokrasi terabaikan.

Karena itu, kesadaran akan multikulturalisme dan pluralisme tidak pernah dilepaskan dari refleksi atas jatidiri kita sebagai manusia Indonesia. Kebhinnekaan Indonesia disatukan oleh tekad bersama untuk memajukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Pancasila memang menjadi fundamen yang juga mengikat semua komponen bangsa. Meskipun demikian, keberadaan Pancasila tidaklah meniadakan keberagaman, tapi justru menjamin keberagaman itu untuk bisa hidup bersama-sama menuju Indonesia semakin adil dan sejahtera.

PENUTUP:

PENDIDIKAN SEHARUSNYA MEMERDEKAKAN MANUSIA INDONESIA

Dari pemahaman sejarah ini, kita diajak untuk melihat problem-problem pendidikan dalam satu

pengenalan yang sama, yakni pendidikan penting untuk memerdekakan manusia Indonesia. Apakah proses keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pendidikan selama ini sudah mampu memperjelas pencarian makna keindonesiaan?

Ada beberapa poin penting yang bisa kita pakai sebagai titik tolak refleksi lebih lanjut ketika kita menelaah kaitan antara pencarian makna keindonesiaan dan pendidikan:

- a) Penemuan jati diri sebagai manusia Indonesia adalah efek samping dari sistem pendidikan kolonial yang melulu mencari keuntungan sebesar-besarnya untuk negeri induk. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Kenyataan ini semakin menunjukkan bahwa pendidikan sebenarnya adalah proses penyadaran dan pembebasan dari berbagai bentuk penindasan, termasuk pembodohan. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan yang memadai, orang dibawa pada hakikat ilmu pengetahuan sebagai sarana manusia untuk memahami kebenaran dalam dirinya, lingkungan sekitarnya dan Tuhan. Sekuat apa pun belenggunya, kebenaran akan menampakkan diri pada para pencarinya. Para pendiri bangsa ini setia menjadi seorang pencari kebenaran

sampai akhirnya kebenaran itu menuntun mereka pada jatidiri manusia merdeka.

- b) Pendidikan Manusia Indonesia tidak bisa diberi beban muatan ideologis. Pendidikan itu tidak mempunyai agama atau aliran politik atau ideologis tertentu. Pendidikan itu hanya memiliki satu tujuan yakni memanusiaikan manusia Indonesia. Pendidikan itu hanya tunduk pada nilai-nilai kemanusiaan universal. Pemerintah kolonial ataupun pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan tidak akan pernah berhasil memanusiaikan manusia bila masih men-subordinasikan pendidikan di bawah naungan politik tertentu. Seandainya suatu pendidikan diselenggarakan oleh lembaga agama, lembaga agama itu harus tunduk pada hukum kodrat tentang manusia dan segala hasil proses belajarnya. Di sini, agama dan sistem nilainya hanya menjamin agar nilai-nilai manusiawi yang didasari oleh hukum kodrat dihargai sebagaimana mestinya dalam proses pembelajaran. Begitu pula ketika pendidikan harus disubordinasikan pada ideologi Pancasila, kita diajak kritis merefleksikan lebih dulu apa itu Pancasila, bukan dipaksa menerima begitu saja tanpa sikap kritis. Sejauh refleksi atas Pancasila itu menghasilkan keselarasan antara Pancasila dan kodrat manusia,

pendidikan yang pancasilais pun adalah pendidikan yang manusiawi, bukan pendidikan penyeragaman dan tirani-militeristik.

- c) Pendidikan harusnya berakar pada kenyataan sosial. Bagaimana pun, pendidikan adalah suatu proses budaya. Sebagai proses budaya, pendidikan tidak pernah boleh lepas dari akar realitas sosialnya. Pemahaman akan kenyataan sosial membuat pendidikan memiliki nilai praktis, yakni menjawab kebutuhan yang tumbuh pada masyarakat tertentu. Kebutuhan masyarakat ini bisa jadi tidak sama dengan kepentingan pemerintah ataupun kepentingan pasar ekonomi global. Karena itu, ketika pemerintah tidak membantu terselenggaranya pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakatlah yang akan bergerak dan terlibat.
- d) Pendidikan merupakan rangkaian sistem yang terkait dengan banyak bidang
Pendidikan bukan suatu sistem tertutup. Pendidikan jelas perlu bersinergi dengan bidang lain. Sebagai suatu proses budaya, pendidikan memerlukan bidang-bidang lain yang tercakup pula dalam kebudayaan manusia.

Di tengah himpitan kebijakan pendidikan nasional, masih ada angin segar yang menyerukan suara untuk

kembali pada peran pendidikan yang sejati. Pendidikan harus terus memerdekakan manusia-manusia Indonesia, bukan malah melanggengkan kekuasaan dan makin menyengsarakan kaum tertindas. Ketika pemerintah gagal menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan perannya yang sejati, masyarakat tergerak untuk memenuhi dahaganya sendiri dan mendidik dirinya sendiri. Pendidikan alternatif yang diselenggarakan oleh masyarakat justru langsung merupakan perjuangan konkret memerdekakan manusia.

Almarhum Rm. Mangunwijaya, misalnya, memiliki visi pendidikan yang kuat.⁹⁰ Baginya, pendidikan harus bisa dinikmati oleh anak-anak miskin dan tertindas. Mereka pun berhak hidup sebagai manusia-manusia merdeka. Karena itu, ia menyusun kurikulum pendidikan bagi anak-anak miskin secara mandiri. Proses belajar terjadi secara dialogis antara pendidik dan anak-anak didiknya. Ada kemerdekaan untuk bertanya dan hak untuk dijawab. Ada pertukaran pengalaman, tidak hanya sekedar transfer ilmu. Isi pengetahuan yang diberikan pun berbasis pada realitas hidup anak didik dan memperhitungkan *local genius*. Selain itu, Rm. Mangun juga membuat sinergi antara pendidikan dan aneka

⁹⁰ Bdk. Y.B. Mangunwijaya, "Paradigma Baru Pendidikan Rakyat", dalam Y.B. Mangunwijaya, *Saya Ingin Membayar Utang kepada Rakyat*, Yogyakarta: Kanisius 1999, hlm. 127-133; Bdk. Firdaus M. Yunus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya*, Yogyakarta: Logung Pustaka 2004, hlm. 72-83;

bidang kehidupan seperti misalnya pilihan arsitektur, tata kelola lingkungan, dan pemberdayaan kaum miskin di perkotaan. Pendidikan sekali lagi bukanlah faktor penentu yang berdiri sendiri, melainkan faktor penentu yang harus pula saling menyokong faktor-faktor lain yang dimiliki oleh masyarakat.

DAFTAR ACUAN

1. Atmadi, A dan Setyaningsih, Y. (eds.). *Transformasi Pendidikan Memasuki Milenium Ketiga*. Yogyakarta: Kanisius dan Universitas Sanata Dharma 2000
2. Darmaningtyas,. *Pendidikan yang Memiskinkan*. Tulisan-tulisan diedit oleh Islah Gusmian dan Sunarwoto Dema. Yogyakarta: Galang Press 2004
3. Mangunwijaya, Y.B. *Saya Ingin Membayar Utang kepada Rakyat*. Yogyakarta: Kanisius 1999
4. Mestoko, Sumarsono, dkk., *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, Jakarta: Balai Pustaka 1986

5. Nasution, S. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara 2001
6. Scherer, Savitri. *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. terj. Jiman S. Rumbo. Jakarta: Komunitas Bambu 2012
7. Shiraishi, Takashi. *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*. terj. Hilmar Farid. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1997
8. Simbolon, Parakitri T. *Menjadi Indonesia*. Jakarta: Kompas 2006 (cetakan II)
9. Soemanto, Wasti dan Soeyarno, F.X., *Landasan Historis Pendidikan Indonesia*, Surabaya: Usaha Nasional 1983,
10. Yunus, Firdaus M. *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya*. Yogyakarta: Logung Pustaka 2004
11. N. Driyarkara, “Buku VI: Menalar Dasar Negara Indonesia”, dalam Sudirja, A. dkk. (eds.). *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, Gramedia Pustaka Utama, Kanisius, Ordo Serikat Yesus Provinsi Indonesia 2006

12. Teks Pidato Soekarno di depan *Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai* atau Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, diunduh dari <http://kepuustakaan-presiden.pnri.go.id/> pada tanggal 2 September 2013, pk. 15.43;

BAB 5

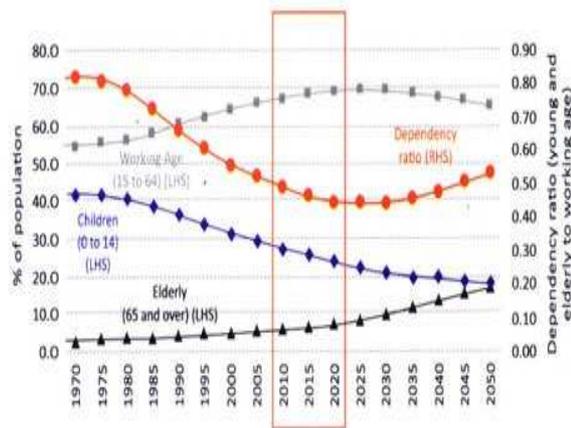
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL DALAM TANTANGAN⁹¹

Oleh: Anita Lie

Tiga dekade mendatang ini merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk menikmati dan memanfaatkan Bonus Demografi (*The World Bank*, 2010). Ketika banyak negara mapan sedang menderita sindrom *The Graying of the Society* dan menanggung beban membesarnya kelompok masyarakat lanjut usia yang harus ditopang oleh kelompok masyarakat usia produktif yang semakin menciut, Indonesia justru mempunyai potensi sangat besar untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dengan situasi demografi yang sangat menguntungkan. Dalam dekade 2010 sampai dengan 2030, Indonesia akan mempunyai penduduk usia produktif (15 s/d 64 tahun) sebesar 70% sementara anak-anak berusia 0-14 tahun berkisar di bawah 30% dan penduduk usia lanjut tidak lebih besar dari 10%.

⁹¹ Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 2 Oktober 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya. Artikel ini juga pernah dimuat dalam *ARETÉ*, Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, Vol. 02, No. 01, Februari 2013, hal. 57-70.

Grafik di bawah ini menunjukkan momentum Bonus Demografi tersebut:



Source: The World Bank

Potensi pertumbuhan ini akan menjadi kenyataan jika prakondisi bisa dipenuhi, yakni persiapan penduduk usia produktif yang terdidik dan sehat. Orang-orang muda usia produktif yang sehat, trampil, dan kompeten akan memberikan kontribusi sangat signifikan bagi pertumbuhan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Sementara itu pemerhati yang skeptis terhadap situasi bonus demografi ini justru mencemaskan ancaman bom demografis jika pertumbuhan ekonomi tidak disertai

dengan perhatian kepada orang muda dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi mereka (Hardjono, 2012). Kecemasan ini mengacu pada tesis Gunmar Heinsohn, profesor ilmu sosial di Universitas Bremen, direktur Raphael-Lemkin Institute for Comparative Genocide Reseach, yang menemukan dalam penelitiannya keterkaitan antara jumlah penduduk usia muda dengan kekacauan dan kekerasan sosial. Melalui studi sejarah, Heinsohn menunjukkan bahwa jumlah orang muda yang tidak bisa menemukan pekerjaan yang sesuai dan penghasilan yang memuaskan akan berubah menjadi bom demografis karena jumlah besar energi muda yang tidak puas memuat resiko tinggi untuk menjadi sumber ketidak-stabilan sosial dan politis. Secara spesifik, Heinsohn menulis, "when 30 % or more of a nation's male inhabitants are in the 15-29 age bracket and there is no sufficient employment, the result is chaos, violence and upheaval."

Dalam kerangka Hausmann, Rodric, dan Velasco (2005), pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat akan mengalami beberapa hambatan potensial, di antaranya rendahnya mutu sumber daya manusia. Pohon diagnostik dalam kerangka HRV mengeksplorasi kelayakan dipekerjakan (*employability*). Pendekatan kelayakan pekerja

melihat masalah dari sudut pandang pendidikan individu dan kondisi kesehatan yang mereka bawa ke pekerjaan.

Dalam konteks ini, peningkatan layanan dasar pendidikan (dan kesehatan) merupakan prasyarat mutlak bagi segala upaya pengentasan kemiskinan dan pertumbuhan masyarakat di Indonesia. Kegagalan dalam bidang pendidikan dituding sebagai penghambat kemajuan perekonomian. Analisis kelayakan kerja (*employability*) di Jawa Timur, misalnya, menunjukkan beberapa temuan yang memprihatinkan (The World Bank, 2011). Rendahnya kualitas sumber daya manusia dkuatirkan akan menjadi kendala bagi produktivitas tenaga kerja di Jawa Timur. Mayoritas angkatan kerja di Jawa Timur berketrampilan rendah. Pada tahun 2009, 55% angkatan kerja di Jawa Timur adalah lulusan SD atau lebih rendah termasuk 21% dari total angkatan kerja yang belum pernah mengenyam pendidikan formal atau tidak menyelesaikan sekolah dasar. Hanya 6% dari angkatan kerja di Jawa Timur yang pernah mendapatkan pendidikan pasca SLTA. Kawasan perkotaan mempunyai angkatan kerja yang lebih terdidik dibandingkan kawasan pedesaan. 44% angkatan kerja di perkotaan lulusan SLTA dibandingkan hanya 15% di pedesaan. Selain itu, indikator pencapaian pendidikan di Jawa Timur seperti angka melek huruf dan lama tahun bersekolah lebih rendah

dibandingkan di provinsi lain di Jawa dan angka rata-rata nasional. Pada tahun 2008, angka melek huruf pria dan perempuan di Jawa Timur adalah 92% dan 83%, lebih rendah dibandingkan angka nasional, yaitu 95% dan 89% serta pencapaian di DKI, yaitu 99,6% dan 97,9%. Demikian pula, rata-rata tahun bersekolah di Jawa Timur lebih rendah secara signifikan, yaitu 7,5 tahun untuk laki-laki dan 6,4 tahun untuk perempuan, dibandingkan dengan DKI Jakarta (10,7 tahun untuk laki-laki dan 9,7 tahun untuk perempuan) dan tingkat nasional (8,0 tahun untuk laki-laki dan 7,1 tahun untuk perempuan). Meskipun akses terhadap pendidikan dasar sudah cukup besar di Jawa Timur, akses terhadap pendidikan menengah masih rendah dan menjadi persoalan di banyak kabupaten. Pada tahun 2009, angka partisipasi murni di Jawa Timur adalah 95% untuk SD, 70% untuk SMP, dan 48% untuk SLTA. Program wajib belajar 9 tahun yang sudah dicanangkan pemerintah masih belum berhasil. Situasi pendidikan di luar Jawa, terutama di daerah tertinggal, bahkan makin menyedihkan. Di atas kertas, berbagai survey (misalnya angka melek huruf dan angka partisipasi murni) menunjukkan disparitas yang sangat memprihatinkan antar provinsi dan daerah.

Visi pembangunan dan kemajuan bangsa melalui pendidikan perlu didukung dengan koherensi sistem dan

kebijakan pendidikan. Saat ini ada tiga permasalahan mendasar dalam sistem dan kerangka kebijakan pendidikan di Indonesia: sentralisasi-desentralisasi, komitmen pendidikan bermutu untuk semua, dan kejelasan sasaran.

SENTRALISASI - DESENTRALISASI

Banyak negara--maju maupun berkembang, masih terus berproses dan ber-eksperimen dalam tarik-ukur sentralisasi dan desentralisasi. Ketika dinamika institusi-institusi politik dan ekonomi sedang berlangsung dalam tarik ulur ini (di antaranya, polemik pembahasan RUU pengganti UU N0. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah), sistem pendidikan di Indonesia juga terus ber-eksperimen dalam kebijakan pusat-daerah. Ada banyak kajian tentang kemajuan pembangunan pendidikan negara-negara maju dan kaitannya dengan pembagian wewenang pusat-daerah. Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang unik dan tidak bisa dibandingkan secara langsung. Namun ada pelajaran berharga yang bisa diambil untuk pembangunan pendidikan di Indonesia. Dalam tarik ulur pusat-daerah, tiga area kebijakan pendidikan perlu diperjelas, yakni kebijakan kurikulum dan ujian nasional, pembiayaan, serta pendidik dan tenaga kependidikan. PP No. 19/2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan memuat delapan standar. Empat di antaranya--standar isi dan standar kompetensi (menyangkut kurikulum), standar pembiayaan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan mengandung nilai strategis dalam pencapaian visi pembangunan pendidikan sementara empat lainnya terlalu instrumental dan teknis (misalnya, standar sarana dan prasarana mengatur jumlah minimal ruang belajar, tempat olahraga, tempat beribadah, dsb).

1. Kurikulum dan Ujian Nasional

Kebijakan kurikulum termasuk substantif karena memuat apa yang penting dan harus diajarkan. Polemik standar kurikulum terus terjadi di kalangan pakar pendidikan. Perbandingan antar negara menjadi materi argumen oleh kedua belah pihak pengusung maupun penentang standar kurikulum. Pakar pendukung kebijakan standar kurikulum berpendapat standar nasional dibutuhkan sebagai acuan untuk memperbaiki mutu pendidikan sementara para penentang mengkhawatirkan standar nasional akan mengarah pada reduksi esensi pendidikan dan minimalisasi pencapaian. Tidak ada bukti cukup kuat yang mendukung korelasi standar nasional dengan kemajuan pendidikan di negara-negara lain. Bahkan, sentralisasi

standar nasional kurikulum di China tidak mengurangi kesenjangan capaian akademik di antara siswa dari berbagai daerah (Yong Zhao, 2010). Finlandia sering menjadi acuan sebagai negara maju dengan mutu dan capaian pendidikan yang cemerlang. Negara ini mempunyai sistem standar nasional namun menyerahkan implementasi dan penilaian pada komunitas lokal. Bangsa Indonesia membutuhkan kesatuan visi tentang tujuan pendidikan dan *the Indonesian Dream* secara nasional dengan eksekusi yang menghargai keberagaman di tingkat lokal. Standar seharusnya menjadi arahan dan ideal, bukan hasil yang harus dicapai. Keunggulan membutuhkan perjuangan menuju yang ideal bukan kepatuhan terhadap ekspektasi minimal.

Beberapa bulan ini pemangku kepentingan Sistem Pendidikan Nasional mengalami kegaduhan seputar rencana pemerintah melaksanakan Kurikulum 2013. Tulisan Wakil Presiden Boediono (Kompas, 27 Agustus 2012) berjudul "Pendidikan Kunci Pembangunan" tampaknya memacu segera diadakan pergantian kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Pusat Kurikulum dan Perbukuan Balitbang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang sudah terus-menerus memantau kurikulum. Namun pernyataan publik dari Wakil Presiden melalui artikel media massa ini langsung disusul dengan keterangan pers Mendikbud

Mohammad Nuh tentang rencana pemerintah mengganti Kurikulum 2006. Dibentuklah tim yang terdiri dari aparat Kemendikbud dan sejumlah tokoh yang terbagi dalam tim narasumber, tim inti, dan tim teknis untuk menggodok Kurikulum 2013.

Wacana yang berkembang di masyarakat terkait dengan Kurikulum 2013 sudah sangat marak. Ada berbagai persepsi dan kritik yang sudah berkembang dan perlu dihargai sebagai bagian dari proses pematangan kurikulum yang sedang disusun. Terlepas dari cemooh "ganti menteri, ganti kurikulum" dari kalangan masyarakat, kurikulum memang harus senantiasa berubah seiring dengan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan. Kritik dari kalangan industri justru diarahkan pada keengganan dunia pendidikan untuk merespon perubahan dalam masyarakat dan metransformasi diri.

Dalam teori kurikulum, keberhasilan suatu kurikulum merupakan proses panjang mulai dari kristalisasi berbagai gagasan dan konsep ideal tentang pendidikan, perumusan desain kurikulum, persiapan pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana, tata kelola pelaksanaan kurikulum--termasuk pembelajaran--dan penilaian pembelajaran dan kurikulum. Dalam konteks ini, setiap kurikulum mempunyai potensi keberhasilan dan

faktor penghambat. Termasuk dalam faktor penentu keberhasilan adalah komitmen pemegang otoritas pendidikan di tingkat daerah, pengembangan kapasitas guru, dan desain penilaian belajar siswa. Apakah Kurikulum 2013 ini akan memenuhi harapan masyarakat dan berperan dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia tentunya masih memerlukan komitmen, perjuangan, dan kerja keras para pembuat kebijakan dan pemegang otoritas pendidikan di tingkat nasional dan daerah, kepercayaan dan dukungan para pemangku kepentingan bidang pendidikan dan kesiapan para pendidik dan tenaga kependidikan sebagai pelaksana pada tingkat tata kelola pelaksanaan kurikulum dan pembelajaran.

Terkait erat dengan kurikulum adalah penilaian hasil belajar atau dikenal oleh publik sebagai ujian. Dalam permasalahan sentralisasi-desentralisasi, ujian nasional mendapat sorotan secara terus menerus sampai pada titik kulminasi April 2013 ketika administrasi ujian nasional terhambat oleh keterlambatan pencetakan dan distribusi soal yang menyebabkan penundaan ujian nasional SMA di 11 provinsi. Walaupun kritikan terhadap ujian nasional terus dilayangkan dan Mahkamah Agung telah memenangkan gugatan masyarakat lewat *citizen law suit* soal penyelenggaraan

ujian nasional pada 2009, pemerintah tetap melaksanakan ujian nasional dengan alasan kebutuhan standarisasi.

Perbaikan sistem penilaian pendidikan mencakup tiga isu sentra: prinsip penilaian belajar, kredibilitas penyelenggaraan, dan perbaikan administrasi. Pertama, prinsip penilaian belajar. Ada berbagai macam tujuan, bentuk, dan format penilaian belajar. Salah satu pepatah yang juga berlaku dalam penilaian belajar--*Not everything that counts can be counted and not everything that can be counted counts* (tidak semua yang bermakna bisa dihitung dan tidak semua yang bisa dihitung bermakna) mensyaratkan adanya penilaian alternatif dan otentik dalam PBM. Ujian berbentuk pilihan ganda seperti ujian nasional tentu saja tidak memadai untuk menilai prestasi, kemajuan, maupun kekurangan peserta didik. Kedua, pelanggaran dalam penyelenggaraan tidak semestinya ditolerir dengan label *ekses* dan *oknum*. Ini bukan persoalan persentase dalam statistik. Dalam pendidikan, rasio pelanggaran (yang dianggap) sangat kecil sudah menjadi persoalan sangat serius karena memberikan dampak modeling negatif yang akan sangat merusak proses pendidikan karakter anak dan bangsa. Pemberitaan mengenai bocornya soal-soal ujian nasional dan beredarnya kunci jawaban sudah menurunkan kredibilitas ujian itu sendiri. Ketiga, perbaikan sistem

membutuhkan evaluasi secara terus menerus. Soal-soal maupun sistem administrasi tes seperti TOEFL dan yang semacamnya sering menjadi bahan kajian terbuka dalam forum-forum para pakar dan peneliti. Bahkan, soal-soal dalam tes terdahulu bisa diakses publik secara terbuka. Selama beberapa dekade pelaksanaannya, ada banyak sekali perubahan dan kemajuan mendasar. Mekanisme evaluasi internal maupun hasil kajian publik telah memungkinkan tes-tes tersebut meningkatkan kesahihan dan keterandalannya secara berkelanjutan.

2. Pembiayaan

Standar pembiayaan serta standar pendidik dan tenaga kependidikan juga memegang peran strategis dalam pembangunan pendidikan secara nasional. Belajar dari negara-negara dengan sistem pendidikan yang berhasil (Kanada, Finlandia, Jepang, Korea, dan Singapura), dibutuhkan komitmen serius terhadap kebijakan pembiayaan dan rekrutmen/pengembangan pendidik. Dalam konteks Indonesia saat ini, belum saatnya menyerahkan kedua hal ini sepenuhnya pada komitmen dan kejujuran pemerintah daerah. Ada variasi komitmen dan kompetensi kepala daerah yang masih terlalu besar. Secara nasional, alokasi

minimum 20% dari APBN (sekitar Rp. 200 triliun pada 2010) untuk pendidikan sudah menghasilkan peningkatan akses terhadap pendidikan (APK dan APM) namun kualitas masih menjadi masalah besar. Bank Dunia mencatat permasalahan ketidak-efisienan dalam pengeluaran pendidikan

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Faktor lain yang terkait dengan kegagalan kurikulum adalah lepasnya peran guru dalam proses penyusunan dan pelaksanaan kurikulum. Agar kurikulum beroperasi dengan efektif, tidak cukup hanya menyusun suatu dokumen dengan kata-kata bagus dan jargon menarik. Sebagai satu bagian sentral dari kurikulum (dalam arti yang luas, baca Glatthorn, 1987), guru sangat menentukan apakah kurikulum yang digunakan akan efektif atau tidak. Dalam konteks ideal, guru terlibat mulai dari tahap persiapan penyusunan kurikulum, proses pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konteks ini, dibutuhkan guru yang profesional, kompeten, berdedikasi, kreatif, dan inovatif. Dalam konteks persekolahan di Indonesia yang sesungguhnya, guru diposisikan sebagai operator untuk menyampaikan kurikulum yang "teacher-proof." Posisi guru sebagai

operator ini tampak nyata di banyak ruang kelas baik dalam kurikulum yang diakui atau ditengarai sebagai "teacher-proof" seperti PPSP misalnya ataupun dalam kurikulum yang seharusnya guru berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan kompeten seperti dalam Kurikulum CBSA, KBK, KTSP, dan yang akan datang Kurikulum 2013.

Kemerosotan mutu pendidikan nasional di Indonesia seperti ditunjukkan dalam berbagai data survei tingkat internasional seperti TIMSS dan Indeks Pembangunan Manusia tidak bisa dilepaskan dari rendahnya mutu guru karena guru mempunyai peran sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Sudah cukup banyak artikel ditulis mengenai rendahnya mutu guru (misalnya Suparno, 2004). Ditengarai kekurangan minat di antara orang muda berkualitas untuk menjadi guru disebabkan salah satunya oleh minimnya jaminan kesejahteraan guru seiring dengan revolusi material dalam era globalisasi (Priyono, 2004).

Satu permasalahan fundamental dalam sistem pendidikan nasional adalah dehumanisasi pendidikan. Seharusnya, pendidikan menghormati dan menghargai martabat manusia beserta dengan segala hak asasinya. Peserta didik seharusnya tumbuh dalam kemanusiaannya

sebagai subyek melalui proses pendidikan. Tapi yang sedang terjadi justru sebaliknya. Ada terlalu banyak contoh dalam praktek-praktek di sekolah yang menunjukkan betapa peserta didik sudah diperlakukan sebagai obyek demi kepentingan ideologi, politik, industri, dan bisnis. Guru sebagai pendidik tidak mampu mengembangkan kesadaran untuk menghentikan gejala dehumanisasi ini karena para guru sendiri merasa terjebak sebagai obyek dalam sistem pendidikan nasional. Berbagai persoalan di bawah ini hanya sebagian kecil dari realita dehumanisasi yang dihadapi guru dan sudah sangat lama disorot masyarakat:

- a. Dengan gaji dan tunjangan yang sangat tidak memadai, guru menjadi terlalu sibuk dengan upaya mencari penghasilan tambahan sehingga tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik diabaikan atau tidak dilakukan dengan sepenuh hati. Sementara itu, di berbagai daerah terpencil dengan kondisi infrastruktur dan transportasi yang masih jauh di bawah standar, peserta didik seringkali menjadi terlantar karena para guru lebih suka berlama-lama tinggal di kota berminggu-minggu setelah mengambil gaji atau liburan sekolah.
- b. Terseret dalam upaya mencari penghasilan tambahan, sebagian guru di kota malah melakukan pelanggaran etika sebagai pendidik dengan memberikan les privat

bagi peserta didik dan bahkan membocorkan soal-soal ulangnya sendiri, ikut menjualkan buku-buku ajar dari penerbit yang memberikan komisi paling memuaskan, atau ikut terlibat sebagai saksi yang menutup mulut atas beberapa tindakan manipulasi dan korupsi oleh birokrasi pendidikan atau pengelola sekolah. Kasus terakhir yang merebak adalah manipulasi yang dilakukan oleh beberapa guru untuk mendapatkan sertifikasi.

- c. Dengan jam mengajar yang panjang dan tugas administratif yang membebani, guru sudah tidak punya waktu untuk membaca dan mengembangkan diri. Pengetahuan, wawasan dan kreativitas guru sulit berkembang. Akibatnya, peserta didik mau bertahan duduk di hadapan guru di dalam kelas hanya karena mereka harus bertahan sebelum bel berbunyi dan menyelesaikan satu jenjang untuk mendapatkan ijazah.
- d. Dengan berbagai kepahitan dan kegetiran hidup sebagai obyek dalam sistem pendidikan nasional, sebagian guru belum mampu mengembangkan mekanisme untuk mengelola emosi negatif mereka sehingga harus mengumpat di kelas, mengasihani diri sendiri atau memperlakukan peserta didik dengan penuh kemarahan.

Tentu saja di berbagai tempat masih ada banyak guru yang cerdas, cemerlang dan berhati nurani. Guru-guru ini senantiasa bersinar di tengah-tengah gambaran suram para guru seperti di atas.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru berupa program sertifikasi guru dan pemberian tunjangan profesi ternyata belum cukup berhasil meningkatkan mutu guru dan prestasi siswa. Penelitian Bank Dunia menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kompetensi antara guru yang sudah bersertifikasi dan yang belum serta tidak ada dampak positif dari sertifikasi guru pada prestasi siswa (2012).

Program sertifikasi guru perlu diintegrasikan dengan program peningkatan profesionalisme guru secara berkelanjutan mulai dari masa pra-jabatan sampai dengan pelatihan dalam masa jabatan.

PENDIDIKAN BERMUTU UNTUK SEMUA

Ketika beberapa negara maju sudah beranjak dari kebijakan “pendidikan dasar untuk semua” menuju pengembangan *knowledge workers*, Indonesia masih tetap harus konsisten terhadap komitmen “pendidikan dasar

untuk semua” sambil melakukan lompatan strategis agar semua anak Indonesia bisa mendapatkan kesempatan menikmati pendidikan bermutu.

Sayangnya, masih ada kesenjangan antara deklarasi komitmen dengan praktik. Di daerah-daerah terpencil, masih banyak anak “lulusan” Sekolah Dasar yang belum kompeten baca-tulis-hitung. Sementara itu, keluarga kelas menengah dan atas berlomba-lomba memasukkan anak mereka ke dalam sekolah-sekolah berstandar internasional, baik dalam struktur pemerintah seperti SBI dan RSBI maupun sekolah-sekolah negeri dan swasta yang telah membeli kurikulum asing.

Sudah saatnya, pemerintah pusat maupun daerah menggunakan indikator lebih dari sekedar APK dan APM untuk menilai keberhasilan pembangunan pendidikan. Pengabaian terhadap anak-anak miskin dalam sistem pendidikan nasional kelak akan berakibat pada ketimpangan dan gejolak sosial yang terlalu mahal.

KEJELASAN SASARAN: APA YANG MAU DICAPAI?

Setelah pendidikan dasar dan menengah, kita perlu menjabarkan impian kita terhadap anak-anak muda Indonesia. Apakah kita mengejar sebagian negara maju dengan mendorong sebanyak-banyaknya anak muda untuk menjadi sarjana dan *knowledge workers*? Atau kita cukup realistis dengan situasi bahwa sebagian anak muda kita akan menjadi pemimpin yang terdidik sementara sebagian lainnya cukup menjadi terlatih dan trampil? Jawaban YA pada pertanyaan pertama terkesan humanis dan demokratis namun sangat tidak realistis untuk saat ini. Sebaliknya, kita mungkin tidak suka menjawab pertanyaan kedua karena mengingatkan pada rekayasa manusia ke dalam lima kasta: Alpha, Beta, Gamma, Delta, dan Epsilon dalam novel *Brave New World* karya Aldous Huxley walaupun sesungguhnya kecemasan terhadap fenomena kastanisasi (Darmaningtyas) muncul dari pengelompokan anak berdasarkan kelas sosial di sekolah-sekolah dengan berbagai tingkatan standar. Keberadaan SMA dan SMK (dipelesetkan menjadi Sekolah Menengah Anak dan Sekolah Menengah Keponakan) secara defacto sudah menunjukkan pengelompokan berdasarkan strata sosial.

Dalam catatan Bank Dunia, hanya 4% anak berusia 18-20 tahun dari kuintil pendapatan paling rendah yang bisa menikmati pendidikan tinggi. Penyelesaian terhadap permasalahan kesenjangan ini perlu dimulai dari pengakuan terhadap realita kemiskinan yang sedang kita hadapi dan pemahaman mengenai sumberdaya yang kita punyai. Strategi penyelesaian masalah perlu dibuat secara bertahap dengan kejelasan sasaran di atas prinsip keadilan bagi semua anak. Pembangunan universitas, politeknik dan akademi komunitas perlu memerhatikan tahapan dan kejelasan sasaran dalam strategi penyelesaian masalah secara jangka panjang.

DAFTAR ACUAN

- Boediono. "Pendidikan Kunci Pembangunan." *Kompas*, 27 Agustus 2012
- Dhakidae, Daniel. 2002. *Cendekiawan dan Kekuasaan. (Intellectuals and Power)*. Jakarta: Gramedia.
- Glatthorn, Alan. 2007. *Curriculum Leadership*.

Gruenwald, Oskar. 2011. "The University as Quest for Truth." *Journal of Interdisciplinary Studies*, XXIII, 1-18.

Hardjono, Ratih. "A demographic bonus or time-bomb?" *The Jakarta Post*, December 5, 2012.

Hausmann, Ricardo, Dani Rodric, dan Andre Velasco. 2005. "Growth Diagnostics.". Mimeo, Inter-American Development Bank.

Heinsohn, Gunnar. Islamism and War: the demographics of rage. *Open Democracy: Free Thinking for the World*.

http://www.opendemocracy.net/conflicts/democracy_terror/islamism_war_demographics_rage

Heinsohn, Gunnar. 2006. *Sons and World Powers: Terror in the Rise and Fall of Nations*. 8th impression.

BAGIAN 2

MENEROPONG PRAKSI PENDIDIKAN DI TANAH AIR

BAB 1

MEMAKNAI HAKIKAT PENDIDIKAN DALAM ALAM BUDAYA INDONESIA: PENDEKATAN ANTROPOLOGIS ATAS PENDIDIKAN DI INDONESIA⁹²

Oleh: Toetik Koesbardiati

PENDAHULUAN

Dalam UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlakukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berakar

⁹² Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 9 Oktober 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya. Artikel ini juga pernah dimuat dalam *ARETÉ*, Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, Vol. 02, No. 02, September 2013.

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Terkait dengan dasar, fungsi dan tujuannya, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa.

Berdasarkan UU Sisdiknas dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional Indonesia jelas berfungsi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter bangsa serta pembentukan peradaban bangsa yang bermartabat. Jelas bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya melibatkan pengembangan kecerdasan seseorang berdasar ilmu pengetahuan, tetapi juga melibatkan nilai-nilai budaya dalam membentuk karakter bangsa, yang akhirnya kedua unsure ini menjadi pembentuk peradaban bangsa.

Meutia Hatta (2013) dalam sebuah seminar menyebutkan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa adalah konsep budaya, yaitu menginternalisasikan nilai-nilai sebagai bangsa yang berkarakter, mempunyai jati diri, watak sebagai bangsa yang bermartabat, berdaulat, mandiri, tangguh, mencintai sesama, mampu menjadi tuan di negeri sendiri, merasa berdiri sejajar dengan bangsa lain dan mampu mendisain masa depannya sendiri tanpa menggantungkan nasibnya pada bangsa lain. Oleh karena itu, menurut Meutia kurikulum pendidikan sebagai operasionalisasi hakikat, tujuan dan fungsi pendidikan nasional harus memuat nilai-nilai budaya yang dapat membentuk peserta didik menjadi individu yang berkarakter manusia Indonesia (*nation dan character building*). Dengan kata lain, pendidikan adalah bagian dari sistem budaya. Oleh karena pendidikan merupakan bagian dari sistem budaya, pendidikan sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari unsur nilai-nilai budaya karena pendidikan berakar pada nilai-nilai budaya ini.

Koentjaraningrat (1985) menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu wujud kebudayaan universal. Unsur universal budaya adalah sistem religi dan upacara keagamaan, sistem dan organisasi kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencaharian

hidup dan sistem teknologi dan peralatan. Dengan kata lain, bahwa pendidikan atau sistem pengetahuan itu menjadi bagian setiap budaya di dunia.

Sisdiknas telah disusun dengan memperhatikan tidak hanya faktor kemampuan tetapi juga faktor karakter bangsa. Namun kenyataan yang terjadi seringkali tidak seperti yang telah ditentukan. Penyimpangan-penyimpangan yang melibatkan faktor budaya membuat potret pendidikan Indonesia menjadi carut marut.

MAKNA PENDIDIKAN: SEBUAH PENGALAMAN SEHARI-HARI

Seperti hal-nya gelar kebangsawanan pada zaman dulu yang sangat penting bagi penyandanginya, demikian pula gelar akademis pada masa kini sangat bermakna bagi penyandanginya. Gelar akademis dapat bermakna sebagai tiket mendapatkan pekerjaan, jenjang kepangkatan dan status. Fenomena memasang foto-foto wisuda dinding rumah adalah salah satu contoh ekspresi status, simbol keluarga berpendidikan atau berkemampuan menyekolahkan anak. Di pedesaan hal ini masih banyak terjadi dan penting. Begitu tingginya makna gelar akademis ini bagi identitas dan martabat seseorang, sehingga orang berlomba mendapatkan

gelar tersebut (Kahar, 2007). Sayangnya kadangkala seseorang mendapatkannya dengan cara tidak benar dari lembaga pendidikan yang tidak benar juga. Maraknya pemalsuan ijazah adalah sebuah kenyataan bahwa mental menerabas adalah mentalitas kita (Koentjaraningrat, 1985). Mental menerabas adalah mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak berusaha. Mentalitas ini adalah akibat dari meremehkan mutu dan mencapai tujuan dengan cara instan. Ketika sertifikasi guru dilaksanakan di tahun 2013, dikabarkan dalam media baik cetak maupun elektronik bahwa banyak guru menggunakan ijazah palsu dalam menapaki karirnya. Sungguh ironi untuk seorang guru yang adalah seorang pendidik.

Setiap tahun (bisa jadi di masa depan juga) sering terdengar kekacauan, kecemasan, kerisauan dan ketakutan terhadap ujian nasional (UN). Bukan hanya siswa yang risau melainkan juga para guru. Risau dan takut akan ketidاكلulusan dan citra sekolah. UN yang merupakan satu-satunya tolok ukur kelulusan siswa tidak hanya mempengaruhi psikis anak didik melainkan juga orang tua. Anak didik takut mengalami kegagalan, sedangkan orang tua cemas akan jumlah rupiah yang harus disiapkan. Jika nilai UN kecil maka kemungkinan besar harus melanjutkan studi

di sekolah/universitas swasta yang mungkin lebih mahal biayanya. Sebaliknya, jika anak gagal melalui UN (tidak lulus), berarti nama orangtua menjadi taruhannya. Karena tidak lulus biasa dimaknai bodoh. Bodoh adalah hal yang harus dihindarkan oleh setiap keluarga. Anak didik terutama di daerah yang jauh dari jangkauan akses pendidikan layak atau anak didik di sekolah swasta yang kurang bermutu merasa sangat terancam akan parameter kelulusan yang bersifat nasional ini. Di sisi lain juga terjadi kecemasan, kerisauan dan ketakutan dikalangan pendidik di sekolah kalau-kalau anak didik mereka tidak lulus. Bukan lagi rahasia, tingkat atau persentase kelulusan bermakna prestise bagi suatu sekolah. Akibatnya, karena tidak ingin berpredikat sekolah tidak berkualitas, seringkali marak terjadi kejahatan akademik berupa jual beli jawaban soal UN oleh para guru.

Fenomena RSBI (red:Rintisan Sekolah Berbasis Internasional) untuk Sekolah Menengah seringkali menjadi sorotan dengan pandangan mata iri. Sekolah yang dirancang dengan standar internasional ini telah menyerap banyak dana untuk pelaksanaannya. Standar internasional berarti prestise untuk sekolah tersebut. Bahasa pengantarnya pun bersifat internasional (bahasa Inggris). Terkait dengan predikat internasional, banyak orang tua tergiur dan akhirnya berlomba untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah

tersebut. Anak usia sekolah yang tidak mampu menembus sekolah ini tentu hanya dapat berangan-angan. Mungkin tidak ada orang yang memahami situasi yang dapat meredakan kekecewaan dengan menunjukkan bahwa sekolah bukan RSBI juga baik. Meminjam istilah Soetandyo Wignyosoebroto (Koesbardiati&Suriyanto, 2012) pendidikan tidak harus dikotak-kotakkan, sehingga ilmu itu dapat saling menyapa, karena pendidikan adalah sebuah pembebasan.

APAKAH LUARAN PENDIDIKAN KITA?

Berita televisi menayangkan adanya rasia pelajar yang membawa sajam (senjata tajam) untuk mengantisipasi tawuran pelajar atau bahkan terjadi di kalangan mahasiswa yang akhir-akhir ini semakin marak terjadi. Namun sajam bukanlah senjata akhir yang digunakan untuk tawuran atau balas dendam, melainkan air raksa. Memerlukan pengetahuan yang cukup dalam menggunakan air raksa tanpa resiko. Tetapi bisa jadi karena mengetahui bahwa air raksa beresiko maka pengetahuan ini disalahgunakan sebagai senjata melumpuhkan lawan. Dalam suatu wawancara di televisi swasta, Reza Indragiri Amriel menyebut penggunaan

air raksa untuk tawuran bukan lagi sebagai bentuk kenakalan remaja, melainkan sebagai bentuk kriminalitas.

Ketika pendidikan tidak mampu membendung pergaulan bebas remaja, maka pendidikanlah yang mejadi korban ketika seorang siswi hamil di luar nikah. Umumnya orang tua yang merasa malu karena aib tersebut memutuskan pendidikan formal anaknya. Akibatnya, pendidikan hanya separuh jalan.

Di tingkat perguruan tinggi, sedikit banyak telah terjadi pergeseran pola belajar. Mahasiswa lebih berorientasi pada pekerjaan. Artinya, orientasi kuliah adalah untuk mendapatkan pekerjaan. Mahasiswa hanya memikirkan nilai bagus (bukan materi kuliah) dan masa studi singkat demi mendapatkan pekerjaan. Salahkah? Tentu tidak. Karena mereka harus survive. Dengan kata lain tidak ada nilai orientasi ke masa depan dan tidak ada nilai orientasi terhadap *achievement* dari karya. Di sisi lain, konsep pendidikan universitas adalah mencetak mahasiswa menjadi pemikir bukan tukang. Pemikir akan memikirkan inovasi-inovasi untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dari beberapa contoh realitas di atas dapat ditarik beberapa persoalan mengenai wajah pendidikan di Indonesia antara lain:

1. Parameter keberhasilan pendidikan Indonesia masih bersifat kecerdasan logika-matematis yang mengabaikan *soft skills* atau kecerdasan yang lain.
2. Pendidikan layak itu hanya untuk orang berpunya. Orang miskin kurang mendapatkan kesempatan untuk mengenyam pendidikan
3. Pendidikan hanya bersifat *transfer of knowledge*, tidak dibarengi dengan *transfer of values*
4. Pendidikan Indonesia kurang mampu membongkar dan menstimulasi potensi diri
5. Pendidikan Indonesia belum mempunyai dasar yang kokoh

Tulisan ini tidak hendak menyoroti sisi lemah pendidikan kita. Walaupun kenyataannya wajah pendidikan kita memang sedang carut marut sehingga kita tidak dapat menikmati keindahannya. Di sisi lain, harapan-harapan cemerlang bermunculan dengan diraihinya beberapa medali dari kejuaraan sains dari berbagai bidang, misalnya bidang astronomi yang dimenangkan oleh murid dari Papua. Tidak jarang inovasi-inovasi teknologi muncul dari murid yang tidak terkenal sekolahnya. Pemusik-pemusik berbakat bermunculan dari negeri ini. Betapa sesungguhnya pendidikan kita masih menyisakan kecemerlangan. Maka

tulisan ini bertujuan untuk memandang kembali wajah pendidikan kita dari sudut pandang budaya karena sesungguhnya budaya adalah proses pembelajaran seumur hidup, sebuah proses pembelajaran yang melibatkan nilai lokalitas setiap budaya.

Hal ini sejalan dengan hasil kongres pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tahun 2012 yang menyatakan bahwa pendidikan bukan hanya untuk *transfer of knowledge*. Akibatnya adalah seperti telah dicontohkan di atas, yaitu penilaian tentang pendidikan tidak lagi sebagai pendidikan yang sesungguhnya yang juga mendidik peserta didik menjadi berkarakter. Pendidikan lebih dimaknai sebagai pengetahuan tetapi tidak disertai dengan *rasa* (baca: *roso*). Dengan demikian, hasil pendidikan itu sendiri menjadi sebuah bangunan yang kaku karena tidak ada *transfer of values* yang menjadikan bangunan itu menjadi liat. Nilai-nilai budaya ini tampaknya perlahan menghilang dan tidak lagi menjadi bagian dari kurikulum pendidikan. Padahal pendidikan adalah salah satu pilar pemelihara kebudayaan, pilar yang dapat mentransfer kebudayaan pula.

Berkembangnya gaya anak muda zaman sekarang misalnya dalam gaya pakaian, penggunaan bahasa, jenis musik dan sebagainya tidak dapat dipungkiri adalah akibat dari modernisasi. Melalui internet, televisi dan media lainnya

orang dengan mudah melintasi benua, budaya, bangsa dan bahasa. Ketika kemudian terjadi pergeseran-pergeseran nilai, maka budaya sendirilah yang biasanya tergeser. Orang lebih bangga berbicara bahasa asing daripada bahasa sendiri, bahkan mungkin bahasa daerahnya sendiri, sehingga muncullah bahasa Indonesia yang bercampur bahasa Inggris.

Dari 8 standar nasional pendidikan (UU no. 19 tahun 2005 yang diperbaiki dalam PP no 32 tahun 2013) tampaknya standar penilaian akhir yang menjadi topik pembicaraan nasional, yaitu ujian nasional, UN. UN adalah penentu kualitas seorang peserta didik selama 3 tahun masa studinya. Diskusi hebat mengenai hal ini masih terus terjadi. UN menjadi hal yang ditakutkan. Dengan kata lain, nilai menjadi tolok ukur kepintaran atau keberhasilan peserta didik. Akibatnya, banyak kecurangan baik dari pihak peserta didik atau dari pihak sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tinggi, angka kelulusan tinggi adalah satu-satunya ukuran kecerdasan peserta didik. Apakah berarti peserta didik yang tidak lulus UN itu bodoh?

Darmaningtyas (2009) menyebut nilai UN adalah ukuran kecerdasan logika-matematis. Padahal menurut Darmaningtyas menyitir pendapat Linda Campbel, dkk, kecerdasan seseorang bukan hanya terkait dengan kecerdasan matematis, melainkan kecerdasan linguistik,

kecerdasan spasial, kecerdasan kinestik-tubuh, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal dan kecerdasan intrapersonal. Darmaningtyas mencontohkan Andi Noya sebagai orang yang mempunyai kecerdasan linguistik, yang mempunyai kemampuan mengolah bahasa. Seorang ahli agama membutuhkan kecerdasan interpersonal sehingga dapat berkomunikasi dengan umatnya. Demikian pula seorang pilot membutuhkan kecerdasan spasial dalam penguasaan medan jelajah. Nilai-nilai budaya, lokalitas (pengetahuan maupun kearifan) yang dipelajari seumur hidup bisa jadi merupakan penguat kecerdasan-kecerdasan tersebut yang sayangnya kurang disuarakan dalam dunia pendidikan. Dunia pendidikan seolah hanya akan mencetak ilmuwan, ahli ilmu alam dsb.

Ketika Yogyakarta dilanda gempa yang menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian serta menyisakan kesedihan, salah satu obat ampuh adalah berpasrah dan *nerima ing pandum*. Ketika kemudian orang menjadi cacat fisik seumur hidup karena peristiwa gempa tersebut, rasa *nerimo* yang sanggup mengembalikannya pada kehidupan sesungguhnya dan peristiwa kecacatan bukan dipandang sebagai hal yang menyedihkan namun dibaliknya menjadi nilai positif pemacu semangat hidup, maka nilai-nilai budayanya yang pernah didengarnya-lah yang memberi

kekuatan baru. Nilai-nilai budaya ini didengungkan kembali melalui *uro-uro*, kesenian rakyat. Penderitaan dalam balutan kebersamaan ternyata lebih cepat memulihkan kesedihan dan menghasilkan kekuatan untuk bangkit. Bukan hanya kepintaran atau kecerdasan seseorang. Situasi yang sama, manakala seseorang yang sehat dan sukses harus menanggung cacat seumur hidup, maka *resilient* seseorang yang tertimpa cacat permanen ditentukan salah satunya oleh nilai budayanya (Hendriani, 2013).

Dalam budaya Jawa, tembang-tembang Jawa yang terdiri dari Mijil hingga Pucung menceritakan tentang nilai-nilai tuntunan perilaku Jawa yang baik dimulai dari kanak-kanak (kelahiran) hingga masa tua (kematian) (Sunarno, 2011). Bukankah hal ini juga merupakan internalisasi pendidikan yang menuntun pada kebaikan pekerti? Menuntun pada pentingnya *ngangsu kaweruh*, sehingga peserta didik tidak perlu lagi merasa terpaksa untuk bersekolah. Dengan demikian, seharusnya tidak perlu ada tawuran antar sekolah bahkan antar mahasiswa.

BUDAYA YANG MANAKAH?

Seperti dijelaskan oleh Koentjaraningrat dan Meutia Hatta, nilai-nilai budaya yang harus dikembangkan di

Indonesia adalah menilai tinggi orientasi ke masa depan. Dengan demikian, setiap individu akan memperhitungkan hidupnya, berhemat dan tidak bertindak semena-mena. Nilai lain yang harus dikembangkan adalah hasrat eksplorasi untuk meningkatkan kapasitas berinovasi; orientasi ke arah achievement dari karya; mentalitas berusaha atas kemampuan sendiri, percaya kepada diri sendiri, berdisiplin murni dan berani bertanggungjawab sendiri. Jika nilai-nilai budaya ini dibuahi oleh ilmu pengetahuan (pendidikan formal) maka pendidikan nasional kita akan berkembang pesat.

Bangga akan diri sendiri dan mampu berdiri sendiri, penuh cinta dan hormat kepada sesama, menjadi tuan di negeri sendiri, mempunyai jati diri, merasa sejajar dengan bangsa lain dan tidak bergantung pada bangsa lain dalam membangun masa depan bangsa adalah hal-hal baik yang terdistorsi akibat penyelewengan, bekerja sama dalam membangun kecurangan, penipuan, tidak mencintai bangsanya dengan merusak fasilitas-fasilitas umum, tidak menghargai sesamanya yang juga ingin maju dalam ilmu pengetahuan.

Pendidikan tidak boleh dipisahkan dari budaya. Pendidikan tidak dapat berdiri sendiri, karena pendidikan adalah unsur dari budaya. Jikalau dibuat analogi, rangka jika

hanya berisi kalsium hanya akan memperkuat rangka tetapi mudah patah. Seperti halnya kapur tulis yang mudah dipatahkan, mudah keropos. Jika rangka hanya terdiri dari karbonat maka rangka hanya akan lentur, tidak kuat. Rangka yang kuat adalah yang cukup kalsium dan cukup karbonat sehingga rangka tersebut liat dan tidak mudah patah. Rangka yang liat dan kuat akan memperkuat bangunan tubuh sehingga dapat bergerak bebas, berkreasi, berinovasi, mempunyai jati diri, mensejajarkan diri dengan bangsa lain dan akhirnya membangun masa depan gemilang dengan berdiri di atas kaki sendiri.

Pendidikan Indonesia saat ini tidak hanya kurang kokoh dari aspek materi keilmuannya namun mulai lemah pula pada aspek budayanya. Untuk menuju peserta didik yang berkualitas, tidak hanya satu indikator saja yang harus diperkuat melainkan tujuh standar lainnya yang mesti pula dibangun. Sejalan dengan itu nilai-nilai budaya seharusnya ditanamkan dalam setiap kegiatan pendidikan. Dengan demikian, pendidikan yang berbudaya akan mencapai masyarakat yang berkarakter. Seperti dinyatakan oleh Juanda (2010) bahwa dalam proses pembudayaan maka pendidikan berfungsi sebagai pembinaan tingkah laku; pendidikan diarahkan kepada keseluruhan aspek kebudayaan dan kepribadian; pendidikan berlangsung seumur hidup; dan

akhirnya pendidikan adalah persiapan penyesuaian yang *intelligent* terhadap perubahan social serta diarahkan pada cita-cita yang luhur. Jika masing-masing peserta didik mempunyai karakter bangsa Indonesia maka distorsi terhadap pendidikan dan budaya sendiri akan dapat dikurangi. ...*bangunlah jiwanya, bangunlah badannya.. untuk Indonesia Raya...* semoga.

DAFTAR ACUAN

- Darmaningtyas, *Peningkatan Mutu Pendidikan dari Perspektif Budaya*, PCNU Kebumen, 27 Juni 2009
- Hatta, M., *Konsep Budaya dalam Pendidikan Nasional Indonesia*, Portal Nasional RI, 18 Juli 2013
- Juanda, “Peranan Pendidikan Formal dalam Proses Pembudayaan”, *Lentera*. Vol. 13, no. 1, Juni 2010, hal. 1-15.
- Kahar, I.A., “Komersialisasi Pendidikan di Indonesia: Suatu Tinjauan dari Aspek Politik, Ekonomi, Sosial dan Budaya”, *Historisme*, no. 23/tahun XI/Januari 2007.

Kongres Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan,
“Pendidikan sebagai Sarana Penegakan Karakter
Bangsa di era Global”, 5 Juli 2012

Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*,
Gramedia, Jakarta, 1985

Koesbardiati, T. & Suriyanto, R.A., *Tiga Begawan
Bioantropologi*, AUP Universitas Airlangga, Surabaya,
2012

Hendriani, W., “*Proses Resiliensi Individu Terhadap Perubahan
Kondisi Fisik Penyandang Disabilitas (Grounded Theory pada
Tunadaksa)*”, Disertasi, Universitas Airlangga, 2013.

UU. 32 tahun 2013

BAB 2

MENGGAGAS PENDIDIKAN BERBASIS PLURALISME⁹³

Oleh: Agustinus Pratisto Trinarso

PENGANTAR

Membicarakan pluralisme bagi kita sebenarnya sebuah hal yang naif karena dalam realitas hidup sehari-hari sebagai bangsa Indonesia, kita mengalami pluralisme sebagai realitas yang sudah sudah terkandung di dalamnya. Hal ini seperti ibarat membicarakan pentingnya air bagi ikan. Bagi bangsa lain dapat saja pluralisme menjadi sebuah kajian baru dalam menghadapi perubahan jaman dan perkembangan demografi penduduknya, akan tetapi bagi bangsa Indonesia yang telah terbentuk dari keanekaragaman suku dan bangsa, pluralisme sebenarnya sudah menjadi bagian dari hidup sehari-hari.

⁹³ Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 16 Oktober 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya. Artikel ini juga pernah dimuat dalam *ARETÉ*, Jurnal Filsafat, Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya, Vol. 02, No. 01, Februari 2013, hal. 71-87.

Menjadi sebuah pertanyaan bagi kita saat pluralisme digagas secara serius bagi kehidupan bangsa, khususnya dalam pendidikan. Ada hal-hal yang ternyata sudah tidak lagi ada dan berkembang dalam konteks alamiahnya, yang tadinya diandaikan ada, sehingga perlu menjadi sebuah pembahasan yang cukup marak belakangan ini terutama menyangkut pendidikan. Secara khusus hal ini juga dibahas dalam kurikulum pendidikan nasional 2013. Makin maraknya perselisihan dan konflik sosial di negara kita yang menunjukkan menguatnya semangat primordial dan sektarian, dan yang mengutamakan kelompok atau golongan daripada pengutamaan kepentingan umum, menjadi penanda bagi kepentingan kita untuk berbicara tentang “Menggagas Pendidikan Berbasis Pluralisme”. Pertanyaan kita adalah: Apakah pendidikan berbasis pluralisme layak ditumbuhkan dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini?

PENGERTIAN AMBIGU TENTANG PLURALISME

Beberapa waktu yang lalu, MUI menerbitkan fatwa yang pada intinya menolak paham pluralisme untuk ditumbuhkan di Indonesia. Lembaga keagamaan ini mensinyalir bahwa pluralisme yang sengaja dikembangkan di Indonesia saat ini sebenarnya berisi paham-paham

sekularisme dan liberalisme yang dapat merusak hidup keagamaan. Fakta lain menunjukkan sebaliknya. Gus Dur mengakui adanya agama Kong hu cu dan membuka kesempatan bagi kebudayaan cina untuk eksis dan berkembang di Indonesia (dengan alasan itulah beliau dijuluki sebagai bapak pluralisme Indonesia).

Bagaimana sebetulnya kita mesti memaknai pluralisme ini? Meninjau kembali pemahaman kita tentang pluralisme ini penting mengingat bahwa hal ini sudah diangkat sebagai persoalan berskala nasional serta mengundang pro dan kontra dalam kehidupan bersama sebagai bangsa Indonesia. Fenomena yang nampak dominan di sini adalah bahwa pluralisme yang praktis selalu dikaitkan dengan hidup beragama di Indonesia. Pluralisme hidup beragama mengetengahkan sikap menghormati dan menghargai perbedaan dalam agama-agama yang ada di tanah air tanpa arogansi sikap yang merasa diri paling benar dalam setiap klaim kebenaran agama. Nampaknya justru hal inilah yang mengundang perdebatan berskala nasional.

Perdebatan atas kemurnian pengertian pluralisme memuncak pada saat MUI mengeluarkan fatwa kesesatan tentang SIPILIS (Sekularisme, Pluralisme dan Liberalisme) pada Musyawarah Nasional (Munas) VII, 26-29 Juli 2005. Situasi pro dan kontra tentang pluralisme kehidupan

beragama dan berbangsa berlangsung memanas dengan munculnya gugatan atau permohonan *judicial review* terhadap UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Gugatan diajukan oleh 11 (sebelas) pemohon yang terdiri dari 7 (tujuh) pemohon LSM, yakni Imparsial, Elsam, PBHI, Demos, Setara, Desantara, YLBHI dan 4 (empat) pemohon perorangan. Menurut para pemohon, apa yang dianggap benar oleh suatu kelompok/aliran belum tentu benar bagi kelompok lain. Karena itu, tidak boleh satu kelompok mengklaim kelompok lain menyimpang; begitu pun sebaliknya. Negara juga tidak boleh membatasi orang untuk melakukan penafsiran dan negara tidak boleh mengambil tafsir satu kelompok sebagai tafsir resmi negara.⁹⁴

Secara hukum tata kenegaraan, negara Indonesia bukan negara agama dan juga bukan penganut agama tunggal. Indonesia mengakui adanya pluralitas agama yakni adanya enam agama yang dianut oleh warga negaranya yakni agama Islam, Kristen, katolik, Hindu dan Buddha serta Khong hu chu. Dalam interaksi masyarakat, kehidupan antar umat beragama memiliki dinamika yang menarik untuk diamati, karena banyak ketegangan yang tensinya dari bernada lemah sampai yang cukup kuat dan krusial seperti

⁹⁴ www.adianhusaini.com

konflik antar agama di Poso dan Ambon. Meskipun ada banyak ketegangan, banyak pengamat menyebutnya karena dipicu faktor diluar agama, yakni faktor politik sektarian dll., namun tidak dapat dipungkiri bahwa agama-agama dan penganutnya dalam konteks hidup bersama tetap memberikan permasalahan yang perlu disikapi dengan tepat.

Pluralisme agama banyak dicurigai sebagai paham yang diterjemahkan dari liberalisme dan memiliki unsur relativisme kebenaran. Dalam pluralisme bisa jadi terdapat relativisme iman dimana melihat bahwa semua agama mengajarkan kebenaran untuk menuju pada satu yang absolut dan mutlak yakni Tuhan sendiri. Dalam logika terbalik dapat dikatakan bahwa kebenaran yang ada di masing-masing agama adalah parsial saja, jadi bukanlah kebenaran yang sejati dan yang sesungguhnya. Apabila dinilai sebagai kebenaran subyektif berarti kebenaran yang hanya dibawa oleh tokoh pendirinya saja dan belum mencapai kebenaran yang mutlak.

Paham pluralisme yang berkaitan dengan budaya disebut juga sebagai multikulturalisme. Pengertian tentang budaya itu sendiri merupakan suatu pandangan menyeluruh atas pola hidup manusia dan sifatnya luas, abstrak serta kompleks karena menyangkut sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian dan bangunan serta karya

seni. Budaya memiliki sifat dapat dipelajari, karena manusia bisa hidup dan berkomunikasi dengan orang lain yang berbeda budaya serta menjalin komunikasi dengan baik tanpa kehilangan identitas budayanya.⁹⁵ Budaya memiliki sifat yang kompleks dan rumit namun erat berhubungan dengan masyarakatnya sehingga segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh budaya yang dimilikinya. Budaya juga memiliki sifat pewarisan sehingga kadang dinilai sebagai *superorganic* bahkan dinilai diwariskan secara genetis.⁹⁶ Multikulturalisme adalah pandangan yang menghargai kemajemukan serta penghormatan terhadap yang lain yang berbeda, membuka diri terhadap kekayaan budaya yang lainnya serta melibatkan diri secara aktif untuk mencari persamaan dalam hidup bersama sambil tetap menghargai perbedaan budaya dan adat istiadat yang ada.⁹⁷ Adanya

⁹⁵ Budaya dalam bahasa Indonesia berasal dari serapan kata bahasa Sansekerta yakni *Buddhayah* yang berarti buddhi atau akal budi sedangkan dalam bahasa Inggris, Culture, berasal dari bahasa latin, colere yang artinya mengerjakan atau mengolah. Culture juga diartikan kultur dalam bahasa Indonesia. Budaya dan kultur dipandang searti dalam bahasa Indonesia.

⁹⁶ Bdk., Bhikku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, Pgrave, New York 2000, 143.

⁹⁷ Bdk., William Chang, 181." *Soko guru pemberdayaan konteks multikultural ini mengandalkan proses internalisasi nilai-nilai humaniora yang menyentuh setiap anasir dalam masyarakat.*" Bdk. Juga dgn Bhikku Parekh, 156.

keberagaman budaya dalam bangsa Indonesia merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri sedemikian hingga keberagaman tersebut menjadi ciri khas bangsa dan negara Indonesia sejak diproklamasikan. Amanat hidup dalam keragaman dengan damai terkandung dalam lambang dan semboyan hidup bangsa yakni *Bhinneka Tunggal Ika*, berbeda-beda namun tetap satu jua.⁹⁸

Sering terjadi bahwa pengertian-pengertian antara pluralitas dan pluralisme tercampur-aduk sehingga sehingga tafsir atas pluralisme menjadi beragam, mulai dari yang bersifat “netral” sampai yang bersifat tuduhan bahwa pluralisme adalah sebuah agama baru atau ideologi baru atas agama-agama. Pluralitas dan pluralisme perlu dibedakan. Pluralitas adalah kenyataan adanya kemajuan dan perbedaan dalam konteks hidup manusia menyangkut suku, agama, ras, kepercayaan, adat budaya dan yang lainnya, sedangkan pluralisme adalah sebuah sikap yang menghargai adanya kemajuan dan menghormati adanya perbedaan yang ada tanpa adanya tendensi klaim atas sebuah kebenaran apa pun. Sikap dalam pluralisme adalah keterbukaan atas adanya

⁹⁸ Bdk., Sal Murgiyanto, *Multikulturalisme dalam seni pertunjukan: Ragam bentuk dan Motif*, dalam *Keragaman & Silang Budaya: Dialog art-Summit*, MSPI, Bandung 1999, 75. “*Multikulturalisme Indonesia tercermin dalam motto: Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana motto ini harus diletakkan dalam praktek-untuk membolehkan beragam kebudayaan hidup bersama-sama dalam damai,...*”.

berbagai paham kebenaran dan menghargainya tanpa melihat nilai kebenarannya itu sama.⁹⁹

KEBUTUHAN PENDIDIKAN PLURALISME DALAM BUDAYA INDONESIA

Pendidikan berbasis pluralisme di tanah air dibutuhkan karena beberapa alasan. Setelah rezim Orde baru tumbang dan kehidupan demokrasi meningkat kualitasnya di masyarakat Indonesia, di mana kadar represi pemerintah dan militer terhadap gerakan pro-demokrasi berkurang, gejolak sektarian justru meningkat. Angin kebebasan yang dibawa oleh iklim demokrasi yang membaik ditafsirkan sebagian masyarakat sebagai ruang untuk memaksakan kepentingan kelompoknya. Padahal pluralisme berhubungan erat dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pluralisme juga berkenaan dengan hak hidup dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kelompok-kelompok tersebut memiliki budayanya masing-masing dan keberadaannya diakui oleh negara.

⁹⁹ Bdk., Yunasril Ali, *Sufisme dan Pluralisme, Memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama-agama*, Elex Media Computindo, Jakarta 2012, 70-71.

Di era globalisasi ini, budaya Indonesia perlahan mulai sirna dan berganti dengan budaya modern. Masyarakat Indonesia sedang mengalami transformasi budaya kearah modern yang sebenarnya dapat disebut penjajahan bentuk baru, yakni “pemaksaan” budaya modern secara halus melalui mass-media dan kecanggihan tehnologi. Sesungguhnya, bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman dalam budaya sedang mengarah pada monokultur atau satu budaya, yakni budaya modern. Jejak keberagaman budaya nasional masih nampak jelas, namun hanya nampak di taraf permukaan, misalnya baju adat, kesenian tradisional, rumah adat, tata desa dan yang sebagainya. Sementara itu, nilai-nilai yang dikandung yang mempengaruhi cara pandang dan perilaku warga negara, perlahan mengarah pada nilai-nilai modern yang sebenarnya belum jelas benar orientasinya. Bukan berarti bahwa kita mau menjadi negara yang menutup diri dari globalisasi dan dampaknya, namun kiranya kesadaran akan pentingnya penghargaan atas budaya bangsa sebagai jati diri dan “perawatannya” dengan baik dan benar akan banyak mendatangkan manfaat bagi pembangunan karakter bangsa. Selain masyarakat, tentunya pemerintah perlu lebih tanggap akan situasi anak bangsa dewasa ini agar lebih mengedepankan pendidikan karakter bangsa yang khas daripada sekedar menjadi “corong” kapitalisme global yang

mengusung budaya lain hanya demi laju pertumbuhan di bidang ekonomi semata.¹⁰⁰

Pluralisme budaya atau multikulturalisme yang ditanamkan dengan baik akan menimbulkan rasa penghargaan dan toleransi antar komunitas budaya yang berbeda. Kekuatan setiap kelompok komunitas budaya apabila disatukan akan menjadi pengikat dari negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini. Pendidikan berbasis pluralisme budaya akan menumbuh-kembangkan subyek didik dalam memiliki sikap saling menghargai, saling menjunjung tinggi dan menghormati, bertoleransi dan mampu hidup dan tumbuh dalam keragaman budaya.

PENDIDIKAN BERBASIS PLURALISME

1. Hakikat Pendidikan Multikultural

Pendidikan pluralisme berkaitan erat dengan epistemologi sosial. Epistemologi adalah dasar mengapa keilmuan itu ada dan bagaimana sudut pandang sebuah

¹⁰⁰ *“Nilai-nilai ekonomi kerakyatan sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan digantikan sistem ekonomi pro “kapital”. Pasar-pasar tradisional digusur digantikan dengan supermarket. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang.”* Lih., Benny Susetyo, *Habitus Dialog dalam konteks Indonesia*, Komisi HAK KWI, Jakarta 2008, 110.

keilmuan itu terhadap kebenaran. Epistemologi dalam filsafat terarah pada asal-usul kebenaran. Epistemologi pluralisme mau memaknai epistemologi dalam kerangka sosial. Artinya, epistemologi yang memandang kebenaran dalam keragaman arti dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Semua hal yang dipandang sebagai kebenaran berlaku sebagai yang baik bagi masyarakat.¹⁰¹ Dalam epistemologi sosial, tidak ada satu kebenaran mutlak yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu pluralisme memiliki hakekat keragaman sedemikian hingga pendidikan yang berbasis pluralisme mengarahkan manusia pada kemampuan melihat keragaman sebagai yang baik dan semuanya memiliki kontribusi atas masyarakatnya.

Pendidikan berbasis pluralisme adalah pendidikan yang memiliki dasar keterbukaan.¹⁰² Keterbukaan yang dimaksud dalam hal ini adalah keterbukaan dalam berpikir dan bersikap. James Banks sebagai pelopor pendidikan multikulturalisme meyakinkan bahwa pendidikan dalam pluralisme adalah mengajari siswa tentang bagaimana memahami semua pengetahuan, bagaimana konstruksi

¹⁰¹ Bdk., Frans Ceufin (Ed.), *Hak-hak asasi manusia, Aneka Suara & Pandangan*, Penerbit Ledalero, Maumere 2006, 94.

¹⁰² Bdk., Bhikku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, 228.

pengetahuan itu dibangun, dan bagaimana terjadinya interpretasi yang berbeda-beda. Siswa belajar bahwa dalam pengetahuan yang diajarkan itu juga terdapat aneka interpretasi yang nampak bertentangan atau berbeda menurut sudut pandang masing-masing. Dalam pendidikan semacam ini, siswa dibiasakan menerima perbedaan cara pandang atas sebuah kebenaran dan implikasinya dalam kehidupan.

Lebih lanjut, pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang menjelaskan adanya rangkaian kepercayaan (*notion of belief*) serta pengakuan adanya keragaman budaya dimana di dalamnya terdapat keragaman gaya hidup, interaksi sosial, pengalaman khas budaya yang membentuk identitas pribadi, relasi sosial yang ada serta hubungan antar masyarakat. Subjek didik diajar untuk berbagi pengalaman dalam perjumpaan dengan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaannya sendiri. Sikap dasarnya adalah bahwa setiap subjek didik adalah subjek yang berakar dalam kebudayaannya sendiri yang juga memiliki kesempatan yang sama dengan orang berlatar belakang kebudayaan yang berbeda darinya, untuk tumbuh berkembang dalam pendidikan.

Pendidikan multikulturalisme juga seharusnya memberi kompetensi multikultural yakni kemampuan hidup (*life skill*) dalam keberagaman. Seringkali pendidikan yang

dominan dalam sebuah budaya dapat menjebak dalam paradigma tertentu yang mengarah pada primordialisme kesukuan, agama dan golongan secara berlebihan. Faktor-faktor inilah yang menjadikan manusia mudah terseret dalam konflik sektarian, yaitu karena tidak memiliki wawasan dan kompetensi multikultural. Parekh melihat bahwa kompetensi multikultur menjadi penting di era globalisasi ini sebagai bekal bagi siswa dalam mengembangkan diri di tengah keberagaman. Sejak dini, pendidikan mengarahkan subjek didik untuk belajar memiliki kompetensi dalam memahami perbedaan budaya, baik dalam tingkah laku, dalam kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat, dalam norma-norma dan aturan hidup, serta dalam adat-istiadat. Harapannya, siswa memiliki ketrampilan dalam menerima perbedaan, kritik, termasuk juga dalam kemampuan bertoleransi dan berempati kepada sesamanya.¹⁰³

2. Syarat dan Pendidikan Pluralisme

Tujuan pendidikan adalah untuk menanamkan pengertian dan nilai tertentu pada subjek didik dengan tujuan agar pengertian dan nilai-nilai yang diajarkan itu

¹⁰³ Bdk. Ibid., 229.

menjadi “miliknya”, sedemikian hingga dapat berguna bagi kehidupannya di tengah-tengah masyarakat. Pendidikan berbasis pluralisme adalah pendidikan yang menanamkan sikap-sikap yang berdasarkan nilai-nilai keragaman dalam hidup bersama. Pendidikan berbasis pluralisme ini dapat diterapkan dalam bentuk-bentuk pendidikan formal dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan di sekolah-sekolah formal (yang terkait kultur sekolah yang menyangkut identitas dan ciri khas sekolah), politik pendidikan, kurikulum, bidang studi, serta lingkungan sekolah. Dalam konteks pendidikan berbasis pluralisme, lingkungan sekolah formal menjadi wilayah yang perlu dipelihara dalam suasana multikultural yang kondusif. Siswa dikondisikan untuk selalu hadir dalam susana yang beragam dan diperlakukan setara. Subjek didik diajak untuk saling menghargai latar belakang dan karakteristik budaya yang memberi ciri khas bagi perilaku seseorang dalam suasana hidup damai, saling memahami, saling menghargai demi mencapai tujuan hidup bersama dalam persatuan dan keragaman.

Dalam diri siswa di lingkungan pendidikan formal ditanamkan pemikiran lateral, yakni saling belajar dalam latar-belakang kebudayaan yang berbeda, berinteraksi dan komunikasi dengan tujuan belajar yakni saling memperkaya

satu dengan yang lainnya. Pendidikan multikultural juga mencakup materi pengajaran tentang etnis dan ras, agama dan perbedaannya, kondisi ekonomi, jenis kelamin, perbedaan umur, dan lain sebagainya. Siswa dapat diajar tentang kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaannya sendiri, kemudian belajar untuk mensikapinya dengan benar sehingga mereka tumbuh dalam sikap hormat dan simpatik.¹⁰⁴

Sementara itu, dalam pendidikan informal, yang biasanya terjadi dalam keluarga dan masyarakat, seorang anak dapat belajar sikap-sikap multikultural dari orang tuanya dan teman-teman di lingkungannya. Lingkungan sosial yang cukup heterogen biasanya lebih cocok untuk belajar tentang multikulturalisme daripada lingkungan sosial yang cenderung homogen. Dalam hal ini, kebijakan politik dalam pembangunan dan kependudukan menentukan bagaimana sikap pluralisme dapat dimiliki dengan baik.

Globalisasi yang cenderung terarah pada ekonomi bebas telah menyuburkan kapitalisme, lantas berdampak pada pengaturan kependudukan, khususnya pada pengaturan perumahan. Munculnya kawasan-kawasan

¹⁰⁴ Bdk., pendapat Yunasril Ali, 72. "*Pendeknya, pluralisme merupakan basis bagi terciptanya kerukunan yang dinamis dan dialogis dalam masyarakat majemuk...*".

perumahan elite yang menunjukkan perbedaan tingkat ekonomi sosial masyarakat cenderung tidak menunjang pendidikan multikulturalisme. Hal ini senada dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini dengan adanya sekolah-sekolah elite yang cenderung mengklasifikasi masyarakat secara ekonomis dan etnis.

3. Bentuk Pendidikan Pluralisme

Bentuk pendidikan pluralisme bagi bangsa Indonesia adalah bentuk pendidikan yang bercirikan pendidikan yang menyediakan keberagaman dan perbedaan. Ini berkaitan dengan hakekat pendidikan karakter yang mau menumbuhkan subjek didik dalam memiliki pengetahuan dan wawasan akan keberagaman. Harapannya, siswa mampu bersikap kritis dan melakukan koreksi atas situasi keberagaman.¹⁰⁵

Dalam pendidikan sikap dan karakter keberagaman, pendidikan pluralisme berfungsi menyemai dan mengembangkan sensitivitas kultural, toleransi budaya, penghormatan pada setiap identitas budaya, sikap responsif

¹⁰⁵ Bdk., William Chang, *Perilaku Multikultural sebagai Habitus*, dalam *Dialog iman dan Budaya*, Komisi Teologi KWI, Jakarta 2006, 180.

atas budaya dan ketrampilan dalam resolusi konflik. Dalam tingkat kognitif, pendidikan pluralisme ini berfungsi untuk menanamkan pengetahuan tentang kemajemukan bangsa, kemampuan untuk melakukan analisis dan interpretasi perilaku budaya, serta kemampuan untuk memiliki kesadaran kritis atas budayanya sendiri. Dalam penerapannya secara psikomotorik, pendidikan pluralisme berfungsi mengembangkan subjek didik agar memiliki kemampuan koreksi atas asumsi salah kaprah, distorsi budaya, stereotipe budaya, strategi hidup multi budaya dan ketrampilan komunikasi sinergi budaya serta kemampuan tehnik evaluasi-eksposisi atas dinamika budaya.¹⁰⁶

TANTANGAN DALAM PENDIDIKAN BERBASIS PLURALISME

1. Kualitas Hidup Kebangsaan

Menurut Prof. Mohammad Nuh selaku menteri pendidikan saat ini, lahirnya kurikulum pendidikan Nasional

¹⁰⁶ Ilh., Karim H. Karim, *The Elusiveness of Full Citizenship: Accounting for Cultural Capital, Cultural Competencies and Cultural Pluralism*, dalam: *Accounting for Culture: Thinking through cultural citizenship*, ed. Caroline Andrew dkk., The University of Ottawa Press (UOP), Ottawa, 152.

2013 didorong oleh adanya keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia khususnya dalam hidup berbangsa dan bernegara dan sekaligus juga atas keprihatinan terhadap peri-hidup masyarakat yang cenderung semakin intoleran dan sektarian. Maraknya konflik sosial dengan latar belakang masalah perbedaan dan keragaman menjadi salah satu pendorong lahirnya kurikulum yang baru saat ini.

Hal pertama yang patut disorot di sini adalah lemahnya kesadaran akan keberagaman bangsa dan juga lemahnya semangat nasionalisme. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan pendidikan dan norma-norma sosial yang seringkali terlalu menekankan kesatuan di satu pihak sementara kurang mengolah kemajemukan bangsa di lain pihak.¹⁰⁷ Bila mengacu pada semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, maka yang lebih ditekankan adalah unsur “ika” daripada “bhineka”. Keberagaman bangsa seperti suku, agama, ras dan golongan yang menjadi kekuatan bangsa kurang dikembangkan. Ironisnya, pada era orde baru

¹⁰⁷ Secara politis, rezim orde baru sebenarnya menyadari pentingnya tata nilai yang sifatnya harus dapat dipegang bersama ditengah keragaman budaya sehingga dapat mempersatukan berbagai suku bangsa ataupun mawadahi aneka nilai budaya yang ada yakni dengan pendidikan Pancasila. Hanya saja penanaman nilai pancasila dan P4 dalam bentuk indoktrinasi yang sifatnya kurang luwes justru telah menimbulkan antipati yang cukup signifikan.

keberagaman ini sering dianggap tabu untuk didiskusikan. Akibatnya, sejak masa reformasi hingga sekarang ini, kualitas hidup kebangsaan dalam konteks kemajemukan kurang digarap dan dikembangkan dengan baik. Pendidikan kebangsaan yang berbasis pluralisme bangsa nampaknya menjadi kebutuhan saat ini.

2. Budaya Monokultural sebagai Akibat Arus Globalisasi

Globalisasi yang menawarkan keterbukaan di era informasi ini jelas merupakan tantangan bagi bangsa Indonesia karena terjadi interaksi yang intensif dengan budaya luar. Budaya luar yang masuk ke Indonesia adalah budaya yang berkuasa dan kuat. Artinya, budaya yang memiliki kekuatan teknologi, yang jaringannya mendunia serta berbasis ekonomi global dan memiliki kekuasaan dalam percaturan politik. Budaya tersebut bukanlah budaya yang beragam tetapi budaya yang cenderung mengusung budaya dari negara-negara adikuasa.¹⁰⁸ Dikatakan, budaya tersebut berciri monokultur dan homogen dan masuk dengan membawa nilai-nilai yang menggiurkan untuk segera

¹⁰⁸ Bdk., Yves Brunsvick & Andre Danzin, *Lahirnya Sebuah Peradaban, Goncangan Globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta 2005, 23.

diterima dan dihidupi oleh bangsa Indonesia. Nilai monokultur dan homogen yang dimaksud di sini yakni nilai yang di dalamnya mengandung kemajuan, *up to date*, hebat, canggih dan modern. Budaya monokultur ini bukan hanya merambah wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi saja, namun juga sudah merambah wilayah gaya hidup, kuliner, dan orientasi spiritual.¹⁰⁹ Kita dapat melihat “agen-agen” monokultural bercokol di Indonesia dan diterima dengan cukup antusias, seperti KFC, McDonald, musik barat, film Hollywood, trend motivator, dan lain sebagainya. Budaya ini mudah masuk ke dalam sebagian besar gaya hidup masyarakat Indonesia karena kekuatan media, dalam hal ini televisi yang telah dimiliki oleh masyarakat hampir di seantero wilayah di Indonesia dan diinput setiap hari oleh sebagian besar rakyat Indonesia. Kita sudah semakin biasa melihat bahwa tidak ada perbedaan dalam gaya berpakaian dan gaya berkomunikasi anak muda baik di kota maupun di desa, atau dalam alam budaya yang satu dan alam budaya lainnya.

¹⁰⁹ *“Positifisme-Materialisme-Hedonisme adalah haluan hidup manusia modern,karena: (1) gampang, (2) praktis,(3) instant.”*, Yunasril Ali, *Sufisme dan Pluralisme, Memahami Hakekat Agama dan Relasi Agama-agama*, Elex Media Computindo, Jakarta 2012, 253-262.

Gejala menguatnya budaya monokultur dan global tersebut (yang nota bene sebetulnya merupakan budaya dari satu bangsa tertentu) jelas menantang keberadaan budaya-budaya khas Indonesia. Dalam hal ini, pendidikan multikulturalisme berusaha menyadarkan adanya keunggulan dan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri dalam kebudayaannya. Bahwa nilai-nilai yang dikandungnya juga mampu menjadi roh dan jiwa bangsa dalam menghadapi era globalisasi.

3. Politik Pemerintah yang Berorientasi Ekonomi

Kebijakan pemerintah untuk semata-mata meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sekaligus mengabaikan kepentingan pendidikan kebangsaan dapat menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia. Pendidikan yang berorientasi pasar bebas dengan pengutamaan pada *skill* kompetensi industri dengan tujuan agar mampu bersaing dengan negara lain, bila tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya pendidikan karakter bangsa akan menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa tukang dan terlepas dari akar budayanya sendiri.¹¹⁰

¹¹⁰ "Nilai-nilai ekonomi kerakyatan sudah mulai ditinggalkan pelan-pelan digantikan sistem ekonomi pro "kapital". Pasar-pasar

Politik yang semata-mata berorientasi ekonomi juga secara perlahan mengklasifikasi masyarakat dalam ranah ekonomi kesejahteraan dan pada gilirannya justru memantik kecenderungan pada kesenjangan sosial-ekonomi. Padahal, kesenjangan inilah yang pada gilirannya berpotensi menimbulkan gejolak dan konflik sosial-sektarian. Dalam hal ini, kekhasan suku, agama dan golongan dijadikan alat legitimasi untuk tawar-menawar demi kesejahteraan masyarakat dan daerah tertentu.

Nyatanya, politik ekonomi juga merambah dunia pendidikan yang pada gilirannya cenderung merangsang tumbuhnya kapitalisme dalam dunia pendidikan. Inilah persisnya yang menimbulkan maraknya sekolah-sekolah RSBI dan sekolah-sekolah elite yang mengkondisikan cepat-tumbuhnya kesenjangan sosial yang lebih parah dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Karena kualitas anak bangsa sejak dini sudah tersekat-sekat. Mereka cenderung menjadi gagap dalam berdialog dan bertoleransi.

Kebijakan ekonomi dalam dunia pendidikan juga tidak luput dari sektarianisme berbau agama. Hal ini

*tradisional digusur digantikan dengan supermarket. Semuanya dilakukan seolah-olah sebagai hal wajar dan tidak memiliki dampak jangka panjang.” Lih., Benny Susetyo, *Habitus Dialog dalam konteks Indonesia*, Komisi HAK KWI, Jakarta 2008, 110.*

seringkali nampak dalam bentuk bantuan khusus pemerintah melalui departemen agama. Kebijakan dengan modus seperti itu seringkali mensyaratkan bahwa calon siswa dalam lembaga pendidikan penerima bantuan harus beragama tertentu. Kebijakan semacam ini tentu bisa menjadi gejala eksklusivitas pendidikan berbasis agama. Ini tentu juga bisa menjadi bahaya laten fundamentalisme yang merongrong keberagaman bangsa Indonesia. Bila lingkungan sekolah yang homogen yang kurang mendukung keberagaman, maka pendidikan berbasis multikulturalisme akan mengalami hambatan.

Kebijakan otonomi daerah yang tidak terkontrol tidak jarang juga menjadi faktor terhambatnya perkembangan visi keberagaman hidup berbangsa Indonesia. Tidak jarang terjadi peraturan dan kebijakan daerah memiliki orientasi sektarian dan nilai-nilainya justru berlawanan dengan semangat demokrasi itu sendiri, yaitu nilai-nilai yang mengajarkan persamaan hak dan kedudukan, sikap egaliter dan keterbukaan. Munculnya kebijakan otonomi khusus yang bertendensi pada kepentingan agama tertentu jelas menjadi tantangan dalam pendidikan pluralisme bangsa.

PENUTUP

Kajian atas tema pendidikan dan pluralitas bangsa mengajak kita untuk memikirkan kembali banyak hal dalam ranah kehidupan kita sehari-hari. Beberapa keprihatinan atas hal-hal yang krusial di dunia pendidikan dan perpolitikan dewasa ini menunjukkan bahwa pendidikan berbasis pluralisme menjadi perlu diperhatikan apabila kita semua menginginkan bahwa karakter bangsa kita menjadi lebih baik. Kepemimpinan bangsa di masa depan sangat ditentukan bagaimana pendidikan karakter yang ada saat ini. Pemimpin bangsa yang memiliki ketrampilan dan wawasan belumlah mencukupi untuk memimpin bangsa Indonesia apabila belum dilengkapi atau belum memiliki kemampuan dalam mengelola pluralisme bangsa.

Pendidikan berbasis pluralisme masih belum banyak dipahami dalam dunia pendidikan di Indonesia. Secerach harapan ada pada kurikulum 2013 yang berusaha memuat keprihatinan atas pluralisme bangsa. Dalam tataran hidup masyarakat, pluralisme atau multikulturalisme perlu dihadirkan untuk memperluas wacana dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mengajak masyarakat keluar dari jurang egoisme kelompok dan sektarian yang dapat memecah belah bangsa. Demikian juga pemerintah perlu memiliki orientasi multikulturalisme dalam

menentukan arah kebijakannya agar berbagai kebijakan yang diambil tidak mudah menimbulkan konflik sosial ekonomi. Pemerintah dan masyarakat di era globalisasi dan demokrasi ini dipanggil untuk arif dalam bagaimana mengelola keberagaman bangsa agar tercapai Indonesia yang damai dan demokratis.

DAFTAR ACUAN

Bhikku Parekh, *Rethinking Multiculturalism, Cultural Diversity and Political Theory*, Pagrave, New York 2000.

Benny Susetyo, *Habitus Dialog dalam konteks Indonesia*, Komisi HAK KWI, Jakarta 2008.

Charles H. Patterson, "*Philosophy an Introduction*, terj: *Filsafat*, Made Sukarata (pentj.), Pustaka Intelektual, Surabaya 2009.

Frans Ceunfin (Ed.), *Hak-hak asasi manusia, Aneka Suara & Pandangan*, Penerbit Ledalero, Maumere 2006.

Karim H. Karim, *The Elusiveness of Full Citizenship: Accounting for Cultural Capital, Cultural Competencies and Cultural Pluralism*, dalam: *Accounting for Culture: Thinking*

through cultural citizenship, ed. Caroline Andrew dkk.,
The University of Ottawa Press (UOP), Ottawa.

Linda Smith & William Raeper, *A Beginner's Guide to Ideas*,
terj. *Ide-Ide, Filsafat dan Agama, Dabulu dan Sekarang*,
Kanisius Yogyakarta 2000.

Sal Murgiyanto, *Multikulturalisme dalam seni pertunjukan: Ragam
bentuk dan Motif*, dalam *Keragaman & Silang Budaya :
Dialog art-Summit*, MSPI, Bandung 1999.

Yves Brunsvick & Andre Danzin, *Labirnya Sebuah Peradaban,
Goncangan Globalisasi*, Kanisius, Yogyakarta 2005.

Yunasril Ali, *Sufisme dan Pluralisme, Memahami Hakekat Agama
dan Relasi Agama-agama*, Elex Media Computindo,
Jakarta 2012.

BAB 3

PENDIDIKAN DAN TEKNOLOGI SIBER

Oleh: Agustinus Ryadi

PENDAHULUAN

Dunia pendidikan banyak dimudahkan oleh teknologi. Banyak buku¹¹¹ ditulis untuk menunjukkan bahwa teknologi mempermudah insan belajar sesuatu. Pemerintah Indonesia di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengadakan program Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) dengan tujuan menyediakan pelayanan publik di bidang telekomunikasi dan informasi-terutama di kawasan terkucil.

Pendidikan memakai teknologi siber tidak bisa dihindari pada saat ini. Beberapa pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini. Apakah pendidikan yang menggunakan teknologi siber menciptakan manusia-

¹¹¹ Richard E. Clark (Ed.), 2001; David Williamson Shaffer, 2006; Barbara C. Trolley & Constance Hanel, 2010; Judy Lever-Duffy & Jean B. McDonald, 2011⁴.

manusia yang mampu berpikir mandiri dengan tujuan-tujuan eksistensial pribadi yang dirumuskannya sendiri? Apakah pendidikan yang memakai teknologi siber mengembangkan kemanusiaan dari manusia? Tesis penulis adalah pendidikan manusia tidak bisa digantikan oleh arus dunia sibernetika.

1. PENDIDIKAN ITU ME-MANUSIA-KAN MANUSIA

Howard Gardner (1943), ahli pendidikan terkemuka dari Harvard, menyesali pemikirannya mengenai kecerdasan majemuk yang dituangkan dalam bukunya *Truth, Beauty, and Goodness Reframed, Educating for the Virtues in the Twenty First Century*. Ia menyesal karena ia cenderung melihat pendidikan dari sudut pandang dua disiplin ilmu yang sangat dominan dewasa ini, yaitu biologi dan ekonomi. Dengan kata lain, ia melihat pendidikan dari perspektif materialistik dan pragmatik. Gardner merasa perlu melihat pendidikan dari sudut pandang yang lebih humanioristik.

Pendidikan itu apa? Arti dan tugas pendidikan sangat ditentukan oleh landasan filsafatnya. Filsafat pendidikan perenialisme atau tradisionalisme menekankan prinsip-prinsip pendidikan yang mendasar. Tugas pendidikan ini mewariskan prinsip-prinsip dasar pendidikan dan nilai-nilai

kebajikan yang berlaku universal kepada generasi kini dan mendatang agar mereka dapat hidup secara bermartabat. Sedangkan filsafat pendidikan esensialis mengajarkan hal-hal yang esensial yang dibutuhkan oleh peserta didik, yaitu pengetahuan dan keterampilan¹¹².

Filsafat humanisme (gerakan filsafat yang muncul pada abad ke-14)¹¹³ ingin mengembalikan dimensi manusia ideal yang ada dalam sastra klasik. Sarana yang dipakai untuk sampai pada pembentukan manusia ideal adalah kebudayaan dan bahasa klasik. Sedangkan filsafat pendidikan progresif lebih menekankan belajar melalui pengalaman langsung. Orientasi pendidikan ini adalah segala sesuatu yang dibutuhkan peserta didik. Akhirnya, filsafat pendidikan sosial rekonstruksionisme bertugas untuk melahirkan generasi pembaru sejarah, suatu generasi yang mampu melahirkan generasi pembaru sejarah. Filsafat pendidikan ini membentuk individu menjadi lebih baik, lebih adil, lebih manusiawi, dan layak huni.

Penulis menyetujui rumusan “pendidikan” yang dibuat oleh Driyarkara. Aktivitas mendidik adalah “pe-

¹¹² Bdk. Doni Koesoema A., *KOMPAS*, 5 April 2013: 7.

¹¹³ Bdk. Thomas Hidyia Tjaya, 2004: 21-26.

manusia-an manusia”¹¹⁴. Pe-manusia-an manusia muda adalah *hominisasi* dan *humanisasi*. Maksudnya, manusia-muda dipimpin sedemikian rupa, sehingga ia bisa berdiri, bergerak, bersikap, bertindak sebagai manusia. Manusia tidak hanya merangkak, menjadi manusia (*homo*), melainkan ia harus menjadi *homo* yang *human*. *Homo* yang *human* memiliki arti ia memiliki budaya yang lebih tinggi.

‘Me-manusia-kan manusia muda’ merupakan gambaran dasar dari setiap perbuatan mendidik. Pengalaman konkrit dari pendidikan adalah perjumpaan antara pribadi pendidik dan pribadi anak didik. Kesatuan antara aku pendidik dan aku anak didik sehingga menjadi kita, yang mengangkat aku anak didik ke tingkat aku pendidik. Pengangkatan ini akan disebut *hominisasi* dan *humanisasi*.

Apa tujuan pendidikan? Seperti kita telah mengetahui bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan untuk mengaktualkan potensi manusia sehingga benar-benar menjadi manusia sejati, manusia yang memiliki hidup yang penuh makna bagi orang lain dan dirinya sendiri. Pendek kata pendidikan membuahakan manusia-manusia yang utuh. Manusia utuh dalam arti manusia yang tidak hanya cerdas,

¹¹⁴ Pengasuh Majalah Basis, 1986: 85.

kreatif dan terampil, melainkan juga ramah, adil dan cinta pada sesama.

Bertrand Russell pernah menawarkan Teori Negatif tentang Pendidikan. Teori negatif tidak berambisi “membentuk” manusia menjadi sesuai dengan yang dikehendaki orang dewasa, melainkan memberikan kepercayaan penuh terhadap hakikat kebaikan dan spontanitas manusia, bermaksud “membantu” dan ‘membantu manusia untuk menjadi dirinya sendiri’. Maka dari itu, teori negatif memiliki pendirian ”tugas pendidikan adalah ‘menyediakan’ peluang yang kondusif bagi pertumbuhan dan ‘menyingkirkan’ kendala-kendalanya”. Kendala yang perlu disingkirkan seperti *chauvinisme*, dogmatisme, kompetisi, skeptisisme, patriotisme, propaganda dan lain-lain. Hanya sayang, Russel belum menjelaskan secara rinci mengenai bagaimana *modus operandi* dari teori dan sistem pendidikan yang disodorkan¹¹⁵.

¹¹⁵ Mao Zedong (1965-1968) menutup universitas-universitas dan memerintahkan mahasiswa untuk pergi ke desa-desa dan pabrik-pabrik untuk belajar secara langsung kepada para petani dan buruh dengan gerakan Turun ke Desa (*Shia Fang*). Paolo Freire (1972) mencanangkan teori pendidikan terhadap masalah dan sistem pendidikan yang dialogis dengan penyadaran (*conscientisation*).

2. APAKAH PENGGUNAAN TEKNOLOGI *CYBER* ME-MANUSIA-KAN MANUSIA?

Tema yang diajukan adalah “Pendidikan dan Arus Sibernetika”. Langsung penulis ingin mengetahui apa itu sibernetika? Kamus *Cambridge Advanced Learner’s* mendefinisikan *cybernetics* dengan “the scientific study of how information is communicated in machines and electronic devices in comparison with how information is communicated in the brain and nervous system”¹¹⁶. Akhirnya penulis memutuskan untuk memaknai tema tersebut di atas dengan mereduksi ‘sibernetika’ dengan ‘siber’ (*cyber*) atau ‘teknologi siber’ (arti meluas).

Kita berkomunikasi lewat telepon jarak jauh yang dipantulkan lewat satelit, *videophone*, *email*, ponsel, kabel optik domestik dengan arus informasi dua arah seperti Internet. *Cursor* mengarah dan ‘klik’ pada *Web*, yang memberi akses pada volume, mengiringi situs-situs *Web* sesuai dengan perluasan alamiah pada *laptop*, yang memberi pengaruh pada ‘dunia info’ tanpa batas ruang dan waktu. Kita melihat *sua-sua* dari ribuan orang (fisik terpisah) yang membentuk komunitas *on-line* terdistribusi lintas negara¹¹⁷. ‘Kehadiran

¹¹⁶ Cambridge Advanced Learner’s Dictionary, 2008: 347.

¹¹⁷ Robert Pepperell, 2009: 8-9.

virtual' atau 'telepresensi' menjadi penting dalam dunia elektronik. Di balik kalimat tersebut terdapat gagasan bahwa kita dapat meningkatkan sosialisasi, kerja dan berkomunikasi melalui suatu cara yang mengurangi kontak fisik manusia.

“Teknologi siber” menghilangkan realitas sosial seperti integrasi, kesatuan, persatuan, nasionalisme dan solidaritas¹¹⁸. Alan Touraine¹¹⁹ melihat bahwa kehidupan sosial kini telah kehilangan kesatuannya. Aktor-aktor individu maupun kolektif tidak lagi bertindak sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Setiap media dan informasi (televisi, internet) memproduksi semakin banyak relasi sosial (*ke-luar*) tetapi ia menetralkan relasi sosial dan sosial itu sendiri (*ke-dalam*)¹²⁰. Yang ada sekarang adalah individu-individu saling berlomba dalam kancah duel (), kontes tantangan pornografi lewat jaringan computer (*cyberporn*), rayuan dan godaan masyarakat konsumen.

Kemajuan teknologi informasi menggiring masyarakat untuk mengakhiri perihal sosial. Tanda akhir sosial adalah transparansi sosial¹²¹. Kondisi yang membentuk

¹¹⁸ Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 133.

¹¹⁹ Hans Haferkamp & Neil J. Smelser, 1992: 62.

¹²⁰ Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 134.

¹²¹ Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 134.

masyarakat sirna. Kondisi tersebut adalah kategori sosial, hirarki sosial, dan batas sosial. Misal, batas sosial antara dunia anak dan dunia orang dewasa hilang di tangan *cyberporn*; batas antara kaum *duava* dan borjuis lenyap di arena virtualisme konsumsi; batas antara kebenaran dan kepalsuan sirna di tangan virtualitas media dan informasi.

Masyarakat yang dihasilkannya adalah masyarakat terbuka. Masyarakat terbuka menuntut pula bentuk-bentuk komunikasi yang terbuka¹²². Salah satu bentuk komunikasi terbuka adalah komunikasi di dalam *cyberspace*. Komunikasi terbuka ini dapat menghasilkan pelbagai bentuk teks terbuka¹²³. *Cyberspace* merupakan sebuah ruang (maya) yang di dalamnya dapat dengan mudah ditemukan teks-teks terbuka tersebut. Teks-teks dan dialog di dalam *cyberspace* semakin sulit untuk dikontrol, apalagi direayasa. Keterbukaan yang tanpa kontrol hanya akan membawa anarkisme, yang dapat membawa pada situasi *chaos*. Pada waktu *cyberspace* tidak bisa dikontrol secara sosial maka kita bisa membayangkan keadaan itu semacam kematian sosial¹²⁴.

¹²² Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 51.

¹²³ Teks yang terbuka bagi pelbagai penafsiran, interaksi, dan pertukaran makna-makna yang bersifat plural (Umberto Eco).

¹²⁴ Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 51-52.

Hukum orbit yang mengatur masyarakat global kita¹²⁵. Segala sesuatu bergerak berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain, dari satu komunitas ke komunitas lain. Semuanya memiliki wujud virtual di dalam proses keliling tersebut. Ada orbit *party-line*¹²⁶, orbit ekonomi, orbit politik, ada orbit *talk-line*. Mengapa hukum orbit yang mengatur kita? Karena jaringan informasi memiliki sifat transparan dan virtual. Kita tidak menemukan lagi kategori-kategori moral yang mengikatnya, ukuran-ukuran nilai yang membatasinya.

Manusia sibernetika adalah “manusia hasil fabrikasi realitas elektronik atau *imagineering*, yang mampu mengekspresikan, mengkomunikasikan, dan berbagi keajaiban otaknya dengan orang lain”¹²⁷. Manusia sibernetika mampu mengendalikan pengetahuan dan teknologi informasi demi tujuan pribadi, keuntungan, kesenangan dan pertumbuhan diri mereka sendiri. Mereka adalah manusia

¹²⁵ Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 135.

¹²⁶ Gambaran masyarakat *cyber* kita yang tenggelam dalam ekstasi komunikasi. Logika *party-line* adalah kegiatan konsumtif. Ia merupakan gambaran pula dari sistem ekonomi global yang semakin tenggelam di dalam ekstasi kecepatan dan percepatan, terutama dalam penetrasi pasar. Kemudian terciptalah kondisi perang dingin sosial, semacam perang berpacu dengan kecepatan.

¹²⁷ Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 286.

bebas, menavigasi diri mereka sendiri tanpa harus bergantung pada sesuatu atau liyan. Timothy Leary menyebut mereka dengan istilah *homo sapiens electronicus*¹²⁸. Alhasil, mereka memiliki mentalitas baru yang berdasar pada kekuatan diri sendiri dan bertanggungjawab terhadap diri mereka sendiri.

Gabriel Marcel (1889-1973) telah menengarai perihal dampak negatif teknologi siber adalah mentalitas manusia yang dihasilkan oleh sibernetika, yaitu mentalitas teknokratik dan semangat abstraksi.

Peradaban sibernetika telah membentuk mentalitas teknokratik dalam diri manusia. Mentalitas ini memiliki dua bentuk semangat, yaitu utilitarisme dan fungsionalisasi. Utilitarisme merupakan semangat yang memiliki kecenderungan untuk memperlakukan manusia menurut prestasi-prestasi yang dicapai. Manusia direduksi menjadi kumpulan prestasi-prestasi. Harga diri dan nilai manusia ditentukan oleh seberapa banyak pelayanan yang sanggup diberikannya. Sedangkan fungsionalisasi adalah semangat yang memiliki kecenderungan untuk memperlakukan manusia menurut fungsi yang dimilikinya. Manusia direduksi

¹²⁸ Timothy Leary (Ed.), 1994: 58.

menjadi kumpulan fungsi-fungsi. Kumpulan fungsi ini menentukan bagaimana ia diperlakukan oleh orang lain.

Selanjutnya, peradaban sibernetika membawa manusia kepada sikap abstraksi saja. Orang tidak mempedulikan kondisi-kondisi objektif yang melekat pada suatu objek tertentu. Orang memandang diri dan sesama bukan lagi sebagai pribadi yang unik dan mandiri, melainkan bagian dari suatu massa yang impersonal dan anonim.

Kedua mentalitas tersebut di atas membahayakan relasi sejati antar manusia. Bahaya karena mentalitas itu dapat menutup kemungkinan untuk menciptakan hubungan antarpribadi yang sejati. Hal tersebut juga dapat menghancurkan hubungan antarpribadi yang telah terbentuk (hubungan *Aku-Engkau*) menjadi hubungan *Aku-Dia*. Hubungan *Aku-Dia* mensyaratkan kontak atau komunikasi. Kontak dan komunikasi antarpribadi dari kedua pihak yang terlibat dapat disebut pertemuan. Pertemuan yang dimaksud oleh Gabriel Marcel adalah *berada-bersama-dengan* merupakan tindakan bebas yang membuat *kami* saling merasa *hadir* satu sama lain. Pendek kata, *bertemu* selalu berarti *hadir-bersama-dengan* seseorang¹²⁹.

¹²⁹ Mathias Hariyadi, 1994: 68.

Kehadiran itu merupakan suatu pertalian batin antara dua orang atau lebih yang bebas sehingga setiap pihak mampu ikut ambil bagian satu dengan yang lain secara efektif. Suatu persekutuan yang mengikat hubungan antarpribadi akan sanggup menyampaikan gema kehadiran di antara mereka, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam ikatan tersebut. Gema kehadiran itu tetap berlangsung dalam hati mereka walaupun jarak memisahkan mereka satu sama lain. Dengan kata lain, kehadiran merupakan pengikat antara dua orang subjek yang mengadakan hubungan pribadi.

Pertanyaan di atas muncul kembali, kalau dunia sosial manusia berakhir, apakah manusia masih bisa dinamai manusia? Kalau dunia moral manusia berakhir, apakah manusia masih bisa dinamai manusia?

3. HAKEKAT SOSIAL MANUSIA DAN *CYBERSPACE*

Penulis memakai definisi *cyberspace* Yasraf Amir Piliang “sebuah ruang utama yang di dalamnya pelbagai simulasi sosial menemukan tempat hidupnya”¹³⁰. Simulasi

¹³⁰ Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 44.

sosial itu apa? Simulasi sosial adalah “bentuk permukaan dari sosial, sebuah relasi sosial yang artifisial, yang tidak tercipta secara alamiah di sebuah teritorial yang nyata ..., akan tetapi di dalam sebuah *teritorial halusinasi*, yang terbentuk dari bit-bit informasi”¹³¹. Wujud simulasi sosial merupakan wujud ruang sosial yang artifisial.

Ruang-ruang simulasi sosial di dalam *cyberspace* telah mempengaruhi kehidupan sosial di luar ruang itu. Pengaruh dari perkembangan ruang-ruang simulasi sosial di dalam *cyberspace* terhadap kehidupan sosial ada tiga tingkatan, yaitu tingkatan individual, antar-individual, dan masyarakat¹³².

Pertama, *cyberspace* telah merubah pemahaman kita tentang identitas secara mendasar pada tingkat individual¹³³. Setiap insan dapat memainkan pelbagai peran sosial yang berbeda-beda (aku memiliki beberapa identitas berbeda pada waktu yang sama) di dalam ruang-ruang sosial *cyberspace*. Akibat yang ditimbulkannya adalah identitas yang kacau. Aku bisa memiliki identitas baru, identitas palsu, identitas

¹³¹ Yasraf Amir Piliang, 2010³ (2004): 37-38.

¹³² Bdk. Yasraf Amir Piliang, 2010³: 44-7.

¹³³ Bdk. David Bell, 2001: 114-117.

ganda¹³⁴. Kekacauan identitas akan mempengaruhi persepsi, pikiran, personalitas, dan gaya hidup insan. Apabila setiap insan dapat memakai sembarang identitas maka sebenarnya insan tersebut tidak memiliki identitas. Sebab identitas itu memiliki ciri utama, yaitu konsistensi.

Kedua, perkembangan komunitas virtual di dalam *cyberspace* telah menimbulkan relasi-relasi sosial yang virtual di ruang-ruang virtual pada tingkat antar-individual. Relasi-relasi sosial virtual tersebut menggiring ke arah *deteritorialisasi sosial*, pelbagai interaksi sosial tidak membutuhkan lagi ruang dan teritorial yang nyata, melainkan *halusinasi teritorial*. Insan menjadi dekat secara sosial dengan seseorang yang jauh secara teritorial. Hal ini dapat diamati pada makan bersama di sebuah resto di mana masing-masing insan sibuk menerima atau menelpon.

Ketiga, *cyberspace* diyakini dapat menimbulkan sebuah model komunitas demokratik dan terbuka (*komunitas imajiner*). Anggota masyarakat memiliki imajinasi kolektif tentang tempat imajiner yang berada di dalam ruang bit-bit computer. Komunitas ini berbeda dengan komunitas konvensional. Mereka tidak memiliki kebersamaan sosial

¹³⁴ Itu semua merupakan bagian dari identitas budaya *cyberspace*. R.D. Laing menyebut kekacauan identitas dengan 'situasi diri terbelah' (*divided self*) dan Lacan menyebutnya dengan 'skizofrenia'.

dan solidaritas sosial terkait dengan tempat (desa, kampung, kota, negara). Mereka tidak memiliki interaksi sosial *face to face*¹³⁵.

Demokrasi di dalam *cyberspace* berkembang ke post-demokrasi. Demokrasi di dalam *cyberspace* berkembang dalam bentuknya yang tanpa batas dan kontrol (*anything goes*). Demokrasi dan masyarakat madani (*civil society*: masyarakat kewargaan)¹³⁶ berkembang ke titik yang paling ekstrem, yaitu demokrasi radikal atau masyarakat madani radikal. Keinginan, tuntutan, ide, protes yang datang dari masyarakat sipil tidak memiliki pengaturan, pengontrolan, dan penilaian. Padahal masyarakat madani (yang tidak radikal) dapat menjadi ‘peran penyeimbang’ di antara pihak-pihak yang terlibat langsung dalam perebutan kekuasaan dan memelihara keadaban (kohesi sosial).

Padahal hakekat manusia adalah makhluk sosial. Sosial yang dimaksud adalah saling ketergantungan, ada kategori-kategori moral yang mengikatnya. Tere Liye¹³⁷

¹³⁵ *KOMPAS*, 29 Maret 2009. Indra Tranggono: “Kultur tatap muka, yang salah satu tujuannya adalah merawat kemanusiaan dari bahaya robotisasi manusia yang diciptakan industrialisme juga makin tenggelam ke dasar degradasi manusia”.

¹³⁶ Azyumardi Azra, *KOMPAS*, Sabtu, 12 Oktober 2013: 6.

¹³⁷ Tere Liye, *KOMPAS*, 6 Juli 2013.

menengarahi bahwa ada enam penyakit sosial berkaitan dengan interaksi di dunia maya. Pertama, kualitas dan kuantitas membaca, apalagi menulis, berkurang. Kedua, kebiasaan berdebat yang tiada manfaat menjadi subur. Ketiga, mental gratisan semakin marak. Keempat, rendahnya sopan santun. Kelima, interaksi dengan dunia nyata mulai menjadi kabur. Keenam, waktu produktif semakin berkurang.

Internet menjadi alat yang sangat penting untuk transfer pengetahuan dan pelatihan, mengubah sikap hidup banyak orang di seluruh dunia. Internet tidak membuat manusia menjadi lebih bermoral dan berkarakter atau berbudi pekerti luhur. Namun kita belum menemukan data dan fakta bahwa internet memiliki dampak pada proses pendidikan atau pembelajaran yang mengubah hidup manusia secara keseluruhan. Internet hanya dapat memintarkan (visi pengajaran) dan membuat orang menjadi terampil (visi pelatihan)¹³⁸.

Faktanya internet “menggiring ke dalam” (*outside in*) segala informasi dari luar¹³⁹. Internet menjadikan banyak

¹³⁸ Andrias Harefa, 2000: 102-103. Contoh film *The Net* yang dibintangi utama oleh Sandra Bullock.

¹³⁹ Presiden Amerika Bill Clinton membuat program *reinventing education*. Semua murid, dari TK sampai SMA, orang tua dan guru-

orang “lebih pintar” dan “lebih terampil” melakukan sesuatu. Sebaliknya, pendidikan “menggiring keluar” (*inside out*), dapat “menggeser paradigma” seseorang, otomatis akan membuat seseorang mengalami *metanoia* (pertobatan). Pendidikan otomatis membuat terjadinya proses belajar menjadi (*learning to be*), yang merupakan inti proses pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan juga menjadikan orang lebih arif-bijaksana.

4. PENUTUP: PENDIDIKAN MASA DEPAN?¹⁴⁰

Dunia pendidikan di masa depan mengandalkan hidupnya pada sebuah jaringan hubungan yang sangat kompleks. Kompleks di sini karena pelbagai dimensi dan nilai-nilai yang sangat kaya dan kompleks ada di dalamnya membentuk jaringan hidup manusia. Jaringan ini mengikat setiap makhluk hidup dengan tujuan bersama. Dunia pendidikan adalah ruang dimana nilai-nilai kemitraan,

guru (jumlah sekitar 150 juta), diberi akses internet gratis. Program tersebut sebenarnya bukan *reinventing education*, melainkan *reinventing school*. Sebab *school* yang kita kenal adalah lembaga pengajaran yang memiliki proses dari luar ke dalam (*outside in*). Lih. Andrias Harefa, 2000: 102.

¹⁴⁰ Yasraf Amir Piliang, 2004: 369-371; Bdk. Bambang Sugiharto (Ed.), 2008: 374-380.

kerjasama, cinta, aspirasi, kasih sayang, moralitas, spiritual, kebersamaan, hakekat, keyakinan dapat dikembangkan.

Pendidikan harus mampu menanamkan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bebas nilai. Seperti telah kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi menciptakan nilai-nilai, merubah nilai-nilai, diarahkan oleh nilai-nilai. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempengaruhi pola kehidupan, memberi fasilitas kepada bentuk-bentuknya, merubah pola-polanya, dan menciptakan gaya-gaya hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan dan teknologi dalam paradigma pendidikan masa depan harus dikembangkan dengan memperhatikan pelbagai aspek dan dampak jangka panjangnya, dijadikan sebagai pengetahuan dan kesadaran publik.

Pendidikan di masa depan harus mampu mengembangkan mitos dan kebiasaan-kebiasaan mental yang baru. Tujuan ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem pendidikan masa depan yang dinamis, produktif, melingkupi, dan holistik. Mitos mengenai pendidikan sebagai pintu gerbang ke arah kerja, gelar haruslah diganti dengan mitos-mitos baru yang sesuai dengan dimensi-dimensi sosial yang lebih kaya. Kebiasaan-kebiasaan mental yang baru yang dapat mendukung sebuah sistem pendidikan dan sistem sosial masa depan yang lebih baik.

DAFTAR ACUAN

a. Buku

- Bell, David, *An Introduction to Cybercultures*, Routledge, London & New York, 2001.
- Clark, Richard E. (Ed.), *Learning from Media: Arguments, Analysis, and Evidence*, IAP, Greenwich, Connecticut, 2001.
- Dua, Mikhael, *Kebebasan Ilmu Pengetahuan & Teknologi: Sebuah Esei Etika*, Kanisius, Yogyakarta, 2011.
- Harefa, Andrias, *Menjadi Manusia Pembelajar*, KOMPAS, Jakarta, 2000.
- Hariyadi, Mathias, *Membina Hubungan Antarpribadi: Berdasarkan Prinsip Partisipasi, Persekutuan, dan Cinta Menurut Gabriel Marcel*, Kanisius, Yogyakarta, 1994.
- Hartanto, Budi, *Dunia Pasca-Manusia: Menjelajahi Tema-Tema Kontemporer Filsafat Teknologi*, Kepik, Depok, 2013.
- Leary, Timothy (Ed.), *Chaos and Cyberculture*, Ronin Publishing, Ins, 1994.
- Lever-Duffy, Judy & McDonald, Jean B., *Teaching and Learning with Technology*, Pearson, Boston, MA, 2011⁴.

- Palmer, Joy A. (Ed.), *50 Pemikir Paling Berpengaruh terhadap Dunia Pendidikan Modern: Biografi, Dedikasi, dan Kontribusinya*, Laksana, Yogyakarta, 2010.
- Pengasuh Majalah Basis, *Driyarkara tentang Pendidikan*, Kanisius, Yogyakarta, 1986².
- Pepperell, Robert, *Posthuman: Kompleksitas Kesadaran, Manusia dan Teknologi*, Kreasi Wacna, Yogyakarta, 2009 (Orig. Inggris, 1997).
- Piliang, Yasraf Amir, *Dunia yang Berlari: Mencari Tuhan-Tuhan Digital*, Grasindo, Jakarta, 2004.
- _____, *Dunia yang Dilipat,: Tamasya Melampaui Batas-Batas Kebudayaan*, Jalasutra, Yogyakarta, 2004.
- _____, *Post-Realitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Post-Metafisika*, Jalasutra, Yogyakarta, 2010³ (2004).
- Russell, Bertrand, *Pendidikan dan Tatahan Sosial*, Terj. Ahmad Setiawan Abadi, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- Sandang, Yesaya, *Dari Filsafat ke Filsafat Teknologi: Sebuah Pengantar Awal*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.

- Shaffer, David Williamson, *How Computer Games Help Children Learn*, Palgrave Macmillan, New York, 2006.
- Shields, Rob, *Virtual: Sebuah Pengantar Komprehensif*, Jalasutra, Yogyakarta, 2011 (Orig. Inggris 2003).
- Sugiharto, Bambang (Ed.), *Humanisme dan Humaniora: Relevansinya bagi Pendidikan*, Jalasutra, Yogyakarta, 2008.
- Tardelly, Reynaldo Fulgentio, *Merasul lewat Internet: Kaum Berjubah dan Dunia Maya*, Kanisius, Yogyakarta, 2009.
- Touraine, Alan, "Two Interpretations of Social Change", dalam Haferkamp, Hans & Smelser, Neil J., *Social Change and Modernity*, University of California Press, California, 1992.
- Tjaya, Thomas Hidya, *Humanisme dan Skolastisisme: Sebuah Debat*, Kanisius, Yogyakarta, 2004.
- Trolley, Barbara C. & Hanel, Constance, *Cyber Kids, Cyber Bullying, Cyber Balance*, Corwin: A Sage Company, California, 2010.
- Zen, M.T., *Sains, Teknologi dan Hari Depan Manusia*, PT Gramedia, Jakarta, 1982.

b. Artikel

A., Doni Koesoema, “Eklektisisme Kurikulum 2013”, dalam *Kompas*, 5 April 2013.

Azra, Azyumardi, “Masyarakat Madani”, dalam *Kompas*, 12 Oktober 2013.

Bagir, Haidar, “Pendidikan yang Memanusiakan”, dalam *Tempo*, 23 Desember 2012.

Dahana, Radhar Panca, “Generasi Digital”, dalam *Kompas*, 30 Nopember 2012.

Karman, Yonky, “Berhenti Berpikir Cara Televisi”, dalam *Kompas*, 15 September 2007.

Liye, Tere, “Penyakit Sosial Dunia Maya”, dalam *Kompas*, 6 Juli 2013.

Tranggono, Indra, “Terbunuhnya Kultur Tatap Muka”, dalam *Kompas*, 29 Maret 2009.

c. Kamus

Cambridge Advanced Learner's Dictionary, Third Edition, Cambridge University Press, Cambridge, 2008.

BAB 4

MENGGAGAS PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DENGAN ETIKA ARISTOTELES¹⁴¹

Oleh: Xaverius Chandra H. Marbun

PENDAHULUAN

Meluas dan mendalamnya korupsi di Indonesia saat ini membuat pesimis mengenai apakah korupsi dapat diberantas. Penangkapan segelintir pejabat oleh KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sedikit memberikan optimisme, tetapi yang belum terbongkar dan terbukti, dalam perasaan umum, sangat jauh lebih banyak. Korupsi di Indonesia terjadi di mana-mana meliputi seluruh bidang hidup bersama. Sudah tiga puluhan tahun lalu Syed Hussein Alatas, yang lama meneliti korupsi di sejumlah negara, mengingatkan hal ini. Ia mengatakan bahwa korupsi bersifat lintas-sistemik dan melekat ada semua sistem sosial, baik feodalisme, kapitalisme, komunisme, maupun sosialisme.¹⁴²

¹⁴¹ Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 6 November 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya.

¹⁴² S. H. ALATAS, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, 1987, Jakarta, hlm. xxiv.

Apakah untuk memberantas korupsi yang berurat berakar di segala bidang dan lapisan hidup sosial di Indonesia diperlukan penegakan hukum yang sangat keras seperti di Cina? Kalau diterapkan di Indonesia, maka dapat dipertanyakan siapa yang dapat mengadili siapa kalau yang mengadili juga tidak dapat dipercaya atau banyak terlibat? Kami sendiri tidak setuju dengan jalan pintas itu karena kemanusiaan manusia lebih bernilai dibandingkan efek yang mau dicapai. Di sini kami tidak membahas bagaimana memberantas korupsi secara cepat, tetapi bagaimana mengubah manusia, yang ada di balik korupsi dan sumber terjadinya korupsi itu, supaya tidak melakukan korupsi, yaitu melalui pendidikan.

Asumsi kami ialah bila seorang manusia memiliki keutamaan atau karakter yang baik, maka ia lebih mampu menahan diri untuk tidak melakukan korupsi. Dan untuk ini tidak ada cara lain selain pendidikan. Akan tetapi, masihkah pendidikan yang ada dapat diharapkan? Bagaimana mendidik untuk tidak melakukan korupsi? Siapa dan kepada siapa yang mendidik dan dididik? Apa yang mau dituju dari pendidikan itu? Bukankah sudah banyak pandangan tentang perlunya pendidikan karakter yang dikemukakan akhir-akhir ini? Dari tinjauan filsafat kami menawarkan etika keutamaan dari Aristoteles untuk menjawab pertanyaan pokok:

bagaimanakah mengubah manusia melalui pendidikan supaya memiliki karakter antikorupsi. Akan tetapi, sebelumnya perlu diperjelas dulu hubungan korupsi dan moral pribadi sehingga keutamaan atau karakter menjadi perlu untuk disasar oleh pendidikan. Pada bagian terakhir kami menarik sejumlah bahan refleksi berangkat dari etika Aristoteles sehubungan dengan pendidikan.

1. KORUPSI DAN MORAL

Sudah banyak definisi tentang korupsi. Akan tetapi, menurut kami baiklah disimak apa yang ditunjukkan oleh Alatas mengenai tiga fenomena korupsi, yaitu penyuapan, pemerasan, nepotisme.¹⁴³ Di samping itu, ciri-ciri pokok dari korupsi adalah penipuan, pencurian, dan pengkhianatan.¹⁴⁴ Alatas juga menunjukkan bahwa sebab dari korupsi dapat dilihat dari faktor pribadi, institusional, dan situasional. Bagi Alatas moralitas pribadi merupakan faktor yang paling kuat dalam menyebabkan korupsi lebih daripada faktor-faktor lain, seperti budaya. Menurutnya faktor moralitas pribadi ini berupa keinginan dari dalam diri seseorang untuk melakukan korupsi di mana di situ tersedia kesempatan untuk

¹⁴³ S. H. ALATAS, *Sosiologi Korupsi*, hlm. 12.

¹⁴⁴ S. H. ALATAS, *Korupsi...* hlm. xix

korupsi.¹⁴⁵ Korupsi di Cina, menurut Alatas, bukan disebabkan oleh tradisi budaya Cina, melainkan oleh kerakusan, kekejaman, dan nafsu untuk mengambil keuntungan yang menjangkiti para penguasa dalam jangka waktu yang lama.¹⁴⁶ Karena itu, Alatas mengajukan bahwa untuk masyarakat di Asia keberadaan orang yang bermoral lebih menentukan daripada bagaimana strukturnya kalau mau mencegah korupsi. Sehubungan dengan ini ia juga menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia disebabkan bukan karena tiadanya undang-undang atau peraturan, melainkan karena faktor di luar struktur pemerintahan, yaitu orang yang korup yang kemudian mencemari pemerintahan itu.¹⁴⁷ Singkatnya, menurut Alatas, faktor terpenting dari korupsi adalah disposisi moral dan intelektual para pemimpin masyarakat.¹⁴⁸ Alatas dengan demikian menegaskan bahwa syarat dan sebab korupsi yang penting adalah tingkat moralitas dalam masyarakat. Menurutnya moralitas yang ditarik dari relativisme nilai, nihilisme, dan individualisme materialistis pasti mengeroposkan moralitas umum dalam

¹⁴⁵ *Op. cit.*, hlm. 16, 130

¹⁴⁶ *Op. cit.*, hlm. 142.

¹⁴⁷ *Op. cit.*, hlm. 165-166.

¹⁴⁸ *Op. cit.*, *Sosiologi Korupsi*, hlm. 59.

masyarakat sehingga di situ tingkat korupsi tinggi.¹⁴⁹ Apa yang dikemukakan Alatas di atas meneguhkan asumsi bahwa faktor terpenting dari mengapa korupsi terjadi adalah moralitas pribadi.

Betapa pentingnya moralitas tampak dari apa yang membuat negara yang rendah tingkat korupsinya berhasil memberantas korupsi. Finlandia, misalnya, merupakan negara yang menduduki ranking pertama, bersama Denmark dan Selandia Baru, dalam daftar negara yang rendah tingkat korupsinya dalam ukuran *Transparency International* pada tahun 2012.¹⁵⁰ Finlandia menyebut nilai-nilai moral, seperti tahu batas, penguasaan diri, dan kebaikan umum, sebagai kunci dari rendahnya tingkat korupsi. Faktor-faktor lain yang berperan adalah tiadanya pemusatan kekuasaan, sempitnya disparitas sosial ekonomi, dan penegakan hukum

¹⁴⁹ *Op. cit.*, *Korupsi...* hlm. xxiv.

¹⁵⁰ <http://www.transparency.org/cpi2012/results>; *Transparency International* mengartikan korupsi sebagai kurangnya integritas moral pada pemegang kuasa. Korupsi merupakan “penyalahgunaan kekuasaan yang

dipercayakan untuk keuntungan pribadi yang pada akhirnya melukai siapa saja yang bergantung pada integritas orang yang duduk dalam posisi kekuasaan itu. (“What We Do”, *Transparency International* [<http://www.transparency.org/whatwedo>])

secara tegas.¹⁵¹ Akan tetapi, hal-hal terakhir disebutkan ini tidak berdaya melawan korupsi tanpa perwujudan nilai-nilai seperti yang disebutkan terdahulu. Dikatakan juga bahwa contoh moral yang diberikan oleh para pegawai dan pejabat merupakan sesuatu yang tidak bisa tidak bagi pembangunan kultur beretika di sektor pemerintahan. Pada sektor swasta pun nilai-nilai seperti akuntabilitas, kejujuran, dan “fair play” dijunjung tinggi sampai-sampai pelatihan etis merupakan bagian integral dari pelatihan manajemen bisnis di Finlandia.¹⁵² Nilai-nilai yang disebutkan di muka merupakan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat atau mencerminkan etika nasional sehingga begitu besar pengaruh dan tekanannya pada pribadi-pribadi yang memegang jabatan publik.¹⁵³ Dikatakan bahwa sejak merdeka pada 1917 Finlandia sudah bekerja keras agar pendidikan dapat menanamkan nilai-nilai bangsanya, terutama kejujuran, kesederhanaan, kerendahan hati. Pendidikan diakui sebagai yang berperan mula-mula untuk mentransformasi nilai-nilai dasar pada seluruh warga negara

¹⁵¹ Ministry for Foreign Affairs of Finland, “Combating Corruption. The Finnish Experience” (<http://formin.finland.fi/public/download.aspx?ID=14293&GUID=%7BCB19248E-6A33-48BA-ABC2-4C7B9FE33A33%7D>, hlm. 5)

¹⁵² *Loc. cit.*, hlm. 6

¹⁵³ *Loc. cit.*, hlm. 7

dan pemerintah. Hasilnya antara lain nilai-nilai bangsa secara bertahap sepenuhnya menjadi nilai-nilai pegawai negeri sehingga pegawai negeri harus bertanggung jawab, jujur, peduli pada kebaikan umum, menghormati hukum, arif dalam melayani kepentingan umum, dan tidak menyalahgunakan kekuasaan ataupun menyombongkan posisinya.¹⁵⁴

Nilai-nilai berkaitan dengan moralitas karena moralitas berkenaan dengan tindakan yang merealisasikan nilai-nilai. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi pemerintah dan warga negara Finlandia adalah nilai-nilai yang mengatasi nilai-nilai pribadi seperti pencarian kenikmatan, keuntungan diri, kemudahan-kemudahan, kuat-kuatan, dsb. Bila nilai kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab demi kebaikan umum lebih dihormati dan lebih dijadikan pedoman daripada yang lain, seperti keinginan memperkaya diri terus menerus dan memiliki barang-barang mewah, maka yang tampil dalam perilaku para pejabat dan pegawai pelayanan publik adalah yang sesuai dengan nilai-nilai yang paling dijunjung tinggi itu, yang berlawanan dengan korupsi.

Karena itu, bila kita berdiskusi mengenai pendidikan antikorupsi di negara dengan tingkat korupsi begitu tinggi

¹⁵⁴ *Loc. cit*, hlm. 15

seperti Indonesia, kami berpendapat bahwa yang mendasar untuk dituju oleh pendidikan antikorupsi itu adalah bagaimana membentuk keutamaan atau karakter moral pribadi manusia yang dengan sadar dan mau menempatkan nilai-nilai lawan dari korupsi di atas segala nilai yang lebih rendah seperti pencarian kenikmatan dan kesenangan diri sendiri. Keutamaan atau karakter moral inilah yang membentuk moralitas pribadi yang berperan signifikan dalam mengembangkan korupsi atau mengurangnya.

2. MENGAPA ETIKA ARISTOTELES

Alasdair MacIntyre mengajak untuk kembali pada rasionalitas tradisional karena rasionalitas yang ditawarkan Proyek Pencerahan, yang berambisi menggantikan rasionalitas agama dengan rasionalitas baru yang mendasari moralitas, telah gagal. MacIntyre menawarkan etika Aristoteles dengan etika keutamaannya, suatu rasionalitas tradisional yang lebih dapat diandalkan daripada apa yang ditawarkan oleh Proyek Pencerahan. Bagi MacIntyre Proyek Pencerahan justru melahirkan emosivisme, yang berpandangan bahwa sesuatu itu baik bagiku karena aku setuju akannya. Ukuran baiknya suatu tindakan adalah ketika “aku tidak keberatan atasnya” atau “aku setuju

terhadapnya.¹⁵⁵ Kalau emosivisme ini ada pada para koruptor, maka korupsi tidak salah karena ukurannya adalah persetujuan siapa dulu atasnya: koruptor dan teman-temannya setuju atasnya, atau pemberi suap tidak keberatan memberikan atau dimintai suap, atau atasan mendukung, maka tidak ada yang salah dengan korupsi. Kalau dihubungkan dengan pendidikan, dapat dipertanyakan bagaimanakah pendidikan antikorupsi dapat dibangun di atas permisivitas semacam itu?

Dari MacIntyre kita dapatkan bahwa etika modern memiliki diskrepansi antara aturan moral yang dibuatnya dan kodrat manusia. Sementara itu, pada Aristoteles, sebagaimana yang dilihat oleh MacIntyre, terdapat kesesuaian di antara keduanya, sebagaimana tampak pada perbedaan antara di satu sisi manusia sebagaimana adanya dan di sisi lain manusia seperti apa ia sesudah mengembangkan kodrat esensialnya. Etika berurusan dengan bagaimana manusia dapat bergerak dari yang pertama ke yang terakhir disebut.¹⁵⁶ Pada perkembangan ini dapat diletakkan pendidikan, dan dengan demikian tampak hubungan antara etika dan

¹⁵⁵ ALASDAIR MACINTYRE, *After Virtue*, University of Notre Dame Press, 1984, hlm. 39-40.

¹⁵⁶ *Op. cit.*, hlm. 52-53.

pendidikan. Pendidikan semacam ini mengandaikan pengakuan akan kodrat manusia yang tetap dan universal.

Etika Aristoteles dibangun di atas dasar kodrat manusia yang tetap dan universal dengan penilaian-penilaian moral yang tak berubah.¹⁵⁷ Misalnya, dari Aristoteles diperoleh pernyataan faktual dan universal bahwa semua orang yang bertindak, tindakannya mengejar tujuan, sehingga suatu tindakan adalah benar bila mengarah pada tujuan.¹⁵⁸ Di sini hidup yang baik itu adalah hidup yang bertujuan. Penentuan tujuan itu beserta sarana-sarana untuk mencapainya digagas oleh manusia secara rasional. Etika Aristoteles merupakan etika rasional yang berangkat dari kodrat manusia yang dapat diterima semua orang.

Pada paruh kedua abad kedua puluh ada usaha sejumlah filsuf untuk kembali pada etika Aristoteles secara lebih eksplisit. Gerakan ini mulai pada 1958 dengan terbitnya artikel dari Elizabeth Anscombe, yang mengajukan pandangan bahwa bahwa etika modern berputar-putar di sekitar ide kewajiban legalistis, yang makna dan perannya sudah mengecil ketika sudah tidak ada lagi pemberi hukum

¹⁵⁷ FREDERICK COPLESTON, *A History of Philosophy*, vol I, Image Book, NY, 1993, hlm. 333

¹⁵⁸ F. COPLESTON, *Op. cit.*, hlm. 332-333.

yang ilahi. Karena itu, ia menganjurkan para filsuf untuk menengok konsep keutamaan dan dengannya seharusnya memulai suatu jenis studi etika.¹⁵⁹

Etika Aristoteles berkembang dalam era Yunani Kuno, yang mana pada masa ini etika berarti karakter. Karakter menunjuk pada seperti apakah manusia yang baik itu. Ini berbeda dengan pengertian etika dalam filsafat modern yang berurusan dengan apa yang harus dilakukan orang pada situasi tertentu ataupun yang berkenaan dengan soal kewajiban, tanggung jawab, dan hak.¹⁶⁰ Kalau korupsi itu lebih banyak disebabkan oleh moralitas pribadi, dan sementara itu, pendidikan antikorupsi mau membentuk manusia yang bermoral agar dapat menolak korupsi, maka adalah tepat bahwa pendidikan bertumpu pada pendidikan karakter. Etika Yunani, khususnya Aristoteles, pertama-tama menggarap karakter ini.

Menurut Aristoteles orang belajar etika untuk dapat menjadi orang yang baik (*Nicomachean Ethics [NE]*, mis. 1095a5-6). Ia mengatakan: “studi kita sekarang ini bukan,

¹⁵⁹ E. ANSCOMBE, 4, 46 hlm 15 dalam ROGER CRISP, “Ethics” dalam DAVID FURLEY (ed.), *Routledge History of Philosophy, vol, II*, Routledge, London & NY, 2005 , hlm. 123.

¹⁶⁰ STEPHEN WATT, “Introduction” dalam Aristotle. *The Nicomachean Ethics*, hlm. xiv; ROGER CRISP, *Op. cit.*, hlm. 109

seperti yang lain-lain, untuk tujuan-tujuan intelektual. Karena kita ingin tahu apakah keutamaan itu tidak supaya kita dapat mengetahui, tetapi supaya menjadi manusia yang baik, karena kalau tidak itu akan menjadi percuma“ (*NE*, 1103b26-9). Aristoteles lebih tertarik pada bagaimana membuat manusia menjadi baik daripada mengenai apa yang dilakukan manusia.¹⁶¹ Aristoteles tidak ingin murid-muridnya sekadar tahu suatu hal, termasuk bagaimana hidup yang baik itu, tetapi ia ingin agar mereka menjadi baik! Tujuan etika bagi Aristoteles adalah sangat praktis. Ia berkenaan dengan pembentukan karakter atau bagaimana menjadi manusia yang baik secara moral. *NE* tidak dimaksudkan untuk menyodorkan seperangkat prinsip etis, tetapi untuk memberikan potret tentang manusia yang berkeutamaan, supaya dari sana orang bukan hanya dapat merumuskan sendiri apakah hakikat keutamaan itu, melainkan juga mengembangkan dan mempraktikkannya.¹⁶² Maksud dari *NE* untuk menjadikan seseorang baik itu adalah baik sebagai manusia, dan bukan sebagai pelaku pekerjaan tertentu atau pencari pengetahuan (1097a15-b21). Menjadi baik sebagai manusia ini menurut Sparshott berarti menjawab persoalan bagaimana manusia mengorganisasi hidupnya dalam suatu

¹⁶¹ STEPHEN WATT, *Op. cit.*, hlm. xxi.

¹⁶² ROGER CRISP, *Op. cit.*, hlm. 113.

kurun waktu.¹⁶³ Manusia perlu mengorganisasi hidupnya agar dapat hidup secara baik. Menurut S. Watt, Aristoteles menulis *NE* untuk menggambarkan seperti apakah orang yang baik itu alih-alih untuk menjawab pertanyaan apa yang seharusnya dilakukan dalam situasi tertentu.¹⁶⁴ Dalam buku X bab IX dari *NE* ditunjukkan bahwa soal menjadi manusia baik itu hampir seluruhnya merupakan soal mendidik manusia dengan tepat. Karena itu, etika Aristoteles layak untuk dipandang dalam rangka menggagas pendidikan antikorupsi.

Aristoteles berurusan dengan persoalan bagaimana mengatur hidup bersama dalam *polis* sehingga kesejahteraan warga negara dapat berkembang. Ia berusaha memberikan pedoman pada para politikus agar mereka dapat menjadi politikus yang baik. Politikus yang baik adalah dia yang dapat membuat para warga negara menjadi baik, dan dengan warga negara yang baik, maka negara menjadi makin baik. Legislator yang baik adalah legislator yang bisa menghasilkan peraturan yang dapat membentuk kebiasaan baik para warga negara. Adalah tugas dari *polis* untuk memberikan

¹⁶³ FRANCIS SPARSHOTT, *Taking Life Seriously. A Study of the Argument of the Nicomachean Ethics*, University of Toronto Press, Toronto, 1996, hlm. 7- 8.

¹⁶⁴ STEPHEN WATT, *Op. cit.*, hlm. xiii.

pendidikan pada warganya agar menjadi orang baik. Negara harus berusaha keras untuk menjamin formasi moral anggota-anggotanya (*Politics*, 8, 1). Untuk itu, perlulah pendidikan moral pada para pejabat dan aparatur negara. Gambaran mengenai bagaimana pribadi yang baik yang dipaparkan Aristoteles dalam *NE* dimaksudkan untuk para politikus agar mereka dapat menjadi baik secara moral dan mendidik para warga negara menjadi baik pula secara moral. Ini relevan dengan persoalan korupsi di kalangan politikus, yang mana faktor moral pribadinya berpengaruh besar pada tindakannya untuk korupsi atau tidak.

3. ETIKA KEUTAMAAN ARISTOTELES DAN KORUPSI

Kalau Aristoteles dengan etika ingin membuat orang menjadi baik, lantas bagaimanakah etika dapat melakukan hal tersebut? Bagaimanakah seseorang dapat menjadi manusia yang baik? Aristoteles menyatakan bahwa kalau pekerjaan seseorang adalah pematung, maka orang yang membuat patung dengan buruk adalah pematung yang buruk. Kalau pekerjaan mata adalah melihat, maka mata yang melihat dengan buruk adalah mata yang buruk (1097b24-33). Manusiapun, karena kemanusiaannya yang melebihi sekadar sebagai pematung, ketika berbuat sesuatu

yang buruk, ia adalah manusia yang buruk. Karena itu, untuk menjadi manusia yang baik seorang manusia seharusnya melakukan apa yang dilakukan manusia yang baik (1106b36-1107a2). Apa dan bagaimanakah itu? *NE* dibuka dengan kalimat yang menunjukkan organisasi terhadap tindakan-tindakan dalam hidup manusia: “Setiap keterampilan dan setiap penelitian, dan demikian juga setiap usaha praktis, terarah pada suatu kebaikan: karena itu harus dikatakan bahwa kebaikan adalah apa yang dituju oleh segala sesuatu.” (I, 1) Ini berarti bahwa untuk manusia tidak sembarangan ia bertindak. Melalui tindakan-tindakannya manusia dapat menjadi manusia yang baik. Tindakan-tindakan manusia harus diorganisasi agar dengannya manusia menjadi manusia yang baik. Bagaimana menurut Aristoteles mengorganisasikannya? Aristoteles menyebut bahwa setiap tindakan manusia cenderung bertujuan pada suatu tujuan. Hidup yang baik dimulai dengan mengorganisasi atau menata hidup sesuai dan ke arah suatu tujuan. Dengan demikian, hidup manusia bukanlah hidup yang hanya bereaksi secara spontan pada apa yang dari luar menarik ataupun dari dalam mendorong secara tiba-tiba. Hidup yang baik merupakan hidup yang tertata menurut tujuan.

Tujuan merupakan itu yang dipandang manusia sebagai sesuatu yang berharga atau bernilai. Suatu tujuan merupakan

suatu kebaikan. Aristoteles tidak mengakui adanya konsep kebaikan pada dirinya sendiri. Sesuatu itu baik bagiku karena kepadanya aku tertarik. Setiap hal memiliki daya tariknya sendiri yang dapat membuatku tertarik padanya. Ketika aku tertarik padanya, aku menjadikannya tujuanku. Nilai tidak berdiri sendiri, tetapi selalu melekat dan terkandung dalam pengada yang lain.

Kalau semua pengada mengandung kebaikan, lantas apakah ada kebaikan bagi manusia yang khas manusiawi? Untuk menjawabnya Aristoteles berangkat dari hidup sehari-hari, yaitu dari apa yang membedakan manusia dari binatang. Menurut Aristoteles gerakan natural pada binatang merupakan respon dari dorongan ekstern, yang mana persepsi dan imajinasinya menyampaikan kepadanya situasi yang akan datang, yang memicunya untuk atau menginginkannya atau menghindarinya. Binatang belajar dari pengalamannya sehubungan dengan kebaikan-kebaikan yang tampak. Akan tetapi, keinginan dan penolakan dari apa yang disodorkan oleh persepsi dan imajinasi pada binatang ini berlangsung dengan langsung-segera (*Physics* II, 1). Ini berbeda dengan manusia. Pada manusia imajinasi digantikan oleh berpikir, kalkulasi, dan pengetahuan (*De anima* 433a10). Manusia dapat melampaui kelangsungsegeraan yang ada pada binatang dengan membuat aktivitas menunggu seraya

membuat pemilihan atas mana yang lebih baik bagi dirinya. Ini adalah apa yang disebut oleh Sparshott sebagai “sense of time, yang mana waktu disini tidak hanya berarti kontinuitas dan suksesi, tetapi merupakan aspek perubahan-perubahan yang diukur menurut peristiwa-peristiwa yang lebih dulu dan lebih kemudian (*Physics* IV 11. 219a32-b1). Itulah sebabnya, pada manusia tindakan diambil setelah melalui pertimbangan dan pilihan berdasarkan tujuan yang ditetapkannya. Ada orientasi waktu pada manusia yang terbentang antara masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Orang yang memiliki tujuan di masa depan, ketika menentukan apa yang dilakukannya sekarang, mempertimbangkan pilihan tindakannya dengan melihat ke masa depan, yaitu apakah tindakan yang dipilihnya, akan berkontribusi bagi pencapaian tujuannya atau tidak. Kapasitas mengorganisasi hidup semacam ini menjadi mungkin karena manusia memiliki “sense of time” dan akal budi, yang membuatnya dapat mengatasi kelangsungsegeraan. Bila dihubungkan dengan korupsi, mestinya tawaran, godaan, dan kesempatan untuk korupsi dengan segala yang dapat diperolehnya untuk memenuhi keinginan-keinginannya tidak langsung segera disambut koruptor dalam tindakan korupsi. Sebagai makhluk yang berbeda dari binatang, semestinya manusia meletakkan berbagai pilihan tindakan yang dilihatnya dalam perspektif

waktu untuk menimbang apakah korupsi itu berkontribusi bagi pencapaian tujuan hidupnya.

Akan tetapi, bagi Aristoteles tidak sembarang tujuan yang dikejar manusia. Tujuan dapat menjadi tujuan bagi tujuan yang lain sampai dengan tercapai tujuan tertinggi. Apakah melakukan korupsi dapat membawa pada tujuan final hidup seseorang? Lagipula, untuk menjadi orang yang baik tidak sembarang tujuan menjadi tujuan tertinggi. Tujuan terakhir adalah suatu tujuan yang tidak dapat menjadi sarana untuk tujuan yang lain, tetapi ia menjadi sasaran yang dituju oleh semua tindakan yang lain. Untuk manusia tujuan terakhir ini disebut “eudaimonia” atau kebahagiaan.

Dalam hal apa terletak kebahagiaan manusia? Apakah semua hal dapat menjadi kebahagiaan manusia? Apakah semua kebahagiaan setara? Aristoteles mengatakan bahwa kebanyakan orang mengidentikkan kebahagiaan dengan sesuatu yang kelihatan dan jelas seperti kesehatan, kekayaan, kesenangan, dan kehormatan. Sudah sejak masa Aristoteles bahwa kalau seseorang tidak memiliki apa yang disebutkan tadi, maka ia dipandang sebagai orang yang malang. Menurut Aristoteles hidup yang hanya mencari kenikmatan tidak menyentuh apa yang manusiawi dalam kemanusiaan. Hidup yang mencari uang bukanlah hidup yang baik karena

uang pada dasarnya itu sarana, dan bukan tujuan. Pengumpulan uang yang tidak digunakan bahkan adalah gila.¹⁶⁵ Dan orang yang hidupnya mengejar kenikmatan adalah serupa dengan binatang (I, 3). Aristoteles tidak mengakui kehormatan sebagai letak kebahagiaan karena kehormatan diberikan oleh orang-orang lain, dan karenanya, ia bergantung pada pendapat-pendapat orang lain.

Menurut Aristoteles ada tiga pola hidup yang ditentukan oleh tiga nilai, yang dipilih orang untuk mencapai kebahagiaan, yaitu mencari kenikmatan, berpolitik, dan berfilsafat. Mencari kenikmatan dan berpolitik dianggap oleh Aristoteles sebagai superfisial. Bagi Aristoteles sesuatu yang baik itu adalah sesuatu yang dipilih bukan karena itu mendatangkan kesenangan, kenikmatan, kehormatan, ataupun keuntungan, melainkan karena kebaikan yang terkandung pada dirinya itu sendiri. Seperti yang sudah ditunjukkan di atas, kebahagiaan yang sejati ada pada kebaikan manusia yang khas manusiawi. Di manakah itu? Kebaikan manusia itu terletak pada kesempurnaan hakikatnya.¹⁶⁶ Kesempurnaan hakikat manusia itu ada pada fungsi khas manusia. Itu ada pada apa yang hanya ada pada manusia dan tidak ada pada binatang. Suka pada apa yang

¹⁶⁵ F. SPARSHOTT, *Op. cit.*, hlm. 29-30.

¹⁶⁶ ROGER CRISP, *Op. cit.*, hlm. 113.

nikmat dan menyenangkan itu terdapat baik pada manusia maupun binatang sehingga orang yang hidupnya hanya mencari apa yang nikmat, ia tidak ada bedanya dari binatang. Yang khas manusiawi adalah akal budi. Fungsi manusia, dengan demikian, adalah bertindak sesuai dengan akal budi. Anak-anak dan binatang dipandang sebagai tidak bisa bahagia karena tidak memiliki kualitas yang perlu untuk menjadikan dirinya orang atau individu yang baik.

Orang yang melakukan korupsi demi memenuhi hasrat untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya agar dengannya diperoleh kenikmatan sebesar-besarnya adalah sama dengan orang yang mencari kebahagiaan pada kenikmatan. Ini termasuk juga orang yang berpolitik demi mencari uang sebanyak-banyaknya untuk kenikmatan. Kenikmatan menjadi tujuan terakhir. Orang semacam ini tentu bukan orang yang baik. Ia bahkan tak berbeda dari ternak bila diingat apa yang dikatakan oleh Aristoteles bahwa hidup yang mengejar kenikmatan demi kenikmatan tak berbeda dari hidup binatang.

Memang menurut Aristoteles adalah sah bahwa orang bertindak ditumpangi oleh keinginan akan kenikmatan maupun oleh penolakan akan kesakitan (X, 4-5). Meski bukan sesuatu yang buruk, kenikmatan merupakan sesuatu yang netral, menyertai suatu tindakan, dan bergantung pada

karakter aktivitas yang disertainya. Akan tetapi, tidak semua kenikmatan tidak diakui oleh Aristoteles sebagai nilai yang berdiri sendiri. Tidak semua tindakan selalu disertai oleh kenikmatan (X, 2). Meskipun tidak ada kenikmatan ketika orang melakukan hal-hal tertentu, namun tindakan-tindakan itu tetap harus dikerjakan. Kenikmatan itu hanya tambahan bagi nilai-nilai lain. Pada orang yang berkeutamaanpun dapat ada rasa nikmat, yaitu ketika ia melihat tindakan-tindakan berkeutamaannya yang sesuai dengan yang ditunjukkan oleh akal budinya. Nikmat di sini adalah kepuasan karena melihat hidup yang selaras dengan tujuan tertinggi yang disodorkan akal budi, yang mana di sini kenikmatan tidak dicari demi kenikmatan itu sendiri. Kenikmatan bukanlah tujuan akhir.

Kebahagiaan yang sejati ditemukan dengan melakukan apa yang menjadi fungsi khas manusia, yaitu bertindak dengan tepat sesuai dengan yang ditunjukkan dengan tepat oleh akal budi. Kebahagiaan bukanlah perasaan yang subjektif, melainkan objektif yang dapat didefinisikan. Disposisi untuk selalu bertindak dan merasa secara tepat menurut akal budi dan yang terarah pada tujuan dan sarana yang benar disebut keutamaan. Kebahagiaan tidak terpisah dari hidup berkeutamaan. Keutamaan mempermudah dan menjamin seseorang dalam melakukan tindakan-tindakan agar terarah pada tujuan. Di dalam keutamaan ada

keseriusan, identifikasi, klarifikasi, dan pengejaran tujuan (II, vii). Begitu stabil suatu keutamaan sehingga ia menjadi karakter (1105a33).

Keutamaan muncul dari *habitus* (1103a17-18). *Habitus* bukan sesuatu yang alamiah. Sebaliknya, ia terbentuk dari pola perilaku yang berulang-ulang dan membiasa. *Habitus* yang baik itulah keutamaan. Kalau akal budi dilatih dan dibiasakan untuk memilih tindakan yang tepat, maka lambat laun ini akan menjadi keutamaan. Dengan terbentuknya keutamaan, selanjutnya makin mudahlah seseorang untuk memilih tindakan yang tepat dalam berbagai situasi hidupnya sesuai dengan tujuan tertingginya. Keutamaan pada diri orang yang berkeutamaan sudah menjadi seperti kodrat kedua baginya, yang membuatnya tidak sulit ataupun terpaksa dalam memilih tindakan berdasarkan tuntunan akal budi dan melakukannya. Ketika seorang hakim yang tidak memiliki keutamaan dihadapkan pada tawaran uang sekian milyar rupiah dari penguasa atau pengusaha untuk memenangkan orang yang bersalah dalam pengadilan, sangat sukar baginya untuk menolak tawaran itu. Sebaliknya, bagi hakim yang berkeutamaan, tidak sulit ia menolak tawaran itu.

Ada dua macam keutamaan, yaitu keutamaan intelek dan keutamaan moral. Yang pertama soal aplikasi akal budi,

yang kedua soal aplikasi kehendak. Keutamaan intelektual ini terdiri atas kebijaksanaan (*sophia*), yang merupakan keunggulan dalam berpikir abstrak, lalu kemampuan mengaktifkan logos (*nous*), ilmu pengetahuan (*episteme*), keterampilan (*techne*), dan kearifan (*phronesis, prudentia*), yang merupakan keunggulan dalam berpikir mengenai bertindak secara tepat. Keutamaan moral berkenaan dengan pengaturan antara motif dan situasi, antara stimulus dan respon, antara dua pilihan ekstrem di bawah kontrol akal budi yang memiliki ukuran kebenaran. Keutamaan moral juga mengarahkan daya nonrasional dari jiwa agar sesuai dengan kebenaran yang ditunjukkan akal budi.

Keutamaan itu disposisi untuk menentukan pilihan di tengah-tengah dua ekstrem, yaitu yang terlalu berlebihan di satu sisi dan yang terlalu kurang di sisi lain. Terlalu lebih dan terlalu kurang dianggap sama-sama merupakan keburukan. “Tengah-tengah” di sini menunjuk pada ketepatan: pada waktu yang tepat, tentang hal yang tepat, terhadap orang yang tepat, untuk tujuan yang tepat, dan dalam cara yang tepat (1106b18-24). Ketepatan di tengah-tengah ini membutuhkan kearifan (*phronesis, prudentia*) untuk menentukannya. Kearifan merupakan karakter atau keutamaan yang dengannya kita menalar tindakan-tindakan kita (1140b4-6). Ia terkadang diterjemahkan sebagai akal

budi praktis atau kebijaksanaan praktis, dan dikontraskan dengan akal budi teoretis (*theoria*) (1141a9-b14).

Dengan menandakan bahwa letak kebahagiaan adalah dalam hidup yang menjalankan fungsi khas hidup yang manusiawi, Aristoteles menekankan bahwa tindakan dan perasaan seseorang harus sesuai dengan akal budi yang tepat. Ini menuntut keutamaan intelektual, khususnya kearifan, untuk membuat orang memiliki pengertian yang tepat mengenai kebahagiaan, peran keutamaan untuk mencapai kebahagiaan itu, dan bagaimana mempraktikkannya dalam hidup sehari-hari. Kearifan berhubungan dengan “pilihan-pilihan” (buku VI dan III), dalam arti bahwa ia menalar sarana dan bukan tujuan (1111b26-27; 11447-9). Kearifan merupakan keutamaan yang mempertimbangkan nilai-nilai yang ada dalam tiap pilihan untuk kemudian dipilih mana yang mengandung nilai yang paling sesuai dan mendukung pencapaian tujuan tertinggi.

Aristoteles sepaham dengan Sokrates yang menyatakan bahwa keutamaan tidak dapat ada tanpa kearifan. Karena kearifan itu disposisi untuk menentukan pilihan yang benar dan masuk akal, ia harus ada pada orang yang berkeutamaan. Bila keutamaan menjamin orang terarah pada tujuan, kearifan menjamin sarana yang dapat mengantarkan sampai

pada tujuan tersebut (II, 45, 2-6). Dari sini dapat ditarik bahwa semua keutamaan haruslah mengalir dari keutamaan kearifan. Kearifan juga merupakan syarat untuk memiliki keutamaan-keutamaan yang lain karena dalam segala situasi seseorang harus memiliki kapasitas untuk menimbang dan memutuskan secara tepat, yang mana kapasitas ini adalah kearifan. Menguasai diri, sebagai contoh, haruslah tepat dalam situasi yang berbeda-beda. Untuk orang yang benar-benar membutuhkan bantuan, seseorang perlu bermurah hati, tetapi untuk menghadapi ajakan teman untuk memanipulasi anggaran guna mendapat keuntungan, tidak ada kemurahan hati.

Dari sini bisa dijawab mengapa tidak sedikit koruptor yang merupakan lulusan universitas, bahkan strata tiga, dan bekerja sebagai dosen dengan pangkat guru besar? Pengetahuan yang banyak akan ilmu pengetahuan (*episteme*) tidak serta merta otomatis membuat orang bermoral karena moral itu soal tindakan dan ketepatan bertindak itu bergantung pada kearifan. Menolak korupsi, misalnya dengan keutamaan-keutamaan moral seperti kejujuran dan penguasaan diri serta tahu batas, menuntut kearifan. Kearifan tidak bisa terbentuk hanya dari pengajaran, kuliah, atau membaca. Keahlian dalam ilmu pertambangan minyak itu hanya *episteme*, tetapi tidak berurusan dengan bertindak

moral (*phronesis*). Yang unggul dalam *episteme* tidak otomatis pasti unggul juga dalam *phronesis*. Kearifan tidak dapat terbentuk dari pengajaran dan bakat alamiah. Kearifan dan keutamaan moral, seperti kejujuran dan penguasaan diri serta tahu batas, tadi hanya dapat terbentuk dari kebiasaan, yaitu melakukan tindakan penguasaan diri berulang-ulang (NE II, 1). Tidak ada orang dari lahir sudah memilikinya. Tidak juga sekolah tinggi strata tiga menjamin bahwa keutamaan-keutamaan itu dimiliki lulusannya. Keutamaan hanya tumbuh dari praktik, artinya dengan melakukan keutamaan itu. Dengan berulang kali berbuat jujur, misalnya, terbentuk dan berkembanglah keutamaan kejujuran. Aristoteles mengatakan bahwa “Kita tidak ingin tahu apakah keberanian itu tetapi menjadi berani, tidak juga apakah keadilan itu tapi menjadi adil” (*Eudemian Ethic* 1216 b 3 12-18). Dalam *Magna Moralia* ia menunjukkan bahwa “siapa saja yang mengetahui esensi keadilan tidak dengannya kemudian menjadi adil” (*Magna Moralia* 1183 b 15-16). Tanpa melakukan keutamaan penguasaan diri, gelar strata tiga ataupun guru besar tidak berpengaruh banyak untuk membuat orang menjadi baik. Kalaupun seseorang yang diakui memiliki keahlian dalam suatu ilmu pengetahuan memutuskan menolak korupsi agar jangan sampai ketahuan publik dan mengotori nama baiknya, bagi Aristoteles hal ini pun bukan tindakan berkeutamaan. Ini karena orang yang

berkeutamaan adalah orang yang memilih tindakan demi kebaikan yang terkandung dalam tindakan itu sendiri (NE 1115b12-13). Meskipun demikian, Aristoteles mengakui bahwa tindakan berkeutamaan memerlukan kebaikan-kebaikan eksternal. Bagaimana seseorang bisa bermurah hati kalau tidak memiliki itu yang dengannya orang bermurah hati? Bagaimana orang bisa jujur dan menguasai diri kalau ia dan keluarganya sukar memperoleh bahan makanan dan banyak kebutuhan pokoknya tidak bisa dipenuhi karena gaji yang sangat kecil?

4. RELEVANSI ETIKA ARISTOTELES DENGAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Dapatkah dari etika Aristoteles ditarik sumbangan untuk merancang pendidikan antikorupsi di Indonesia? Etika Aristoteles dalam *NE* dimaksudkan untuk para negarawan atau politikus. Akan tetapi, yang dituju oleh *NE* adalah menjadi pribadi politikus yang baik, yaitu yang berkeutamaan. Tidak menjadi kesulitan bagi Aristoteles untuk membayangkan para politikus berubah menjadi pribadi yang baik karena penduduk Athena pada empat ratus tahun sebelum masehi hanya sekitar sepuluh ribu orang dan sistem polis berbeda jauh dengan sistem politik

modern masa sekarang. Aristoteles menulis untuk para negarawan dari kelas aristokrat yang mempunyai banyak waktu luang, yang dapat diisi dengan berfilsafat. Pada masyarakat Yunani kuno berfilsafat adalah kegiatan yang umum dan biasa. Ini berbeda dengan masyarakat kita zaman sekarang. Aristoteles tidak menyusun etikanya dalam *NE* untuk para siswa sekolah.

Meskipun demikian, etika Aristotelian, yang menekankan keutamaan atau karakter sebagai pembentuk pribadi yang baik tetap relevan untuk pendidikan antikorupsi, khususnya di sektor formal. Apalagi dengan mengingat faktor utama penyebab korupsi, yaitu moral pribadi, maka etika Aristoteles relevan untuk menggagas bagaimana pendidikan antikorupsi, yang bertolak dari pembentukan pribadi yang baik secara moral dengan pendidikan keutamaan atau karakter. Kami mengajukan beberapa gagasan sebagai berikut:

Pertama, pendidikan antikorupsi pada dasarnya merupakan pendidikan keutamaan atau karakter. Ia pertama-tama merupakan formasi pribadi menjadi pribadi yang baik. Dasarnya adalah bahwa dari pribadi yang baiklah mengalir tindakan-tindakan berkeutamaan. Sebaliknya, dari pribadi yang tidak baik akan lebih mudah keluar tindakan-tindakan yang buruk seperti korupsi. Karena itu, yang pertama-tama

dan mendasar digarap adalah pribadi manusianya, secara khusus keutamaan-keutamaannya. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk pribadi manusia yang baik melalui pembentukan keutamaan-keutamaan. Dari sini kami sependapat bahwa pendidikan karakter merupakan pendidikan yang paling tepat untuk melawan korupsi sejauh pendidikan tersebut membentuk keutamaan-keutamaan. Dalam pasal 3 UU Sisdiknas tahun 2003 tertulis, “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Sehubungan dengan tujuan pendidikan nasional di atas dapat dipertanyakan berdasarkan etika Aristoteles: sebenarnya apakah pendidikan kita membimbing orang untuk melihat tujuan tertinggi atau kebahagiaannya? Kontemplasi dapat menatap di manakah letak kebahagiaan. Pendidikan melalui mata pelajaran-mata pelajaran dapat membawa subjek didik pada pengertian mengenai kebaikan

tertinggi untuk mencapai kebahagiaan. Integrasi pendidikan karakter dengan pengajaran ilmu-ilmu pengetahuan di sekolah terwujud jika pengajaran mengajak subjek didik menemukan kebaikan tertinggi dalam hidupnya. Atau bila tidak, orang tua minimal yang melakukan hal serupa di rumah.

Kedua, Aristoteles menganggap bahwa pada tiap orang ada karakter atau keutamaan yang umum, walau awalnya pada tiap orang keutamaan atau karakter itu hadir dalam bentuk kapasitas potensial. Akan tetapi, pembentukan keutamaan atau karakter itu hanya dapat terwujud bila orang melakukan tindakan-tindakan berkeutamaan, yang dilakukan secara berulang-ulang hingga menjadi kebiasaan. Pembiasaan sejak dini adalah lebih baik. Walaupun anak-anak subjek didik belum bisa mengetahui ataupun menyadarinya, pengertian dan kesadaran pada mereka akan muncul kemudian. Bertumbuhnya keutamaan karena pembiasaan akan mempermudah dan membantu manusia untuk bertindak. Dengan demikian, tidak tepatlah pendidikan karakter yang tanpa pembiasaan. Meskipun pendidikan karakter itu dirancang terintegrasi dengan pengajaran di sekolah, namun bila hanya sekadar pengingatan, pemberian pengetahuan, dan pembangkitan pengertian, itu sangat kurang. Dalam keluarga pun

pendidikan hanya dengan memberikan nasihat tanpa mengajak anak melakukan perbuatan-perbuatan keutamaan-keutamaan, merefleksikan diri dari pengalamannya bertindak, dan pemberian contoh dari orang tua tidak akan menumbuhkan keutamaan atau karakter baik pada anak.

Ketiga, menurut Aristoteles manusia lahir dengan kapasitas untuk formasi dan pengembangan keutamaan. Keutamaan muncul lebih karena proses pembentukan keutamaan itu dalam diri pribadi sejak kanak-kanak daripada karena pengaruh lingkungan sekitar. Keutamaan berkaitan erat dengan kapasitas pribadi untuk menentukan sendiri mau menjadi pribadi manusia macam apa dirinya sesuai dengan tujuan akhirnya dengan kemampuan memilih sarana-sarana yang tepat untuk mencapai tujuan itu. Tidak cukup seorang pemuda menjadi pegawai atau pejabat, tetapi pegawai atau pejabat yang bagaimana. Untuk itu si pemuda harus menemukan dan mengupayakan kualitas-kualitas apa yang harus dimilikinya untuk mencapai tujuan hidupnya. Dan karena kualitas-kualitas itu tidak dapat dimiliki seketika segera, tetapi terbentuk melalui kebiasaan bertindak, maka sejak awal orang muda itu harus membiasakan diri untuk melakukan tindakan-tindakan berkualitas atau berkeutamaan itu. Si pemuda ini subjek dari pendidikan dan perkembangan dirinya sendiri.

Pembentukan karakter hanya mungkin terwujud bila pendidikan memandang subjek didik sebagai subjek aktif, bukan objek pasif yang dijejali pengetahuan dan apalagi harus menghapuskannya. Tidak juga itu dapat terwujud bila pendidikan lebih banyak berisi penerapan hukum dan peraturan dengan perintah dan larangan dari luar secara terus-menerus. Aristoteles tidak mengajukan etika semacam etika larangan (“jangan berbuat ini”, “dilarang berbuat itu”). Ia menyarankan tindakan-tindakan yang positif yang berbeda-beda menurut situasinya. Pendidikan yang berisi kewajiban dan larangan bertindak tidak memanusiakan subjek didik karena tidak memberi kesempatan pada mereka untuk menjadi tuan atas tindakan mereka sendiri dan bertanggung jawab sendiri atasnya. Orang yang tumbuh dalam ketakutan dan keterpaksaan tidak akan menjadi orang yang dewasa dalam moral, padahal orang berkeutamaan adalah orang yang dewasa dalam moral. Di samping itu, orang yang dibiasakan mematuhi peraturan tidak dapat bertindak tepat dalam setiap situasi yang berbeda-beda dan rumit. Karena itu, subjek didik hendaknya tidak hanya disodori larangan-larangan, tetapi dilatih dan didorong untuk menalar tindakan yang tepat untuk dalam tiap situasi. Bila orang memiliki wewenang dan kesempatan untuk korupsi, orang tetap bisa “bermain” dengan aturan dan melakukan korupsi dan berdalih bahwa aturan tidak

melarang itu secara persis. Kalaupun setelah menjabat seseorang memilih tidak melakukan korupsi karena takut pada hukuman, inipun belum merupakan tindakan berkeutamaan, dan karena itu, belum merupakan pribadi yang baik dalam terang etika Aristotelian. Tidak juga cukup pendidikan hanya mengajari subjek didik akal budi teoretis (yang hasilnya *episteme* atau *sophia*) tanpa praktik keutamaan-keutamaan. Bagi Aristoteles tidak ada artinya kaum muda belajar etika dari membaca buku-buku etika. Etika tidak seperti matematika yang bisa dipelajari semacam itu dan kemampuannya sudah bisa terbawa sejak lahir. Pengertian etis muncul dari melakukan tindakan etis itu sendiri sehingga belajar etika adalah dengan mempraktikkannya. Lagipula situasi yang dihadapi manusia adalah berbeda-beda dan dapat begitu rumit sehingga panduan teoretis sangat kurang memadai dan di sanalah dituntut kemampuan manusia untuk berpikir secara rasional praktis. Seorang murid dapat saja mengetahui apa itu kebaikan umum (*common good, bonum communa*) sebagai apa yang ditunjukkan oleh akal budi sebagai alasan dan tujuan negara beserta pemerintah dengan seluruh aparturnya. Akan tetapi, ketika ia diberi wewenang atas urusan publik dan pada waktu yang sama mempunyai keinginan memiliki banyak uang dalam kesempatan yang tersedia, apakah ia akan serta merta bertindak sesuai dengan kebaikan umum?

Keempat, pendidikan yang mengantarkan menjadi manusia yang baik berarti pendidikan yang mengantarkan pada kedewasaan moral. Kedewasaan moral diukur dari kedewasaan kearifan karena kearifan merupakan keutamaan yang mengarahkan proses pengambilan keputusan yang tepat di hadapan berbagai pilihan. Suatu perbuatan baik sangat bergantung pada keseriusan dan kemampuan dalam menggunakan kearifan ini. Dari sini bisa dimengerti perbedaan pertumbuhan keutamaan pada satu orang dengan yang lain. Formasi keutamaan kearifan juga penting karena, seperti ditunjukkan di atas, kearifan merupakan sumber dari keutamaan-keutamaan yang lain. Karena itu, yang pertama-tama perlu diasah dalam pendidikan moral ini adalah keutamaan kearifan.

Bagaimanakah pendidikan untuk menumbuhkan kearifan ini hendaknya diupayakan? Pendidikan kearifan yang membuat orang dewasa dalam moral ini pertama-tama menuntut pendidikan yang selalu memandang subjek didik sebagai subjek yang mengarah pada pertumbuhannya agar menjadi dewasa dalam kapasitas pribadi yang mengantarkannya menjadi manusia yang baik. Subjek didik memiliki akal budi dan mampu menggunakannya sendiri. Kemampuan aplikasi akal budi inilah yang hendaknya diutamakan dalam pendidikan. Subjek didik perlu dipandu

untuk berpikir sendiri untuk menemukan dan merumuskan serta menginternasionasikan apa yang paling bernilai dalam hidupnya dan menjadi tujuan final hidupnya. Sesudah itu, mereka perlu dilatih untuk memilih tindakan yang sesuai dengan tujuan hidupnya. Caranya, misalnya, dengan memasukkan subjek didik pada contoh-contoh kasus hidup konkret dan menantang mereka untuk menganalisis dan membuat keputusan dalam setiap kasus secara rasional sesuai dengan tujuan akhirnya. Di samping simulasi semacam itu, dapat dipakai juga refleksi atas pengalaman hidup sehari-hari di mana subjek didik diminta melihat diri mereka sendiri dengan segala pertimbangan yang mereka pakai dan keputusan yang mereka ambil serta tindakan yang mereka sudah lakukan. Bila subjek didik dibiasakan berulang-ulang selama sekian tahun di sekolah dan di rumah menalar sendiri tindakan moral mereka, mereka akan lebih berintegritas, tidak mudah terpengaruh atau “ikut arus”, tidak gampang goyah oleh berbagai godaan dan tekanan untuk melakukan korupsi.

Pada NE 1145b2-7 dijumpai suatu metode berpikir etis. Di situ berpikir etis mulai dari *phainomena*, yaitu pandangan-pandangan yang diajukan dan diterima kebanyakan orang dan para filsuf, kemudian merumuskan *aporiai* atau persoalan-persoalan yang membingungkan yang muncul,

lalu berusaha memecahkan persoalan-persoalan itu diterangi oleh *phainomena*. Metode ini dapat diterapkan dalam rangka pendidikan antikorupsi. Misalnya, kepada subjek didik disampaikan pandangan yang diterima banyak orang, misalnya dari butir-butir Pancasila, yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Sesudah itu disampaikan kepadanya satu kasus dari media massa yang menimbulkan persoalan sehubungan dengan pandangan itu. Kemudian subjek didik diajak untuk menalar pilihan-pilihan tindakan yang tersedia dan menentukan pilihan. Ini merupakan kegiatan penalaran moral yang dapat mengembangkan kedewasaan moral karena melatih penalaran moral subjek didik. Di sini subjek didik yang harus aktif berproses berpikir dan menemukan sendiri jawaban-jawaban serta mempertanggungjawabkan. Guru lebih banyak sebagai fasilitator atau bidan. Metode ini lebih baik daripada menjejali subjek didik dengan pengetahuan akan nilai-nilai, seperti butir-butir Pancasila, dan memintanya menghapalkannya.

Bimbingan menemukan kebaikan tertinggi dalam hidup atau tujuan akhir ini dapat dilakukan dengan membaca dan mencari inspirasi dari cerita-cerita orang-orang yang berjasa bagi kemanusiaan. Menurut S. H. Alatas korupsi dapat dilawan dengan mempromosikan cerita-cerita mengenai

hidup para tokoh yang saleh yang memancarkan nilai-nilai kejujuran. Di samping itu, pemerintah dapat menyebarluaskan kisah-kisah sukses di masa lalu dalam khazanah budaya tradisional dalam melawan korupsi.¹⁶⁷ Gunar Myrdal menunjukkan bahwa cerita-cerita sukses tentang perlawanan terhadap korupsi yang membangkitkan kepercayaan dan emosi sehubungan dengan korupsi patut diperkuat dalam kampanye antikorupsi.¹⁶⁸ Sebagai contoh untuk ini adalah cerita-cerita dalam Mahabharata dan Ramayana yang dipandang memuat nilai-nilai dan norma-norma dalam tokoh-tokoh heroik di dalamnya.¹⁶⁹

Kelima, menurut Aristoteles di satu sisi pada manusia ada kecenderungan kodrati hewani untuk melakukan sesuatu yang muncul secara alamiah, dan di sisi lain ada dorongan dari kodrat untuk hidup dengan akal budi dalam “sense of time”. Dorongan-dorongan kodrati dasariah ini perlu diformasi dan dilatih sehingga terarah dalam membentuk pribadi manusia yang baik. Di sinilah bagi Aristoteles

¹⁶⁷ S. H. ALATAS, *Sosiologi Korupsi, Op. cit.*, hlm. 71.

¹⁶⁸ GUNAR MYRDAL, *Asian Drama, An Abridgement*, Penguin, NY, 1972, hlm. 167.

¹⁶⁹ MUH. SAID, *Etik Masyarakat Indonesia*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1980, hlm. 7.

pentingnya disiplin. Tanpa disiplin pendidikan akan tidak berhasil dalam menumbuhkan kapasitas pribadi manusia untuk mengontrol dorongan-dorongan alamiah dalam dirinya dan mengaturnya mengikuti tatanan akal budi. Tanpa kapasitas mengontrol dorongan-dorongan alamiahnya seorang pejabat yang hidup di tengah banyak orang yang berkelimpahan materi dari korupsi akan mudah tergoda untuk mengimbangi kepemilikan rekan-rekannya dengan jalan pintas melakukan korupsi.

Apakah pendidikan sudah sangat menekankan keutamaan moral yang perlu untuk melawan dorongan mencari kenikmatan atau kesenangan demi menikmatinya, misalnya, penguasaan diri dan tahu batas? Penguasaan diri ini salah satu keutamaan moral yang menentukan dalam menolak korupsi. Adalah baik sejak dini anak-anak dilatih untuk menguasai diri dalam memenuhi keinginan-keinginannya akan kesenangan atau kenikmatan. Termasuk di sini adalah bimbingan untuk menimbang dan memilih kenikmatan mengingat tidak semua merupakan kesenangan yang sejati. Kenikmatan yang sejati adalah yang menyertai tindakan-tindakan yang khas manusiawi. Subjek didik tetap perlu dididik dengan disiplin untuk bertindak sesuai apa yang secara rasional merupakan tujuan terakhir, sehingga meskipun suatu tindakan dipilih demi tujuan itu

menyakitkan, namun tindakan yang sesuai dengan tujuan itulah yang dipilih daripada yang menyenangkan. Menurut Aristoteles ada tiga sikap yang harus dihindari: kejahatan, ketidakmampuan untuk menguasai diri, dan kekasaran (VII, 1). Bisa jadi pendidikan menyadari perlunya mendidik generasi muda agar tidak berbuat jahat dan berbuat kasar, tetapi kurang menekankan keutamaan penguasaan diri, padahal ini penting sekali untuk mengendalikan dorongan keinginan-keinginan alamiah, yang dapat menyebabkan orang melakukan korupsi.

Keenam, bagi Aristoteles para negarawan atau politikuslah yang diharapkan bisa mendidik warga negara menjadi baik. Kalau disadari korupsi itu merusak dan merugikan negara, maka para negarawan seharusnya mendidik para warga negara untuk menjadi pribadi-pribadi yang baik, dan dengan keteguhan keutamaan itu, mereka dapat menolak korupsi. Akan tetapi, bila semakin banyak warga negara yang melakukan korupsi hingga ke lapisan-lapisan terbawah dan di segala sudut kehidupan bersama, tidakkah ini menunjukkan bahwa para politikus abai akan tugas mereka? Tidakkah justru para politikus yang terus-menerus semakin banyak melakukan korupsi justru secara tidak langsung menjadi contoh dan pembenar bagi banyak rakyat untuk melakukan korupsi? Tidakkah justru karena

para politikusnya sendiri banyak melakukan korupsi, mereka tidak kredibel lagi untuk mendidik warga negara? Bagaimana mungkin orang yang tidak baik dapat mengharapkan dan mendidik orang lain menjadi pribadi yang baik? Itulah sebabnya, barangkali pendidikan di Indonesia, khususnya di jalur formal, setelah sekian puluh tahun merdeka tidak malah membuat lebih banyak warga negara menjadi pribadi-pribadi yang baik sebagaimana tampak pada makin masif dan intensnya korupsi di Indonesia hingga saat ini. Tidakkah para politikus yang berkiprah perlu mendapatkan pendidikan etis menjadi pribadi-pribadi yang baik terlebih dahulu? Akan tetapi, siapa yang melakukannya? Pemerintah yang berkuasa? Partai? Apakah pemerintah yang korup dapat mendidikan sesuatu yang ia tidak mampu? Apakah masih ada partai politik yang menekankan pengkaderan dengan pendidikan etis semacam itu? Memperhatikan apa yang diharapkan Aristoteles dalam *NE* tentang tanggung jawab para negarawan untuk mendidik para warga negara menjadi pribadi yang baik secara etis, dan karenanya para negarawan itu terlebih dahulu yang perlu dididik menjadi pribadi yang baik secara etis, tampaknya sukar memberantas korupsi bila para politikus, negarawan, termasuk aparaturnya dari atas hingga bawah tidak mendapatkan pendidikan etis yang memadai. Sebaiknya partai-partai memperbaiki sistem

pengkaderannya dan menekankan di sana pendidikan etis untuk anggota-anggotanya.

Akhirnya, pendidikan akan mendapatkan panduannya yang lebih jelas dalam hukum yang ditegakkan dengan tegas. Bila tidak, akan sukar menanamkan kesadaran untuk tidak memilih jalan pintas dengan sogokan atau suap, tetapi dalam realitas tidak ada penegakan yang tegas atas hukum yang melarang hal itu. Demikian pula, dengan penegakan hukum yang transaksional-negosional di mana yang terbukti bersalah melakukan korupsi dalam jumlah besar dan seharusnya dihukum berat, malahan dibebaskan atau menerima hukuman kecil dengan fasilitas-fasilitas sangat bagus di tempat hukuman. Ini dapat sedikit banyak mengacaukan apa yang mau dituju dengan pendidikan antikorupsi karena bagaimanapun pendidikan dapat lebih efektif kalau didukung oleh hukum yang dengan pasti dan tegas menyatakan mana yang benar dan mana yang salah.

DAFTAR ACUAN

ALATAS, SYED HUSSEIN, *Korupsi. Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.

-----, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, Jakarta, 1982.

ARISTOTLE, *The Nicomachean Ethics*, (terj. Harris Rackham), Wordsworth, Hertfordshire, 1996.

COPLESTON, FREDERICK, *A History of Philosophy, vol I*, Image Book, NY, 1993

FURLEY, DAVID (ed.), *Routledge History of Philosophy, vol, II*, Routledge, London & NY, 2005.

MACINTYRE, ALASDAIR, *After Virtue*, University of Notre Dame Press, 1984.

MYRDAL, GUNAR, *Asian Drama, An Abridgement*, Penguin, NY, 1972.

SAID, MUH., *Etik Masyarakat Indonesia*, Pradnyaparamita, Jakarta, 1980,

SPARSHOTT, FRANCIS, *Taking Life Seriously. A Study of the Argument of the Nicomachean Ethics*, University of Toronto Press, Toronto, 1996

BAGIAN 3

MENGGAGAS PENDIDIKAN BAGI CALON PEMIMPIN NASIONAL

BAB 1

MENGGAGAS PENDIDIKAN CALON PEMIMPIN INDONESIA¹⁷⁰

Oleh: Agustinus Pratisto Trinarso

PENDAHULUAN

Saat ini, mulai marak dibicarakan bagaimana figur pemimpin masa depan bangsa Indonesia, apalagi bangsa Indonesia sebentar lagi akan mengadakan Pemilu 2014 yang akan menentukan siapa yang pantas memimpin bangsa Indonesia pada periode berikutnya. Ada banyak pendapat yang ingin memberikan masukan tentang sosok dan figur yang seperti apa yang pantas memimpin, mulai dari kriteria sampai nama tokoh yang nyata. Di media massa sendiri, sering mulai ditayangkan iklan-iklan kampanye calon pemimpin bangsa dari berbagai partai. Peristiwa pemilu 2014 sungguh menjadi momen yang amat dinantikan dan masyarakat berharap akan memiliki pemimpin yang

¹⁷⁰ Artikel ini pernah menjadi materi Program *Extension Course* Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala Surabaya yang disampaikan pada tanggal 20 November 2013, di Balai Paroki Santa Maria tak Bercela, Lantai 3, Jln. Ngagel Madya 1, Surabaya.

kompeten bagi bangsa Indonesia untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

Tulisan ini dapat dinilai sebagai bentuk latah untuk ikut-ikutan memberikan wawasan bagi situasi tersebut diatas, namun tulisan ini dapat juga dinilai responsif atas situasi politik yang ada saat ini. Sebenarnya, tulisan ini bukan hanya ingin memberikan masukan bagaimana sosok pemimpin bangsa, namun juga ingin memberikan masukan bagi dunia pendidikan, bagaimana mendidik calon pemimpin bangsa dengan memerhatikan situasi yang sedang berkembang dewasa ini.

KRISIS KEPEMIMPINAN

Ada fenomena menarik menjelang pemilu 2014. Beberapa partai besar belum menentukan calon pasangan capres-cawapres yang akan diusung. Partai-partai ini seolah masih bimbang menentukan calon yang diharapkan bisa meningkatkan elektabilitas partai di mata masyarakat. Fenomena ini memunculkan sebuah spekulasi baru, bahwa Indonesia tengah mengalami krisis kepemimpinan. Indonesia dinilai sedang mengalami krisis sosok pemimpin yang berkualitas sehingga beberapa partai tak kunjung menentukan pilihan calon yang akan didukung. Apakah

mereka sedang mengadakan politik hati-hati ataukah memang sedang terjadi krisis? Benarkah di Indonesia sedang terjadi krisis kepemimpinan? Beberapa kasus korupsi yang dipertontonkan para pemimpin Indonesia di beberapa wilayah, baik di pusat maupun di daerah, dapat menjadi indikasi adanya krisis tersebut, yakni krisis moral dalam diri para pemimpin. Budaya korupsi sudah mewabah layaknya virus yang merusak dan menggerogoti sendi-sendi bangsa dan negara, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Fenomena krisis pemimpin ini nyata-nyata juga telah membentuk pemahaman di masyarakat bahwa tidak ada lagi birokrasi pemerintahan yang bersih dari korupsi. Hal ini menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat pada para pemimpinnya.

Seiring dengan reformasi tahun 1998, di Indonesia, diberlakukan otonomi daerah (otoda) secara bertahap. Dengan otoda, diharapkan pembangunan di daerah dapat lebih cepat dan lebih tepat sasaran. Dengan berjalannya waktu, otoda disalahgunakan oleh para wakil rakyat daerah dan pemimpinnya dengan mengeluarkan perda-perda yang berbau sektarian dan demi kelompok tertentu. Hal ini jelas menjadi keprihatinan dalam hidup berdemokrasi, sehingga masyarakat memandang bahwa para pemimpin negara telah tidak berlaku adil dan bijaksana dalam mensikapi adanya

perbedaan dan pluralitas bangsa. Hal ini juga telah menimbulkan krisis kepemimpinan dalam mensikapi kebhinekaan bangsa.

Dalam bidang kerukunan agama, beberapa kasus yang belum tuntas dan berlarut-larut seperti kasus Sampang dan Gereja Yasmin Bogor, menunjukkan pemerintah dan para pemimpinnya kurang kompeten dalam menyelesaikan konflik antar agama yang ada di Indonesia. Para pemimpin kurang peka akan masalah konflik antar agama. Hal ini dapat dinilai bahwa ada krisis kepemimpinan dibidang dialog antar agama. Kita tidak menemukan figur pemimpin yang mampu menjadi jembatan dan pendamai yang kuat dan bijak dalam dialog antar agama.

Dalam bidang kemanusiaan, penderitaan rakyat karena menjadi korban tindakan pengusaha kapitalis seperti kasus lapindo, PHK, pembabatan hutan, dll. Pemerintah dan pemimpin bangsa tidak mampu menyelesaikan secara tuntas dan tegas. Hal ini menunjukkan adanya krisis kepemimpinan di bidang orientasi kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Beberapa kasus yang menunjukkan kolusi antara pejabat dan pengusaha, misalnya sejumlah proyek pemerintah tanpa tender, menunjukkan krisis kepemimpinan dalam ketaatan dan hormat terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Tidak

dihargainya prosedur yang benar dan aturan main menunjukkan sikap pemimpin yang egois, arogan dan main kuasa demi kepentingan sesaat saja.

Dapat mulai disimpulkan bahwa krisis kepemimpinan yang sedang terjadi adalah kurangnya kompetensi pemimpin dalam moral dan keadilan, kurangnya kepekaan dan kepedulian kepada yang miskin, lemah dan tertindas, kurangnya wawasan yang mendasar akan kehinekaan bangsa, ketidakmampuan menjembatani konflik dan perbedaan, kurang taat pada aturan main, hukum dan perundang-undangan, lemahnya upaya memegang prinsip kebenaran dan lemahnya mental sehingga mudah terhasut dalam kolusi. Hal-hal tersebut menunjukkan lemahnya integritas kepribadian pemimpin dan kurangnya kesadaran pemimpin sebagai pelayan kepentingan umum.

Fakta-fakta tersebut memaksa kita bertanya mengapa hal tersebut dapat terjadi. Kita dapat pula bertanya: apakah sistem pendidikan Indonesia belum mampu membentuk pemimpin yang berkualitas.

FIGUR PEMIMPIN BANGSA YANG DIRINDUKAN

Sejak awal tahun ini, banyak stiker dan baliho yang cukup kreatif dengan menampilkan kembali wajah mantan presiden Suharto dengan tulisan *“piye le kabarmu saiki, luwib penak jamanku ndhisik tho?”* Nampaknya, stiker atau baliho itu bertujuan membandingkan bagaimana situasi saat ini dengan situasi saat dipimpin oleh rezim Orde Baru. Iklan politik tersebut seakan menuduh bahwa telah terjadi kemerosotan dalam sejarah bangsa Indonesia. Namun apabila dikritisi, iklan semacam itu sebenarnya menunjukkan adanya kerinduan masyarakat akan figur pemimpin yang dapat menjamin kehidupan bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Di tengah situasi krisis kepemimpinan bangsa, ada fenomena politik yang menarik, yakni terpilihnya Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meskipun hanya diusung oleh partai PDIP dan Gerindra yang terhitung kecil kekuatannya dibandingkan partai besar lainnya yang berkoalisi, Jokowi tetap terpilih oleh rakyat Jakarta. Fenomena Jokowi seakan menjawab kerinduan akan figur pemimpin yang merakyat, tegas, mau blusukan dan hadir

disaat masyarakat membutuhkan, yakni disaat kritis dan darurat.¹⁷¹

Menurut Anies Baswedan, Rektor Universitas Paramadina, dalam diskusi "Revitalisasi Kepemimpinan Nasional" di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta, "Kita punya tokoh politik yang banyak, namun tidak semua diinginkan rakyat. Kita butuh pemimpin yang memiliki ketegasan seperti yang diinginkan rakyat," Menurutnya, pemimpin pemimpin nasional saat ini sering absen dalam peristiwa-peristiwa yang sebenarnya penting untuk bersama rakyatnya. Harusnya, pemimpin hadir untuk mewakili janji kemerdekaan bangsa. Negara absen terhadap perlindungan rakyatnya, bahkan cenderung mengadakan pembiaran pada saat masyarakat mengalami masalah genting dan pemimpin negara nampak punya keengganan mengambil keputusan secara cepat dan tepat.¹⁷² Presiden seharusnya hadir secara nyata dan dirasakan kepemimpinannya. Tidaklah cukup, berkomunikasi lewat televisi dan menyatakan prihatin karena hal akan menjadi berbeda kesannya. Ia

¹⁷¹ Fenomena Jokowi, Buku Harian Jokowi, <http://jokowiringstar.wordpress.com/2013/09/24/benarkah-fenomena-jokowi-karena-adanya-krisis-kepemimpinan/>

¹⁷² Anis Baswedan, Krisis Kepemimpinan bangsa, Dari: <http://www.investor.co.id/home/anies-baswedan-indonesia-krisis-kepemimpinan-nasional/18137>

menambahkan, ketidaktegasan pemimpin akan berdampak terhadap bawahannya sehingga membuat bawahannya pun bimbang.

Senada dengan Baswedan, Dian Basuki berpendapat bahwa salah satu cara melihat kualitas kepemimpinan saat ini adalah melihat respons pemimpin terhadap krisis. Dalam situasi kritis, seorang pemimpin dipaksa oleh keadaan untuk memberikan respons dengan kualitas yang berbeda dari situasi normal. Dapat saja seorang pemimpin memberikan respons terbaik, tapi bisa pula ia merespons dengan sangat buruk.¹⁷³ Dalam situasi kritis, jiwa kepemimpinannya “hadir” dan kehadirannya dirasakan oleh anggota tim dan masyarakat. Sebagai pemimpin, ia harus memperlihatkan bahwa ia mampu mengendalikan situasi. Tatkala tak seorang pun sanggup mengendalikan, pemimpinlah yang harus melakukannya. Pemimpin dapat memberi gambaran mengenai besarnya tantangan yang dihadapi, tapi pada saat yang sama, ia menawarkan respons yang memberikan harapan.

Pada saat banyak orang kehilangan arah, pemimpin memberikan perspektif mengenai situasi. Ia juga mampu

¹⁷³ Dian Basuki, Memimpin di saat krisis, dari: <http://blog.tempointeraktif.com/ekonomi-bisnis/memimpin-di-saat-krisis/#more-1583>

menunjukkan jalan yang harus dilalui untuk keluar dari situasi. Pemimpin yang kreatif akan mencari jalan yang tak biasa untuk keluar dari situasi kritis. Baginya, cara-cara yang biasa tidak memadai sebagai bentuk respons. Dan ia menunjukkan jalan tersebut agar anggota tim atau masyarakat mengikutinya. Namun semua itu bergantung kepada penilaian pemimpin terhadap situasi yang tengah dihadapi: apakah menurut dia situasi sudah tergolong kritis atau belum. Orang lain mungkin menganggap situasi sudah kritis, tapi si pemimpin beranggapan bahwa situasinya normal belaka. Dalam situasi demikian kepekaan indera si pemimpin diuji. Dari caranya menilai situasi dan caranya mengambil keputusan maupun bertindak, kita dapat menilai kualitas kepemimpinan seseorang.

Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla berpendapat, krisis kepemimpinan saat ini sebenarnya adalah krisis kepercayaan. Krisis terjadi karena pemimpin sudah tidak dipercaya lagi oleh rakyatnya. Menurutnya, pemimpin dapat dipercaya apabila satu dalam kata dan perbuatan, dan pemimpin seharusnya dapat menjadi teladan yang baik dalam konsistensi kata dan tindakan.¹⁷⁴ Tidak jauh berbeda

¹⁷⁴

Jusuf

Kalla,

dari:

<http://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/13/02/26/mitqrb-jk-krisis-kepemimpinan-karena-krisis-kepercayaan>.

dengan pemikiran Yusuf Kalla, pakar bidang ilmu sosial dan politik, Dewi Fortuna Anwar menyatakan, “Kepercayaan rakyat untuk pemimpin tidak dapat dipaksakan. Kepercayaan hanya dapat diperoleh, diraih, artinya dengan menunjukkan kualitas kemampuan”. Ia menggarisbawahi bahwa kepercayaan yang dikhianati akan membuat rakyat berpaling. Menurutnya, "Pada era demokrasi, rakyat bisa mengamati, serta mencatat *track record*. Saat kepercayaan dinodai, itulah saatnya pergantian kekuasaan,"¹⁷⁵

Apabila kita menggunakan logika terbalik berdasarkan paparan masalah krisis kepemimpinan di atas, dapat dikatakan bahwa figur pemimpin yang dirindukan bangsa Indonesia saat ini adalah: **pertama**, figur pemimpin yang memiliki integritas moral: kuat dalam prinsip kebenaran, konsisten dalam kata dan perbuatan, pribadi tidak mudah tergiur dengan godaan materi. **Kedua**, pemimpin yang punya kepekaan, empati dan peduli pada penderitaan rakyatnya. **Ketiga**, memiliki kemampuan cepat dan tanggap dalam situasi kritis dan mau hadir di lapangan mendampingi rakyatnya. **Keempat**, pemimpin

¹⁷⁵ Pemikiran Dewi Fortuna Anwar, ditulis oleh *Gloria Samantha* dari laman

<http://nationalgeographic.co.id/berita/2013/02/indonesia-hadapi-krisis-kepemimpinan-akibat-krisis-kepercayaan>

yang menunjukkan sosok pembela dan pelindung kelompok minoritas dan terpinggirkan, **Kelima**, pemimpin yang menjunjung tinggi hukum dan aturan main yang ada. **Keenam**, pemimpin yang visioner dan mampu memiliki sikap terhadap kuatnya arus kapitalisme dan globalisasi.¹⁷⁶

Lantas bagaimana kita dapat memiliki figur calon pemimpin semacam itu? Hal ini jelas mensyaratkan bagaimana pendidikan politik yang dibutuhkan agar mencetak calon pemimpin yang sungguh tepat bagi situasi bangsa Indonesia saat ini.

PENDIDIKAN POLITIK YANG KONTEKSTUAL

1. Pentingnya Pendidikan bagi Calon Pemimpin

Plato, seorang filsuf Yunani Kuno, berpendapat bahwa agar pemerintahan polis dapat terus berjalan,

¹⁷⁶ Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, saat ini Indonesia sedang menghadapi krisis kepemimpinan karena kepemimpinan yang ada sangat transaksional. Menurutnya, kehadiran Joko Widodo merupakan jawaban dalam mengatasi permasalahan tersebut. Menurut Hasto, Jokowi merupakan tipe pemimpin yang satu kata dengan perbuatan, jujur, amanah dan mampu membebaskan orang yang terpinggirkan Dari laman

<http://megapolitan.kompas.com/read/2013/10/18/0755216/Jokowi.Jawaban.Krisis.Kepemimpinan.di.Indonesia>

diperlukan pendidikan khusus bagi para calon pemimpinnya sejak usia dini. Dari pendidikan umum, dapat diketahui berbagai karakter siswanya, dan dari kualitas para siswa, dapat dipilih beberapa anak yang berbakat menjadi pemimpin, yang kemudian dididik secara khusus dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang baik.¹⁷⁷ Bagi Plato, tidak semua orang dapat menjadi pemimpin yang baik. Menurutnya, setiap orang memiliki tugas dan panggilan hidup yang tidak sama, termasuk ada orang-orang yang dapat menjadi pemimpin.

Demikian pula, murid Plato, yakni Aristoteles, dalam bukunya *The Politic*, menyatakan bahwa setiap pemerintahan yang tidak mampu memberikan pendidikan bagi generasi berikutnya, dengan berjalannya waktu, pemerintahan itu akan mengalami masa kehancuran.¹⁷⁸ Begitu pentingnya pendidikan kepemimpinan sehingga membahas hal tersebut, sama pentingnya dengan membicarakan keberlangsungan organisasi, imperium atau bentuk kumpulan manusia apa pun. Sebuah negara hanya akan besar apabila memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk berpartisipasi dalam jalannya roda kenegaraan. Tentu saja, sumber daya

¹⁷⁷ Plato, *The Republic, and other works*, translated by B. Jowett, Anchor books, New York, 1989, 233.

¹⁷⁸ Aristoteles, *The Politics*, Penguin Books, England 1992, 452 dst.

manusia semakin berkualitas apabila diberikan pendidikan yang baik pula. Pendidikan merupakan satu-satunya instrumen untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, terlepas apa pun bentuk dan metodenya. Adapun pendidikan khusus untuk mempersiapkan para pemimpin disebut sebagai kaderisasi.

Dalam konteks partai, kita juga bisa melihat pola pendidikan atau kaderisasi yang diterapkan untuk membangun kader-kader yang diharapkan menjalankan visi-misi partai. Lemahnya kaderisasi di dalam partai akan berdampak langsung terhadap melemahnya partai. Tanpa kader yang kuat, tidak ada organisasi kokoh bisa terbentuk, begitu juga sebaliknya tanpa organisasi yang kokoh, sulitlah melakukan kaderisasi yang baik.

2. Pengertian Kaderisasi

Kaderisasi adalah bentuk pendidikan bagi calon pemimpin yang berisi upaya-upaya yang mendukung bagi terbentuknya integritas kepribadian dan kemampuan menggerakkan banyak orang secara intensif. Dalam pembahasan ini, kaderisasi disempitkan bagi calon pemimpin bangsa.

Kaderisasi kepemimpinan adalah proses mempersiapkan atau mencetak seseorang untuk menjadi pemimpin bangsa di masa depan. Dari proses kaderisasi dilahirkan seorang kader.¹⁷⁹ Kader pemimpin bangsa adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai pengetahuan, keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dapat dikatakan seorang calon pemimpin memiliki kematangan diri, kemampuan dan wawasan yang levelnya di atas rata-rata orang umum.¹⁸⁰ Bung Hatta pernah menyatakan bahwa kaderisasi sama artinya dengan menanam bibit. Untuk menghasilkan pemimpin bangsa di masa depan, pemimpin pada masanya harus menanam.

Beberapa faktor yang membuat kaderisasi kepemimpinan terus diperlukan, antara lain :

¹⁷⁹ Ada perdebatan tentang pemimpin itu dilahirkan atau diciptakan. Dalam kenyataan, ada orang-orang tertentu yang memiliki bakat kepemimpinan, namun ada pendapat bahwa kepemimpinan itu dapat dipelajari dan semua orang dapat menjadi pemimpin, lih. Frances Hesselbein, ed., *The Leader of the Future, Pemimpin Masa depan*, terj. Bob Wdiyahartono, Elex Media Komputindo, Jakarta 1997, 108.

¹⁸⁰ Salah satu contoh kaderisasi oleh lembaga keagamaan adalah YI-Lead. Visi Islamic Leadership Academy YI-Lead adalah menjadi perintis pendidikan kepemimpinan Islam yang berstruktur, berjenjang, dan ber kurikulum. Output yang ingin dicapai adalah mencetak para pemuda dengan karakter kuat untuk memimpin dan memperbaiki moral bangsa. Dari laman <http://www.islampos.com/krisis-kepimpinan-yi-lead-siapkan-kurikulum-kepemimpinan-berjenjang-81782/>

- a. Dalam peraturan Negara, ada ketentuan periode atau masa kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
- b. Adanya kemungkinan penolakan dari rakyat yang menghendaki kepemimpinan diganti, baik secara konstitusional ataupun tidak.
- c. Adanya proses alamiah yakni usia yang menjadi tua dan kehilangan kemampuan memimpin.
- d. Kematian.

3. Bentuk Kaderisasi

Kaderisasi memiliki dua bentuk yakni :

a. Kaderisasi informal

Kaderisasi informal merupakan sebuah proses atau usaha-usaha mempersiapkan seorang calon pemimpin atau kader yang dilaksanakan tidak secara berencana, teratur, tertib, sistematis, terarah, dan disengaja, serta tidak menggunakan kurikulum tertentu. Kaderisasi informal merupakan sebuah proses pendidikan sehari-hari yang dimulai dari sejak dini, baik itu proses belajar di sekolah, di keluarga dan lingkungan masyarakat setempat. Proses ini menekankan pembentukan kepribadian, penanaman akhlak, dan habitus (sikap yang baik dalam jangka waktu yang lama).

Kepribadian positif perlu dipupuk sejak dini dan seumur hidup. Dari proses kaderisasi informal ini, dapat diketahui kelebihan seorang calon pemimpin yang memiliki kepribadian positif. Hal ini bisa dilihat dari prestasinya, moralitasnya, loyalitas dan dedikasinya dalam suatu kelompok atau organisasi yang diikutinya.

b. Kaderisasi Formal & Kontekstual

Kaderisasi formal adalah proses kaderisasi atau upaya mempersiapkan seseorang menjadi calon pemimpin bangsa yang dilaksanakan secara disengaja, terarah, teratur dan tertib, sistematis serta mengikuti kurikulum tertentu dalam jangka waktu tertentu yang berisi bahan-bahan teoretis dan praktik tentang kepemimpinan dan berbagai aspek pendukungnya. Pendidikan kader, mengutip dari pemikiran Sastrapratedja, haruslah *values based*, berdasar pada pendidikan nilai yang jelas tidak netral, *knowledge based*, yakni pengetahuan yang mencukupi dan pada *vision based*, berdasarkan visi mengenai masyarakat kita pada masa yang akan datang.¹⁸¹ Desain kurikulum dalam kaderisasi juga

¹⁸¹ Sastrapratedja, M. SJ, *Restorasi Pendidikan Politik berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab*, dalam Jurnal Iman Ilmu Budaya, Pusat Studi Iman Ilmu dan Budaya Yayasan Bhumiksara, Vol. 3, No. 3, Sept-Des 2004, Jakarta, 114.

harus sesuai dengan konteks, bersifat personal atau massal, bersifat tertutup atau terbuka dan bentuk-bentuk lainnya.

Gereja Katolik melihat arti penting kaderisasi. *Gaudium et Spes* artikel 75 menyatakan,

“Hendaknya secara intensif diusahakan pembinaan kewarganegaraan dan politik, yang sekarang ini perlu sekali bagi masyarakat dan terutama bagi generasi muda, supaya semua warga negara mampu memainkan peranannya dalam hidup bernegara. Mereka yang cakap atau berbakat hendaknya menyiapkan diri untuk mencapai keahlian politik, yang sukar dan sekaligus amat lentur dan berusaha mengamalkannya tanpa memperhitungkan kepentingan pribadi atau keuntungan materi. Hendaknya mereka dengan ketulusan kepribadiannya dan kebijaksanaannya menentang ketidakadilan dan penindasan, kekuasaan sewenang-wenang dan sikap tidak bertenggangrasa satu orang atau satu partai politik. Hendaknya mereka secara jujur dan wajar, malahan dengan cinta kasih dan ketegasan politik, membaktikan diri bagi kesejahteraan semua orang.”¹⁸²

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa para bapa Konsili mengamanatkan perlu adanya pendidikan bagi calon pemimpin dan yang akan terjun ke dunia politik. Pendidikan kader haruslah menekankan pentingnya pendidikan moral, ketrampilan berpolitik, dan ketegasan politik.

¹⁸² Dokumen Konsili Vatikan II, *Gaudium et Spes*, artikel 75.

Faktor pertama yang menentukan dalam kaderisasi adalah seleksi calon kader. Seleksi ini mengandaikan banyak informasi terkait dengan kualitas calon kader, yakni potensi dasarnya. Potensi dasar tersebut dapat diketahui melalui perjalanan hidupnya. Sejauh mana kecenderungannya terhadap problema-problema sosial lingkungannya. Hal-hal yang dilihat adalah: Fisik (kesehatan), Spiritual (keyakinan, agama, nilai), Mental (moral, daya tahan, *softskills*, kepedulian), Intelektual (kecerdasan IQ, Social Intellegensi, wawasan keilmuan), Manajerial (aktif dalam keorganisasian, bakat kepemimpinan) serta profesi (memiliki skill dan pengetahuan di bidang keilmuan).

Faktor kedua lebih menyangkut bidang dan materi kaderisasi terkait kebutuhan kepemimpinan masa depan yang menjawab tantangan zaman. Kepemimpinan adalah kombinasi antara kompetensi dan karakter.¹⁸³

- a. Pendidikan Moral & Etika Kepemimpinan: mendidik kader untuk memiliki moral yang baik dan konsistensi atas nilai-nilai moral dan keutamaan jujur, terbuka, pejuang kebenaran dan keadilan (pendidikan iman, etika dan kepribadian). Bidang ini dapat berupa pengajaran filsafat nilai dan moral individu dan masyarakat,

¹⁸³ Lih. Frances Hesselbein, ed., *The Leader of the Future*, 170.

pembinaan iman dan pembinaan kepribadian, refleksi dan mawas diri, studi kasus korupsi dan masalah moral bangsa, dll.

- b. Pendidikan Kepedulian Sosial: mendidik kader untuk memiliki kepekaan dan kepedulian akan penderitaan rakyat (pendidikan Afektif: Iman dan Hati), bentuknya dapat berupa: pendidikan *Social Intellegent* (SQ), Live In di tengah masyarakat kecil, pelatihan manajemen Resolusi Konflik, pelatihan Ansos (analisa sosial), diskusi sosial dan latihan agitasi (pembelaan) kasus sosial.
- c. Pendidikan Keorganisasian: mendidik kader untuk memiliki skill berorganisasi dan skill kepemimpinan dalam organisasi, komunikasi, memimpin rapat, mengadakan koordinasi, manajemen pemerintahan, dll.
- d. Pendidikan Intelektualitas dan wawasan hidup berbangsa dan bernegara: mendidik kader untuk memiliki wawasan dan pengetahuan tentang dasar-dasar negara & wawasan kebangsaan (ideologi negara), dinamika perpolitikan (ilmu-ilmu politik), hukum dan undang-undang perpolitikan, belajar issue-issue strategis dalam geopolitik dewasa ini: HAM, Pluralisme, keadilan, NGO/LSM, Globalisasi, Ekonomi bebas

(ISO), paham-paham ideologi, perburuhan, Hubungan Internasional, dll.

Faktor ketiga, menyangkut peluang dan kesempatan untuk masuk dalam dunia perpolitikan dan belajar kepemimpinan melalui proses kaderisasi yang nyata dengan menduduki jabatan publik agar terasah kemampuan skill kepemimpinan kader. Faktor ini tidak begitu mudah karena membutuhkan bantuan pendampingan dari para politisi senior dan sistem seleksi yang fairness dan terbuka dalam tubuh organisasi pemerintahan.¹⁸⁴ Menjadi tidak mudah karena kriteria dan ukuran yang dipakai untuk masuk dalam jabatan publik bukanlah jalur kompetensi kader, melainkan jalur politik. Agar pantas menduduki jabatan public, yang dituntut bukanlah kualitas dan kompetensi kader, melainkan rekomendasi dari politikus, yang nota bene karena kepentingan partai politik tertentu. Kita cukup berharap peluang berpolitik bagi generasi muda semakin terbuka di Indonesia dengan adanya angin segar yang dicontohkan oleh gubernur DKI Jakarta dengan menggunakan bentuk lelang untuk jabatan publik. Sistem seleksi yang digunakan untuk seleksi bersifat terbuka dan komprehensif menyangkut

¹⁸⁴ Pendampingan dari para senior politisi berupa sharing, dialog, diskusi, studi, pemantapan dan pendalaman spiritualitas. Lih. Piet Go O. Carm, *Peran serta orang katolik dalam politik*, Dioma, Malang 1990, 30.

banyak aspek terkait dengan kompetensi calon pejabat publik. Demikian pula dengan sistem konvensi yang diadakan oleh partai Demokrat untuk menjaring sebanyak mungkin calon pemimpin bangsa dengan berbagai kriteria dan tahapan seleksinya meski belum terlalu terbuka dalam kriterianya.

Faktor keempat dalam kaderisasi adalah bentuk *on going formation*, atau bentuk pendampingan dan kontrol bagi kader politik yang sedang berproses dalam lingkup dunia perpolitikan. Faktor ini menjadi sangat penting karena kualitas kader dapat mengalami perkembangan atau kemunduran akibat pengaruh faktor-faktor luar seperti tekanan dari lawan politik, godaan bentuk materi semacam suap, *money politics* dan sejenisnya dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan jangka pendek, keluarga atau teman sejawat yang tidak sevisi, dll. Untuk tetap menjaga kualitas dan konsistensi kader, perlu diadakan pembinaan berkala dan konsolidasi.

Faktor kelima dalam kaderisasi adalah pembiayaan. Untuk dapat menjadi seorang pejabat publik, sejak awal seorang kader yang dipersiapkan, perlu memperhitungkan biaya. Biaya tersebut dapat berasal dari pribadi, dari organisasi seperti partai politik atau organisasi massa lainnya, atau dari sumber-sumber lain yang halal dan transparan

seperti donatur atau sponsor. Untuk jabatan publik tertentu, dapat saja biaya tidak terlalu diperhitungkan, namun mengingat perkembangan zaman yang menempatkan mass media menjadi salah satu sarana kampanye, para calon jelas membutuhkan dana untuk promosi dan kampanye.¹⁸⁵ Biaya politik dalam kalkulasi politik sebenarnya tidaklah mutlak apabila kualitas kader yang ada cukup mumpuni dan memiliki legitimasi atau kepercayaan yang kuat dari rakyat. Fenomena Jokowi dapat menjadi cermin bahwa biaya kampanye yang tidak besar juga mampu mengantarkan seorang kader menduduki jabatan publik yang strategis karena mendapat legitimasi atau kepercayaan dan dukungan dari rakyat pemilihnya yang cukup banyak.

PREDIKSI FIGUR CALON PEMIMPIN NASIONAL MASA DEPAN

Apabila sejarah bangsa Indonesia dan sejarah kejatuhan para pemimpinnya dicermati, dapat dilihat beberapa hal yang menyangkut legitimisasi rakyat Indonesia terhadap para pemimpinnya. Pada era Sukarno, legitimasi berakhir karena konflik ideologi. Penyatuan berbagai ideologi

¹⁸⁵ Adrianus Meliala, *Caleg Katolik*, dalam majalah Mingguan Hidup no 46, 17 November 2013, 50.

seperti Nasakom (nasionalis, Agama dan Komunis) jelas melukai rakyat Indonesia yang memegang teguh sila Ketuhanan yang Maha Esa. Nasionalisme bangsa yang berbasis agama dan kepercayaan kepada Tuhan menjadi dasar yang kuat dan kokoh. Pada era Suharto, rezim Orde Baru cenderung sangat totaliter dan kurang demokratis. Legitimasi Suharto jatuh karena sektor ekonomi yang monopolitis dan nepotisme yang cukup kuat serta budaya korupsi yang kuat di tubuh pemerintahannya.¹⁸⁶ Seruan reformasi mencanangkan tiga isu strategis untuk diperjuangkan, yakni anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Pasca Reformasi, pemerintahan telah berganti beberapa pemimpin bangsa dan masing-masing pemimpin membawa warna baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada banyak perubahan yang positif, seperti pada era Gus Dur, kesadaran akan pluralisme diusung sebagai pembangun semangat demokrasi. Atau, pada Era Megawati, konflik antara pemerintah dan separatis GAM bisa diselesaikan lewat perundingan damai. Akan tetapi, praktik-praktik KKN masih saja semarak, bahkan menyeret semakin banyak pejabat publik yang korup.

¹⁸⁶ Lih. Frans Magnis Suseno, *Mencari Makna kebangsaan*, Kanisius, Yogyakarta 1998, 132.

Dengan memerhatikan beberapa kelemahan yang ada, sebagai hikmah belajar dari kekurangan pada masa lalu, kita dapat merangkum beberapa hal bagi calon pemimpin masa depan Indonesia, yakni bahwa pemimpin yang dirindukan adalah pemimpin yang memegang teguh ideologi Pancasila, memiliki semangat nasionalisme yang tinggi, bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), memiliki integritas moral, pendukung utama negara demokrasi dan mampu memperjuangkan keadilan bagi semua rakyat, pelindung dan penjaga kelompok minoritas, peduli dan tanggap penderitaan rakyat, berani memerangi kemiskinan, mampu bekerja cepat tanpa pamrih dan berani turun ke lapangan, punya semangat membangun kemandirian bangsa, punya ketegasan politik dan visioner,¹⁸⁷ serta kehidupannya dapat menjadi teladan bagi masyarakat.¹⁸⁸ Nampaknya ketegasan politik perlu mendapatkan tekanan selain integritas moral mengingat kebhinekaan dan pluralitas bangsa yang cukup banyak dan semua perlu dilindungi. Ketegasan politik adalah keberanian

¹⁸⁷ lih. Frances Hesselbein, ed., *The Leader of the Future*, 129.

¹⁸⁸ Frans Magnis menilai rasa kebangsaan berkurang karena adanya ketidakadilan yang menyeluruh yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia merasakan kesulitan mengidentikkan diri sebagai bangsa karena diperlakukan tidak adil dengan sesamanya. Lih. Frans Magnis Suseno, *Mencari Makna kebangsaan*, Kanisius, Yogyakarta 1998, 49.

untuk bersikap dan bertindak berbeda serta sikap kritis atas suatu keputusan, peraturan, kebijakan, pengaruh yang bertentangan dengan hati nurani, martabat manusia dan hak-hak asasi manusia.¹⁸⁹

Dalam kancah perpolitikan yang nyata dewasa ini, Indonesia memiliki banyak calon pemimpin bangsa. Banyak nama tokoh nasional yang bisa kita identikkan dengan sosok pemimpin yang berkualitas, seperti Mahfud MD, Jusuf Kalla, Dahlan Iskan, Anies Baswedan, dan masih banyak lagi. Masyarakat Indonesia perlu juga melihat lebih optimis akan calon pemimpin masa depan karena rakyat Indonesia dinilai telah memiliki modal sosial (*social capital*) yang cukup bernilai, yakni kesanggupan masyarakat melakukan kompetisi politik secara relatif jujur dan adil secara maraton sejak tahun 1999.¹⁹⁰ Pemimpin-pemimpin berkualitas telah menunjukkan kualitasnya di tingkat pemimpin daerah atau provinsi. Sebut saja sosok Jokowi, Tri Rismaharini. Kualitas para calon pemimpin tersebut telah teruji dalam pelaksanaan

¹⁸⁹ Martino Sardi, *Kerasulan Intelektual dalam bidang politik menurut interpretasi tata peraturan gereja*, dalam Jurnal Iman Ilmu Budaya, Pusat Studi Iman Ilmu dan Budaya Yayasan Bhumiksara, Vol. 3, No. 3, Sept-Des 2004, Jakarta, 114.

¹⁹⁰ Modal sosial dalam pemilu telah mendapatkan apresiasi baik dari dalam maupun luar negeri. Lih. Kristiadi, J, *Demokrasi dan Etika Bernegara*, Kanisius, Yogyakarta 2008, 14.

tugas mereka sebagai pejabat publik. Di sisi lain, partai-partai politik juga memiliki kader-kader yang disiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan

PEMILU 2014: KUALITAS VS PENCITRAAN

Pemilu 2014 nanti dapat diprediksi sebagai ajang pertarungan antara kualitas dan pencitraan para kader. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa kader memiliki sarana media massa untuk mempromosikan dirinya. Mereka sering muncul dalam tayangan televisi dan ditonton oleh banyak orang sehingga segera mudah menjadi populer dan dikenal oleh masyarakat. Pencitraan dapat menjadi pengelabuhan atau penipuan publik apabila dalam realitasnya, kualitas kader tidak seperti yang dikampanyekan. Demikian pula sebaliknya, kualitas calon kader yang baik dan teruji, akan dengan sendirinya tercium oleh media massa ataupun oleh rakyat sehingga simpati, dukungan, dan harapan mengalir dari segala penjuru untuknya. Nampak sekali bahwa ruang informasi dan ruang pembuktian kualitas dalam kinerja nyata menjadi dua corong yang efektif untuk mendulang suara rakyat saat ini. Dalam kondisi tersebut, perlu diperhatikan oleh para kader dan partai politik, etika berpolitik yang baik dalam berkampanye. Hendaknya rakyat

juga disadarkan dan diajak kritis atas siasat dan cara-cara yang illegal dan tidak bermoral dengan bentuk perusakan citra lawan politik, sabotase, *money politics*, provokasi massa dan anarki.

Di samping hal-hal tersebut di atas, kampanye politik jelas membutuhkan biaya tinggi. Banyak kasus kolusi antara penguasa dan pengusaha yang berusaha memenangkan kandidatnya agar nantinya memperoleh banyak keuntungan pribadi. Akan banyak pengusaha dengan sarat kepentingan yang berusaha ikut bermain dalam dunia politik dengan menggelontorkan banyak dana untuk membantu kampanye kader politik. Rakyat perlu kritis atas sumber-sumber dana kampanye dan relasi antara kader dan para pengusaha. Dengan kritis memerhatikan jaringan kader dan rekam jejak kualitas kader, rakyat dapat menentukan siapa yang pantas memimpin bangsa Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa pengusaha yang sekaligus politisi bahkan menduduki pucuk pimpinan partai. Dalam teori politik Aristoteles, demokrasi menjadi rusak karena sarat kepentingan kelompok penguasa yang disebut dengan oligarkhi.¹⁹¹ Pesta demokrasi hanya menjadi sebuah sarana saja bagi kelompok oligarkhi untuk legitimasi meraih kemenangan, dan setelah memperoleh kekuasaan itu dari

¹⁹¹ Lih. Aristoteles, *The Politics*, 252.

rakyat secara sah, rakyat akan ditinggalkan demi kepentingan kelompoknya saja. Indonesia dapat diperintah oleh rezim oligarkhi di masa depan apabila rakyat tidak cerdas secara politik dan salah dalam memilih pemimpinnya karena sudah dikuasainya media massa dan jaringan partai politik oleh segelintir orang saat ini.

CATATAN AKHIR

Mendidik calon pemimpin bangsa yang berkualitas adalah tugas dan panggilan semua warga negara demi berlangsungnya kehidupan bernegara yang baik dan berkembang menuju cita-cita bangsa. Hal ini adalah sebuah panggilan yang perlu diwujudkan karena jalur pendidikan formal saat ini tidak mewadahnya secara penuh, sehingga lembaga-lembaga masyarakat perlu mengadakannya sebagai investasi jangka panjang dan sumbangan yang luhur bagi keberlangsungan negara kita.¹⁹² Pelatihan kaderisasi hendaknya menjadi kebutuhan semua organisasi masyarakat dan perlu diadakan secara rutin dan berjenjang.

¹⁹² lih. Frances Hesselbein, ed., *The Leader of the Future*, 165.

Kurangnya pelatihan kaderisasi dalam masyarakat menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang kepemimpinan dan politik bagi kehidupannya padahal politik menciptakan dan mengkondisikan semua aspek kehidupan manusia. Politik berada pada inti perkembangan permasalahan dalam masyarakat dan cara kolektif penyelesaian permasalahan masyarakat.¹⁹³ Masyarakat cenderung *hic et nunc*, melihat yang saat ini dan sekarang saja, artinya masyarakat dalam berpolitik cenderung suka produk yang instan, siapa yang muncul dan menampakkan dirinya dengan baik atau menarik perhatian itulah yang akan dapat dipilih. Di balik itu sebenarnya menunjukkan pula mentalitas instan dan pragmatis menguat dan banyak dihidupi oleh masyarakat.¹⁹⁴ Edmund Husserl dalam aliran pemikiran fenomenologis mengingatkan kita untuk kritis atas apa yang nampak, apa yang muncul dalam keindraan kita.¹⁹⁵ Apa yang

¹⁹³ Lih. Sastrapratedja, 101.

¹⁹⁴ Pragmatis adalah sebuah sikap, pragmatisme adalah aliran yang melihat kebenaran dengan pembuktiannya yang memiliki nilai membawa manfaat praktis. Pragmatisme tidak mendasarkan diri pada kebenaran absolut. Yang ada disebut benar bila berguna dan bermanfaat. Lih., Harun Hadiwijoyo, *Sari Sejarah Filsafat barat 2*, Kanisius, Yogyakarta 1980, 130 dst.

¹⁹⁵ Fenomenologi adalah ilmu pengetahuan (*logos*) tentang apa yang tampak (*phainomenon*). Kita hanya mengenal fenomen-fenomen (*Erscheinungen*) dan bukan realitas itu sendiri (*Das Ding an sich*). Yang kita pandang sebenarnya K. Bertens, *Filsafat barat abad XX Inggris-Jerman*, PT. Gramedia, Jakarta 1983, 101-104.

nampak belumlah kebenaran sejati dan sesungguhnya. Apa yang nampak perlu dikaji dan kritisi dengan intuisi kebenaran, yakni dengan melihat rekam jejak dan latar belakangnya agar kebenaran itu menjadi jelas dan gamblang. Pragmatisme perlu dimurnikan dengan fenomenologi. Kampanye kader pemimpin dapat dinilai sebagai fenomena dan tidak perlu disikapi secara pragmatis. Mengagas pemilu 2014 sebenarnya menyadarkan kita akan salah satu masa dalam proses kaderisasi, yakni masa panen. Namun sebenarnya, kaderisasi adalah proses yang cukup panjang dalam perjalanan waktu dan membutuhkan biaya dan pengorbanan yang cukup banyak. Semoga menyambut pemilu 2014, masyarakat tidak jatuh dalam sikap pragmatis dan bangsa kita memperoleh calon-calon pemimpin yang berkualitas hasil dari proses kaderisasi dan bukan hanya sekedar berjualan citra sesaat.

DAFTAR RUJUKAN

- Aristoteles, *The Politics*, Penguin Books, England 1992.
- Bertens, K., *Filsafat Barat Abad XX Inggris-Jerman*, Gramedia, Jakarta 1983.
- _____, *Filsafat Barat Abad XX, jilid II, Prancis*, Gramedia, 1983.
- Dokumen Gereja Katolik, Konsili Vatikan ke II, *Gaudium et Spes*.
- Go, Piet, *Peran Serta Orang Katolik dalam Politik*, Dioma, Malang 1990
- Hadiwijoyo, Harun, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2*, Kanisius, Yogyakarta 1980
- Hesselbein, Frances, ed., *The Leader of the Future, Pemimpin Masa Depan*, terj. Bob Widyahartono, Elex Media Komputindo, Jakarta 1997.
- Kristiadi, J., *Demokrasi dan Etika Bernegara*, Kanisius, Yogyakarta 2008.
- Plato, *The Republic, and Other Works*, translated by B. Jowett, Anchor books, New York, 1989.

- Sardi, Martino, *Kerasulan Intelektual dalam Bidang Politik menurut Interpretasi Tata*
- Suseno, Frans Magniz, *Mencari Makna Kebangsaan*, Kanisius, Yogyakarta 1998.
- Susilo, Basis, *Pemuda dan Politik, antara Nasionalisme dan Globalisasi*, Karolmedia, Sidoarjo 2007.
- Meilala, Adrianus, *Caleg Katolik*, dalam majalah Mingguan Hidup no. 46 17 November 2013.
- Peraturan Gereja*, dalam Jurnal Iman Ilmu Budaya, Pusat Studi Iman Ilmu dan Budaya Yayasan Bhumiksara, Vol. 3, No. 3, Sept-Des 2004
- Sastrapratedja, M., *Restorasi Pendidikan Politik berdasarkan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*, dalam Jurnal Iman Ilmu Budaya, Pusat Studi Iman Ilmu dan Budaya Yayasan Bhumiksara, Vol. 3, No. 3, Sept-Des 2004.

(Gambar negara kepulauan Indonesia dalam warna abu-abu)

EPILOG

MENCARI *COMMON CORE VALUES* BAGI PENDIDIKAN NASIONAL

Oleh: Emanuel Prasetyono

PENDAHULUAN

Kita sudah menggeluti sebuah tema besar berjudul “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional.” Kami menyebutnya sebagai “tema besar” karena memang bukan hal yang mudah untuk mencari dan menemukan bagaimana sistem dan bentuk pendidikan nasional yang membangun sosok manusia Indonesia yang di dalam sistemnya sekaligus memberikan kontribusi dalam membangun karakter para calon pemimpin generasi mendatang. Pembahasan demi pembahasan dari setiap judul di dalam buku ini sesungguhnya mau mengupayakan pengembangan tema besar tersebut secara tuntas. Dan hasilnya jelas, bahwa pembahasan tema ini jauh dari tuntas. Ketidaktuntasan itu bukan datang dari sebuah kenaifan atau kemalasan para penulis dalam buku ini, melainkan dari kenyataan bahwa membangun sebuah sistem dan bentuk pendidikan yang mau membangun sosok manusia Indonesia dan sekaligus berkontribusi dalam

mendidik generasi para calon pemimpin masa depan, adalah sebuah wacana dan perjuangan yang tak pernah selesai. Selain itu, pendidikan nasional itu sendiri dari hakekatnya adalah tugas yang tak kunjung selesai dari seluruh komponen yang terlibat (para penyelenggara pendidikan, pemerintah, guru, dan murid). Meskipun mengalami pelbagai bentuk kesulitan dan kendala dalam mengekspresikan kepeduliannya terhadap sistem pendidikan nasional, upaya-upaya yang ditempuh oleh para penulis dalam buku ini juga layak diapresiasi, karena sedikit banyak telah diupayakan suatu pemikiran yang mau menemukan hakekat pendidikan itu sendiri yang cocok dengan situasi masyarakat bangsa Indonesia.

Lantas, di penghujung pembahasan dalam buku ini, apa yang bisa dikatakan tentang tema-tema yang dikemas dalam 5 judul di bagian pertama, 5 judul di bagian ke dua, dan 1 judul di bagian ke tiga? Apakah kesebelas judul itu sungguh-sungguh sudah menjabarkan kerangka besar dari “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin”? Apa yang bisa kita katakan tentang kesebelas judul tersebut? Apakah tema-tema yang dikemas ke dalam kesebelas judul tersebut membantu kita untuk menangkap dan menetapkan nilai-nilai yang mau diraih oleh pendidikan nasional (*common core values*) yang diyakini

bersama sebagai nilai-nilai yang kita perlukan untuk hidup sebagai bangsa Indonesia yang bermartabat? Apakah tema-tema tersebut bisa memberi isi bagi sebuah visi pendidikan bagi manusia Indonesia sebagai praksis mempersiapkan generasi pemimpin nasional? Praktisnya, misalnya dalam wacana tentang bagaimana materi “kurikulum” pendidikan bagi manusia Indonesia sebagai persiapan bagi para calon pemimpin nasional mungkin bisa dibuat, maka kita mempunyai pertanyaan: apakah ke-11 tema tersebut sudah memberi jawaban inspiratif? Dengan kata lain, apakah ke-11 tema tersebut sudah bisa dilihat untuk memberikan kontribusi positif bagi “kurikulum” pendidikan bagi manusia Indonesia dalam mempersiapkan generasi pemimpin nasional?

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, di sini kami akan merangkum kembali isi pokok yang mau disampaikan oleh kesebelas tema tersebut secara keseluruhan.

MENCARI *COMMON CORE VALUES* BAGI SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL SEBAGAI AKTIVITAS “MEMBACA” ULANG INDONESIA UNTUK KEPENTINGAN TUJUAN PENDIDIKAN NASIONAL

Di tengah-tengah kebijakan pendidikan nasional yang sangat dinamis (dan cenderung tidak menentu) di tanah air, amat pentinglah untuk mencari dan menemukan kembali apa yang hakiki dalam dunia pendidikan nasional kita. Apa yang hakiki selalu diperlukan untuk memberikan orientasi di tengah-tengah kerumitan, kemajemukan, dan kompleksitas permasalahan. Dinamika situasi sosial, politik, dan pendidikan di tanah air yang cenderung pragmatis dan *instant* membuat kita harus menarik sebuah refleksi tentang apa yang sesungguhnya merupakan hakekat dari pendidikan itu sendiri. Yang patut diingat adalah bahwa **yang hakiki dalam dunia pendidikan itu *seharusnya* bersifat universal dan mengakomodir hal-hal yang bersifat fundamental bagi pertumbuhan karakter, kemampuan intelektual, dan kepribadian peserta didik.** Dalam tulisan ini, hal-hal yang hakiki itu kami sebut sebagai *common core values* sistem pendidikan nasional. Dengan *common core values* dimaksudkan nilai-nilai utama yang diyakini bersama sebagai nilai berharga yang mau diraih dalam pendidikan

nasional. Nilai-nilai bersama itu dihayati sebagai bagian dari perjuangan mewujudkan hidup manusia secara bermartabat yang ditempuh melalui pendidikan. Agar menjadi *common core values*, nilai-nilai bersama itu haruslah bersifat koheren sebagai sistem nilai yang mau dihayati dan diraih bersama-sama, lalu tidak mengandung kontradiksi yang menimbulkan konflik nilai di dalam dirinya sendiri. Tulisan-tulisan dalam buku ini sejatinya mau mencari dan menemukan *common core values* yang memberi kita landasan konseptual dan visioner tentang tujuan pendidikan nasional.

Sejak awal tulisan di bagian prolog dari buku ini, sudah ditekankan bahwa tema “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional” didasarkan atas “penemuan” akar pelbagai persoalan di tanah air yang pada akhirnya mengerucut pada persoalan tentang pendidikan. Untuk itu, dari apa saja yang telah dikatakan dan dibahas dalam buku ini, beberapa poin penting akan kami garisbawahi dan tekankan kembali di sini.

Pertama, pelbagai persoalan di tanah air (utamanya persoalan pendidikan) disebabkan oleh gagalnya proses identifikasi diri sebagai **manusia Indonesia**, akan pemahaman dan pemaknaan diri bangsa Indonesia. Ke dua, pokok persoalan berikutnya lebih merupakan akibat atau implikasi lebih lanjut dari persoalan pertama. Yaitu, sebagai

akibat kegagalan dalam mengidentifikasi diri sebagai manusia Indonesia, terjadilah krisis **kepemimpinan nasional**. Para pemimpin yang muncul dan memimpin tidak menunjukkan integritas dan jiwa kepemimpinan sebagai manusia Indonesia. Kedua pokok persoalan yang kami lihat itulah yang pada akhirnya menghantar pada pencetusan tema “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin”, yang lantas kemudian membawa kita pada fokus persoalan tentang **pendidikan, kemanusiaan, keindonesiaan, dan kepemimpinan**. Demikianlah, kita sampai pada penemuan bahwa setiap pembahasan tentang hakekat pendidikan nasional mesti membahas soal **kemanusiaan, keindonesiaan, dan kepemimpinan**. Ketiganya mesti menjadi asumsi dasar dan pendasaran konseptual yang memberi visi dan orientasi bagi setiap praksis kebijakan tentang pendidikan nasional. Kemanusiaan, keindonesiaan, dan kepemimpinan seharusnya merupakan bentuk “pembacaan ulang” secara kritis yang dilakukan terhadap praksis penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia yang mengantar kita pada pemahaman terhadap tujuan hakiki pendidikan nasional.

Mungkin kita bertanya: Apa yang dimaksudkan dengan “membaca ulang” praksis penyelenggaraan pendidikan nasional di dalam buku ini? “Membaca” di sini

dengan demikian sama dengan mengerti, memahami, memaknai, dan menginterpretasi. Setiap orang memiliki tingkat kemampuannya sendiri dalam “membaca” situasi-situasi aktual. Dalam konteks tema “Mendidik Manusia Indonesia dan Mempersiapkan Generasi Pemimpin Nasional”, kita “membaca” persoalan dasar yang menjadi akar dari segala persoalan yang berkaitan dengan pendidikan nasional, yaitu persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kemanusiaan, keindonesiaan, dan kepemimpinan. Maksudnya adalah bahwa pelbagai kajian dalam buku ini mau memberi sarana bantu refleksi kritis untuk melihat dan meninjau kembali apakah praxis penyelenggaraan pendidikan nasional selama ini sudah mengakomodir unsur-unsur yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan, keindonesiaan, dan kepemimpinan, atau belum sama sekali.

Untuk memperjelas apa yang dimaksudkan, kami akan mengambil contoh bagaimana tujuan pendidikan nasional itu dirumuskan dan ditetapkan. Pada prinsipnya, suatu tujuan pendidikan nasional itu sendiri seharusnya ditetapkan berdasarkan kerangka pemahaman yang akurat dan realistis terhadap situasi bangsa dan masyarakat Indonesia sedemikian hingga baik sistem maupun praxis pendidikan mampu menjadi sarana bagi masyarakat dan bangsa untuk mencapai kehidupan yang lebih sejahtera dan

berkeadilan. Oleh karena itu, yang akan kita lakukan berikut ini adalah melihat dan meninjau kembali apakah tujuan pendidikan nasional sudah mengakomodir unsur-unsur hakiki (*common core values*) dalam pendidikan nasional yang kami sebutkan di atas, yaitu kemanusiaan, keindonesiaan, dan kepemimpinan.

Untuk itu baiklah kami kutipkan rumusan tentang pendidikan dan tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 1:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Dari kutipan tentang tujuan pendidikan nasional berdasarkan UU tersebut di atas, kita bisa melihat apa yang menjadi asumsi dasar yang berada di balik perumusan tujuan pendidikan tersebut. Bila tujuan pertama dari pendidikan nasional adalah agar peserta didik “secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan ...dst” maka seluruh praksis pendidikan

yang mengikutinya mesti berdasarkan tujuan ini. Menurut undang-undang ini, memiliki kekuatan spiritual keagamaan menempati urutan pertama dalam tujuan pendidikan nasional dan ini berarti tujuan ini menjadi prioritas utama. Undang-undang ini mengasumsikan bahwa kekuatan spiritual keagamaan menjadi “roh” yang seharusnya melandasi seluruh praksis pendidikan. Asumsi ini “berada di balik teks”, artinya apa yang tersirat di dalam perumusan tekstual yang nampak tersurat. Asumsi yang terkandung di balik teks perumusan tujuan pendidikan nasional itu sendiri merupakan bentuk “cara membaca” Indonesia yang memberi latar belakang bagi proses perumusan tujuan pendidikan nasional. Asumsi sebagai “cara membaca” Indonesia inilah yang sekarang harus kita kaji dengan kritis untuk melihat dan menilai apakah di dalam asumsi tersebut sudah terkandung nilai-nilai kemanusiaan, keindonesiaan, dan kepemimpinan (*common core values* pendidikan nasional).

Di balik rumusan tujuan pendidikan nasional ini, para pembuat undang-undang ini telah “membaca” kepentingan pendidikan nasional di Indonesia dalam pendekatan agama. Jadi, produk sebuah penyelenggaraan pendidikan nasional diarahkan pada anak didik yang (setelah menjalani seluruh proses pendidikannya) akan memiliki “kekuatan spiritual keagamaan”. Cara “membaca” bangsa

Indonesia untuk kepentingan tujuan pendidikan nasional dengan menempatkan kekuatan spiritual keagamaan sebagai prioritas pertama tentu sangat merepotkan dan rumit sekali bila dipertanyakan tentang tolok ukur dan indikator keberhasilannya. Sebab, kenyataannya bangsa Indonesia tersusun dari kebhinekaan dan keanekaragaman suku, budaya, agama, dan ras/etnis. Untuk diangkat sebagai sebuah prioritas pertama tujuan pendidikan nasional, asumsi ini bersifat sangat terbatas. Bila kekuatan spiritual keagamaan dipakai sebagai prioritas pertama (dan dengan demikian dipakai sebagai asumsi dasar) dalam menetapkan tujuan pendidikan nasional, maka pembentukan nilai-nilai berikutnya seperti pengendalian, kepribadian, kecerdasan, dan akhlak mulia, akan sulit bila diterapkan dalam suatu lembaga pendidikan, yang mana peserta didiknya berasal dari keanekaragaman dan kebhinekaan suku, agama, budaya, dan etnis. Sebab, pertanyaan kita adalah: agama mana yang mau dipakai sebagai standar bagi tujuan pendidikan nasional? Para guru yang langsung berada di garis depan pendidikan (termasuk guru-guru di pedalaman dan sekolah-sekolah “pinggiran”) akan mengalami banyak hambatan dan kesulitan untuk meraih tujuan pendidikan semacam ini. Pendekatan agama yang dipakai sebagai asumsi dasar untuk menetapkan tujuan pendidikan nasional pada gilirannya akan menimbulkan konflik antar sistem nilai dan keyakinan di

tengah keanekaragaman masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. “Cara membaca” bangsa Indonesia melalui pendekatan yang terbatas (bahkan sektarian dan primordial) untuk menetapkan tujuan pendidikan nasional inilah yang dikritisi oleh pelbagai kajian dan pendekatan dalam kesebelas tema dalam buku ini.

Sudah dikatakan bahwa pelbagai pembahasan dalam buku ini mau memfokuskan diri pada tiga nilai dasar yang menjadi pilar ideologis-konseptual bagi praksis kebijakan pendidikan nasional pada tiga hal: yaitu **kemanusiaan, keindonesiaan, kepemimpinan**. Dengan tiga pendasaran konseptual bagi setiap praksis pendidikan ini, sejatinya buku ini mau menegaskan perlunya kembali “membaca ulang” bangsa dan masyarakat Indonesia yang tidak terbatas hanya pada persoalan dan pendekatan agama, sistem keyakinan, atau etnis tertentu yang sifatnya terbatas, lokal, dan berdasar pada kelompok atau golongan tertentu saja. Untuk menetapkan sebuah tujuan pendidikan nasional, Indonesia mesti “dibaca” sebagai bangsa yang plural dan majemuk, yang beraneka ragam. Dengan kata lain, untuk menetapkan sebuah rumusan tujuan pendidikan nasional, seyogyanya dilakukan proses “membaca” kehidupan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berbhineka dan beraneka ragam. Keanekaragaman budaya dan kebhinekaan hidup menjadi

tanda khas bangsa Indonesia sesuai dengan sembojannya “bhineka tunggal ika”. Pelbagai tulisan dan pembahasan dalam buku ini sejatinya mau mengatakan bahwa **kemanusiaan, keindonesiaan, dan kepemimpinan** hendaknya menjadi “roh” yang mengisi setiap lembar pemahaman kita tentang Indonesia dalam kaitannya dengan tujuan dan praksis penyelenggaraan pendidikan nasional.

PENUTUP: MEMBANGUN KOMITMEN SEBAGAI PENDIDIK DAN PEMBELAJAR

William Arthur Ward (1921-1994), seorang penulis Amerika terkenal yang kata-katanya banyak dikutip media sosial, mengatakan: *“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires”*. Seorang guru yang levelnya rata-rata (*mediocre teacher*) menyampaikan ilmunya dengan banyak kata. Ini dilakukan oleh kebanyakan orang yang menggunakan pola pengajaran melalui transfer ilmu kepada murid sebanyak-banyaknya seperti layaknya mengisi botol kosong (analoginya, “isi” kepala murid dianggap kosong karena defisit ilmu pengetahuan). Dia banyak menyampaikan informasi searah tentang isi pengetahuan di kelas, sementara para murid duduk pasif mendengarkan keterangan sang guru. Ada

kesenjangan komunikasi dan dialog antara guru dan murid, karena sementara guru berperan aktif dan mendominasi situasi kelas, para murid duduk pasif mendengarkan.

Dalam level yang lebih tinggi, seorang guru yang baik (*good teacher*) bukan hanya mengajar dengan mentransfer ilmu dengan banyak kata dan teori, tetapi dia juga menjelaskan, menjabarkan, dan menerangkan pelbagai bentuk aplikasi praktis dan konsekuensi logisnya. Para murid tidak hanya mendapatkan definisi-definisi tentang ilmu-ilmu yang diajarkan oleh guru di kelas, tetapi lebih jauh diterangkan maksudnya dalam bentuk penjabaran-penjabaran permasalahan ke dalam lingkup yang lebih luas. Dalam level yang lebih tinggi lagi daripada seorang *good teacher*, seorang guru (*superior teacher*) bukan hanya menjelaskan, tetapi juga membuktikan, memberikan contoh-contoh dan panduan konkrit tentang bagaimana ilmu dipraktikkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, seorang guru dalam arti sejati (*great teacher*) adalah sosok yang menginspirasi murid-muridnya. Seorang guru sejati diingat oleh mantan murid-muridnya ketika mereka sudah beranjak dewasa, bahkan juga jika guru tersebut telah meninggal dunia. Guru semacam ini diingat karena karakternya yang baik, hidupnya yang dedikatif dan loyal terhadap visi pembelajaran dan kemanusiaan. Seorang

guru yang menginspirasi para muridnya berkomitmen penuh dalam mendidik manusia dalam arti hakiki.

Tulisan ini akan kami tutup dengan mengetengahkan beberapa komitmen kami sebagai seorang pendidik dalam menjaga semangat dalam berkontribusi dalam proses penyelenggaraan pendidikan nasional yang bermutu. Komitmen ini menjadi kekuatan dari dalam (*inner power*) yang tetap menjaga semangat di dalam diri kami sebagai seorang guru, pendidik, dan pembelajar, agar kami tidak hanyut dan larut dalam situasi-situasi yang membelokkan cita-cita mendidik manusia Indonesia dan mempersiapkan generasi pemimpin.

- a. Komitmen pertama adalah menjadi pendidik yang profesional (yang kompeten di bidang keilmuan yang digelutinya). Menjadi guru pertama-tama menjadi seorang pendidik yang profesional. Sebagai pendidik profesional, seorang guru mengajar, melatih, dan membimbing peserta didik agar mereka memiliki kompetensi ilmu yang diajarkannya.
- b. Komitmen ke dua adalah senantiasa setia, tekun, cermat, dan teliti mengembangkan bidang-bidang keilmuan yang kami geluti. Konkretnya, hal ini berkaitan dengan semangat belajar dan mengajar,

serta meneliti dan melakukan riset keilmuan sesuai bidang yang digeluti. Pada prinsipnya, untuk menjaga profesionalitas dan kompetensi seorang guru dalam bidang keilmuan yang digelutinya, maka seorang pendidik secara periodik memiliki sikap yang rajin, tekun, serta teliti melakukan riset atau penelitian terhadap bidang keilmuan yang digelutinya sehingga proses belajar-mengajar menjadi ajang berbagi ilmu di antara pendidik dan peserta didik.

- c. Komitmen ke tiga adalah tetap setia menjadi seorang guru, pendidik, dan pembelajar. Menjadi seorang guru dan pendidik berarti juga menjadi pembelajar yang tak pernah putus asa. Menjadi seorang pendidik dan sekaligus pembelajar menjadikan seseorang sebagai pendidik yang berkarakter, bukan pendidik yang asal-asalan tanpa visi dan orientasi pendidikan dan kemanusiaan. Secara simultan, seorang guru yang pembelajar adalah juga seorang pendidik yang rendah hati. Sebab, keterbatasan-keterbatasan yang ada padanya menyadarkannya bahwa pendidikan apa pun mesti mengarahkan manusia kepada sikap penyempurnaan hidup yang terus-menerus. Selain itu, dinamika setiap bidang keilmuan sejalan dengan

dinamika perkembangan hidup manusia itu sendiri. Dia menyadari bahwa bidang keilmuan apa pun mesti terarah demi pemuliaan martabat kemanusiaan. Pemuliaan martabat kemanusiaan adalah nilai tertinggi dari setiap bidang keilmuan. Pencapaian pemahaman dan penghayatan seorang pendidik terhadap nilai ini membutuhkan proses panjang, kebebasan, otonomi, tanggung jawab, dedikasi, komitmen, dan semangat belajar yang tak kunjung henti. Proses itu hanya mungkin dijalani apabila seorang guru adalah sekaligus seorang pendidik dan pembelajar.

PARA PENULIS

Agustinus Pratisto Trinarso

Agustinus Pratisto Trinarso, Lic. Phil. Pengajar tetap pada Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya.

Agustinus Ryadi

Dr. Agustinus Ryadi. Dekan dan Pengajar tetap pada Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya.

Aloysius Widyawan

Aloysius Widyawan, Lic.Phil., wakil dekan dan pengajar tetap pada Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya.

Anita Lie

Prof. Anita Lie, Ed.D., Guru Besar dan Direktur Program Pascasarjana Unika Widya Mandala, Surabaya.

Emanuel Prasetyono

Emanuel Prasetyono, Lic.Phil. Pengajar tetap pada Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya.

Ramon Nadres

Dr. Ramon Nadres. Pengajar filsafat pada Fakultas Filsafat dan bioetika pada Fakultas Keperawatan di Unika Widya Mandala, Surabaya.

Toetik Koesbardiati

Dr. Toetik Koesbardiati. Departemen Antropologi, FISIP, Universitas Airlangga, Surabaya.

Xaverius Chandra H. Marbun

Xaverius Chandra H. Marbun, Lic. Theol. Pengajar pada Fakultas Filsafat Unika Widya Mandala, Surabaya.